BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau

dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-

Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Hasil pilkada Tahun 2020 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN dengan memperhatikan :
    a. RPJMD Provinsi;
    b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
    c. RPJMD Daerah Sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a. penyusunan RKPD, Renstra PD, Renja PD;
b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
c. bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

Pasal 5

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 6

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan;
memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Srategis Daerah;
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026.
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
i. BAB IX : Penutup
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH : (7-187/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) daerah di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tangggal 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kendal memenangkan pasangan Dico M. Ganinduto, B.Sc dan H. Windu Suko Basuki, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dikukuhkan dan dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Dengan telah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, maka kewajiban Pemerintah Daerah adalah segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi dasar dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini nantinya berfungsi sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyusunan RPJMD 2021–2026 perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis baik regional maupun nasional, memperhatikan arahan dan kebijakan pembangunan nasional dan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kebijakan nasional yang perlu dipedomani dalam penyusunan RPJMD antara lain adalah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs), dan juga adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi 6 urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Selain itu penyusunan RPJMD 2021-2026 juga perlu memperhatikan perubahan kondisi perekonomian baik perekonomian

global, nasional maupun daerah, akibat adanya pandemi Covid-19. Sehingga pada periode 2021-2026, salah satu prioritas pemerintah adalah pemulihan perekonomian dan aspek lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal ini mengacu arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal 2005–2025, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Penyusunan RPJMD disusun disesuaikan dengan tahap-tahap penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahap tersebut mulai dari tahap persiapan, penyusunan draft rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud “pelaksanaan lebih lanjut” adalah Rencana Pembangunan Tahunan pada tahun berjalan mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 Tahun 2021
TANGGAL : 26 Agustus 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pembangunan daerah di era otonomi. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan perencanaan tahunan daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD) serta selanjutnya dalam perencanaan penganggaran (APBD).

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal dilaksanakan dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan penting yaitu : pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan rencana pembangunan sesuai tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD

mengacu pada visi dan misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*Bottom-Up*) dan atas-bawah (*Top-Down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten/kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Dengan terpilihnya pasangan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020, telah terpilih Bupati Dico M Ganinduto, B.Sc dan Wakil Bupati Windu Suko Basuki, SH yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 dengan periode masa jabatan tahun 2021 – 2026. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal 2005 – 2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2018 – 2023. Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal memperhatikan prioritas berdasarkan periode keempat (tahun 2021 – 2025) dalam RPJPD Kabupaten Kendal berdasarkan prioritas memantapkan peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing daerah, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance* dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan). Demikian pula dalam RPJMD Kabupaten Kendal 2021 – 2026 dengan program prioritas yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi dan keunggulan daerah, pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 sejalan dengan Kebijakan Nasional Pengembangan Ekonomi Nasional (PEN), mengurangi kemiskinan dan

pengangguran di daerah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di pasar kerja dunia industri, meningkatkan kondusivitas wilayah, rasa nyaman dan tenteram dengan penyelenggaraan pembangunan daerah yang merata, pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.

Demikian pula dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan non alam (termasuk Pandemi Covid-19) melalui tatakelola pemerintahan yang semakin baik di tahun-tahun mendatang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disampaikan bahwa penyusunan RPJMD terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD

   Persiapan penyusunan RPJMD meliputi :

   a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim RPJMD;
   b. Orientasi mengenai RPJMD;
   c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RPJMD;
   d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
   e. Penyusunan Rancangan Teknokratik, Rancangan Teknokratik merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

   Tahapan ini merupakan tahapan penyempuraan rancangan teknokratik RPJMD dengan mempedomani visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kendal terpilih. Tahapan penyusunan Rancangan Awal ini meliputi :

   a. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
   b. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

c. Perumusan tujuan dan sasaran;
d. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
e. Perumusan program pembangunan Daerah;
f. Perumusan program Perangkat Daerah; dan
g. KLHS.

Dari penyusunan rancangan awal ini kemudian di bahas dengan para pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk memperoleh masukan yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk penyepakatan yang selanjutnya diajukan untuk dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

   Tahapan ini merupakan tahapan penyempurnaan Rancangan awal dengan mendasarkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

   Pelaksanaan musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Perumusan Rancangan Akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

6. Penetapan

   Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14,

dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Kembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, dimana dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, antara lain : RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Dokumen RPJPD Kabupaten Kendal dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal yang baru.

1.3.1. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang ditetapkan dalam arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Kendal juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021-2026.

1.3.2. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, kawasan strategis, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

1.3.3. Hubungan Antara RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Kendal

RPJMD tahun 2021-2026 merupakan RPJMD penjabaran dari periode keempat dari RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang daerah adalah : “Kabupaten Kendal yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”, dimana dalam periode tersebut, sasaran pokok perencanaan pembangunan daerah untuk perencanaan tahun

2021 – 2026 yaitu memantapkan pencapaian prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kendal yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Kabupaten Kendal yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya Kabupaten Kendal aman dan damai;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

1.3.4. Hubungan Antara RPJMD dengan RKPD Kabupaten Kendal

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 nantinya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, RKPD Provinsi dan pedoman penyusunan RKPD.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.5. Hubungan Antara RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Gambaran singkat keterkaitan antara dokumen RPJMD Kabupaten Kendal dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dikemukakan pada skema, sebagai berikut:

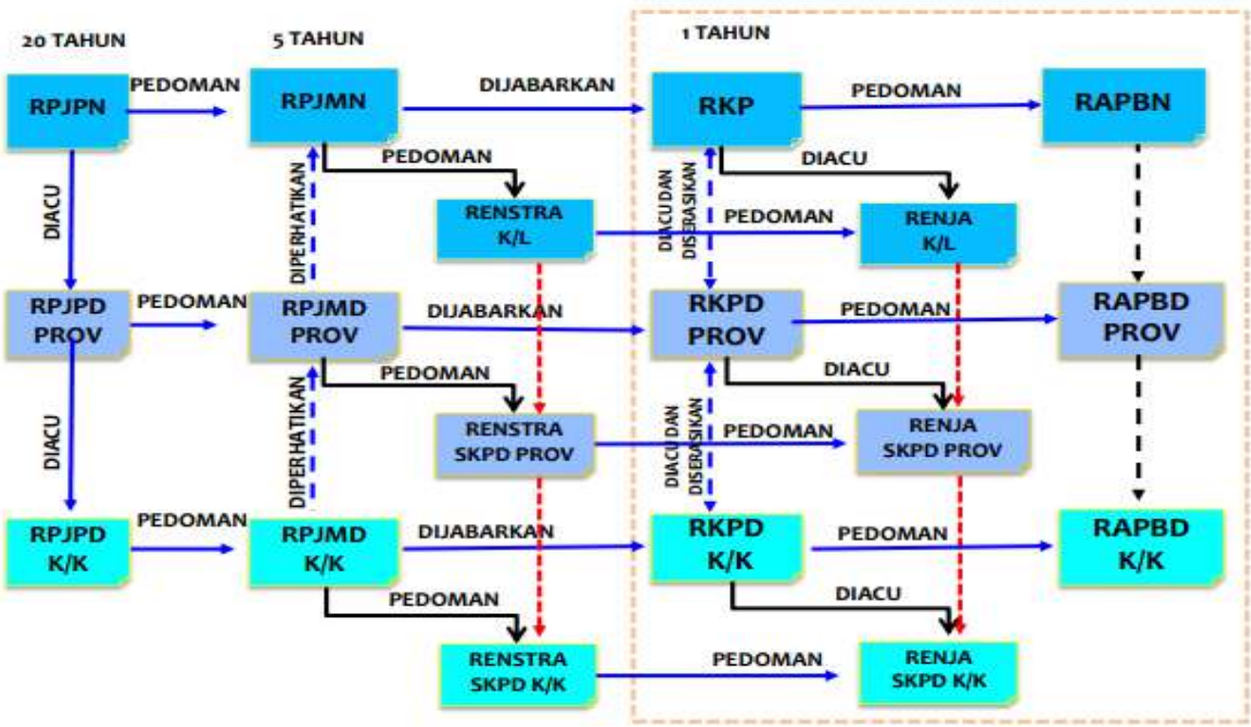

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

1.3.6. Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/* SDG's, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kendal. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kendal dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 adalah:

a. Merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati Kendal;

b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik pemerintah daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepemahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal periode tahun 2021-2026;
c. Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat maupun Renja Perangkat Daerah Daerah berupa Program beserta target dan pagu indikatif sebagai dasar penyusunan RAPBD;
d. Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 5 tahun (2016 – 2020);
b. Tersajinya informasi dan analisis permasalahan atau isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun yang lalu dan masa yang akan datang.
c. Tersajinya informasi mengenai potensi/ kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.
d. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah Daerah, serta sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja tahunan.

1.5. Sistematika RPJMD Kabupaten Kendal

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Rancangan RPJMD Kabupaten Kendal, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini mengemukakan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini mengemukakan tentang strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bab ini mengemukakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KENDAL

2.1 Aspek Geografis Dan Demografis

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah sebesar 1.002,23 Km^2. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kendal

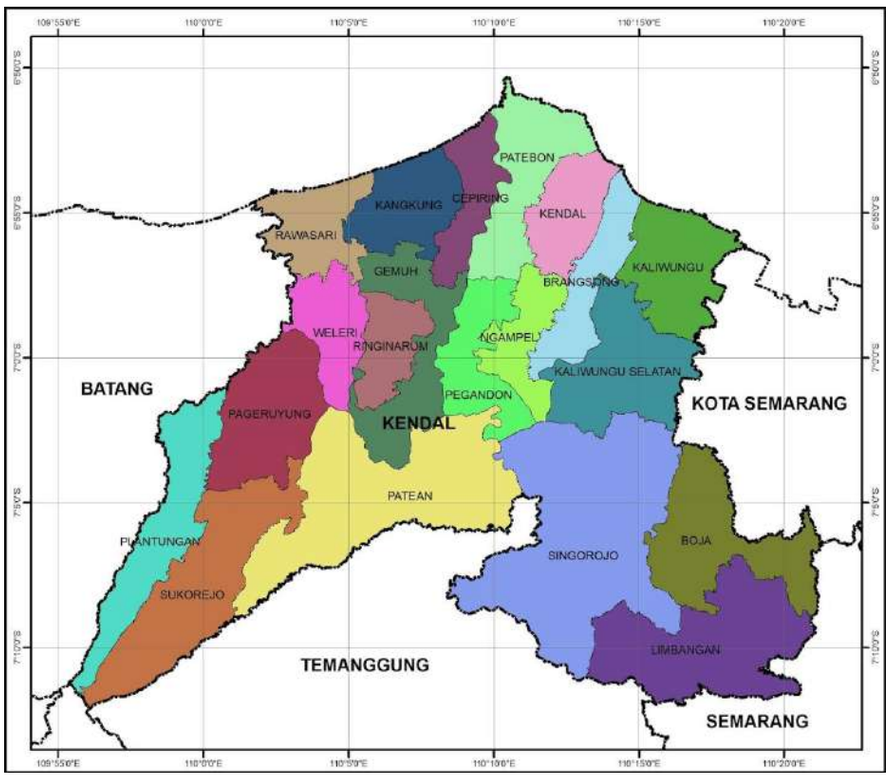

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal

Jumlah kecamatan di Kabupaten Kendal sebanyak 20 (dua puluh) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 286 (dua ratus delapan puluh enam) yang terdiri 266 desa dan 20 kelurahan. Terdiri dari 1.167 dusun, 1.508 RW dan 6.590 RT.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada posisi geografis 109°40’ - 110°18’ Bujur Timur dan 6°32’ - 7°24’ Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Kendal berada pada jalur penghubung Pulau Jawa bagian utara (PANTURA) sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Selain itu juga Kabupaten

Kendal letaknya berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian, yaitu tanah sawah seluas 240,53 km^2 (24,00%), dan tanah tegalan 224,85 km^2 (22,44%). Sedangkan sisanya dipergunakan untuk peruntukan lain (hutan, perkebunan, lahan bukan pertanian dan lain-lain).

3. Topografi

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan titik tertinggi mencapai 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 25^0 C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27^0 C.

Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 697,992 meter di atas permukaan laut (mdpl), sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,256 mdpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4,877 mdpl.

4. Geologi

Kondisi Geologi Kabupaten Kendal berdasarkan struktur geologinya terdiri atas dataran aluvial, perbukitan bergelombang, perbukitan berelief sedang, plato dan tubuh gunung api.

- Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, sebagian Kaliwungu, Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon dan Ngampel merupakan dataran aluvial dengan kemiringan antara 3-5%.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Pageruyung, Weleri, Ringinarum, dan Kaliwungu merupakan wilayah perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 3-10%, dan didominasi batu pasir, breksi, tufa, dan aliran lava.
- Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi Kecamatan Patean dan Singorojo merupakan daerah berelief sedang dengan kemiringan 15-30%.

- Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang meliputi sebagian kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Limbangan, dan Boja merpakan plato dengan kemiringan lebih dari 30%.
- Wilayah selatan lain yang meliputi Kecamatan Limbangan merupakan tubuh gunung api dengan kemiringan 15-30% didominasi lava andesit basal dan bongkah vulkanik lahar.
- Wilayah selatan lain yang meliputi sebagian wilayah Limbangan dan Singorojo merupakan daerah perbukitan berelief kasar dengan kemiringan antara 30-70%.

5. Hidrologi

Suplai air tanah maupun air tawar seluruhnya datang dari hujan yang berasal dari penguapan air laut, yang merupakan bagian dari proses siklus hidrologi. Hujan yang jatuh akan meresap ke dalam tanah, sebagian menjadi air tanah yang mengisi aguifer (formasi tanah yang mengandung dan menghantarkan air tanah dan sebagian besar mengalir di permukaan sebagai *run off*), dalam kenyataannya siklus hidrologi ini sangat rumit meskipun pada dasarnya hidrologi adalah bagian dari ilmu bumi.

Namun kenyataannya hidrologi harus berhubungan dengan atmosfir sebagai medium yang meneruskan air ke muka bumi maupun dari muka bumi. Kabupaten Kendal memiliki sekitar 20 mata air dengan debit yang beranekaragam. Mata air yang ada tersebut pada umumnya terletak di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, Singorojo, Limbangan, dan Patean.

Kabupaten Kendal termasuk dalam wilayah Sub DAS Bodri, Sub DAS Besar Pemali-Comal-Jratun-Seluna. Sungai-sungai yang mengalir sebagian besar hulunya masih di lingkup Kabupaten Kendal yaitu bagian tengah dan selatan. Secara umum, bagian tengah dan selatan Kabupaten Kendal merupakan daerah resapan air hujan yang diharapkan dapat mengisi akuifer yang berguna sebagai sumber air. Wilayah daerah Aliran Sungai Kabupaten Kendal itu sendiri dilalui oleh 10 sungai, antara lain kali Aji/slembang, kali waridin, kali glodog, kali blorong, kali kendal, kali buntu, kali bodri, kali blukar, kali bulanan/pening, dan kali kuto yang sebagian besar digunakan untuk sistem irigasi teknis persawahan dan perkebunan.

Sungai dengan debit air terbesar di Kabupaten Kendal tahun 2017 yaitu sungai Kali Kuto. Debit air Kali Kuto pada musim penghujan bisa mencapai 504,9 m^3/dt, sedangkan pada musim kemarau debit air

terbesarpun ada di Kali Kuto berkisar 100,9 m3/dt dengan panjang sungai 52 km.

6. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara yang berdekatan dengan Laut Jawa (dataran rendah), kondisi iklim di daerah tersebut cenderung lebih panas. Sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan (dataran tinggi), kondisi iklim didaerah tersebut cenderung lebih sejuk.

Selama Tahun 2018 di 5 (lima) wilayah pencatatan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari di wilayah pencatatan Boja yaitu sekitar 726 mm. Jumlah curah hujan pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Untuk tahun 2018 berkisar 2.055 mm sedangkan untuk tahun 2017 berkisar 2.610 mm.

7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal pada tahun 2020, dipergunakan untuk tanah sawah 240,88 km^2 (24,03%), tegalan 220,42 km^2 (21,99%), hutan 162,64 km^2 (16,23%), perkebunan 78,68 km^2(7,85%), lahan bukan pertanian 252,00 km^2 (25,14%) dan Lain-lain sebesar 47,61 km^2 (4,75%).

2.1.2 Pengembangan Wilayah

Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 memiliki arah pengembangan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

a. Sistem perkotaan

Perwujudan sistem perkotaan meliputi :

- Penetapan herarki pusat pelayanan;
- Pengembangan sistem pusat pelayanan;
- Pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan dan perdesaan.

b. Sistem jaringan prasarana

Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi :

- Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- Perwujudan sistem jaringan energi;

- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Gambar 2.2 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kendal

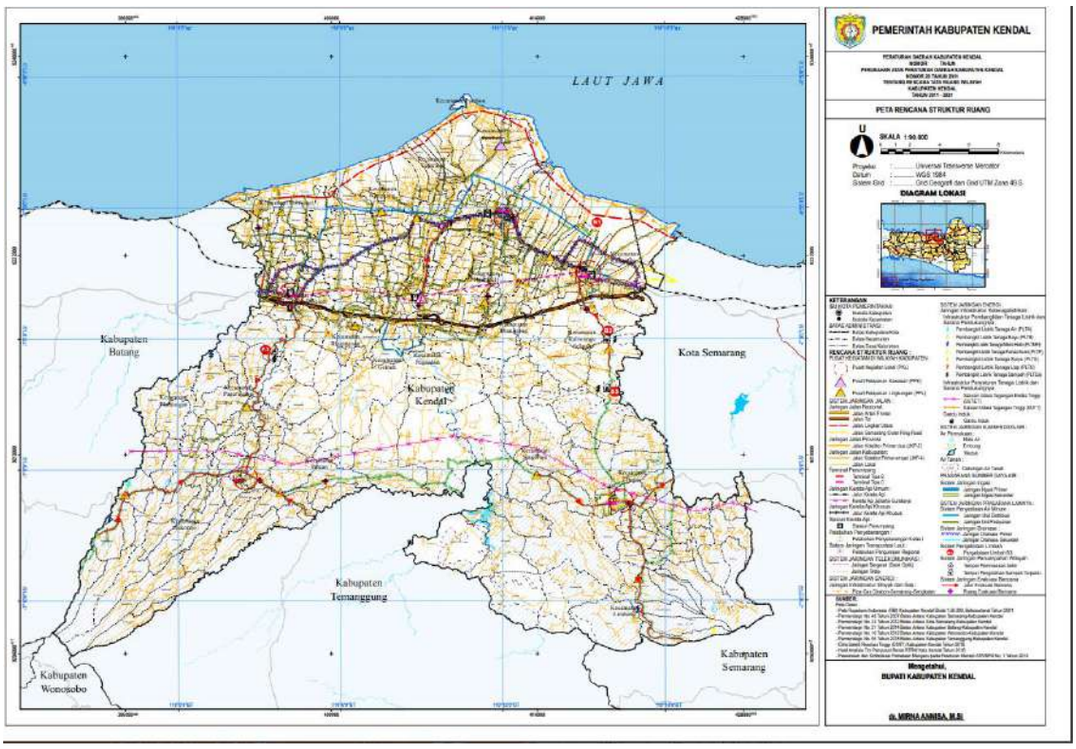

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.

2. Rencana Pola Ruang

a. Kawasan peruntukan lindung;

Kawasan peruntukan lindung terdiri atas :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas :

   a) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 1.706 (seribu tujuh ratus enam) hektar meliputi :
      (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
      (2) sebagian Kecamatan Boja;
      (3) sebagian Kecamatan Plantungan;
      (4) sebagian Kecamatan Sukorejo

   b) Kawasan resapan air meliputi :
      (1) sebagian Kecamatan Limbangan;
      (2) sebagian Kecamatan Boja;
      (3) sebagian Kecamatan Singorojo;

(4) sebagian Kecamatan Patean;

(5) sebagian Kecamatan Sukorejo;

(6) sebagian Kecamatan Plantungan;

(7) sebagian Kecamatan Pageruyung.

2. Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

a) Kawasan sempadan pantai dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :

(1) Kecamatan Rowosari;

(2) Kecamatan Kangkung;

(3) Kecamatan Cepiring;

(4) Kecamatan Patebon;

(5) Kecamatan Kendal;

(6) Kecamatan Brangsong;

(7) Kecamatan Kaliwungu.

b) Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 835 (delapan ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:

(1) Kecamatan Kendal;

(2) Kecamatan Weleri;

(3) Kecamatan Kaliwungu;

(4) Kecamatan Boja;

(5) Kecamatan Sukorejo;

(6) Kecamatan Pegandon;

(7) Kecamatan Cepiring;

(8) Kecamatan Patebon;

(9) Kecamatan Gemuh;

(10) Kecamatan Rowosari;

(11) Kecamatan Kangkung;

(12) Kecamatan Pageruyung;

(13) Kecamatan Patean;

(14) Kecamatan Singorojo;

(15) Kecamatan Limbangan;

(16) Kecamatan Kaliwungu Selatan;

(17) Kecamatan Ringinarum;

(18) Kecamatan Ngampel;

(19) Kecamatan Brangsong;

(20) Kecamatan Plantungan.

c) Kawasan sekitar danau/ waduk/ embung dengan luas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Singorojo;

d) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan termasuk di dalamnya hutan kota berfungsi untuk menjaga fungsi hidrologis, memelihara keindahan, mikrolimat, ekosistem, dan habitat fauna dengan luas kurang lebih 1.608 (seribu enam ratus delapan) hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan perkotaan.

e) Kawasan sempadan rel kereta api dengan luas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:

(1) Kecamatan Weleri;
(2) Kecamatan Ringinarum;
(3) Kecamatan Gemuh;
(4) Kecamatan Pegandon;
(5) Kecamatan Ngampel;
(6) Kecamatan Brangsong;
(7) Kecamatan Kaliwungu

3. Kawasan konservasi;

Kawasan konservasi berupa kawasan cagar alam Pagerwunung Darupono dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

4. Kawasan cagar budaya;

Kawasan cagar budaya meliputi :

a) Situs seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan;
b) Tugu Gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;
c) Tugu Gerbang Pasarean Berada di Kecamatan Kendal;
d) Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.

5. Kawasan lindung geologi;

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:

a) Kawasan imbuhan air berada di Cekungan Air Tanah (CAT) Kendal, Cekungan Air Tanah (CAT) Semarang – Demak, Cekungan Air Tanah (CAT) Subah dan Cekungan Air Tanah (CAT) Sumowono, yang meliputi:

(1) sebagian Kecamatan Weleri;
(2) sebagian Kecamatan Ringinarum;

(3) sebagian Kecamatan Gemuh;
(4) sebagian Kecamatan Pegandon;
(5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
(6) sebagian Kecamatan Singorojo.

b) Kawasan sempadan mata air ditetapkan selebar 200 (dua ratus) meter di sekeliling mata air.

6. Kawasan rawan bencana;

Kawasan rawan bencana terdiri atas :

a) kawasan rawan bencana banjir meliputi :
(1) sebagian Kecamatan Brangsong;
(2) sebagian Kecamatan Cepiring;
(3) sebagian Kecamatan Gemuh;
(4) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
(5) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
(6) sebagian Kecamatan Kangkung;
(7) sebagian Kecamatan Kendal;
(8) sebagian Kecamatan Ngampel;
(9) sebagian Kecamatan Sukorejo;
(10) sebagian Kecamatan Patean;
(11) sebagian Kecamatan Patebon;
(12) sebagian Kecamatan Pegandon;
(13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
(14) sebagian Kecamatan Rowosari;
(15) sebagian Kecamatan Boja; dan
(16) sebagian Kecamatan Weleri.

b) kawasan rawan bencana banjir bandang meliputi :
(1) sebagian Kecamatan Rowosari;
(2) sebagian Kecamatan Kangkung;
(3) sebagian Kecamatan Cepiring;
(4) sebagian Kecamatan Patebon;
(5) sebagian Kecamatan Kendal;
(6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
(7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.

c) kawasan rawan bencana kekeringan meliputi :
(1) Kecamatan Boja;
(2) Kecamatan Gemuh;
(3) Kecamatan Kaliwungu
(4) Kecamatan Kaliwungu Selatan;

(5) Kecamatan Limbangan;
(6) Kecamatan Pageruyung;
(7) Kecamatan Patean;
(8) Kecamatan Pegandon;
(9) Kecamatan Plantungan;
(10) Kecamatan Ringinarum;
(11) Kecamatan Singorojo;
(12) Kecamatan Sukorejo;
(13) Kecamatan Weleri;
(14) Kecamatan Brangsong;
(15) Kecamatan Ngampel;
(16) Kecamatan Rowosari;
(17) Kecamatan Kangkung;
(18) Kecamatan Cepiring;
(19) Kecamatan Patebon; dan
(20) Kecamatan Kendal

d) kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi :
(1) sebagian Kecamatan Pageruyung;
(2) sebagian Kecamatan Plantungan;
(3) sebagian Kecamatan Gemuh;
(4) sebagian Kecamatan Boja;
(5) sebagian Kecamatan Singorojo;
(6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
(7) sebagian Kecamatan Kaliwungu
(8) sebagian Kecamatan Singorojo;
(9) sebagian Kecamatan Limbangan;
(10) sebagian Kecamatan Patean;
(11) sebagian Kecamatan Sukorejo;
(12) sebagian Kecamatan Weleri;
(13) sebagian Kecamatan Ringinarum;
(14) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
(15) sebagian Kecamatan Ngampel

e) kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi meliputi:
(1) sebagian Kecamatan Rowosari;
(2) sebagian Kecamatan Kangkung;
(3) sebagian Kecamatan Cepiring;
(4) sebagian Kecamatan Patebon;

(5) sebagian Kecamatan Kendal;
(6) sebagian Kecamatan Brangsong; dan
(7) sebagian Kecamatan Kaliwungu.

f) kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi :
(1) sebagian Kecamatan Limbangan;
(2) sebagian Kecamatan Sukorejo;
(3) sebagian Kecamatan Plantungan;
(4) sebagian Kecamatan Singorojo.
(5) sebagian Kecamatan Limbangan;
(6) sebagian Kecamatan Kaliwungu Selatan;
(7) sebagian Kecamatan Ringinarum;
(8) sebagian Kecamatan Boja;
(9) sebagian Kecamatan Pageruyung;
(10) sebagian Kecamatan Kaliwungu
(11) sebagian Kecamatan Gemuh; dan
(12) sebagian Kecamatan Weleri.

7. Kawasan ekosistem mangrove.
a) Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar meliputi :
1) sebagian Kecamatan Rowosari;
2) sebagian Kecamatan Kangkung;
3) sebagian Kecamatan Cepiring.
b) Kawasan peruntukan industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan pantai berhutan bakau yang selanjutnya disebut kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau.
c) Kawasan peruntukan industri/kawasan pantai berhutan bakau berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.
d) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pantai berhutan bakau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kawasan peruntukan budi daya.

Kawasan peruntukan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

1) kawasan hutan produksi;

Kawasan hutan produksi terdiri atas :

a) Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi :
   (1) Kecamatan Limbangan;
   (2) Kecamatan Sukorejo;
   (3) Kecamatan Plantungan;
   (4) Kecamatan Singorojo.

b) Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 15.441 (lima belas ribu empat ratus empat puluh satu) hektar meliputi:
   (1) Kecamatan Boja;
   (2) Kecamatan Brangsong;
   (3) Kecamatan Gemuh;
   (4) Kecamatan Kaliwungu;
   (5) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
   (6) Kecamatan Limbangan;
   (7) Kecamatan Ngampel;
   (8) Kecamatan Pageruyung;
   (9) Kecamatan Patean;
   (10) Kecamatan Pegandon;
   (11) Kecamatan Plantungan;
   (12) Kecamatan Ringinarum;
   (13) Kecamatan Singorojo;
   (14) Kecamatan Sukorejo;
   (15) Kecamatan Weleri.

2) Kawasan pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas :

a) Kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 25.213 (dua puluh lima ribu dua ratus tiga belas) hektar meliputi
   (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih25.000 (dua puluh lima ribu) hektar meliputi:
      (a) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;

(b) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar; dan

(c) Lahan penunjang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar.

(2) Penunjang kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 213 (dua ratus tiga belas) hektar.

Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

(1) sebagian Kecamatan Rowosari;
(2) sebagian Kecamatan Kangkung;
(3) sebagian Kecamatan Cepiring;
(4) sebagian Kecamatan Patebon;
(5) sebagian Kecamatan Kendal;
(6) sebagian Kecamatan Brangsong;
(7) sebagian Kecamatan Ngampel;
(8) sebagian Kecamatan Pegandon;
(9) sebagian Kecn amatan Gemuh;
(10) sebagian Kecamatan Weleri
(11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
(12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
(13) sebagian Kecamatan Limbangan;
(14) sebagian Kecamatan Singorojo;
(15) sebagian Kecamatan Boja;
(16) sebagian Kecamatan Patean;
(17) sebagian Kecamatan Plantungan;
(18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan;
(19) sebagian kecamatan Pageruyung.

b) Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 16.303 (enam belas ribu tiga ratus tiga) hektar meliputi:

(1) sebagian Kecamatan Rowosari;
(2) sebagian Kecamatan Kangkung;
(3) sebagian Kecamatan Cepiring;
(4) sebagian Kecamatan Patebon
(5) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
(6) sebagian Kecamatan Brangsong;
(7) sebagian Kecamatan Ngampel;
(8) sebagian Kecamatan Pegandon;
(9) sebagian Kecamatan Gemuh;

(10) sebagian Kecamatan Weleri;
(11) sebagian Kecamatan Ringinarum;
(12) sebagian Kecamatan Sukorejo;
(13) sebagian Kecamatan Limbangan;
(14) sebagian Kecamatan Singorojo;
(15) sebagian Kecamatan Boja;
(16) sebagian Kecamatan Patean;
(17) sebagian Kecamatan Plantungan;
(18) sebagian kecamatan Kaliwungu Selatan;
(19) sebagian kecamatan Pageruyung

c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.844 (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
(1) sebagian Kecamatan Limbangan
(2) sebagian Kecamatan Boja;
(3) sebagian Kecamatan Singorojo;
(4) sebagian Kecamatan Patean;
(5) sebagian Kecamatan Pageruyung;
(6) sebagian Kecamatan Plantungan;
(7) sebagian Kecamatan Sukorejo;
(8) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
(9) sebagian Kecamatan Weleri;
(10) sebagian Kecamatan Gemuh;
(11) sebagian Kecamatan Pegandon; dan
(12) sebagian Kecamatan Ringinarum.

d) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
(1) sapi, kerbau dan kuda meliputi:
(a) Kecamatan Sukorejo;
(b) Kecamatan Pageruyung;
(c) Kecamatan Plantungan;
(d) Kecamatan Patean;
(e) Kecamatan Singorojo;
(f) Kecamatan Limbangan;
(g) Kecamatan Boja.
(h) Kecamatan Kaliwungu Selatan
(i) Kecamatan Kaliwungu
(j) Kecamatan Gemuh
(k) Kecamatan Pegandon

(l) Kecamatan Patebon

(2) kambing, domba, itik, merpati dan ayam buras tersebar di seluruh kecamatan.

(3) kelinci meliputi:

(a) Kecamatan Cepiring;
(b) Kecamatan Plantungan;
(c) Kecamatan Limbangan;
(d) Kecamatan Gemuh;
(e) Kecamatan Boja;
(f) Kecamatan Pageruyung;
(g) Kecamatan Pegandon;
(h) Kecamatan Kaliwungu;
(i) Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
(j) Kecamatan Patean.

(4) Ayam ras meliputi:

(a) Kecamatan Pageruyung;
(b) Kecamatan Plantungan;
(c) Kecamatan Sukorejo;
(d) Kecamatan Patean;
(e) Kecamatan Singorojo;
(f) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
(g) Kecamatan Limbangan;
(h) Kecamatan Boja;
(i) Kecamatan Pegandon; dan
(j) Kecamatan Gemuh

3) Kawasan perikanan;

Kawasan perikanan terdiri dari

a) Kawasan pengembangan perikanan tangkap terdiri dari :

(1) perikanan tangkap di laut yang memanfaatkan potensi perairan pantai utara;

(2) perikanan tangkap di perairan umum yang memanfaatkan potensi waduk, rawa, sungai, dan embung.

b) Kawasan pengembangan perikanan budidaya seluas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar terdiri dari:

(1) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Kawasan pengembangan perikanan budidaya air payau, sepanjang pesisir utara meliputi:

(a) Kecamatan Cepiring;
(b) Kecamatan Kangkung;
(c) Kecamatan Rowosari

4) Kawasan pertambangan dan energi;

Kawasan pertambangan dan energi terdiri atas :

a) Kawasan pertambangan mineral terdiri atas:
   (1) Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi:
      (a) Kecamatan Pegandon;
      (b) Kecamatan Weleri;
      (c) Kecamatan Pageruyung;
      (d) Kecamatan Patean;
      (e) Kecamatan Sukorejo;
      (f) Kecamatan Singorojo;
      (g) sepanjang Sungai Bodri.
   (2) Kawasan pertambangan batuan, meliputi:
      (a) Kecamatan Kaliwungu Selatan
      (b) Kecamatan Kaliwungu;
      (c) Kecamatan Brangsong;
      (d) Kecamatan Ngampel;
      (e) Kecamatan Pegandon;
      (f) Kecamatan Weleri;
      (g) Kecamatan Pageruyung;
      (h) sepanjang Sungai Bodri.
b) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi berskala kecil berada di Kecamatan Gemuh.
c) Kawasan panas bumi berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Ungaran dan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Dieng.

5) Kawasan Peruntukan Industri;

Kawasan peruntukan industri terdiri atas:

a) Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di:
   (1) sebagian Kecamatan Kaliwungu;
   (2) sebagian Kecamatan Brangsong;
   (3) sebagian Kecamatan Kendal;
   (4) sebagian Kecamatan Patebon.
b) Sentra industri kecil dan menengah berada di seluruh kecamatan.

6) Kawasan Pariwisata;

Pengembangan kawasan pariwisata terdiri atas:

a) Kawasan pariwisata budaya meliputi:
   (1) Makam Pangeran Juminah dan Makam Sunan Katong berada di Kaliwungu Selatan;
   (2) Makam Nyai Dapu dan Makam Sunan Bromo berada di Kecamatan Boja;
   (3) Situs Batu Seloarjuno dan Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
   (4) Goa Maria berada di Kecamatan Weleri.
   (5) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

b) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   (1) Pantai Sendangkulon, Pantai Jungsemi, dan Pantai Tanjungmojo berada di KecamatanKangkung;
   (2) Pantai Sendangsikucing berada di Kecamatan Rowosari;
   (3) Wana Wisata berada di Kecamatan Ringinarum;
   (4) Curug Semawur, Tuk Air Hangat Tirtomoyo, dan Agrowisata Ngebruk berada di KecamatanPatean;
   (5) Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo berada di Kecamatan Singorojo; dan
   (6) Air Panas Gonoharjo, Goa Jepang, dan Air Terjun Panglebur gongso berada di KecamatanLimbangan: dan
   (7) Pantai Muara Kencan di Kecamatan Patebon.
   (8) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

c) Kawasan pariwisata buatan meliputi:
   (1) Plantera berada di Kecamatan Patean;
   (2) Agrowisata Ngadiwarno berada di Kecamatan Sukorejo;
   (3) Wisata Kuliner Pemancingan berada di Kecamatan Weleri;
   (4) Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba berada di Kecamatan Rowosari; dan
   (5) Agrowisata Darupono, Agrowisata Kedungsuren, dan Agrowisata Jerukgiling berada diKecamatan Kaliwungu Selatan.
   (6) Kampung Jawa Sekatul berada di Kecamatan Limbangan;
   (7) Pengembangan potensi wisata di seluruh kecamatan.

7) Kawasan Permukiman;

Kawasan permukiman meliputi :

a) Kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 5.485 (lima ribu empat ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:

(1) Kecamatan Boja;
(2) Kecamatan Brangsong;
(3) Kecamatan Cepiring;
(4) Kecamatan Gemuh;
(5) Kecamatan Kaliwungu;
(6) Kecamatan Kaliwungu Selatan;
(7) Kecamatan Kangkung;
(8) Kecamatan Limbang;
(9) Kecamatan Ngampel;
(10) Kecamatan Pageruyung;
(11) Kecamatan Patean;
(12) Kecamatan Patebon;
(13) Kecamatan Pegandon;
(14) Kecamatan Plantungan;
(15) Kecamatan Ringinarum;
(16) Kecamatan Rowosari;
(17) Kecamatan Singorojo;
(18) Kecamatan Sukorejo;
(19) Kecamatan Weleri;
(20) Kecamatan Kendal.

b) Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 12.817 (dua belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar berada di seluruh kecamatan.

c) Fokus pengembangan kawasan permukiman berada pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal, Kecamatan Patebon, Kecamatan Pegandon, dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

8) kawasan pertahanan dan keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi :

a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;

b) POSAL Kendal yang berada di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari;

c) Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan KarangsariKecamatan Kendal.

c. Kawasan Strategis

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan luas kurang lebih 123

(seratus dua puluh tiga) hektar berada di kawasan panas bumi Gunung Ungaran.

2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan luas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus Sembilan)hektar, meliputi:
   a) Kecamatan Kaliwungu;
   b) Kecamatan Brangsong;
   c) Kecamatan Kendal; dan
   d) Kecamatan Patebon.

3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

   Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan luas kurang lebih 46.289 (empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:
   a) sebagian Kecamatan Limbangan;
   b) sebagian Kecamatan Boja;
   c) sebagian Kecamatan Sukorejo;
   d) sebagian Kecamatan Patean; dan
   e) sebagian Kecamatan Plantungan

Gambar 2.4
Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kendal

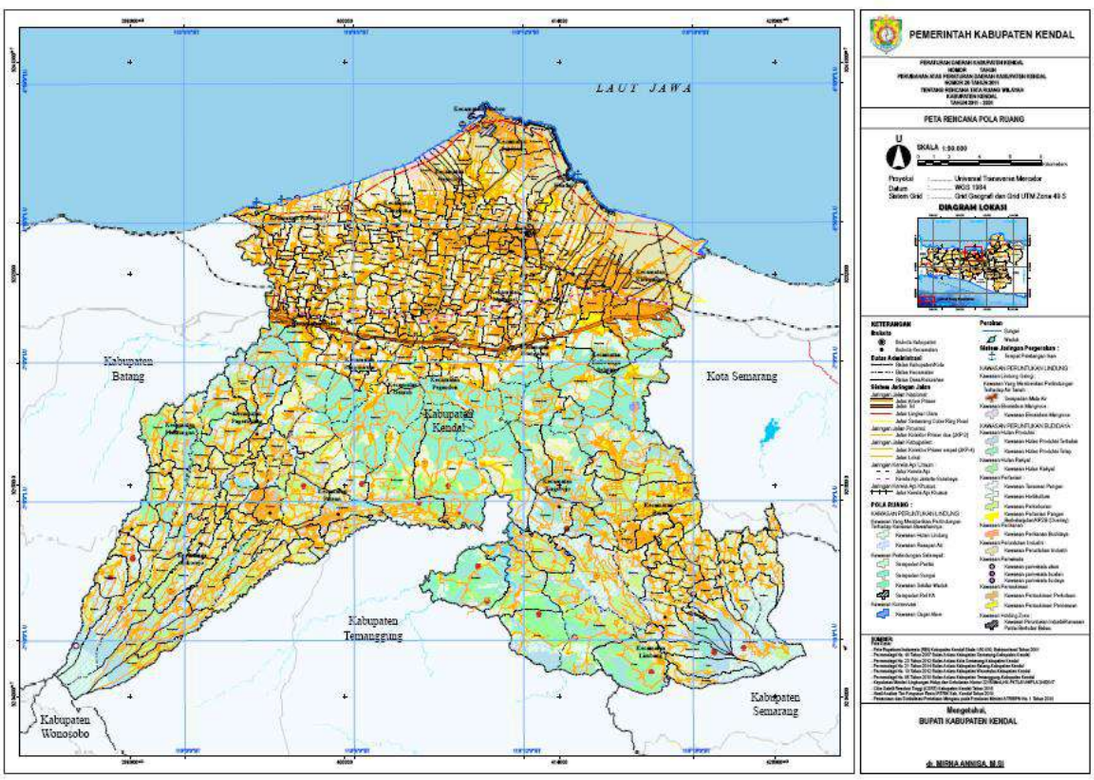

Sumber :Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

2.1.3 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal menurut BPS tahun 2020 tercatat sebanyak 1.018.505 jiwa terdiri dari 514.795 laki-laki dan 503.710 perempuan. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 82.443 jiwa dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Plantungan dengan jumlah penduduk 32.586 jiwa dari total penduduk di Kabupaten Kendal.

Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Weleri dan Kota Kendal. Pada kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 1.978 dan 2.177 jiwa setiap kilometer persegi.

Tabel 2.1
Proyeksi Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk Per Km²
1	Plantungan	16.704	15.882	32.586	105,18	667
2	Sukorejo	30.871	29.528	60.399	104,55	795
3	Pageruyung	18.277	17.394	35.671	105,08	694
4	Patean	26.459	25.646	52.105	103,17	561
5	Singorojo	26.699	26.155	52.854	102,08	443
6	Limbangan	17.594	17.343	34.937	101,45	487
7	Boja	41.455	40.988	82.443	101,14	1.286
8	Kaliwungu	33.325	32.832	66.157	101,50	1.386
9	Kaliwungu Selatan	26.329	25.670	51.999	102,57	798
10	Brangsong	25.633	24.978	50.611	102,62	1.465
11	Pegandon	19.012	18.942	37.954	100,37	1.220
12	Ngampel	18.133	17.722	35.855	102,32	1058
13	Gemuh	26.454	25.955	52.409	101,92	1.373
14	Ringinarum	18.710	17.910	36.620	104,47	1.558
15	Weleri	30.249	29.636	59.885	102,07	1.978
16	Rowosari	27.050	26.516	53.566	102,01	1.641
17	Kangkung	25.063	24.820	49.883	100,98	1.280
18	Cepiring	26.314	26.340	52.654	99,90	1.750
19	Patebon	30.342	29.743	60.085	102,01	1.356
20	Kota Kendal	30.122	29.710	59.832	101,39	2.177
Jumlah		**514.795**	**503.710**	**1.018.505**	**102,20**	**1016**

Sumber: BPS, ”Buku Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021”, 2021

Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Kendal tahun

2020 menunjukkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 725.890 jiwa, sedangkan yang belum produktif (<15 tahun) sebesar 227.453 jiwa dan yang tidak produktif lagi (65 tahun keatas) sebesar 65.162 jiwa. Sehingga rasio beban ketergantungan sebesar 40,31% yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 40 orang usia tidak produktif.

Tabel 2.2
Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kendal Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	36.443	34.949	71.392
5 - 9	40.116	38.278	78.394
10 - 14	39.818	37.849	77.667
15 - 19	40.645	38.106	78.751
20 - 24	40.728	38.642	79.370
25 - 29	42.975	41.137	84.112
30 - 34	44.741	42.304	87.045
35 - 39	40.879	39.853	80.732
40 - 44	38.495	38.493	76.988
45 - 49	33.927	35.313	69.240
50 - 54	32.720	33771	66.491
55 - 59	28.771	28.373	57.144
60 - 64	23.220	22.797	46.017
65-69	16.204	16.016	32.220
70-74	7.940	8.598	16.538
75+	7.173	9.231	16.404
2020	**514.795**	**503.710**	**1.018.505**

Sumber: BPS,"Buku Kabupaten Kendal Dalam Angka 2021", 2021

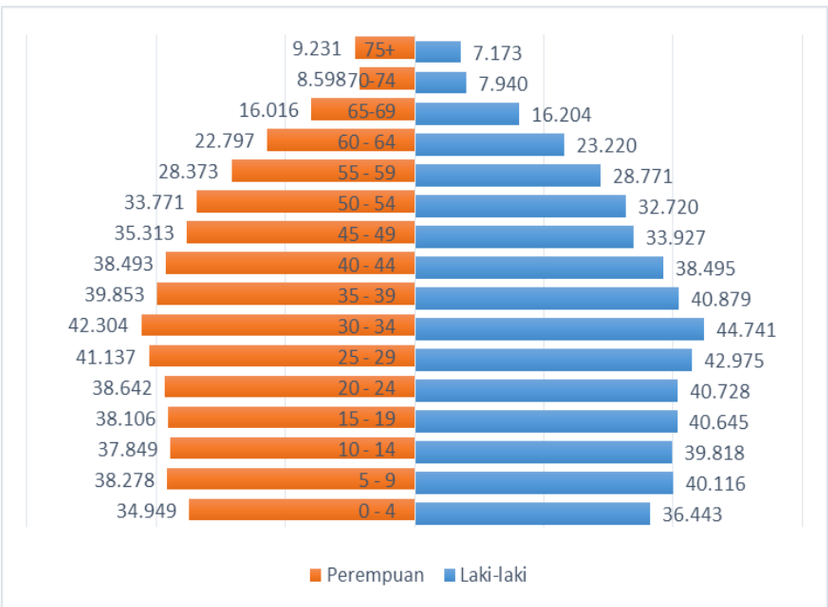

Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

Gambar 2.4
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2030 menunjukan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.33.797.968,33 juta terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp.42.581.364,55 juta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

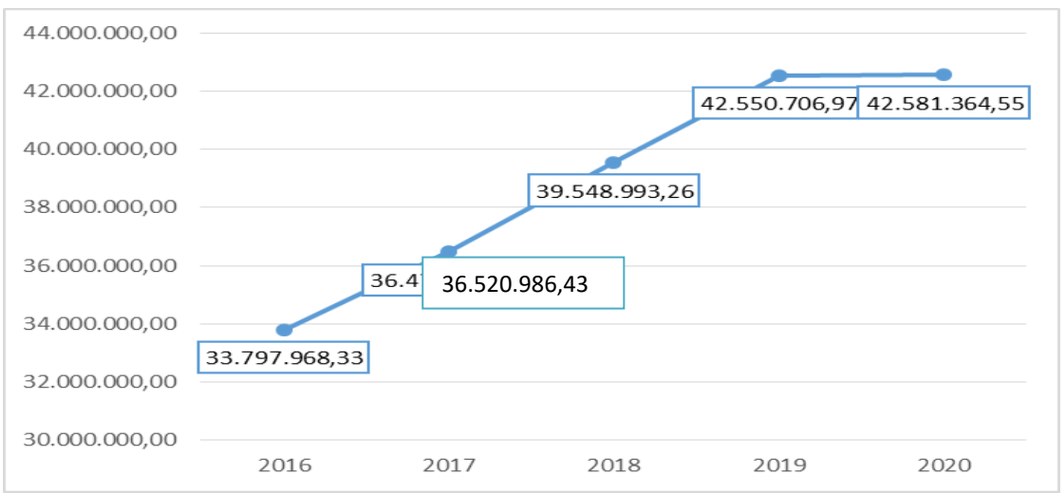

Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

Gambar 2.5
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHB di Kabupaten Kendal didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor dan Konstruksi. Kontribusi tertinggi pada sektor Industri pengolahan sebesar Rp.18.009.216,20 juta. Selengkapnya PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten Kendal tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.883.213,26	7.180.063,43	7.608.852,28	8.122.142,28	8.191.422,28
B	Pertambangan dan Penggalian	359.800,27	481.107,56	528.800,00	566.240,00	590.690,00
C	Industri Pengolahan	14.053.610,81	15.118.015,20	16.528.279,11	17.787.788,20	18.009.216,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	59.162,49	66.610,90	71.812,78	75.738,78	75.173,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.144,59	24.371,25	25.691,25	26.941,25	29.091,25
F	Konstruksi	2.196.824,64	2.421.656,45	2.672.256,45	2.846.256,45	2757 251,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.151.263,86	4.484.357,29	4.829.957,29	5.190.107,29	5.065.357,29
H	Transportasi dan Pergudangan	639.534,27	696.891,25	753.861,30	829.557,40	581.472,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.097.555,91	1.186.730,28	1.293.740,28	1.426.360,28	1.384.360,28
J	Informasi dan Komunikasi	944.967,16	1.097.134,57	1.223.134,57	1.368.134,57	1.558.634,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	697.553,08	757.335,33	806.937,38	840.119,90	853.975,23
L	Real Estate	304.690,35	335.149,38	361.104,38	385.754,38	388.254,38
M,N	Jasa Perusahaan	96.317,87	108.476,02	121.056,02	136.106,02	130.756,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	730.051,48	773.014,67	810.114,67	854.264,67	862.364,67
P	Jasa Pendidikan	880.416,97	981.591,20	1.078.879,20	1.187.179,20	1.194.679,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250.580,50	278.350,16	304.550,16	331.050,16	366.200,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	429.280,82	481.766,14	529.966,14	576.966,14	542.466,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**33.797.968,33**	**33.797.968,33**	**36.472.621,08**	39.548.993,26	42.550.706,97

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.26.139.414,95 juta terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp.30.443.688,53 juta, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

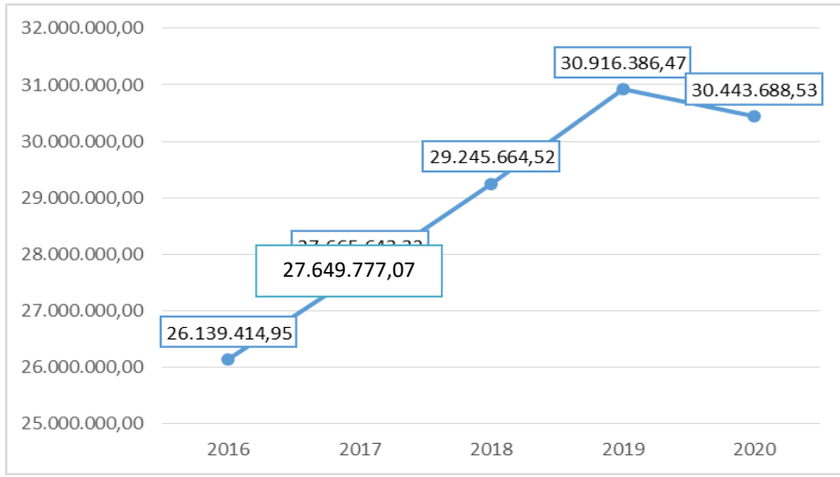

Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

Gambar 2.4
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHK di Kabupaten Kendal mencakup empat sektor, yaitu sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi dan sektor Industri Pengolahan. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menurut lapangan usaha Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.439.635,39	5.622.475,38	5.784.865,38	6.052.715,38	5.986.492,88
B	Pertambangan dan Penggalian	221.683,34	279.651,58	290.601,58	307.101,58	313.608,32
C	Industri Pengolahan	10.505.620,53	11.076.050,47	11.763.810,92	12.445.172,22	12.338.134,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56.202,05	58.778,90	61.548,43	64.819,93	64.617,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.512,95	22.520,15	23.620,15	24.370,15	24.881,20
F	Konstruksi	1.739.413,20	1.868.908,35	1.991.958,35	2.073.768,35	1.997.248,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.200.580,71	3.378.702,01	3.566.378,06	3.752.648,06	3.608.772,06
H	Transportasi dan Pergudangan	563.781,17	604.398,93	642.616,58	694.461,27	470.829,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	886.876,39	948.148,64	1.022.048,64	1.107.313,64	1.059.587,63
J	Informasi dan Komunikasi	1.060.960,28	1.199.100,15	1.337.651,10	1.476.151,10	1.679.231,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	486.262,35	511.388,41	527.539,48	541.355,94	550.129,03
L	Real Estate	252.709,43	272.415,49	287.415,49	303.365,49	302.932,49
M,N	Jasa Perusahaan	72.210,02	78.499,07	85.399,07	94.039,07	88.338,82

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	511.043,35	523.938,00	541.638,00	561.763,00	559.200,80
P	Jasa Pendidikan	609.025,27	660.174,07	710.224,07	763.124,07	760.627,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.392,66	181.985,25	196.840,25	209.700,25	226.845,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	345.505,86	378.508,47	411.508,97	444.516,97	412.211,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ADHK		**26.139.414,95**	**27.649.777,07**	**29.245.664,52**	**30.916.386,47**	**30.443.688,53**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga 2020 terjadi fluktuasi dengan penurunan tajam pada tahun 2020 menjadi -1,53%. Hal ini terjadi disebabkan oleh pandemi Covid 19, sehingga aktifitas ekonomi jauh berkurang. Berdasarkan PDRB harga konstan penurunan terjadi hampir disemua sektor perekonomian, kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan yaitu -32,20%. Penurunan ekonomi juga terjadi pada Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

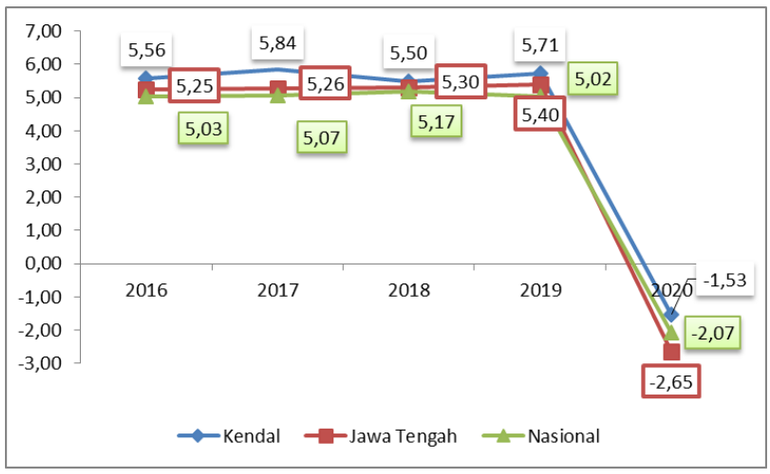

Sumber : Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota Di Indonesia 2016-2020

Gambar 2.5
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Pada tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal terjadi penurunan sebesar -1,53%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar -2,65% dan Nasional sebesar -2,07% serta berada di posisi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya

dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

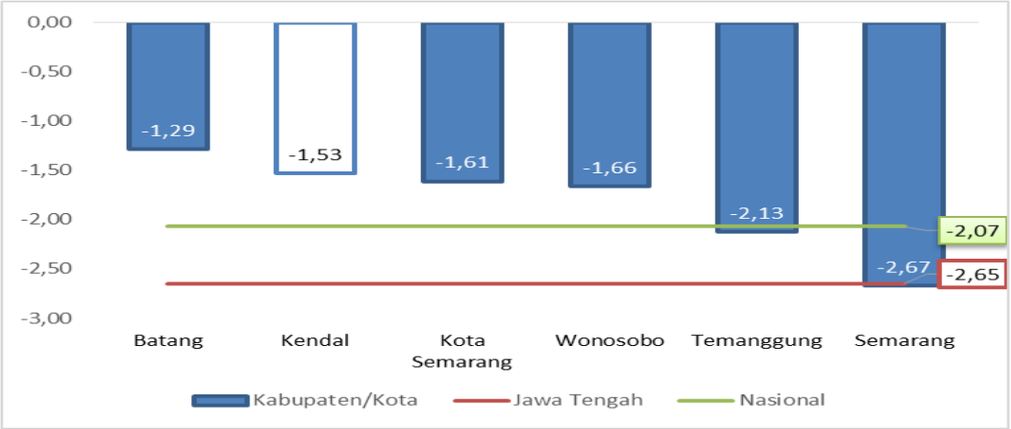

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.6
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)

3. Laju Inflasi

Inflasi tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,68%, dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 2,58%. Penurunan ini merupakan keberhasilan dari tim pengendali inflasi Kabupaten Kendal. Perkembangan laju inflasi dari tahun 2016-2020 digambarkan sebagai berikut:

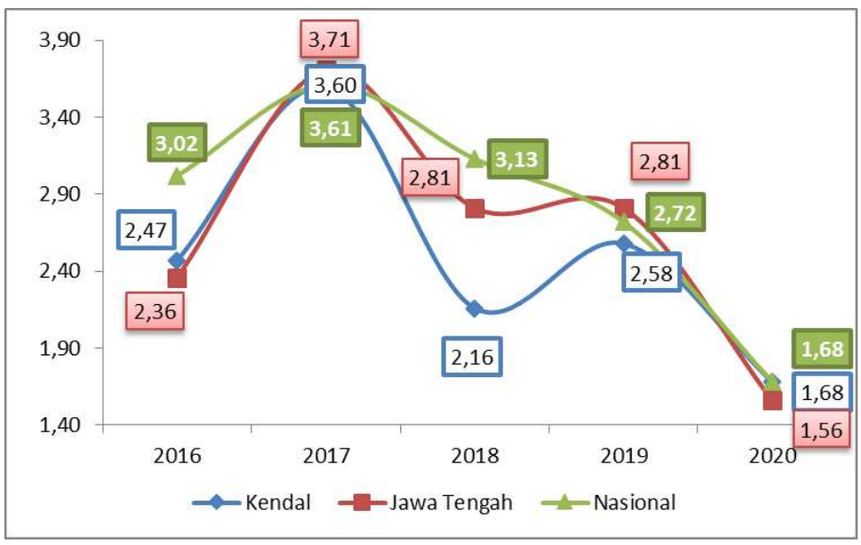

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Kendal 2021

Gambar 2.7
Laju Inflasi Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah (%) Tahun 2016-2020

4. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat

mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga konstan dalam kurun 2016-2020 naik dari 26,97 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 30,91 juta rupiah di tahun 2020. Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut.

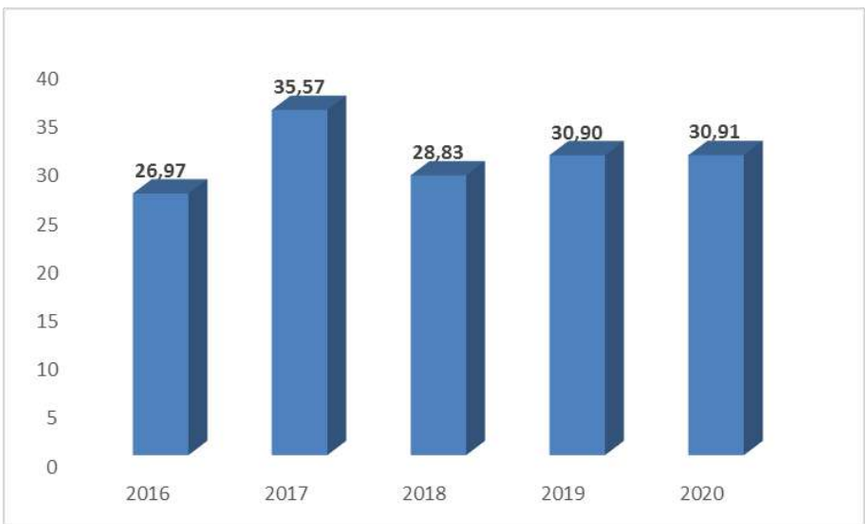

Sumber: Baperlitbang Kabupaten Kendal Tahun 2021

Gambar 2.8

PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2016– 2020(juta rupiah)

5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, tahun 2016 sebesar 11,37% menurunmenjadi 9,41% pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,99%, hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun yang disebabkan oleh terjadinya PHK, pekerja yang dirumahkan, pembatasan kegiatan masyarakat. Kondisi ini juga dialami oleh angka kemiskinan di Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah dan nasinal selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

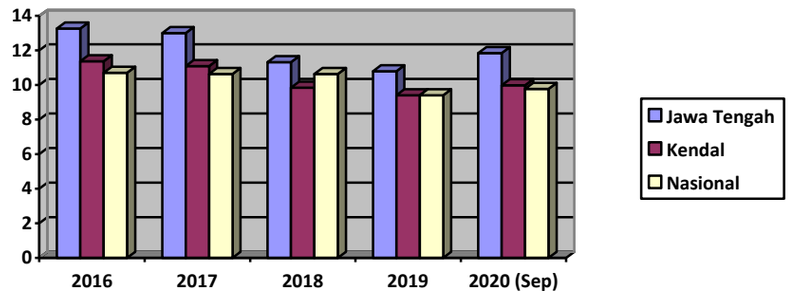

Sumber: bps.go.id, tahun 2021

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, Persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 9,99%, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 11,84% tetapi berada diatas Nasional sebesar 9,78% serta berada di posisi ke-5 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

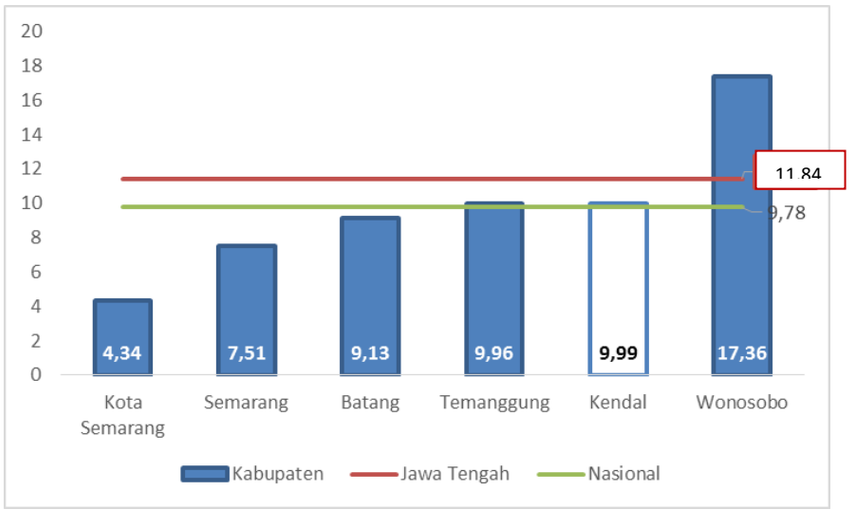

Sumber: bps.go.id, tahun 2021

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru

meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 capaian IPM Kabupaten Kendal sebesar 70,11 meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada gambar berikut:

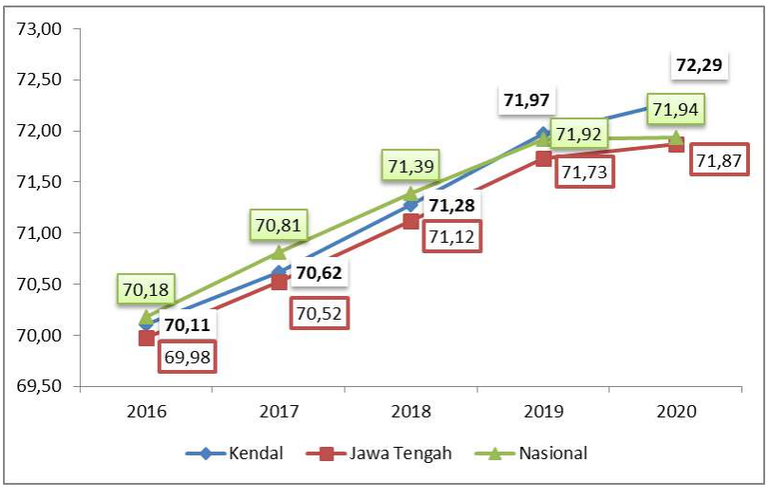

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.11

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Kendal sebesar 72,29 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 71,84dan berada diatas Nasional sebesar 71,94 serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

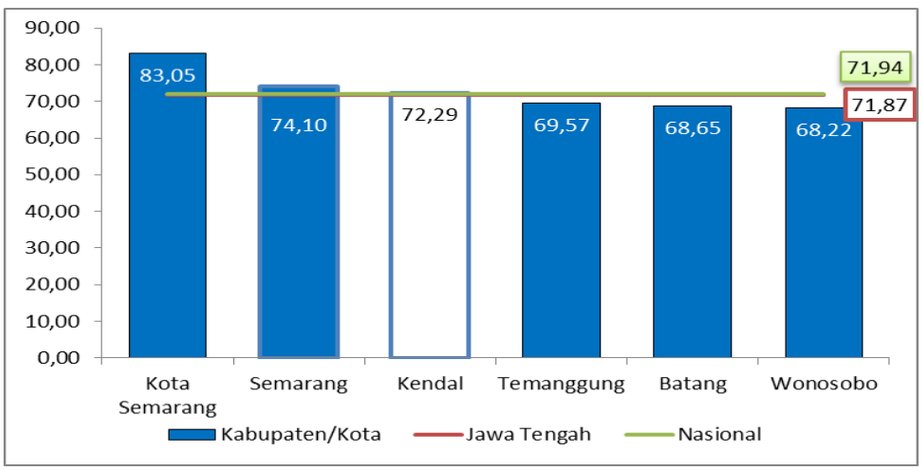

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.12

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita uraiannya sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH, merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan AHH Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,20 tahun meningkat menjadi 74,43 tahun pada tahun 2020. perkembangan tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

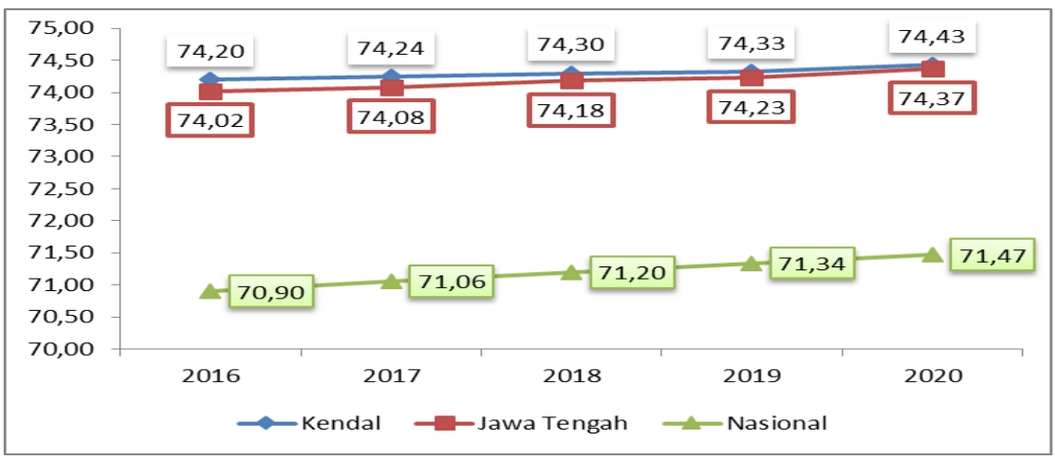

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.13

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)

Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Kendal sebesar 74,43 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,37 tahun dan Nasional sebesar 71,47 tahun serta berada di posisi ke-5 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

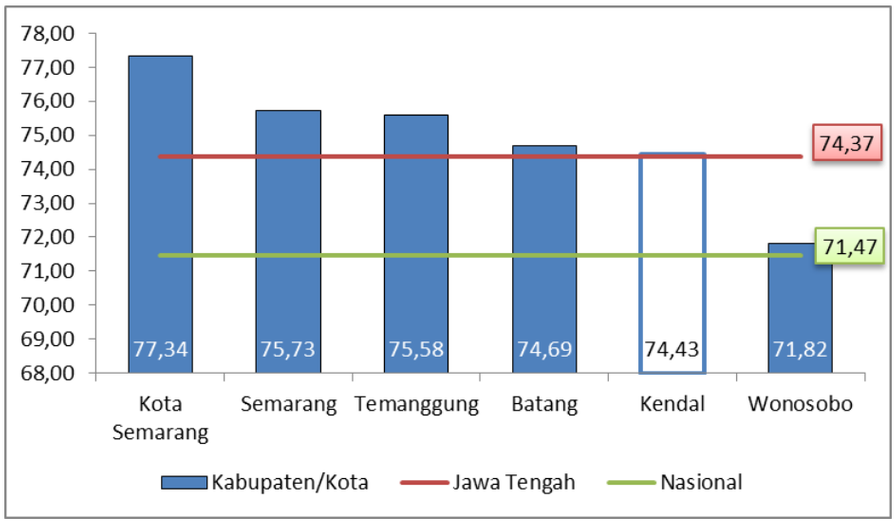

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.14
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 12,68 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 12,95 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

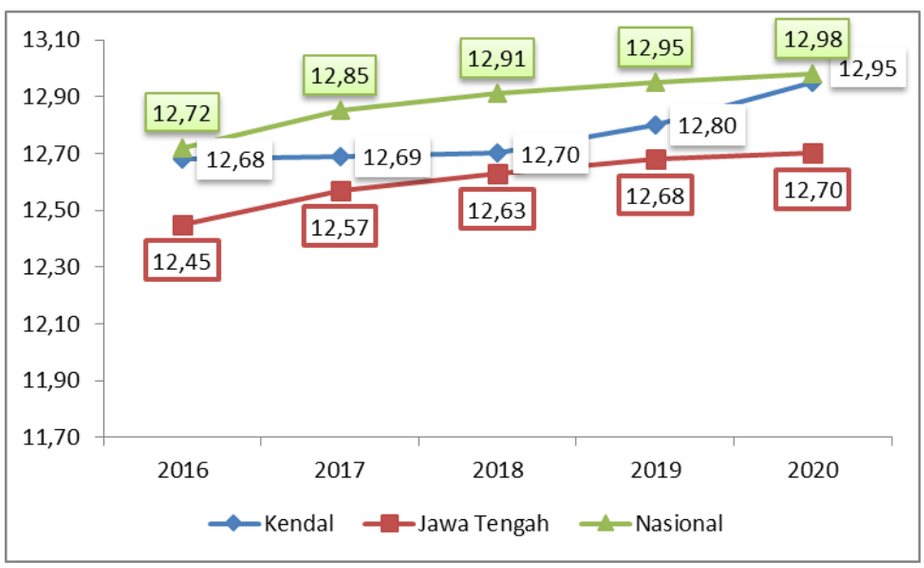

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.15
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)

Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Kendal sebesar 12,95 tahun, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 12,70 tahun tetapi berada dibawah Nasional sebesar 12,98 tahun serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

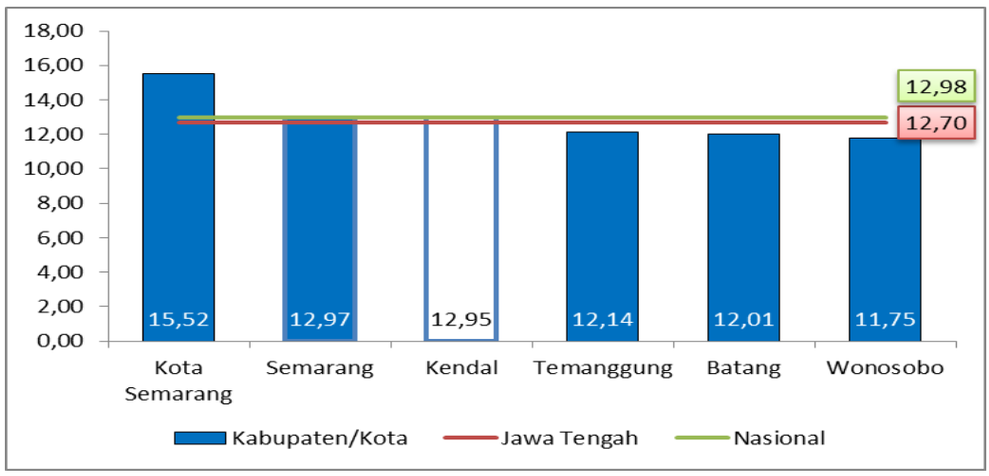

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.16
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 6,65 tahun menjadi sebesar 7,45 tahun pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

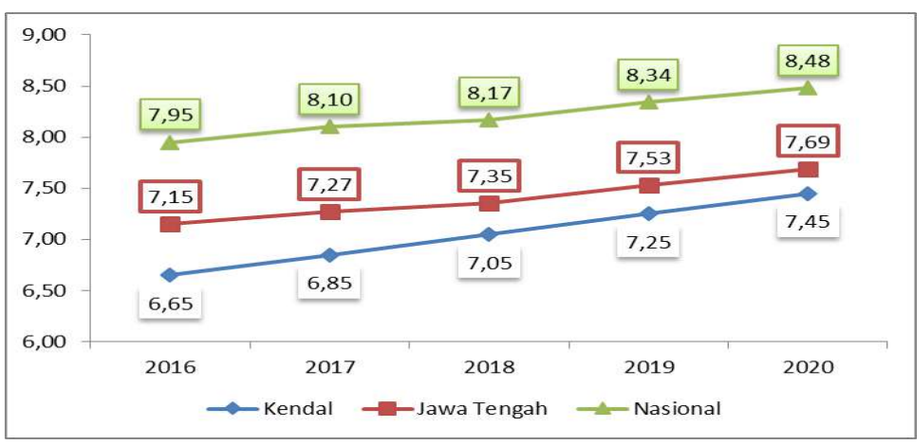

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.17
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)

Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,45 tahun, berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 7,69 tahun danNasional sebesar 8,48 tahun serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

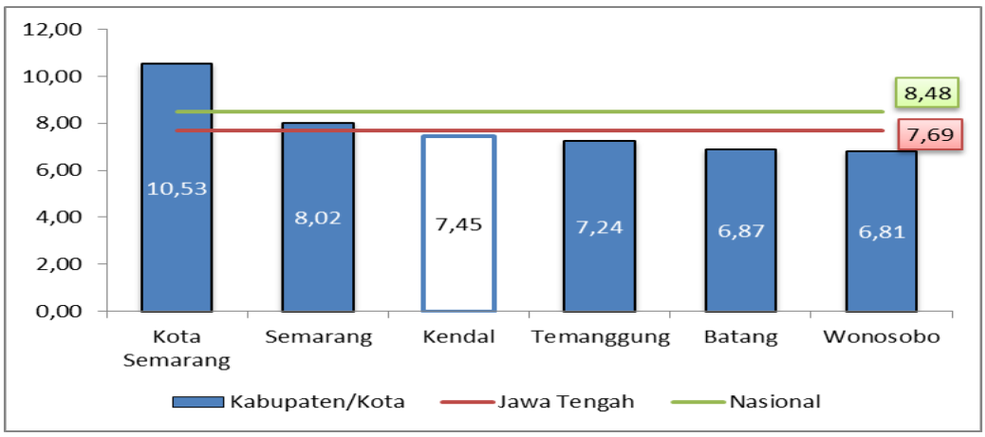

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.18

Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (Tahun)

d. Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.10.631 ribu dan tahun 2019 menjadi sebesar Rp.11.597 ribu, namun menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.11.425 ribu. Penurunan pengeluaran perkapita terjadi karena adanya kebijakan PSBB pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid 19. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2020.

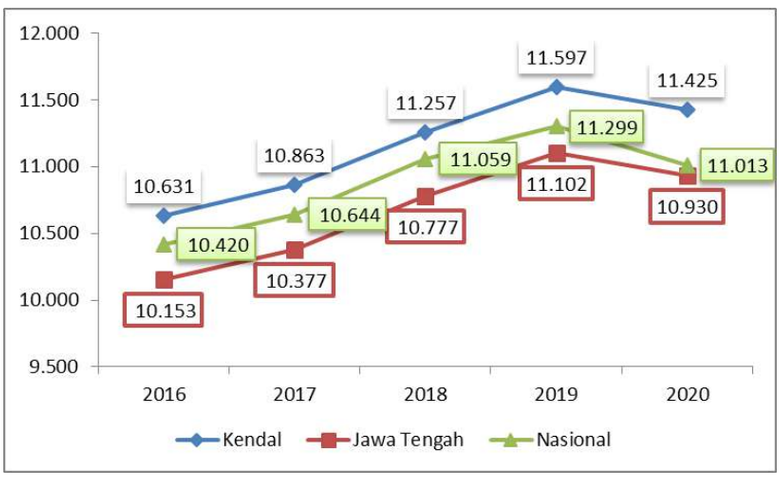

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.19

Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

Pada tahun 2020, Pengeluaran Per kapita Kabupaten Kendal sebesar Rp.11.425 ribu, berada diatasrata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.10.930 ribu dan Nasional sebesar Rp.11.013 ribu serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

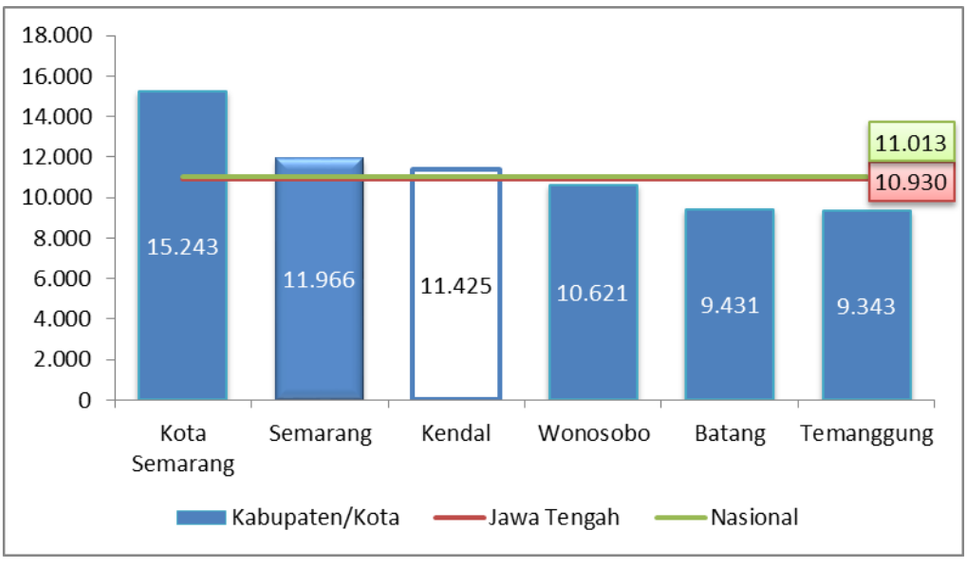

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.20
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG. IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Kendal tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020, IPG Kabupaten Kendal meningkatmenjadi 93,19 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah tetapi berbeda dengan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

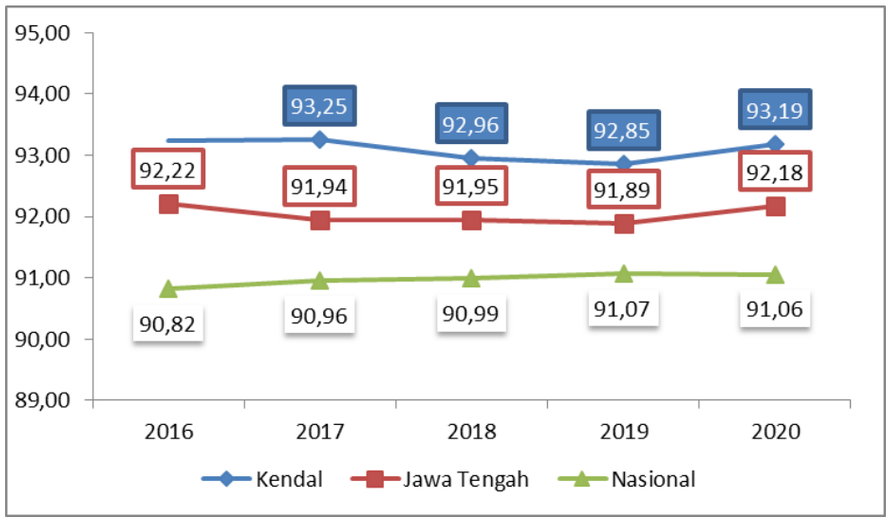

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.21
Perkembangan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020, IPG Kabupaten Kendal sebesar 93,19, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan Nasional sebesar 91,06 serta berada di posisi ke-4 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

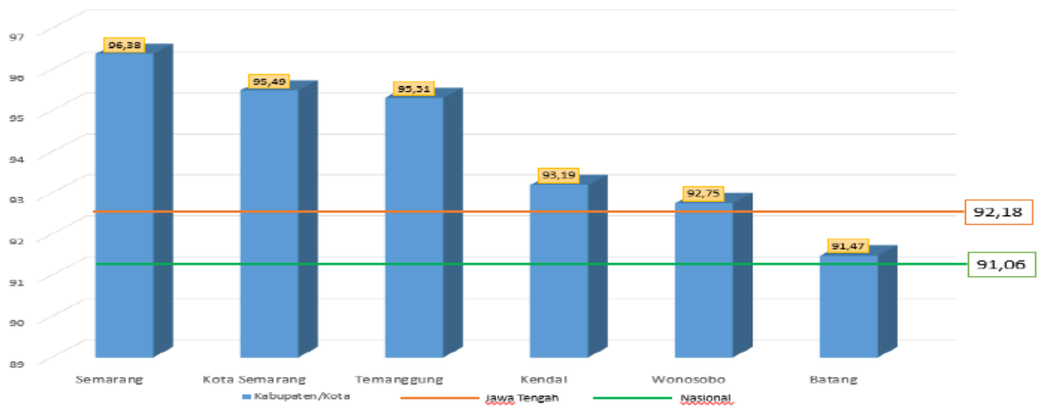

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.22
Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada Tabel2.5, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, angka harapan hidup perempuan tahun 2015 sebesar 76,05 tahun meningkat menjadi sebesar 76,26 tahun pada tahun 2020, sedangkan angka harapan hidup laki-laki tahun 2015 sebesar 72,16 tahun dan tahun 2020 sebesar 72,58 tahun.

Harapan Lama sekolah perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki, dimana harapan lama sekolah perempuan tahun 2015 sebesar 12,54 tahun meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,17 tahun, sedangkan untuk laki-laki tahun 2015 sebesar 12,24 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 12,81 tahun.

Sementara rata-rata lama sekolah laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 7,47 tahun dan tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 8,10 tahun, sedangkan untuk perempuan tahun 2015 sebesar 6,08 tahun dan tahun 2020 menjadi sebesar 6,84 tahun.

Dilihat dari Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal tahun 2015 hingga tahun 2020 laki-laki lebih baik dibandingkan dengan perempuan yaitu tahun 2015 sebesar Rp.13.660 ribu dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.14.842 ribu, sedangkan untuk perempuan tahun 2015 sebesar Rp.9.991 ribu dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.10.567 ribu. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kabupaten Kendal tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

No.	Tahun	AHH		HLS		RRLS		Pengeluaran Per Kapita	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	2016	72,25	76,09	12,34	12,57	7,68	6,65	13.805	9.997
2	2017	72,33	76,10	12,64	12,81	7,42	6,3	14.262	10.303
3	2018	72,40	76,16	12,70	12,82	7,64	6,47	14.708	10.476
4	2019	72,43	76,16	12,80	12,92	7,91	6,63	15.077	10.738
5	2020	72,58	76,26	12,81	13,17	8,10	6,84	14.842	10.567

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 73,43menjadi sebesar 77,24 pada tahun 2019. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional tetapi berbeda dengan Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

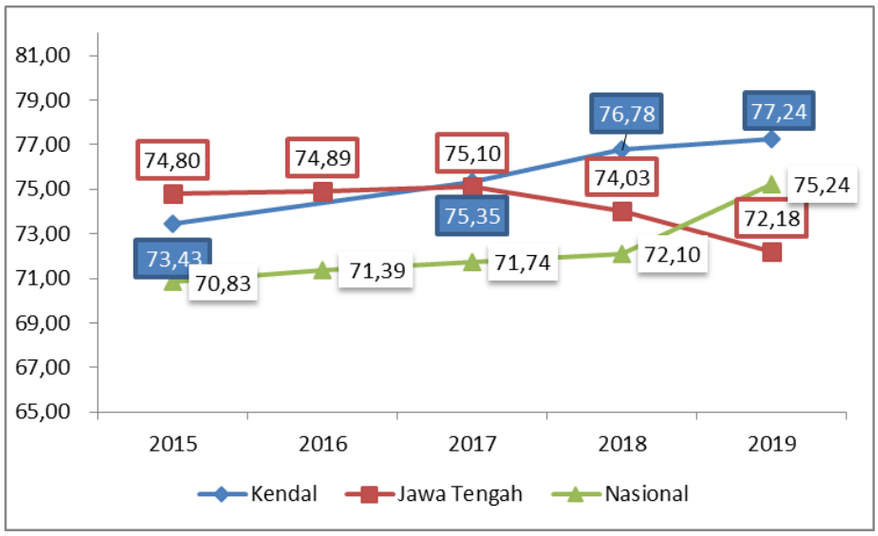

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 2.23
Perkembangan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Kendal sebesar 77,24, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 72,18 dan Nasional sebesar 75,24 serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

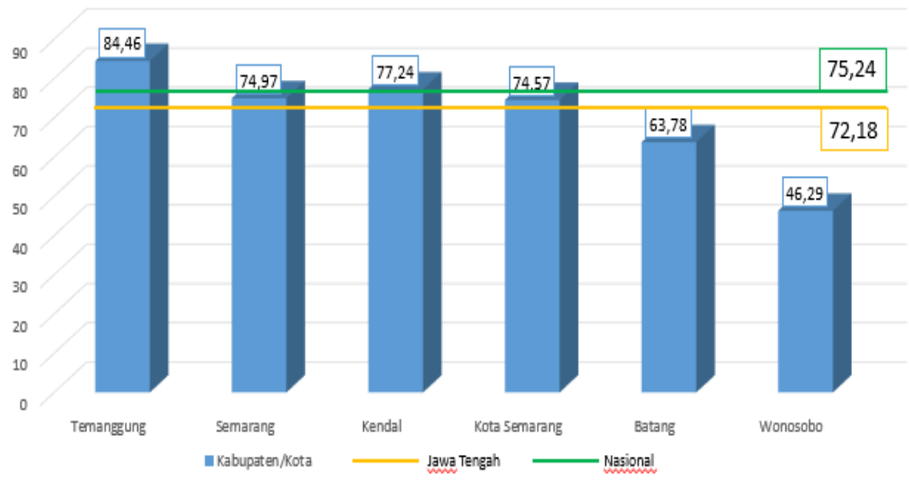

Sumber : Badan Pusat Statustik

Gambar 2.24
Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019

Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kendal tahun 2015-2019, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar 22,22% dan tahun 2019 sebesar 24,44%.

Kondisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi,

teknisi mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, yaitu tahun 2015 sebesar 40,24% dan mengalami peningkatan 48,20% tahun 2019.

Sedangkan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Kendal terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu tahun 2015 sebesar 34,66% dan tahun 2019 sebesar 35,30%. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kabupaten Kendal dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Perkembangan Indikator Pembentuk IDG Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	22,22	22,73	24,44	24,44	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	40,24	50,99	49,48	48,20	49,91
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	34,66	34,86	34,91	35,30	35,42

Sumber : Kementrian KPPA, Buku PMBG, BPS, 2021

4. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Kendal masih tergolong tinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 7,07%, menurun menjadi4,96% pada tahun 2017 kemudian meningkat hingga menjadi sebesar 7,56% pada tahun 2020. Adapun angka rata-rata TPT di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 6,48%. Peningkatan TPT di Kabupaten Kendal terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan industri dengan lulusan sekolah, selain itu adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, agar industri yang mulai masuk ke Kabupaten Kendal dapat menggunakan tenaga kerja dari Kabupaten Kendal.

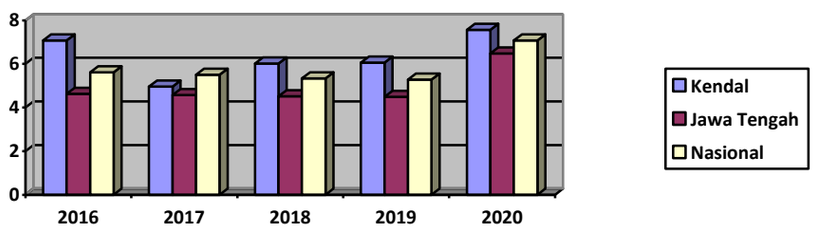

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2020, jateng.bps.go.id

Gambar 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Kendal sebesar 7,56%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 6,48% dan Nasional sebesar 7,07% serta berada di posisi ke-2 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

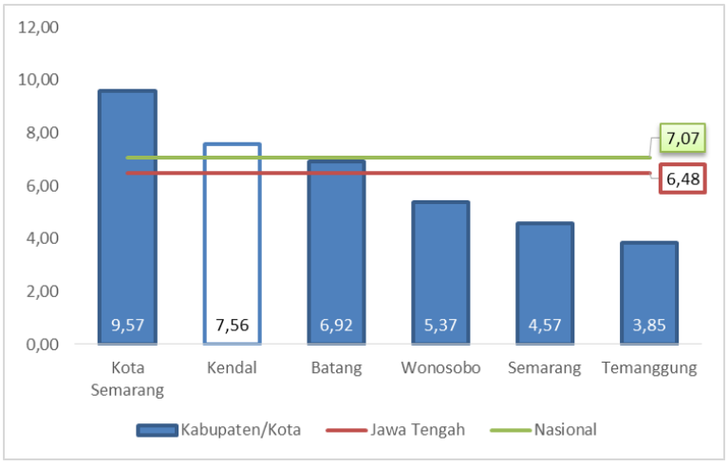

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2021, jateng.bps.go.id

Gambar 2.26
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Tahun 2020

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 65,7% dan tahun 2020 sebesar 70,50%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan fluktuatif dan Nasional yang mengalami perkembangan meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

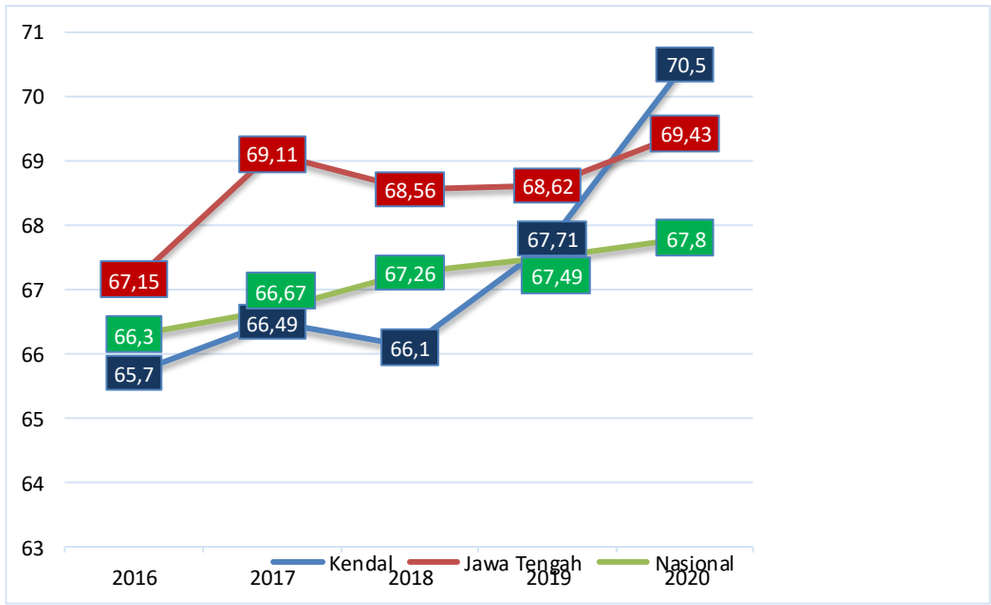

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Kendal sebesar 70,50%, berada diatasrata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 69,43% serta berada di posisi ke-3 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

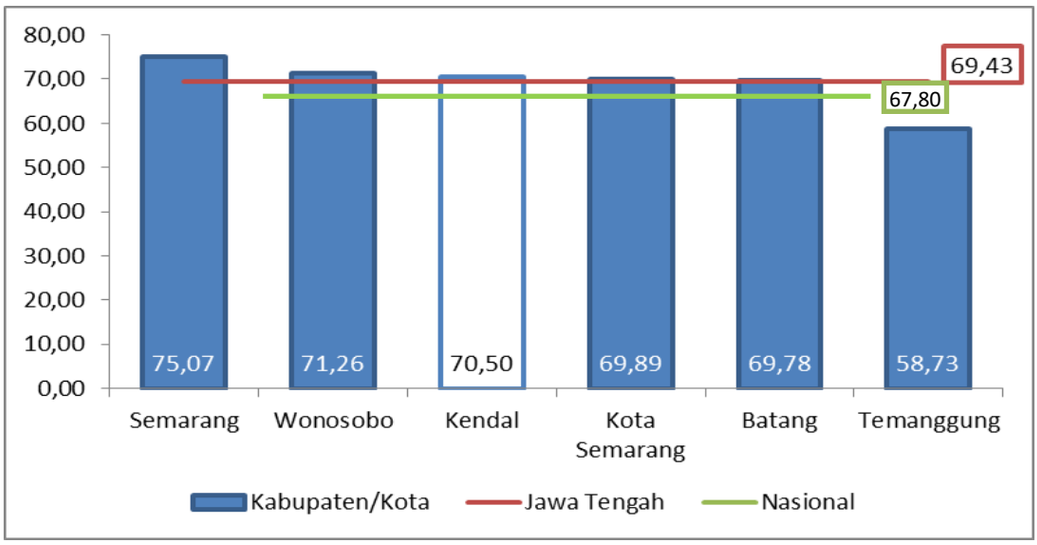

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.5
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi fokus seni budaya dan olahraga adalah untuk melihat sejauh mana prestasi olahraga di Kabupaten Kendal. Atlet berprestasi Kabupaten

Kendal terus meningkatkan prestasinya, hal ini bisa dilihat dari jumlah atlet berprestasi yang terus bertambah setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga kompetisi olahraga ditiadakan.

Tabel 2.7
Kinerja Makro Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	Orang	NA	100	332	662	520
2	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	Orang	57	145	211	268	21
3	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	Orang	60	61	124	86	17

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan denganPelayanan Dasar

1. Pendidikan.

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* pendidikan mengambil peran penting dengan target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memberhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan Pada tahun 2030, adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas. Pencapaian tujuan tersebut bagi Kabupaten Kendal harus diupayakan karena Kabupaten Kendal merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan urusan pendidikan bagi kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar. (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar,pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. (5) Pemindahan

pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, saasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan.

Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar (perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase) PAUD sebesar 43,84% pada tahun 2020 meningkat menjadi 56,79% walaupun masih dalam kondisi yang relatif rendah namun capaian tersebut menunjukkan sedikit peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target SDGs, maka capaian tersebut masih cukup jauh dari target SDGs 100% pada tahun 2030.

Kondisi pelayanan PAUD di Kabupaten Kendal juga menunjukan peningkatan selama kurun waktu 2016 – 2020. Kualitas pelayanan PAUD diukur melalui indikator Persentase PAUD terakreditasi. Pada tahun 2016 – 2020 persentase PAUD terakreditasi menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD di Kabupaten Kendal semakin baik.

Capaian indikator PAUD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Capaian Indikator PAUD Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020.

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	43,84	43,84	48,07	56,79	59,01
2.	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	39	36,13	45,50	47,09	45,44
3	Persentase Penduduk usia 5-6 tahun sudah tamat atau sedang belajar PAUD	%	NA	NA	NA	NA	90.94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, 2021

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD atau sederajat dan SMP atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. Perkembangan ketersediaan dapat dilihat dari indikator persentase ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik dan persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 perkembangan ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik fluktuatif namun cenderung turun. Pada tahun 2017 persentase ruang kelas SD/MI sebesar 78,78% dan pada tahun 2020 menjadi 71,33%. Demikian juga persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik. Selama kurun waktu 2016–2020 perkembangan ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2019 persentase ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik sebesar 86,64% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 79,89%. Selain kondisi ruang kelas indikator lain dari ketersediaan adalah persentase kondisi perpustakaan dalam kondisi baik. SD dengan ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 40,56% pada tahun 2019 meningkat menjadi 86,04 dan di tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 70,01%. Sedangkan untuk SMP juga mengalami peningkatan persentase ruang perpustakaan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 71,57% meningkat menjadi 84,31 di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 75,25% pada tahun 2020.

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan Non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)(perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase)pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah.

Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kabupaten Kendal sudah mengembangkan PKBM dan juga pendidikan kesetaraan. Pada tahun 2020 PKBM yang memiliki akreditasi sebesar 75,00% Angka kelulusan pendidikan Non Formal pada tahun 2020 sebesar 86,25% meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 81,45%.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kelulusan pendidikan non formal	%	81,45	81,96	84,83	86,25	86,25
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	108,04	110,03	109,83	100,33	106,67
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	99,22	99,97	98,57	106,19	89,86
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD dan SMP	%	103,63	105,00	104,20	103,26	98,27
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	84,22	88,01	88,59	88,61	94,56
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	%	62,76	69,79	68,9	74,47	73,88
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,1	0,1	0,06	0,19	0,06
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,71	1,23	0,58	0,98	0,14
9..	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100	100	100	100	100
10.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	88,45	91,17	91,57	99,13	99,13
11.	Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	61,3	78,78	78,51	75,89	71,33
12.	Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	75,23	78,89	81,57	86,64	79,89
13.	Persentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	40,56	39,51	82,39	86,04	70,01
14.	Persentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	71,57	71,15	83	84,31	75,25
15.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1	0,99	1,016	1,01	1,01
16.	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		0,99	0,95	0,95	0,949	0,95
17.	Rasio Guru/Siswa SD		0,067	0,062	0,053	0,052	0,06
18.	Rasio Guru/Siswa SMP		0,059	0,058	0,055	0,056	0,06
19.	Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	96,58	96,73	96,76	96,77	93,93
20.	Persentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	30	70	70	75	75
21.	Persentase pendidik yang memiliki sertifikasi	%	51,5	52	53,43	56,66	56,66
22.	Persentase Pendidik TK	%	42,95	40,36	40,76	44,92	44,92

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Memiliki Sertifikasi						
23.	Persentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	55,75	55,8	54,92	60,52	60,52
24.	Persentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	57,8	58,6	61,07	61,07	61,07
25.	Persentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	%	NA	NA	NA	NA	70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal 2021

d. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel 2.10
Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB).	%	NA	NA	NA	120.594	132.220
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	NA	NA	NA	1.499	1.503
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.	%	NA	NA	NA	26.489	26.741

Tabel capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dengan terbitnya ketiga peraturan tersebut, peraturan mengenai SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Usia

Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal mengalami peningkatan.UHH meningkat disebabkan oleh rendahnya angka kematian.

Urusan kesehatan memiliki peranan sangat penting dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kendal dari tahun 2016 sampai 2020 fluktuatif. AKB tahun 2016 sebesar 8,05 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) meningkat menjadi 10,04 per 1.000 KH pada tahun 2020. Angka ini dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH. Sedangkan kematian balita juga fluktuatif, dari tahun 2016 AKABA sebesar 9,41 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan tahun 2020 menjadi 12,42 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian balita didominasi oleh angka kematian bayi. Masih ditemukannya kematian bayi dan balita disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang belum optimal, angka kesakitan pada bayi dan balita, lingkungan yang kurang sehat, kesadaran masyarakat yang masih belum baik.

Angka kematian ibu (AKI) dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. AKI tahun 2016 sebesar 122,47 per 100.000 KH menurun tahun 2020 menjadi 115,8 per 100.000 KH. Dibandingkan dengan target SDGs tahun 2030 masih diatasnya yaitu 70 per 100.000 KH. Kematian ibu disebabkan oleh kondisi dimana ibu tidak siap mengalami kelahiran yaitu mengalami 4 T (terlalu sering, terlalu banyak, terlalu muda dan terlalu tua) melahirkan. Penyebab langsung kematian ibu melahirkan seperti Kasus pendarahan telah mengalami penurunan namun karena infeksi penyakit dan penyakit penyerta (jantung, hipertensi, kanker dll) mengalami peningkatan.

Tabel 2.11
Capaian AKB,AKABA dan AKI Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	8,05	9,28	8,87	9,6	10,04
2	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	9,41	10,92	9,90	11,1	12,42
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	122,47	163,50	115,77	104	115,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Status gizi masyarakat di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari kondisi gizi buruk dan balita stunting. Gizi buruk di Kabupaten Kendal mengalami

kenaikan dari tahun 2016 sebesar 0,03% menjadi 0,05% pada tahun 2020. Gizi buruk terjadi karena asupan makan yang tidak memenuhi kebutuhan pertumbuhan.Hal ini karena kemiskinan dan ketidakpahaman penduduk dalam menyiapkan makanan yang seimbang. Balita gizi buruk yang meningkat diikuti dengan meningkatnya balita stunting. Hasil penimbangan serentak Tahun 2016 balita stunting sebanyak 6,25% menurun menjadi 5,60% pada tahun 2019, dan berdasarkan data EPPBGM tahun 2020 balita stunting sebesar 17,54%.

Tabel 2.12
Status gizi masyarakat di Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05
2	% Balita Stunting	%	6,25	5,22	5,14	5,6	*17,54*

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal telah tersedia disemua kecamatan. Dari sisi ketersediaan pelayanan kesehatan tidak menjadi permasalahan namun dari sisi kualitas pelayanan masih menjadi perhatian. Hal ini dapat dilihat dari rasio puskesmas melebihi 30.000 penduduk.Persentase puskesmas yang sesuai Permenkes No. 75 tahun 2014, pada tahun 2020hanya sebesar 30% (9 Puskesmas). Hal ini dikarenakan dari sisi tenaga kesehatan sesuai peaturan masih belum terpenuhi dan dari tata bangunan juga masih perlu mendapat perhatian.

Tabel 2.13
Kondisi Pelayanan Kesehatan Dasar kabupaten Kendal

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Puskesmas terhadap Penduduk	Rasio	1 : 32056	1 : 32559	1 : 32622	1 : 33.731	1 : 34.082
2	Rasio jumlah tempat tidur Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio	1 : 1825	1 : 1655	1 : 1744	1:1586	1:1587
3	Presentase Puskesmas yang memiliki tenaga sesuai permenkes 75 tahun 2014	%	20	26,6	30	30	30
4	Persentaseapotek dan toko obat yang berizin	%	100	100	100	100	100
5	IKM Puskesmas	Skor	76,06 (10 PKM)	76,11 (8 PKM)	79,70 (10 PKM)	80,11 (17 Puskesmas)	84,28 (30 Puskesmas)
6	Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar	%	97,06	95,24	95,65	93,28	93,22
7	Rata – rata capaian SPM	%	NA	75,14	71,78	80	78,48

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Inovasi dan pelayanan yang dilakukan dalam upaya penanganan Covid-19 antara lain yaitu sosialisasi dan publikasi secara digital yang dilakukan pada situs dan media sosial pemerintah kabupaten kendal. Selanjutnya yaitu Pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Admedika dalam penyediaan dan pengintegrasian Electronic Health Record (EHR) di seluruh fasilitas kesehatan di Kendal. Adapun salah satu bentuk pencegahan yaitu vaksinasi yang dilakukan secara keliling. Upaya untuk percepatan testing maka akan disediakan GeNose. Beberapa upaya lain yang dilakukan yaitu dengan Menyediakan dan Mengoperasikan. Situation Room di Command Center, Membuat Grand Design PPKM Mikro, Menyediakan dan Mengaktivasi Nomor Darurat (Call Center 112 dan 119).

Pelayanan kesehatan rujukan dilayani oleh RSUD Kabupaten Kendal, sampai dengan hari ini *Bed Occupancy Rate* (BOR) RSUD tahun 2020 sebesar 60,57 berada dibawah dari standar yang ada yaitu 75%. Artinya RSUD kekurangan pasien, hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19. Rata-rata lama tinggal atau AVLOS juga diatas target yaitu 3,44 hari dan kematian dirumah sakit juga belum memenuhi target yaitu 3,34%. Kepuasan masyarakat yang menggunakan pelayanan RSUD mencapai 83,17 tahun 2020, hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 79. Banyak hal yang menyebabkan kepuasan masyarakat menurun terhadap pelayanan RSUD. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap baik dari segi jumlah dan spesifikasinya, maupun Tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang memberikan pelayanan dinilai kurang ramah terhadap masyarakat.

Tabel 2.14
Kondisi Pelayanan Kesehatan Rujukan Kabupaten Kendal

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	75	68,74	87,34	82,1	60,57
2	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3.5	3,52	4,77	4,68	3,44
3	NDR (Net Death Rate)	%	2.5	2,6	2,59	3,06	3,34
4	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	80	84,75	78,07	79	83,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Pelayanan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Kendal belum sebagaimana target yang ditentukan. Berdasarkan data yang disediakan Dinas Kesehatan, hanya indikator pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang telah mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan penilaian indeks keluarga sehat Kabupaten Kendalbelum masuk kategori sehat. Pada tahun 2020 Indeks Keluarga sehat baru mencapai 0,22. Kategori keluarga sehat dibedakan menjadi 3 yaitu keluarga tidak sehat (0-0,5), keluarga prasehat (0,5-0,8) dan keluarga sehat (0,8-1) Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan masih diangka 65,8%.

Tabel 2.15
Kondisi Standar Pelayanan Kesehatan dan Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Kendal

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	%	56	58,85	65,8	73,6	73,2
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibuhamil	%	95,77	93,51	93,66	93,83	94,79
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	96,79	99,99	99,99	99,99	99,99
4	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	104,4	99,9	99,2	100	100
5	Pelayanan kesehatan balita	%	98,9	100,2	97,3	100	99,2
6	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	100	100	62,22
7	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	NA	4,1	28,1	62	57,2
8	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	23,26	98,98	62,44	62,68	77,06
9	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	26,90	36,4	19,5	40,9
10	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	NA	20,1	21,1	69,2	87,4
11	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	NA	55,4	85	83	75,4
12	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	87	87	41,7	54,3	52,1

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
13	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	%	80,0	80,3	89,1	92,7	90,7
14	Indeks Keluarga Sehat	indeks	NA	NA	0,19	0,20	0,22
15	Rasio dokter terhadap jumlah penduduk		20,5	11,4	15,53	21,78	28,5
16	Rasio para medis terhadap jumlah penduduk		41	20,5	109,23	77,3	193,3
17	Rasio Rumah sakit tipe C dan terhadap jumlah penduduk		1:961.989	1:978.672	1:991.686	1:1.011.939	1:1.022.485
18	Rasio DPM (dokter Praktek Mandiri) terhadap jumlah penduduk		0	4,59	1,91	2,07	3,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Kualitas lingkungan Kabupaten Kendal cukup baik, hal ini dapat dilihat dari semua kelurahan dan desatelah bebas dari buang air besar sembarangan, Persentase PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 84,73%. Persentase desa siaga aktif telah mencapai 99,65% ditahun 2020. Namun demikian belum semua desa mencapai desa dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Industri rumah tangga di Kabupaten Kendal belum semua memiliki izin. Pada tahun 2020 perusahaan dengan IRT (Industri Rumah Tangga) baru mencapai 54,75% dan produk PIRT (Produk Industri rumah Tangga) yang terawasi post marketnya baru mencapai 34,7%.

Tabel 2.16
Kondisi Kualitas Lingkungan Sehat dan Industri Rumah Tangga Kabupaten Kendal

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kelurahan/Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	%	0	0	0	30	51
2	PersentaseKelurahan/Desa ODF (*Open Defecation Free*)	%	16,43	30,77	100	100	100
3	Persentase Desa siaga aktif minimal strata madya	%	50	50	50	96,85	99,65
4	Persentase Rumah ber PHBS	%	80	80	85	79	84,73
5	Persentaseperusahaan rumah tangga yang	%	26,1	34,6	44,9	49,15	54,75

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	memiliki IRT						
6	Persentase produk PIRT yang terawasi post marketnya	%	22,8	25,7	29,5	31,6	34,7
7	Persentase pembinaan mutu makanan dan minuman	%	15,2	10,8	13,5	9,7	15,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal 2021

Tabel 2.17
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	NA	93,51	93,66	93,83	94,79
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	NA	99,80	99,99	99,99	99,99
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru Lahir	%	NA	101,47	99,18	100,00	100,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	%	NA	100,00	97,26	100,00	99,20
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	NA	100,00	100,00	100,00	62,22
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	%	NA	4,15	28,17	62,00	57,22
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	%	NA	99,52	62,44	62,68	77,06
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	NA	26,88	36,44	19,58	40,97
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	NA	20,98	21,08	69,24	87,44
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	NA	55,40	85,04	83,03	75,49
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	%	NA	100,00	41,90	54,30	52,32
12.	Pelayanan Kesehatan Pada Orang beresiko terinfeksi HIV	%	NA	80,30	89,10	92,70	90,70

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur berdasarkan 11 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Indeks kinerja

sistem irigasi; 2) Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi; 3) Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air; 4) Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan); 5) Persentase akses sanitasi layak; 6) Persentase drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat); 7) Persentase kondisi mantap jalan; 8) Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah; 9) Persentase kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL; 10) Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti; 11) Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi pada system informasi jasa konstruksi.

Capaian indikator Indeks kinerja sistem irigasi, pada tahun 2020 sebesar 1,02 %. Indikator persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi menunjukan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 61,03 % di tahun 2016 menjadi 75,08% pada tahun 2020. Indikator konservasi infrastruktur alami sumber air juga mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020, dari 34,27 % di tahun 2016 menjadi 47,92 % pada tahun 2020.

Capaian universal acces di bidang air minum dan sanitasi selama tahun 2016-2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Indikator persentase akses air minum layak dan aman (termasuk perpipaan) selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 83,46 % di tahun 2016 menjadi 93 % di tahun 2020. Meskipun mengalami trend peningkatan setiap tahun tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana capaian akses air minum layak dan aman harus 100 %. Indikator persentase akses sanitasi layak selama tahun 2016-2020 juga mengalami peningkatan, dari 78 % di tahun 2016 meningkat menjadi 92 % di tahun 2020, sama halnya dengan capaian indikator akses air minum layak, meskipun capaian akses sanitasi meningkat setiap tahun masih belum memenuhi target universal acces 100-0-100 yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian indikator drainase jalan kondisi baik (lancar dan tidak tersumbat) tahun 2016-2020 mengalami trend meningkat, dari 40,39 % di tahun 2016 menjadi 87% di tahun 2020. Indikator persentase kondisi mantap jalan juga mengalami trend peningkatan, dari 51 % di tahun 2016 menjadi 88,28 % di tahun 2020. Infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah mempunyai arti yang sangat penting, mengingat fungsinya untuk memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ketempat lain dan arus barang dari sumber-sumber produksi ke pusat-pusat pemasaran.

Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator Kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	NA	NA	NA	NA	1,02
2	Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	61,03	70,05	71,03	75,02	75,08
3	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	41,5	47	45,92	62,78	63,94
4	Konservasi infrastruktur Alami Sumber Air	%	34,28	39,28	44,28	47,92	47,92
5	Persentase akses air minum layak dan aman (termasuk akses perpipaan)	%	83,46	88,58	90,03	92	93
7	Persentase Akses sanitasi layak (%)	%	78	87,35	88	92	92
8	Presentase drainase kondisi baik	%	40,39	60	62	87,4	87
9	Persentase jalan kondisi mantap	%	51,00	69,00	71,57	88	88,28
10	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	41,65	46,40	49,69	65,11	67,03
12	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	41,65	46,40	49,69	65,11	67,03
13	Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah	%	NA	87,00	87,00	87,00	87,00
14	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	%	NA	87	87	87	87
15	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	NA	87,00	87,00	87,00	87,00
16	Persentase Kawasan yang memiliki RDTR/RTRK/RTBL	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17	Persentase rekomendasi IPR yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
18	Persentase Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada system informasi jasa konstruksi	%	65	65	80	90	90
19	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	NA	NA	NA	NA	19,14
20	Rasio banguna gedung ber-IMB per satuan bangunan	%	NA	NA	NA	NA	54,82
21	Nilai/ Score SIPJAKI	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal 2021

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator sesuai kewenangan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	%	83,46	88,58	90,03	94	93,35
2.	Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	78	87,35	88	92,20	92,24

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 11 sub urusan yaitu: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 10 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase pengembang perumahan berizin; 2)

Persentase perumahan formal berizin; 3) Proporsi Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak; 4) Persentase Rumah Layak Huni; 5) Persentase kawasan permukiman kumuh; 6) Persentase Perumahan yang dilengkapi oleh PSU; 7) Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Baik; 8) Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana; 9) Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana; 10) Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perumahan.

Capaian indikator persentase pengembang perumahan dan perumahan formal berizin selama kurun waktu tahun 2016-2020 sudah tercapai 100 % sejak tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, salah satunya dengan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator persentase rumah layak huni yang mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dari 95,96 % di tahun 2016 menjadi 98,61. Tetapi capaian tersebut menurun di tahun 2020 menjadi 87,85 %, salah satu faktor turunnya capaian tersebut adalah dampak pandemi covid 19 dimana banyak anggaran pembangunan daerah terkena recofusing untuk penanganan pandemi covid 19.

Capaian indikator kawasan permukiman kumuh selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dilihat dari penurunan luas kawasan kumuh yang cukup signifikan, dari 69,9 % di tahun 2016 menjadi 0 % di tahun 2020 berdasarkan SK Bupati No.648.2/520/2017. Dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan perumahan diperlukan peran serta dari masyarat, dan tidak bisa tergantung dari pemerintah dikarena keterbatasan dilihat dari indikator.Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perumahan di Kabupaten Kendal cenderung mengalami peningkatan tahun 2016 tercatat sebesar 0,69 % menjadi 40,91% pada tahun 2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Capaian Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengembang perumahan berizin	%	100	100	100	100	100
2	Persentase perumahan formal berizin	%	100	100	100	100	100
3	Proporsi Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak	%	95,96	96,68	97,3	98,61	87,85
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	95,96	96,68	97,3	98,61	87,85
5	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	0	3.937	4.180	7.192	4.77
6	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,96	96,63	97,3	98,61	87,85
7	Persentase kawasan permukiman kumuh	%	69,9	85,34	40,46	0	0
8	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh	%	0	19.85	28.46	23.17	3
9	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	0	19.85	48.31	72.01	74.81
10	Persentase Perumahan yang dilengkapi oleh PSU	%	100	100	100	100	100
11	Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	%	0	25	30,37	100	100
12	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perumahan	%	0,69	19,93	19,93	33,92	40,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal 2021

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	%	NA	50	NA	0	0
2	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NA	NA

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, bencana dan kebakaran. Dalam rangka mendukung ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dari indikator yang ada sampai tahun 2020 secara umum tercapai dengan baik dan rata-rata dilaksanakan. Pada ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, indikator

persentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah mencapai 100% mulai tahun 2018-2020. Cakupan penegakan Perda sudah mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Pada pelaksanaan upaya peningkatan wawasan kebangsaan, indikator dengan capaian mengalami penurunan yaitu pada masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan, tercatat pada tahun 2020 sebesar 1.150 jiwa dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 8.652 jiwa.

Capaian kinerja untuk sub urusan bencana di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 yang meliputi indikator persentase bencana yang tertangani dan persentase meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban sudah mencapai 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja kebakaran di Kabupaten kendal menunjukkan fluktuatif cenderung turun dimana indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 81% dan di tahun 2020 meningkat menjadi 95%.

Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	15	100	100	100
2.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	318	151	230	230	240
3.	Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	rasio	1,4	1,3	1,4	1,4	1,65
4.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	98,4	84,9	98	10,4	10,8
5.	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	per desa/ kelurahan	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97
6.	Tertanganinya konflik sosial yang terjadi	%	100	100	100	100	100
7.	Cakupan penegakan Perda yang tertangani	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	90	90	90	90	90

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Persentase pelanggaran ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani	%	100	100	100	100	100
10.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	0,53	0,55	0,6	0,67	0,58
11.	Presentase penurunan ganguan keamanan dan ketertiban	%	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Jumlah pelanggaran Perda	kasus	600	577	563	456	460
13.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
14.	Persentase bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100
15.	Persentase meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban.	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	0	10	10	10	10
17.	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	NA	10	98	100	100
18.	Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk (Desa Rawan 73)	%	2,73	5,47	8,22	9,59	10,96
19.	Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100
20.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	%	100	100	100	100	100
21.	Persentase LSM/Ormas yang dibina kebangsaan	%	7,19	8,82	10,46	12,09	13,73
22.	Presentase cakupan penegakan perda	%	100	92	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	yang tertangani						
23.	Presentase Kebakaran yang ditangani	%	100	100	100	100	100
24.	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)	%	75	88	81	92	95
25.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	70	80	100	100	100
26.	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	%	100	100	100	100	100
27.	Persentase Kelompok Balakar per Kecamatan	%	0	100	100	100	100
28.	Persentase relawan kebakaran yang dibina	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP dan Pemadam kebakaran; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal 2021

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan perkada	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
	Sub Kebencanaan						
	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi daerah rawan bencana	%	30	30	60	75	100
	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten / Kota	%	30	30	60	75	100
	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100

6. Sosial.

Urusan sosial memiliki kewenangan terkait dengan pemberdayaan sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kota; Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kota; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan

keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kota); Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal); Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum); Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota; Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan); Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota;

Indikator yang kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan urusan sosial adalah besarnya cakupan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan terhadap PPKS baik itu melalui pemberdayaan, pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pada pemenuhan standar pelayanan. Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya pada tahun 2020 mencapai 20%, memiliki kinerja yang sama jika dilihat dengan kondisi ditahun 2019. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2018, kondisi ditahun 2020 mengalami kenaikan signifikan sampai dengan 14%. Dilihat berdasarkan pembinaan terhadap PPKS, kinerja selama dua tahun terakhir (2019-2020) terbilang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator prosentase pembinaan anak terlantar yang tertangani sebesar 10% dan jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani hanya sebesar 10 anak.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan sosial juga menunjukkan masih rendah. Dalam lima tahun terkahir tidak ada peningkatan yang ditunjukkan dengan persentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang tetap berada pada capaian 7%. Kinerja termasuk kategori tinggi hanya pada persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani dengan kinerja mencapai 100%.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun

			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya yang tertangani	%/tahun	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak terlantar yang dibina	%/tahun	15	10	10	10	10
3	Jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	Anak	10	10	10	10	10
4	Persentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%/tahun	7	7	7	7	7
5	Persentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	100	100	100	100	100
6	Persentase PPKS di Luar Panti yang tertangani	%	100	20	20	20	20
7	Persentase PSKS Lembaga dan PSKS Non Lembaga yang bersertifikat dan terakreditasi	%	92	100	100	73	100
8	Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	%	7	7	7	7	9
9	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	NA	NA	NA	0,03	NA
10	Persentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	100
11	Persentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
12	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100
13	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
14	Persentase Penduduk miskin yang mendapat santunan kematian	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021

Urusan sosial merupakan salah satu dari 6 urusan pembangunan yang termasuk dalam kategori urusan wajib dengan pelayanan dasar. Dimana ke enam urusan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah urusan yang harus memenuhi standar pelayanan minimal kepada masyarakat.

Urusan sosial di tingkat Kabupaten/Kota dalam peraturan tersebut diamanatkan untuk menyediakan pelayanan berupa:

1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Capaian kinerja SPM urusan Sosial di Kabupaten Kendal dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,95	10	10	10	10
2	Persentase Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,41	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	1,62	10	10	10	10
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0,16	10	10	10	10
5	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2021

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga

ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam urusan ketenagakerjaan terutama diarahkan pada pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja ditujukan untuk meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi tenaga kerja agar dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di dunia industri melalui peningkatan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Melalui pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemampuan manajemen di Kabupaten Kendal. Tenaga kerja yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan diharapkan sudah siap diterima di pasar kerja sesuai dengan kompetensinya.

Penempatan pencari kerja menunjukkan kinerja yang semakin baik, tahun 2016 sebesar 73,77% meningkat menjadi 75% pada tahun 2018. Namun ditahun 2019, pencari kerja yang ditempatkan tidak mengalami kenaikan tetap diangka 75%, dan bahkan ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 43%. Peningkatan kapasitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan. Kinerja peningkatan kapasitas tenaga kerja yang ditunjukkan dengan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat ditahun 2019 keduanya mengalami kenaikan, namun ditahun 2020 yang mengalami kenaikan hanya pada persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat. Sementara itu, tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan trennya ditahun 2019-2020 menurun menjadi 74% dibandingkan tahun 2018 sebesar 76%.

Sementara itu, pembinaan terhadap lembaga pelatihan trennya membaik sampai dengan tahun 2019. Tercatat Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina pada tahun 2018 mencapai sebesar 62%, meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 63%, namun mengalami penurunan menjadi 45% ditahun 2020. Begitu pula pada jumlah lembaga pelatihan kerja yang berizin yang semula ditahun 2019 sebanyak 64 lembaga naik menjadi 70 lembaga ditahun 2020.

Tren membaik ditunjukkan oleh jumlah tenaga kerja yang menjadi

peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami peningkatan dari 30.017 orang pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 35.110 orang, dan kembali mengalami kenaikkan menjadi 35.625 orang pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan jika kesadaran pemilik perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya semakin baik.

Berlakunya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menarik beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Kewenangan urusan tenaga kerja yang ditarik ke pemerintah provinsi yaitu 1) Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja; 2) Persentase Pemeriksaan Perusahaan dan 3) Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan, oleh sebab itu capaian tahun 2017 dan 2018 tidak bisa dihitung (0).

Tabel 2.23
Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	73,77	74	75	75	43
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	90	90	93	91,42
3	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	91	83,33	92,34	93	94
4	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	70,31	80	76	74	74
5	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	%	59,38	80	62	63	45
6	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berizin	LPK	32	42	54	64	70
7	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	96,36	82,14	95	83	53
8	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	orang	22.000	27.961	28.914	35.110	35.625
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	NA	66,49	66,10	67,71	70,50
10	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	73,77	74	75	75	43
11	Persentase kegiatan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	2	2	2	2	2,1
12	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	22	22	22	22	19
13	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	75373,1	77104,7	81012,9	81261,1	86760,7
14	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar	%	51,10	64,32	74	54	51,07

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Kerja dalam wilayah						
15	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	60	65	70	75	50

Sumberdata : Dinas Tenaga Kerja Kab Kendal, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Indikator Agregat pembangunan pemberdayaan dan perlindungan anak adalah Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Pada pembahasan diatas terlihat bahwa IPG dan IDG Kabupaten Kendal belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan belum responsif gender. Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang mengawal perencanaan yang responsif gender hanya 60,00% yang aktif.

Kekerasan perempuan dan anak masih ditemukan di Kabupaten Kendal. Sampai dengan 2020 KDRT perempuan dan anak sebesar 0,03%. Perwujudan Kabupaten Layak anak dapat dilaksanakan dengan Desa Layak Anak. Sampai dengan tahun 2020 Desa layak anak yang terbentuk baru mencapai 8%.

Tabel 2.24
Capaian Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	36,58	37,69	50,80	64,01	60,00
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	50,97	47,54	52,9	49,91	22,22
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,72	22,22	22,22	22,22
4.	Rasio KDRT perempuan dan anak	%	0,04	0,02	0,02	0,04	0,03
5.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO	/ 100.000 perempuan	7,00	6,69	4,07	10,59	4,96
6.	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	3,85	6	7,34	9,19	8
7.	Cakupan Pengelola Industri Rumahan (IR) yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	%	22,38	26,66	34,42	35,96	33
8.	Jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak yang	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	tertangani						
9.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	75	50	41	53	33
10.	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100

Sumber : DP2KBP2PA Kabupaten Kendal, 2021

3. Pangan.

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama peningkatan ketersediaan, akses pangan dan pemanafaatan pangan bagi peningkatan sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh. Peningkatan ketahanan pangan diselenggarakan berdasarkan Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) dan mengacu pula pada RAD PG Provinsi Jawa Tengah dan RAD PG Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan daerah surplus beras, dagung ayam dan telur untuk wilayah Jawa Tengah bagian Utara.

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan adalah memenuhi kebutuhan pangan beragam, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi bagi secara merata dan berkelanjutan sesuai arahan kebijakan pangan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Ketahanan pangan ditingkatkan dengan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik, yaitu pada tahun 2020 mencapai sebesar 87,2. Rata-rata tingkat konsumsi pangan pokok masih tinggi dalam konsumsi karbohidrat terutama konsumsi beras (dengan rata-rata 85 -95 Kg/ per kapita/ tahun) dan terigu. Sedangkan rata-rata konsumsi umbi-umbian, protein hewani, sayur–sayuran, buah–buahan masih rendah.

Penanganan daerah rawan pangan semakin baik dari tahun ke tahun, tahun 2016 sebesar 42,8 % meningkat menjadi sebesar 52,72 % pada tahun 2020, diharapkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat rentan/miskin menjadi lebih baik. Gambaran capaian kinerja pengembangan dan pemenuhan pangan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kapita (% AKE)	158	173,5	187,14	195,25	187,3
2	Ketersediaan protein perkapita	Kkal/kapita (% AKE)	117,11	114	131,79	127,29	131,9
3	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	125	138	113	98
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	70	91,06	96,91	96,3	97,92
5	Penanganan daerah rawan pangan	%	42,8	42,8	51,6	52,52	52,72
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	82,1	84,2	84,8	86,8	87,2
7	Persentase pangan yang aman dikonsumsi asal tumbuhan	%	83,5	80	83,33	90	90
8	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	%	27,42	49,5	49,7	48	31,5
9	Prosentase lumbung pangan aktif	%	10	10	10	10	10
10	Ketersediaan bahan pokok utama (beras)	%	156,95	144,08	140,31	138,06	125,72

Sumberdata : Dinas Pertanian dan Pangan Kab Kendal, 2021

4. Pertanahan.

Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 8 sub urusan yaitu: 1) Izin lokasi; 2) Sengketa Tanah Garapan; 3) GantiKerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan; 4) Subyek dan Obyek RedistribusiTanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee;* 5)Tanah Ulayat; 6) Tanah Kosong; 7) Izin Membuka Tanah dan 8) Penggunaan Tanah. Capaian indikator persentase bidang tanah bersertifikat milik Pemda tahun 2016 sebesar 39,41 % meningkat menjadi 42,01 % pada tahun 2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase bidang tanah bersertifikat (milik Pemda)	%	39,41	39,41	39,41	40,89	42,01

Sumberdata : Dinas PUPR dan Badan Keuangan Daerah Kab Kendal, 2021

5. Lingkungan Hidup.

Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 6 sub urusan yaitu: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 17 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Persentase emisi gas rumah kaca; 3) Indeks kualitas air; 4) Lahan kritis yang tertangani; 5) Luas RTHK perkotaan publik; 6) Rasio ruang terbuka hijau; 7) Jumlah izin pengelolaan limbah B3; 8) Persentase ketaatan usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan; 9) Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti; 10) Persentase sampah yang tertangani; 11) Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA; 12) Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata; 13) Persentase penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan; 14) Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses; 15) jumlah sumber mata air yang tertangani; 16) Luas Lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani; 17) Persentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau dan jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda.

Capaian indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukan trend peningkatan, dari 49,62 di tahun 2016 menjadi 66,24, kemudian naik lagi di tahun 2020 menjadi 66,37, hal ini menggambarkan status lingkungan yang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dimana semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan semakin baik kondisi lingkungannya. Pembobotan nilai IKLH adalah sebagai berikut : Sangat Baik (skornya 90-100), Baik (70-89,9), Sedang (50-69,9), Buruk (25-49,9), Sangat Buruk (0-24,9).

Dalam rangka penyelelamatan lingkungan hidup Kabupaten Kendal melakukan penanganan luas lahan kritis dan sumber mata air secara bertahap pada titik-titik kritis yang perlu segera mendapatkan penanganan, lahan kritis yang tertangani selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, dari 6 % di tahun 2016 menjadi 18,20% di tahun 2020. Indikator luas Ruang Terbuka Hijau Kota (publik) capaian 2016 sebesar 14,94% meningkat menjadi 17,73% pada Tahun 2020.

Sementara itu untuk indikator persentase timbulan sampah yang tertangani menunjukan trend peningkatan, dari 8,73% pada Tahun 2016

menjadi 20,5 % pada Tahun 2020. Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA juga meningkat dari 12 kecamatan di tahun 2016 menjadi 17 kecamatan di tahun 2020. Indikator jumlah lokasi taman dan RTH perkotaan yang tertata selama kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan dari 25 RTH di tahun 2016 menjadi 30 RTH di tahun 2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skor	49,62	63,49	66,29	66,24	66,37
2	Persentase emisi gas rumah kaca						
	a. Energi dan listrik	%	14,1	41,83	83,71	38,55	38,55
	b. *Industrial Processes and Production Use* (IPPU)	%	1,6	2,98	1,03	3,92	3,92
	c. *Agroforestry and Other Land Use* (AFOLU)	%	78,44	36,73	8,52	32,13	32,13
	d. Limbah	%	6,47	18,43	6,73	25,39	25,39
3	Indeks kualitas air;	skor	NA	58,57	66,70	50	46,7
4	Lahan kritis yang tertangani;	%	6	9,80	14,47	24	18,20
5	Luas RTHK perkotaan publik;	Ha	7,587	8,646	8,689	8,689	9,004
6	Rasio ruang terbuka hijau	%	14,94	17,02	17,11	17,11	17,73
7	Jumlah izin pengelolaan limbah B3	izin	12	13	15	29	30
8	Persentase ketaatan usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan	%	NA	NA	25	59	58
9	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti	%	NA	NA	100	100	100
10	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	8,73	9,55	10,71	21,26	20,5
11	Jumlah daerah layanan pengangkutan ke TPA	Desa/ Kel	49	55	64	82	90
12	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	RTH	25	26	27	27	30
13	Persentase penambahan luasan ruang publik yang dimanfaatkan	%	2	6	6	6	6
14	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jenis	2	2	3	12	1
15	Jumlah sumber mata air yang tertangani	lokasi	NA	1	1	2	2

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
16	Luas Lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani	ha	10	8	14	24	18,2
17	Persentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%	20	20	20	20	20
18	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda	jumlah	7	7	7	7	7
19	Cakupan pemantauan kualitas air	%	23,33	53,33	35	50	53,33
20	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	NA	NA	NA	25	50
23	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	NA	25	59	58
24	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	orang	1	10	10	15	6
25	Persentase masyarakat yang dibina	%	25	30	40	62	28
28	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	%	14,94	17,02	17,11	17,11	17,73
29	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	12.264	13.441	15.102	30.681	30.435
30	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pengelolahan sampah melalui 3R	%	3,04	3,33	3,62	3,91	4,20

Sumberdata : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal, 2021

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal meliputi sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Capaian indikator kinerja untuk bidang administrasi kependudukan dan pecatatan sipil menunjukkan untuk indikator kinerja Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun), Persentase Penerbitan akta kematian, Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan, Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date, dan ketersediaan Profil Kependudukan

Kabupaten menunjukkan capaian 100%. Sedangkan untuk persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2020 baru mencapai 33,10% dan Persentase Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk di tahun 2020 baru mencapai 69,36%. Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020 dapat dilhat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Kinerja Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk (kepemilikan KK)	100	100	100	100	100
2	Persentase kepemilikan KTP elektronik	98,91	90,45	96,58	99,69	99,79
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	NA	NA	15,36	15,36	33,09
4	Persentase Kepemilikan akta kelahiran seluruh penduduk	62,79	67,51	67,21	69,36	69,36
5	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	90,86	91,14	91,35	94,80	95,67
6	Persentase Penerbitan akta kematian	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	5,01	10,5	11,46	12	12,98
8	Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date	100	100	100	100	100
9	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan	NA	NA	2 OPD	2 OPD	2 OPD
10	Profil Kependudukan Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Kepemilikan akta cerai	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07

Sumberdata : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kendal, 2020

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Urusan kewenangan pemberdayaan masyarakat dan desa yang diselenggarakan Kabupaten kenal adalah penataan desa, fasilitasi kerjasama antara desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan pembinaan lembaga adat dan pembinaan adat istiadat. Berdasarkan data 266 desa maka diketahui pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selama tahun 2016–2020 menunjukkan kecenderungan peningkatan cukup baik, terutama tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Kendal sejak tahun 2018. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa dari alokasi dana desa (ADD), meningkatkan keberdayaan

masyarakat dan pembinaan PKK serta Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) secara swadaya.

Hal ini ditambahkan lagi dengan semakin membaiknya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Lembaga keuangan mikro dan berswadaya masyarakat mengalami peningkatan. Tingkat keberdayaan desa terus dikembangkan agar aparatur desa memiliki kapasitas dan kompetensi baik. Sampai dengan tahun 2020 aparatur desa yang telah menjalani Bimbingan Teknis sebanyak 822 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sudah dilaksanakan. Pemberdayaan ekonomi desa dilaksanakan dengan meningkatkan pendirian BUMDes sesuai dengan potensi desa, namun masih fluktuatif, terutama pada tahun 2018 meningkat meningkat sebanyak 108 desa kemudian menurun menjadi 50 desa pada tahun 2020 maka peningkatan unit usaha perlu mendapatkan perhatian. Persentase Lembaga Keuangan Pedesaan (LKP) aktif menunjukkan peningkatan, tahun 2016 LKP aktif sebesar 28% meningkat menjadi 53,5% pada tahun 2020. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah desa tertinggal	Desa	0	85	0	0	0
2.	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	30	97	130	140	180
3.	Desa yang mendapatkan program TMMD	Desa	2	3	48	3	3
4.	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti Bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	266	266	1.049	400	822
5.	Jumlah data dan informasi	Dokumen	266	266	266	266	266
6.	Persentase Lembaga Keuangan Pedesaan aktif	%	28	29	53	53	53,5
7.	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	Desa	266	266	266	266	266
8	Tingkat Kemandirian Desa	Desa	0	8	11	11	12
9	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	0	3	4,13	4,13	4,51
10	Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	NA	NA	2	2	2
11	Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	%	NA	34	60	63	66
12	Persentase jumlah desa dengan BUMDes	%	12	31,2	40,6	52,6	67,6

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	50	55	58	60	65
14	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (TP PKK Kecamatan)	Kelompok	20	20	20	20	20
15	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
16	Jumlah Posyandu aktif	%	1.197	1.273	1.320	1.320	1.320
17	Persentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor)	%	50	55	58	61	65
18	Persentase Desa yang memiliki Kerjasama	%	NA	NA	NA	NA	9,7
19	Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES	%	100	100	100	100	100
20	% kelembagaan desa yang dibina {RT,RW,PKK,Posyandu,karangtaruna}	%	100	100	100	100	100
21	Persentase Desa Mandiri	%	0	3,01	3,01	4,13	4,51
22	% BUMDES Strata Maju	%	NA	NA	NA	NA	0,64
23	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	kawasan	NA	NA	NA	1	2

Sumberdata : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kendal, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan kewenangan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kendal adalah pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Upaya pengendalian penduduk, KB dan KS erat kaiannya dengan upaya mewujudkan keseimbangan antara penduduk yang meninggal, penduduk yang lahir, penduduk yang masuk (migrasi in) dan penduduk yang keluar (migrasi out) berdasarkan amanat pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga.

Pengendalian penduduk yang dilaksanakan oleh urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah pengendalian penduduk yang bersumber dari kelahiran. Total Fertility Rate adalah indikator untuk melihat tingkat kemampuan perempuan melahirkan dalam kurun waktu di sebuah wilayah. TFR Kabupaten Kendal masih diatas 2 hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perempuan hamil lebih dari 2 kali.

Pengendalian penduduk dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana. Indikator keluarga berencana sampai dengan tahun 2020 sengan caoaian cukup baik. Rasio akseptor KB baru sampai dengan 2020 telah mencapai sebesar 84,57%, Cakupan peserta KB aktif baru mencapai sebesar 70,26% sampai dengan tahun 2020 dan masih perlu mendapat perhatian adalah kesertaan KB bagi laki-laki belum optimal (tahun 2020

mencapai sebesar 1,38%, capaian ini masih dibawah target nasional sebesar 3%.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki istri di bawah usia 20 tahun angkanya cukup bagus sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,15%. Keberhasilan ini dikarenakan semakin efektifnya peran Bina Keluarga Remaja (BKR), PIK KRR dalam memberikan edukasi dalam upaya mencegah perkawinan usia dini dan kesehatan reproduksi di kalangan ramaja dan Generasi Z. Capaian kinerja urusan Dalduk dan KB, dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 2.30
Capaian Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio akseptor KB (baru)	%	100	78,42	70	77,91	84,57
2.	Cakupan peserta KB aktif (m-CPR)	%	80,9	81,1	69,45	69,35	70,26
3.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	79,23	79,25	79,12	79,28	79,1
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,45	1,45	0,42	0,98	1,15
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	11,89	9,87	11,83	18,34	15,77
6.	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,28	1,05	1,16	1,16	1,38
7.	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	62,07	64,83	64,83	67,13	69,23
8.	Persentase PIKR aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	26	28,89	33,3	26,6	29,3
9.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	87,81	86,8	87,24	84,1	85,1
10.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11.	Persentase penurunan usia pernikahan dini	%	NA	NA	NA	NA	NA
12.	Cakupan PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	21	22	24	26,6	28,8
13.	Persentase kelompok	%	78,9	80	80	80	80

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)						

Sumberdata : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Kendal, 2021

9. Perhubungan.

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 4 sub urusan yaitu: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan dan 4) perkeretaapian. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 21 indikator yang telah ditetapkan yaitu: 1) Jumlah rute lintas penyeberangan; 2) Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir; 3) Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik; 4) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji; 5) Jumlah uji KIR angkutan umum; 6) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; 7) Jumlah Trayek yang terlayani; 8) Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek; 9) Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas; 10) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/ Kota; 11) Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar; 12) Persentase Layanan PJU Berbasis Smart City; 13) Indek konektivitas wilayah; 14) Persentase layanan angkutan darat; 15) Rasio izin trayek; 16) Persentase terminal C sesuai standar; 17) Persentase pemasangan rambu-rambu; 18) Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik; 19) Jumlah orang melalui terminal per tahun 20) Jumlah pelabuhan laut dan 21) Persentase pelabuhan sesuai standard.

Capaian indikator jumlah rute lalu lintas penyebarangan mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020, dari 2 buah di tahun 2016 menjadi 3 buah di tahun 2020. Jumlah pelabuhan, terminal dan taman juga meningkat selama kurun waktu 2016-2020, dari 5 unit di tahun 2016 menjadi 6 unit di tahun 2020. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik menunjukan peningkatan dari 554 unit tahun 2016 menjadi 910 unit tahun 2020. Terminal angkutan penumpang umum dalam trayek selama kurun waktu 2016-2020 tetap 4 unit.

Untuk capaian indikator jumlah trayek yang terlayani meningkat dari 60 trayek di tahun 2016 menjadi 62 trayek di tahun 2018, meskipun ada peningkatan jumlah trayek namun masih banyak kecamatan maupun desa yang belum dilalui sarana transportasi umum. Ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas juga menunjukan peningkatan selama 5 tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan rambu-rambu lalu lintas selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 667 unit di tahun 2016 menjadi 1.217 unit di tahun 2020. Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrill*) juga meningkat dari 2.550 unit tahun 2016 menjadi 6.750 unit di tahun 2020.

Capaian indek konektivitas Kabupaten Kendal selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 0,74 pada tahun 2012 menjadi 0,76 pada tahun 2020. Indek konektivitas merupakan gambaran kondisi jaringan jalan yang saling terkoneksi di suatu kawasan, hal tersebut berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang dan jasa karena prasarana jalan sangat erat dalam memperlancar mobilitas antar wilayah. Capaian kinerja persentase layanan angkutan darat selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 70 % pada tahun 2016 menjadi 72 % pada tahun 2020, begitu juga dengan rasio izin trayek capaiannya mengalami peningkatan dari 70 % pada tahun 2016 menjadi 75 % pada tahun 2020.

Indikator persentase terminal C sesuai standart selama tahun 2016-2020 bersifat tetap sebesar 75 %. Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik, capaiannya juga bersifat tetap sebesar 60 % dari tahun 2016-2020.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rute lintas penyeberangan	Buah	2	2	2	3	3
2	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	Unit	5	5	6	6	6
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Unit	554	608	670	780	910

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	Unit	1	1	1	1	1
5	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	12.148	12.263	12.930	12.036	8.133
6	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	4	4	4	4	4
7	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	60	60	62	62	62
8	Persentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	53,33	63	66	78	80
10	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) Kabupaten/ Kota.	unit	3.217	5.266	5.620	6.759	7.967
11	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	Unit	11	11	11	11	11
12	Persentase Layanan PJU	%	19	42	52	87	101
13	Rasio konektivitas wilayah	angka	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76
14	Persentase layanan angkutan darat	%	70	70	70	72	72
15	Rasio izin trayek		70	70	70	73	75
16	Persentase terminal C sesuai standar	%	75	75	75	75	75
18	Persentase sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	60	60	60	60	60
19	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	5.403.675	2.807.546	1.935.204	1.441.478	920.744
20	Jumlah pelabuhan laut	unit	1	1	1	1	1
21	Persentase sarana prasarana pelabuhan	%	55	60	65	70	75

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	sesuai standard						

Sumberdata : Dinas Perhubungan Kab Kendal, 2021

10. Komunikasi dan Informatika.

Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdiri atas 2 sub urusan yaitu: 1) Informasi dan Komunikasi Publik dan 2) Aplikasi Informatika. Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 13 indikator yang telah ditetapkan yaitu: 1) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP); 2) Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah; 3) Indeks SPBE; 4) Indeks SPBE; 5) Indeks Domain Tata kelola SPBE; 6) Indeks Domain Layanan SPBE; 7) Jumlah Hotspot yang tersedia; 8) Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online; 9) Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda; 10) Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi; 11) Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi; 12) Persentase kerja sama informasi dengan mass media; 13) Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi.

Capaian indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020 sebesar 88,8. Capaian Indeks SPBE tahun 2020 sebesar 3,76, dan komposit indeks SPBE seperti Indeks domain kebijakan SPBE sebesar 3,41; Indeks domain tata kelola SPBE sebesar 3,43; Indeks domain layanan SPBE sebesar 4,03. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, jumlah hotspot yang tersedia bertambah setiap tahunnya dari 16 titik di tahun 2016 menjadi 85 titik di tahun 2020. Dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal, masih terdapat 8 Kecamatan yang beberapa desanya memiliki wilayah yang tidak dapat mengakses Mobile Broadband 4G, bahkan ada yang masih blankspot). Indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen pemerintah daerah, sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 11 SIM di tahun 2016 menjadi 147 SIM di tahun 2020.

Capain indikator yang sudah mencapai 100 % selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah: 1) Indikator persentase pemanfaatan fasilitas

protokoler dan dokumentasi pada kegiatan pimpinan daerah/ tamu Pemda; 2) persentase kerja sama informasi dengan mass media dan 3) persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi.

Selengkapnya perkembangan capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Skor	NA	NA	NA	15,38	88,8
2	Persentase Masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NA	51,48
3	Indeks SPBE	Skor	NA	NA	2,94	3,76	3,76
4	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Skor	NA	NA	3,76	3,41	3,41
5	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Skor	NA	NA	3	3,43	3,43
6	Indeks Domain Layanan SPBE	Skor	NA	NA	3,12	4,03	4,03
7	Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	14	32	60	74	85
8	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online	SIM	11	17	52	102	150
9	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	%	100	100	100	100	100
10	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	SKPD	12	38	54	60	66
11	Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	%	59	59	59	59	59
12	Persentase kerja sama informasi dengan mass media	%	100	100	100	100	100
13	Persentase optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
14	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	Skore	NA	NA	NA	NA	NA
15	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	35,21	35,21	39,90	39,90	41,31
16	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	NA	NA	14,12	19,77

Sumberdata : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kendal, 2021

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM. Pertama, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perizinian meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Perkembangan wirausaha baru mikro di Kabupaten Kendal sampai pada tahun 2020 mencapai 32.207 unit. Jika dilihat capainnya menunjukkan peningkatan sebesar 125 unit dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 32.082 unit. Dukungan terhadap manajemen UKM setiap tahun dilaksanakan di 5 kecamatan sejak tahun 2016. Sementara itu jumlah UKM yang berkembang dari mikro ke kecil pada tahun 2020 mencapai 1.355 unit, trennya menurun dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Untuk kondisi koperasi kategori aktif, ditahun 2020 mencapai sebesar 78%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 71,9%. Sedangkan persentase koperasi yang dibina tahun 2019 sebesar 57,83% mengalami penurunan menjadi 50% pada tahun 2020.

Kinerja urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Kendal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha baru mikro	unit	33.216	33.400	31.872	32.082	32.207
2	Cakupan dukungan manajemen UMKM	Kec	5	5	5	20	20
3	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.285	1.353	1.528	1.335	1.355
4	Persentase Koperasi aktif	%	71,9	77,26	61,34	77,45	78,00
5	Persentase pertumbuhan UKM	%	6,5	1	5	7	5,2
6	Persentase UKM yang telah mengakses kredit usaha	%	9,9	0,6	0,6	1	1,2
7	Persentase usaha mikro yang berizin	%	10	4	3	5	7,3
8	Jumlah usaha mikro yang dibina	unit	230	220	370	680	1511
9	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	31	29	37	37,15	31,62
10	Persentase sumberdaya manusia koperasi yang terampil	%	37,47	38,46	41,28	41,58	42,41
11	Persentase koperasi yang dibina	%	46,84	52,04	53,89	57,83	50
12	Persentase pertumbuhan omset koperasi yang dibina	%	60,41	62,13	63,08	57,83	50
13	persentasi koperasi/KSP yang diawasi	%	2	4	6	8,2	8,54
14	Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai	%	10	10	10	35,04	17,09
15	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	%	10	15	20	25	25,7
16	Persentase pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	%	10	15	20	25	25,7
17	% usaha mikro yang diberdayakan	%	2	2,5	3	8,5	4,42
18	% Usaha mikro yang dikembangkan	%	2	2,5	3	4,0	4,80

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
19	Persentase koperasi sehat	%	30	40	50	60,04	70,08
20	Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan	%	10	15	17	0	3
21	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	%	10	15	18	25	25,7

Sumberdata : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Kendal, 2021

12. Penanaman Modal.

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Terkait jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kabupaten Kendal, dilihat dari sisi tren memang fluktuatif, tahun 2017 mampu mencapai 354 investor, akan tetapi tahun 2018 turun menjadi 149 investor, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 903 investor. Peningkatan investor juga diikuti dengan nilai investasi yang masuk pada tahun 2020 sebesar 2,877 trilyun rupiah, maka menunjukkan bahwa nilai investasi setiap investor cukup signifikan.

Untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan berusaha di Kabupaten Kendal, salah satu upaya yang dilakukan adalah mempercepat proses perijinan. Standar waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus perijinan usaha di Kabupaten Kendal adalah 7 hari kerja.

Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.34
Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	5	5	5	13	8
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Investor	173	354	149	561	903
3	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	dokumen	0	1	0	0	1
4	Kecepatan pelayanan perizinan	hari	7	7	7	7	7
5	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Triliyun)	Trilyun	1	4,1	1,331	8,341	3,146

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
6	Prosentase calon investor yang memiliki kepeminatan investasi	%	80	85	80	80	90
7	Prosentase permohonan perizinan dan Non perizinan yang memenuhi ketentuan	%	89	146	51	166	235
8	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,02	80,00	80,04	80,77	83,33
9	Prosentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola sisten informasi penanaman modal	%	80	90	90	95	98
10	Prosentase investor/pelaku usaha berijin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal	%	70	80	75	80	85

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kendal Tahun 2021

13. Kepemudaan dan Olah Raga.

Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan pemuda dan olah raga dapat dilihat dari indikator Indeks pembangunan pemuda daerah, Persentase OPD yang melakukan olahraga rutin setiap minggu, Persentase atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regioal/nasional/internasional dan persentase pembinaan organisasi kepramukaan daerah. Indikator kedepan terkait dengan kepemudaan dan olahraga Indeks Pembangunan Pemuda Daerah. Adapun capaian untuk indikator tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.35
Capaian Pembangunan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kendal

Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	orang	NA	100	332	662	520
2	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	57	145	211	268	21
3	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	orang	60	61	124	86	17
4	Organisasi Kepemudaan yang dibina	Buah	15	15	21	25	25
5	Jumlah wirausaha muda pemula	orang	200	25	122	135	100
6	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	60	100	110	118	120
7	Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	7	7	8	9	9
8	Organisasi Olahraga	Cabor	29	32	37	37	37
9	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Na	Na	Na	15,11	15,11
10	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11	0,19	0,31	0,43	0,44
11	Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang	%	100	100	100	100	100
12	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	%	35,48	76,76	76,47	62,86	37,21

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, 2021

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, jumlah pemuda yang dilatih Pendidikan karakter mengalami angka fluktuatif yaitu pada tahun 2016 sebanyak 100 orang meningkat menjadi 662 orang pada tahun 2019 kemudian turun mejadi 460 orang pada tahun 2020. Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional di Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 57 orang pada tahun 2016 turun menjadi 11 orang pada tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada jumlah wirausaha muda pemula menjadi 100 orang pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19.

14. Statistik.

Dalam UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa data

statistik yang handal, efektif dan efisien diperlukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Oleh sebab itu ketersediaan data statistik yang valid, akurat dan tepat sangat penting artinya dalam berbagai tahapan pembangunan nasional, baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi penyelenggaraan. Selain itu data statistik juga sangat bermanfaat bagi sektor lain misal ilmu pengetahuan, penelitian dan perkembangan dunia usaha.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan statistik sebagaimana disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 UU No. 16 tahun 1997 tentang statistik menyebutkan, berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas: (1)statistik dasar; (2)statistik sektoral dan; (3) statistik khusus.

Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Sedangkan statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kendal setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Kabupaten Kendal Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Survei Angkatan Kerja Daerah (Sakerda), dan Indeks Harga Konsumen serta Inflasi danPenyediaan data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Selain publikasi oleh BPS, data statistik yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, evaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengambilan keputusan disediakan oleh Bappeda sebagai instansi yang

memiliki tugas pokok perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Untuk kebutuhan perencanaan Bappeda memiliki data profil pembangunan Kabupaten.

Selain itu juga masing-masing SKPD yang mengampu urusan-urusan strategis seperti Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan data profil masing-masing urusan yaitu profil pendidikan dan profil kesehatan.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

NO	Indiktor	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan data satistik ekonomi kreatif	Ada/ Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan data statistik pariwisata	Ada/ Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
3	Ketersediaan data statistik e-commerce	Ada/ Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Buku Kendal Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku PDRB Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	% ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal	%	NA	NA	NA	95,25	95,42
7	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	%	NA	NA	NA	1,75	3,51

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, 2021

15. Persandian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa persandian merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayananan Dasar dan fungsi persandian adalah sebagai pengaman informasi.

Saat ini Kabupaten Kendal memiliki 4 (empat) orang personil yang kompeten dalam bidang persandian. Idealnya pada setiap PD mempunyai 1 (satu) orang yang kompeten dalam persandian, sehingga pengelolaan persandian di Kabupaten Kendal bisa tertangani secara optimal.

Pelaksanaan persandian bertujuan untuk mengamankan informasi, namun sarana dan prasarana persandian yang diperlukan belum mencukupi. Capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37

Capaian Pembangunan Persandian Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks KAMI (Skore Indeks Kematangan Keamanan Informasi)	skor	Na	Na	Na	Na	Na
2	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	Na	89,63	104,1	100	100
3	% sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	%	Na	NA	Na	NA	22,84

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, 2021

16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan bagi Kabupaten Kendal meliputi 5 sub urusan yaitu : kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah lokal, cagar budaya dan pengelolaan museum tingkat kabupaten. Cagar budaya merupakan warisan budaya perlu dijaga dan dilestarikan sebagai jatidiri bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya merupakan usaha terus menerus yang bertujuan melstarikan dan mempertahankan nilai-nilai dan keberadaan cagar budaya melalui upaya pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan serta penyebarluasan kepada generasi muda dan masyarakat luas.

Kesenian dan warisan budaya dalam masyarakat baik yang bersifat benda maupun budaya tak benda harus dilestarikan menjadi jati diri masyarakat dan mempromosikan kepada masyarakat luas dalam wisata budaya. Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kendal ditunjukkan dengan indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Cakupan cagar budaya yang dilestarikan.

Cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 1 cagar budaya pada tahun 2020. Budaya lokal yang dilestarikan antara lain dilakukan Promosi seni dan budaya melalui kegiatan festival yang dilakukan dengan persentase sebesar 75 % pada tahun 2020 dan banyaknya pembinaan pelaku seni budaya sebanyak 975 kelompok dan grup kesenian yang terdaftar sebanyak 676 kelompok. Perkembangan pembangunan kebudayaan dengan upaya memperkenalkan beragam seni dan budaya dari Kabupaten Kendal, diketahui sebagai berikut.

Tabel 2.38
Capaian Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	NA	NA	1	1	1
2	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	50	NA	50	75	75
3	Persentase misi budaya yang dilestarikan	%	75	NA	84,62	85	85
4	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	kelompok	550	NA	575	975	975
5	Jumlah grup kesenian	kelompok	550	NA	644	676	676
6	Cakupan Kajian Seni	%	60	NA	73,33	75	75
7	Cakupan Fasilitasi Seni	%	50	NA	57,14	70	70
8	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	50	NA	77,43	85	85
9	Cakupan Organisasi seni	%	80	NA	60	80	80
10	Cakupan Gelar Seni dan budaya	%	80	NA	84	80	90
11	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	%	0	0	0	0	0
12	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	0	0	0	0	0
13	Jumlah tim ahli cagar budaya	orang	NA	0	0	0	0
14	Persentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	%	NA	NA	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, 2021

17. Perpustakaan.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Kendal meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan untuk indikator tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan peningkatan serta persentase perpustakaan dalam kondisi baik mencapai 65% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 belum ada pustakawan yang terdpat di Kabupaten Kendal. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kendal Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	28.952	31.114	35.154	38.071	38.071
2	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	18.195	16.440	18.340	20.315	3.891
3	Persentase perpustakaan dalam kondisi baik	%	na	57	60	65	65
4	Persentase perpustakaan aktif	%	52	54	56	58	60
5	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	40,37
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	NA	NA	NA	7.7

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, 2021

18. Kearsipan.

Urusan kearsipan meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. Capaian kinerja kearsipan selama lima tahun terakhir menunjukkan pengelolaan arsip dinamis dan statis menurun dari tahun 2016 sebanyak 7.600 berkas yang dikelola menjadi 2.990 berkas di tahun 2020. Sedangkan untuk prosentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara menunjukkan peningkatan dari 3,09% di tahun 2016 menjadi 4,54% di tahun 2018 dan tahun 2020 menurun menjadi 2,73%. Jumlah arsip yang dialihmediakan dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan fluktuasi dari 600 lembar menjadi 1.100 lembar pada tahun 2019 dan menurun tahun 2020 menjadi sebesar 500 lembar. Gambaran capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40
Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kendal Tahun 2016– 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	1.600	1.600	1.700	2.137	2.990
2	Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	NA	0,2	4,51	6,48	2,73
3	Jumlah arsip yang dialihmediakan	lembar	NA	600	700	1100	500
4	Jumlah Arsiparis/Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	NA	8	244	298	314
6	Cakupan sarana prasarana arsip yang terpelihara	%	NA	NA	26,19	26,19	26,19
7	Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan	%	NA	NA	98,24	98,24	98,24
8	Persentase arsip yang dikelola secara baku	%	NA	NA	NA	NA	26

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase arsip statis yang dialihmediakan	%	NA	8,12	9,47	14,89	6,76
10	Persentase izin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan	%	NA	NA	NA	NA	50
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	48,22	75	54,42	100	75,75
12	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	16,7	16,7	83.33	91.66

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal, 2021

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten Kendal pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kinerja perikanan budidaya ditunjukkan dengan produksi perikanan budidaya yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dari sebanyak 23.116.793 kg pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 22.509.480 kg pada tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan kualitas sistem budidaya telah dilaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dengan cakupan per tahun antara 10-20 kelompok yang diberdayakan. Kinerja produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yang baik, dari tahun 2016 sebesar 3.086.445 Kg meningkat menjadi sebesar 3.801.077 kg pada tahun 2020. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap, pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan pembinaan dengan fasilitasi bagi kelompok nelayan dengan cakupan per tahun antara 10 – 20 kelompok nelayan.

Rata-rata tingkat konsumsi ikan masyarakat menunjukkan peningkatan dari sebesar 19,37 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi

sebanyak 30,92 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Hal ini masih lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (2020) sebesar 33 Kg/ per kapota/ tahun. Upaya peningkatan konsumsi ikan dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan nilai gizi ikan dan daya beli masyarakat serta "budaya makan ikan" belum menyebar ke selauruh lapisan masyarakat. Secara rinci Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi perikanan budidaya	kg	23.116.793	24.142.548	25.493.410	26.547.940	22.509.480
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	3.086.445	3.326.763	3.152.489	3.543.970	3.801.077
3	Persentase Peningkatan Produksi Ikan	%	9,10	4,83	4,28	5,05	(12,57)
4	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	kelompok / tahun	10	5	10	20	12
5	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok / tahun	10	20	10	20	13
6	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	20	40	70	80	100
7	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kap/ tahun	19,37	24,69	24,25	26,41	30,92

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2021

2. Pariwisata.

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Obyek wisata di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 sebanyak 9 obyek wisata unggulan, tahun

2020 meningkat menjadi 16 obyek wisata. Obyek wisata di Kabupaten Kendal yang paling banyak pengunjungnya adalah Pantai Sendang Sikucing dan Air Terjun Curug Sewu.

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kendal, tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dari 98,7% pada tahun 2016 meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Sedangkan untuk pemandu wisata yang bersertifikasi di Kabupaten Kendal meningkat dari sebesar 38,5% pada tahun 2016 menjadi sebesar 90% pada tahun 2020.

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kendal juga mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat dari tahun 2016-2020. Tahun 2016 sebanyak 239.899 orang, tahun 2019 meningkat menjadi 1.250.288 orang, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 459.342 orang, hal ini dikarenakan pandemic covid-19 yang mengharus obyek wisata ditutup sementara (PSBB). Menurunnya kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Kendal. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2016 sebesar 0,51%, menurun menjadi 0,036% pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi guna mengembangkan ide dan gambaran untuk perkembangan pariwisata Kabupaten Kendal.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun Ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Obyek wisata unggulan	OW	9	12	15	16	16
2	Jumlah Obyek destinasi yang dibangun/dikembangkan	OW	3	3	3	3	3
3	Jumlah kunjungan wisata	Orang	239.899	1.126.000	1.182.302	1.250.288	459.342
4	Persentase usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi/ memenuhi standar usaha pariwisata	%	61,2	60,2	63,9	63,9	63,9
5	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	93,7	93,7	100	100	100
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,5	0,53	0,53	0,036
7	penyediaan prasarana (zona/ruang kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif Kab. Kendal	Unit	1	1	1	1	1

NO	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun Ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Persentase SDM pelaku usaha pariwisata yang memiliki sertifikat/ memenuhi standar kompetensi	%	34,8%	39,5%	61,8%	74,31%	81,21%
9	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	5	5	5	5,75	-63,3
10	PAD sektor pariwisata	Rp	1.345.315.000	1.654.429.400	1.767.831.450	1.735.993.920	646.413.038
11	% Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	Na	6,25	25	18,75	18,75
12	% pelaku ekraf yang dikembangkan	%	Na	15,02	60,06	45,05	45,05
13	Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi	%	0,47	1,12	3,63	4,75	3,73

Sumber data : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab Kendal, 2021

3. Pertanian.

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Masyarakat Kabupaten Kendal sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani (dalam arti luas) yang meliputi usaha tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan urusan kewenangan pertanian Kabupaten Kendal mencakup enam (6) sub urusan yaitu : Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian.

Produksi tanaman pangan terutama diarahkan pada tanaman padi, jagung dan kedelai. Dari pertanian tamanan pangan produksi padi mengalami penurunan dari sebesar 260.888 ton pada tahun 2016 menjadi 220.532 ton pada tahun 2020, namun sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Kendal salah satu lumbung beras di Jawa Tengah (surplus). Produktivitas padi di Kabupaten Kendal pada tahun 2016 sebesar 55,34% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 58,82% dan pada tahun 2020 produktivitas padi mencapai 54,25%.

Produksi jagung bersifat fluktuatif, pada tahun 2015 produksi jagung sebesar 209.0032 ton meningkat menjadi 222.922 ton pada tahun 2020 dan produksi kedelai sangat sedikit, dengan kecenderungan menurun dari

sebanyak 3.032 ton tahun 2015 menjadi sebesar 108 ton tahun 2020, karena faktor iklim dan keterbatasan lahan yang cocok untuk dapat ditanami.

Produksi tanaman hortikultura terlihat dari Produksi Bawang merah, selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari sebanyak 320.936 kuintal menjadi 177.360 kuintal. Produksi cabe mengalami peningkatan dari sebanyak 41.585 kuintal pada tahun 2016 menjadi sebanyak 48.027 kwintal pada tahun 2020.

Sementara itu produksi perkebunan ditunjukkan dengan produksi tebu dengan kinerja yang cenderung menurun dari sebanyak 19.169,80 kuintal pada tahun 2016 menjadi 14.816,2 kuintal pada tahun 2020. Komoditas lainnya yang meningkat yaitu tembakau, kopi, cengkeh, karet. Sementara itu beberapa komoditas mengalami penurunan produksi, seperti kelapa dan kakao.

Pada bidang peternakan, populasi ternak sapi potong di Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari sebanyak 21.440 ekor pada tahun 2015 menjadi 22.258 ekor pada tahun 2020. Kenaikan juga terjadi pada populasi domba dari sebanyak 29.839 ekor pada tahun 2015 menjadi 30.002 ekor pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada populasi kambing, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Populasi kambing cenderung menunjukkan peningkatan dari sebanyak 36.718 ekor pada tahun 2015 menjadi 43.857 pada tahun 2020. Populasi ayam ras pedaging mengalami peningkatan dari sebanyak 8.587.800 ekor pada tahun 2016 menjadi 15.290.110 ekor pada tahun 2020. Populasi Ayam ras petelur meningkat dari sebanyak 3.538.300 ekor pada tahun 2015 menjadi 5.451.491 ekor pada tahun 2020. Berkaitan dengan kesehatan hewan, angka morbiditas (kesakitan) hewan menunjukkan penurunan dari sebanyak 8.915 ekor pada tahun 2015 menjadi 1.916 ekor pada tahun 2020.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, produksi daging sapi, kambing, domba dan ayam pedaging cenderung meningkat, begitu juga untuk produksi telur. Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak 1.960 ekor pada tahun 2016 menjadi 2.207 ekor pada tahun 2020.

Secara rinci kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43

Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi padi	Ton	260.888	241.924	239.401	236.378	220.532
2.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	55,34	52,88	54,56	58,82	54,25
3.	Produksi Jagung	Ton	225.505	239.122	199.199	215.866	222.922
4.	Produktivitas Jagung	Ku/Ha	66,75	67,87	68,83	61,73	68,19
5.	Produksi Kedelai	Ton	1.340	1.945	2.280	1.451	108
6.	Produksi Bawang merah	Kwintal	320.936	318.863	184.334	139.341	177.360
7.	Produktivitas Bawang Merah	Ku/Ha	96,35	92,59	93,05	93,27	93,35
8.	Produksi Cabe	Kwintal	41.585	59.964	69.331	45.330	48.027
9.	Produktivitas Cabe	Ku/Ha	63,98	70,80	66,54	67,76	69,00
10.	Produksi Tebu	Kwintal	19.169,80	20.671,80	15.669,30	17.669,74	14.816,2
11.	Produksi Tembakau	Ton	806,13	1.038,26	1.331,30	2807,09	3.466,7
12.	Produksi Kopi	Ton	1.307,07	1.206,50	1.266,30	1540,27	1.541,24
13.	Produktivitas Kopi	Ku/Ha	5,09	5,21	5,48	6,86	7,34
14.	Produksi Cengkeh	Ton	158,09	252,87	242,30	276,27	279,16
15.	Produksi Karet	Ton	36,26	165,04	213,40	213,61	197,50
16.	Produksi Kelapa	Ton	598,76	478,34	560,79	602,74	549,77
17.	Produksi Kakao	Ton	198,54	153,92	156,60	156,76	140,50
18.	Indeks Pertanaman	%	186,53	188,81	189,83	175.51	173,43
19.	Persentase Lahan Sawah Untuk Pertanian	%	25,93	25,02	24,00	24	24,03
20.	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	NA	NA	103,48	103,21	101,84
21.	Populasi Sapi potong	ekor	20.523	20.598	20.804	21.364	22.258
22.	Populasi Kambing	ekor	37.776	37.645	37.920	45.594	43.857
23.	Populasi Domba	ekor	30.842	30.703	30.836	31.628	30.002
24.	Populasi Ayam ras pedaging	ekor	8.587.800	8.321.500	8.196.500	10.912.480	15.290.110
25.	Populasi Ayam ras petelur	ekor	3.799.915	4.088.100	4.198.300	5.383.371	5.451.491
26.	Produksi Daging sapi	kg	640.543	734.949	774.761	854.440,2	908.945,20
27.	Produksi Daging kambing	kg	108.801	115.412	112.767	214.026,8	147.421,83
28.	Produksi Daging domba	kg	16.393	15.633	15.306	19.402,82	27.040,71
29.	Produksi Daging ayam ras pedaging	kg	5.916.994	5.249.052	5.896.429	6.226.715	13.364.400
30.	Produksi telur	kg	36.204.920	34.474.321	38.556.141	44.952.224	46.739.813,12
31.	Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH	ekor	1.960	2.268	1.713	2.527	2.207
32.	Angka morbiditas hewan	ekor	7.900	3.996	2.334	2.916	1.916
33.	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	NA	NA	3,05	5,04	-1,97
34.	Produksi Durian	kwintal	19.369	33.672	49.740	56.855	37.414
35.	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	%	86,96	89,53	91,11	92,56	94,46
36.	Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	%	66,27	41,33	23,14	62,51	70,73
37.	Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	%	69	69,29	69,02	68,93	69,17
38.	Luas Lahan Pertanian	Ha	22.666	22.666	22.666	22.666	22.666

	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Pangan Berkelanjutan						
39.	Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	2.000	1.170	2.085	1.314	985
40.	Angka morbiditas ternak ruminansia	ekor	7.900	1.470	1.334	2.916	1.916
41.	Persentase luas lahan yang memperoleh pengendalian hama penyakit	%	0,62	0,63	0,94	0,95	0,52
42.	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif	%	76	78	79	80	82

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, 2021

4. Energi Sumber Daya Mineral

Kewenangan Pemerintah Kabupaten hanya terkait dengan pengelolaan energi panas bumi. Sampai dengan tahun 2020 energi panas bumi yang termanfaatkan sebanyak 1 unit.

Tabel 2.44
Kinerja Urusan ESDMKabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah energi panas bumi yang termanfaatkan	unit	1	1	1	1	1

Sumberdata : Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kendal, 2021

5. Perdagangan.

Pada urusan perdagangan, pemerintah daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 5 kewenangan yang wajib dilaksanakan, yaitu perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi dan perlindungan konsumen.

Pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yaitu pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan, saat ini ditahun 2019 Kabupaten Kendal hanya memiliki 24,99% pasar yang telah memenuhi persyaratan. Selebihnya, pasar rakyat masih belum memenuhi persayaratan. Untuk penataan PKL masih relatif kecil yaitu baru sebesar 20%. Pelaksanaan kewenangan dalam

stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, di Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik, yaitu ditahun 2018 sudah mencapai 90%. Sementara itu dari sisi ekspor perdagangan, tercatat pada tahun 2019 sebesar 47,27%, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan kewenangan pada standardisasi perlindungan konsumen, pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan penteraan terhadap alat timbang. Pada tahun 2020, UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya) yang ditera mencapai 20,47%.

Pada Urusan Perdagangan, capaian indikator kinerja dari tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase UTTP yang ditera	%	0	3,12	90	96,50	20,47
2	Perkembangan nilai ekspor	%	72,49	15,8	13,24	47,27	12,81
3	Cakupan bina kelompok pedagang/jumlah pedagang	%	100	300	100	230,66	100
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	75	131,25	90	114,28	28,57
5	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	0	0	0	8,33	24,99	8,33
6	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	0	0	20	20	20
7	Persentase pasar yang layak fungsi	%	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46
8	Persentase kebutuhan msyarakat terhadap barang pokok dan penting	%	100	100	100	100	100
9	Jumlah jenis produk unggulan ekspor	jenis	21	22	23	24	25
10	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelaksanaan promosi produk dalam negeri	orang	Na	24.000	24.250	24.500	24.750

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, 2021

6. Perindustrian.

Urusan perindustrian pada lingkup pemerintahan daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Kondisi industri kecil dan menengah yang berkembang di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 tumbuh sebesar 4,01%. Pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya yang berada di bawah 1%. Pada kelompok industri kecil, sampai dengan tahun 2020 yang sudah memiliki sertifikasi halal sebesar 0,36% dan yang sudah memiliki izin PIRT sebesar 16,47%. Hasil penilaian kelayakan produksi, industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi di Kabupaten Kendal masih sangat kecil, hanya sebesar 2,64% pada tahun 2020. Dengan kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB sebesar 41,9% pda tahun 2020, maka perlu dukungan yang kuat dalam memperbaiki kualitas industri, baik dari sisi perizinan maupun kelayakan industri.

Capaian kinerja pada urusan perindustrian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	0,44	0,55	1,62	2,77	4,01
2	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	12,58	13,24	13,24	15,12	16,47
3	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal	%	0,33	0,33	0,45	0,36	0,36
4	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	0,73	0,66	1,05	1,98	2,64
5	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	40,29	41,45	41,45	41,8	41,9
6	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	0,5	0,25	0,25	2,5	25
7	Persentase sentra indsutri yang dikembangkan	%	10	10	10	10	25
8	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	%	10	10	10	10	20
9	Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI)	%	0,5	10	10	10	10
10	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	1,2	1,4	1,5	2	2,5

Sumber : Dinas Perindustrian , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal, 2021

7. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada lingkup pemerintah daerah hanya dibatasi pada lingkup penataan pesebaran yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2016, prosentase kawasan transmigrasi teridentifikasi 100% dihitung dari lokasi transmigrasi yang ditawarkan. Pada tahun 2020 prosentase kawasan transmigrasi tidak teridentifikasi dikarenakan tidak ada lokasi sasaran calon transmigran.

Capaian kinerja pada urusan transmigrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	% kawasan transmigrasi teridentifikasi	%	100	50	13	20	0
2	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	%	100	100	125	125	0
3	Jumlah kuota transmigran	KK	10	3	4	6	0

Sumber Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal tahun 2021

2.3.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pada tahun 2020, sebanyak 74,5% usulan berasal dari Musrenbang desa/kelurahan diakomodir dalam RPJMD. Capaian RPJMD sesuai sasaran yang ditetapkan sampai dengan 2020 sebesar 75%. Sedangkan aspirasi DPRD telah diakomodir dalam perencanaan sampai dengan 2020 mencapai sebesar 70,14%. Gambaran capaian kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.48
Capaian Pembangunan Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	40	57,45	34,17	57,71	74,5
2	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD	%	50	NA	71,3	75	75
3	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	Na	100	100	100	100
4	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100	100	100	100	100
5	Persentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	40	42,66	58,9	62,35	70,14

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	Dok	-	1	0	0	0
7	Nilai SAKIP	Nilai	48	55	61,39	64,55	66,31
8	Persentase Realisasi Sasaran Pembangunan	Persen	50	NA	72	75	62,5

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal, 2021

2. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) menjadi urusan penunjang yang erat kaitannya dengan peningkatan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah yang dapat mendorong daya saing darah dilaksanakan melalui kegiatan riset, pengkajian, review dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, penelitian perekonomian, penelitian infrastruktur dan pengembangan wilayah; kegiatan penelitian perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Kendal telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berdasarkan Perbup Nomor 35 Tahun 2016 tentang SIDa Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 dan prestasi Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten Inovatif Nomor 2 se Indonesia dari Kemenrisktek pada tahun 2020 sebagai paresiasi bagi pengembangan inovasi di Kabupaten Kendal. Capaian dalam urusan penelitian dan pengembangan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD.

Tabel 2.49
Capaian Pembangunan Urusan Penunjang
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks inovasi daerah	indeks	NA	NA	240	470	4.239
2	Indeks Daya Saing Daerah	%	NA	NA	2,666	7,7997	3,7486
3	persentase produk inovasi/kelitbangan yang mendukung arah kebijakan pembangunan	%	NA	57,14	80,95	93,1	100

Sumber : Baperlitbang Kabupaten Kendal, 2021

3. Keuangan.

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pendapatan daerah, kinerja dapat dilihat dari Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah Kabupaten Kendal berkisar

antara 27 % - 39% dalam kurun waktu tahun 2016-2020, menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Persentase Pajak Daerah terhadap PAD berkisar antara 27-36%. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja dapat terlihat dari indikator Persentase Realisasi Anggaran terjadi penurunan dari sebesar 84% pada tahun 2016 menjadi sebesar 79,4% tahun 2020 yang disebabkan Pandemi Covid-19.

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan manajemen Barang Milik Daerah (BMD) diketahui dari Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan yang baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Status tersebut didukung dengan capaian indikator persentase dokumen penganggaran tepat waktu yang meningkat dari 85% menjadi 90%, persentase laporan keuangan tepat waktu yang mengalami peningkatan dari 85% menjadi 90%, dan persentase aset daerah yang terintegrasi menunjukkan peningkatan yang baik sebesar 100% pada tahun 2020. Secara rinci kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2020 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Kinerja Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase aset daerah yang ter-registrasi	%	21	30	35	100	100
3.	Proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah	%	16	23	16	19,67	16,68
4.	Persentase Pajak terhadap PAD	%	32	27	36	36,5	39
5.	Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	%	90	90	90	100	100
6.	Persentase Realisasi Anggaran	%	88	88	92	94,04	79,46
7.	Persentase Dokumen penganggaran tepat Waktu	%	90	90	90	95	95
8.	% konsistensi program/kegiatan APBD sesuai dengan RKPD	%	90	90	90	90	90
9.	% kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	%	95	95	95	95	95
10.	% Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	%	100	100	100	100	100
11.	% OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	%	100	100	100	100	100
12.	% sistem keuangan yang terintegrasi	%	-	75	100	100	100
13.	% aset daerah yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100
14.	% Pertumbuhan WP Baru	%	1.08	0.31	-0.27	0.56	1.07
15.	% Pertumbuhan Pajak Pertahun	%	1	0	26	34	-3
16.	Nilai IKM	%	-	-	-	86.94	91.94
17.	% Realisasi Pajak Daerah	%	85.16	87.30	86.02	87.67	82.33

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
18.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	NA	NA	NA	NA	NA
19.	Kapasitas Fiskal Daerah	skor	NA	NA	NA	NA	0,733
20.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-10,98	-10,48	-8,41	-8,38	-9,53
21.	Deviasi realisasi PAD terhadap terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0,68	2,31	0,64	-15,03	6,92
22.	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	18,86	24,40	25,40	27,15	22,69
23.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-10,98	-10,48	-8,41	-8,38	-9,53

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, 2021

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi urusan penunjang kepegawaian merupakan unsur penunjang yang mengelola ASN. Urusan kepegawaian berkaitan dengan berbagai aspek dalam manajemen kepagawaian yaitu pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN, pembinaan disiplin ASN, kesejahteraan ASN, pemberhentian ASN dan pensiun.Urusan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan aspek pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan manajerial.

Kinerja urusan penunjang kepegawaian adalah persentase pegawai mengikuti Diklat / Bintek yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan, persentae struktur jabatan yang terisi, persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik dan jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi.Kinerja urusan penunjang pendidikan dan pelatihan adalah persentase pegawai mengikuti Diklat / Bintek yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan.

Pada tahun 2016 jumlah pegawai yang mengikuti diklat yang difasilitasi oleh BKPP sebesar 100% pada tahun 2018 meningkat menjadi 122,79%, artinya pada tahun 2018 pegawai yang mengikuti diklat ada yang dua kali dalam tahun berjalan. IPA tahun 2019 pengukuran dilakukan oleh BKN melalui SAPK.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten KendalTahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	Na	77,36	78,92	27,19	75,28
2.	Persentase ASN yang mengikuti dan lulus diklat yang difasilitasi BKPP Kab. Kendal pada tahun berjalan	%	100	100	122,79	100	100
3.	Persentase struktur jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	83,07	87	86,28	92,45	88,7
4.	Persentase penempatan ASN sesuai ABK	%	64,88	59,14	58,40	60,85	59,89
5.	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jenis pelayanan	8	10	12	15	16
6.	Persentase ASN dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	%	90,15	89,59	94,25	96,43	96,43
8.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	129,36	150,59	228,28	253,50	207,23
9.	Tingkat Kedisiplinan ASN	%	99,8	99,832	99,810	99,689	97,375
10.	Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	%	90	90	92	94	95,78
11.	Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	%	NA	NA	NA	96,68	NA
12.	Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan	%	NA	NA	NA	NA	86,53
13.	Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	%	83,07	87	86,28	92,45	88,7
14.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,76	5,04	7,76	6,69	8,08
15.	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi	%	100	100	100	100	100
16.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	NA	NA	NA	16,6	23,21
17.	Nilai Dimensi Disiplin	skor	NA	NA	NA	4,95	4,93
18.	Nilai Dimensi Kinerja	skor	NA	NA	NA	0,59	25,03
19.	Nilai Dimensi Kualifikasi	skor	NA	NA	NA	12,81	12,7
20.	Dimensi Kompetensi	skor	NA	NA	NA	8,83	32,62

Sumber : BKPP Kabupaten Kendal, 2021

5. Pengawasan.

Fungsi pengawasan internal pemerintahan Kabupaten Kendal memiliki

peran yang penting dalam rangka mengendalikan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara responsive dan akuntabel. Melalui pengawasan internal pemerintah daerah diharapkan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi.

Kinerja fungsi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kendal yang kinerjanya diketahui berdasarkan indikator, sebagai berikut : tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Rasio temuan pengawas dari rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas, Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Rata-rata nilai akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi berdasarkan LKjIP.

Pada tahun 2016 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih level 1 (satu). Pada tahun 2017 Tingkat Maturitas SPIP meningkat menjadi level 2, dan pada tahun 2020 menjadi level 3. Selain itu indikator persentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan harta kekayaannya meningkat dari kurun waktu 2016 – 2020. Pada tahun 2016 ASN yang melaporkan harta kekayaannya hanya sebesar 39%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 90% dan menjadi 100% pada tahun 2020.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator urusan Penunjang Pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kabupaten Kendal
Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	70	75	80	81,51	81,51
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	39	80	90	99,25	100
3	Persentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100	100	100	100	100
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	C	CC	CC	B	BB
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	1	2	3	3	3
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	2
7	% Obrik yang diperiksa sesuai ketentuan	%	84,31	100	98,6	91,83	94,74

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah temuan penyimpangan pembangunan jumlah temuan penyimpangan pembangunan	kasus	1	5	1	7	7
9	% Dokumen perencanaan dan penganggaran yang direview	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Capaian IKU Inspektorat	%	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kendal, 2021

6. Kewilayahan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kecamatan sebagai salah Perangkat Daerah memerlukan adanya IKM ini karena adanya fungsi pelayanan publik secara langsung. Tujuan dari pelaksanaan survey IKM ini adalah sebagai tolok ukur/evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.53
Kategori Penilaian Skor IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Adapun gambaran capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal periode 2016-2020 menunjukkan dari 20 kecamatan yang ada sebanyak 10 kecamatan (50%) baru melakukan survey IKM pada tahun 2018. Pada tahun 2020, Kecamatan yang memiliki skor IKM tertinggi adalah Kecamatan Limbangan (92,53), sedangkan kecamatan dengan skor IKM terendah adalah Kecamatan Plantungan (76,05). Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian IKM Kecamatan di Kabupaten Kendal tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	Skor	NA	NA	76,05	76,05	76,05
2	Sukorejo	Skor	73,57	NA	83,11	77,88	82,49
3	Pageruyung	Skor	NA	NA	82,34	82,34	82,34
4	Patean	Skor	80,23	84,86	83,71	83,71	83,71
5	Singorojo	Skor	75,22	75,5	75,68	75,68	91,19
6	Limbangan	Skor	75,22	75,5	75,68	75,68	92,83
7	Boja	Skor	NA	NA	84,04	84,04	84,04
8	Kaliwungu	Skor	NA	NA	89,56	89,56	80
9	Kaliwungu Selatan	Skor	83,98	84,02	84,1	84,1	84,1
10	Brangsong	Skor	NA	NA	76,09	76,09	76,09
11	Pegandon	Skor	NA	NA	82,41	82,41	82,9
12	Ngampel	Skor	80,73	80,92	81,16	82,60	88,83
13	Gemuh	Skor	NA	NA	86,75	86,75	86,75
14	Ringinarum	%	80	79	80	80	80
15	Weleri	Skor	NA	NA	86,92	86,92	86,92
16	Rowosari	Skor	NA	NA	81,68	81,68	81,68
17	Kangkung	Skor	NA	NA	84,25	84,25	84,25
18	Cepiring	%	NA	NA	79,34	79,34	83
19	Patebon	Skor	79	79	81	81	81
20	Kota Kendal	%	82	82	84	84	84

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

b. Persentase Rata Rata Realisasi Dana Desa

Sejak disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa mendapatkan kucuran dana yang dianggarkan dari APBN sebesar sebesar Rp1 miliar. Tahun 2015, merupakan awal kali dikucurkan dana desa. Penggunaan dana desa sesuai dengan pasal 19 UU no. 6 tahun 2014 diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan prioritas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dari 20 kecamatan yang ada menunjukkan rata-rata realisasi dana desa sebesar 100% sebanyak 8 kecamatan, capaian realisasi dana desa antara 90%-99% sebanyak 9 kecamatan dan sisanya sebanyak 3 kecamatan capaian rata-rata realisasinya rendah berkisar antara 7,08% - 50,65% yaitu kecamatan Pageruyung, Plantungan, dan Kecamatan Boja.

Tabel 2.55
Rata-Rata realisasi Dana Desa Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	100	100	100	100	99,02
2	Sukorejo	92	100	100	100	100
3	Pageruyung	7,08	7,03	7,08	7,08	7,08

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Patean	100	100	100	100	100
5	Singorojo	100	100	97,86	97,86	97,86
6	Limbangan	100	100	97,86	97,86	97,86
7	Boja	51,51	54,25	50,65	96,04	99,99
8	Kaliwungu	90	90	90	90	90
9	Kaliwungu Selatan	100	100	100	100	100
10	Brangsong	90	90	90	90	90
11	Pegandon	94	95	96	97	96
12	Ngampel	100	100	100	100	100
13	Gemuh	90	90	90	90	90
14	Ringinarum	100	100	99	99	99
15	Weleri	99,92	98,76	97,08	97,08	100
16	Rowosari	100	100	100	100	100
17	Kangkung	100	100	100	100	100
18	Cepiring	98,52	98,23	99,21	99,21	99,21
19	Patebon	100	99	98	98	98

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

c. Persentase Anggaran Fisik Seluruh Desa

Penggunaan dana di tingkat desa untuk pembangunan fisik dan fisik di wilayah Kabupaten Kendal menunjukkan adanya trend menurun dalam kurun waktu antara tahun 2014-2018. Penggunaan dana untuk pembangunan dari 20 kecamatan sebanyak 9 kecamatan masih menunjukkan adanya proporsi yang lebih besar untuk pembangunan fisik, bahkan di Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kota Kemdal 100% digunakan untuk pembangunan fisik. Untuk kecamatan lainnya sudah menunjukkan adanya alokasi dana untuk pembangunan non fisik semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya pemanfaatan anggaran untuk pembangunan fisik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Alokasi Anggaran Fisik di Tingkat Desa Kabupaten Kendal
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	100	97,84	97,87	94,52	33,12
2	Sukorejo	62,5	62,92	53,25	53,25	53,25
3	Pageruyung	65,4	67,1	66,22	66,22	66,22
4	Patean	74,89	78,31	77,42	77,42	77,42
5	Singorojo	32,00	32,50	33,50	33,50	33,50
6	Limbangan	32,00	32,50	33,50	33,50	33,50
7	Boja	70	70	70	91,52	45
8	Kaliwungu	100	100	100	100	100
9	Kaliwungu Selatan	66	68	64	67	38
10	Brangsong	70	70	70	70	70
11	Pegandon	87	86	85	81	56

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
12	Ngampel	62,59	60,34	54,76	69,62	72,49
13	Gemuh	60	60	60	60	60
14	Ringinarum	70	75	75	75	75
15	Weleri	62,28	63,87	62,87	62,87	98,18
16	Rowosari	67,19	61,53	60,01	60,01	60,01
17	Kangkung	40	30	100	100	100
18	Cepiring	99,13	97,39	95,77	95,77	95,77
19	Patebon	78	80	75	75	75
20	Kota Kendal	100	100	100	100	100

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

d. Persentase Kegiatan Mengakomodir Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan/desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan/desa di kecamatan yang bersangkutan. Adapun tujuan daripada musrenbang kecamatan adalah memberikan wahana untuk mensinergikan dan menyepakati prioritas usulan-usulan masalah yang berasal dari masyarakat tingkat kelurahan (dan atau lintas kelurahan) yang menjadi skala pelayanan atau kewenangan kecamatan dan lintas kecamatan untuk satun tahun mendatang; Merumuskan dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum-forum SKPD dan Musrenbang kabupaten. Serta meenetapkan delegasi kecamatan untuk mengawal usulan-usulan permasalahan kecamatanyang merupakan kegiatan kecamatan.

Dari pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang dilakukan di Kabupaten Kendal menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan rata-rata sudah banyak yang mengakomodir dari musrenbang tersebut. Data tahun 2016-2020menunjukkan adanya peningkatan hasil musrenbang yang diakomodir di tingkat kecamatan. Secara lengkap gambaran capaian hasil musrenbang yang diakomodir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57
Hasil Musrenbang yang diakomodir di tingkat Kecamatan
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	65	65	65	65	75
2	Sukorejo	28	10	7,5	12,5	12,2
3	Pageruyung	1,7	1,3	1,4	1,4	1,4

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Patean	77,21	79,44	76,59	76,59	76,59
5	Singorojo	60	60	60	60	60
6	Limbangan	60	60	60	60	60
7	Boja	77,21	79,44	76,59	37,84	66,67
8	Kaliwungu	80	85	80	80	80
9	Kaliwungu Selatan	42,18	45,77	52,89	52,89	52,89
10	Brangsong	75	75	75	75	75
11	Pegandon	80	82	81	83	70
12	Ngampel	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
13	Gemuh	80	80	80	80	80
14	Ringinarum	75	75	75	75	75
15	Weleri	50,25	62,30	60,15	47,40	50,65
16	Rowosari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Kangkung	70	77	80	80	80
18	Cepiring	NA	NA	9,66	9,66	9,66
19	Patebon	78	80	75	75	75
20	Kota Kendal	80	85	85	87	88

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

e. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan yaitu Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Secara lengkap gambaran capaian pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	100	100	100	100	100
2	Sukorejo	100	100	100	100	100
3	Pageruyung	100	100	100	100	100
4	Patean	100	100	100	100	100
5	Singorojo	100	100	100	100	100
6	Limbangan	100	100	100	100	100
7	Boja	100	100	100	100	100
8	Kaliwungu	100	100	100	100	100
9	Kaliwungu Selatan	100	100	100	100	100
10	Brangsong	100	100	100	100	100
11	Pegandon	100	100	100	100	100
12	Ngampel	100	100	100	100	100
13	Gemuh	100	100	100	100	100

No	Kecamatan	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Ringinarum	100	100	100	100	100
15	Weleri	100	100	100	100	100
16	Rowosari	100	100	100	100	100
17	Kangkung	100	100	100	100	100
18	Cepiring	100	100	100	100	100
19	Patebon	100	100	100	100	100
20	Kota Kendal	100	100	100	100	100

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2021

f. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP berguna untuk mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 - 85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30. Adapun gambaran nilai SAKIP kecamatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2016-2020ditampilkan dalam tabel di bawah ini..

Tabel 2.59
Nilai Sakip Kecamatan Kabupaten Kendal tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Capaian (skor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Plantungan	NA	NA	60,86	60,86	60,86
2	Sukorejo	NA	NA	61,67	61,67	61,67
3	Pageruyung	C	CC	61,59	61,59	61,59
4	Patean	0	0	62,4	62,4	62,4
5	Singorojo	NA	NA	63,97	63,97	63,97
6	Limbangan	NA	NA	63,97	63,97	63,97
7	Boja	NA	NA	61,73	61,73	61,73
8	Kaliwungu	NA	NA	61,54	61,54	61
9	Kaliwungu Selatan	62,5	62,51	62,69	62,69	62,69
10	Brangsong	NA	NA	63,77	63,77	63,77
11	Pegandon	NA	NA	64,05	64,05	64,09
12	Ngampel	61,46	61,53	61,62	61,73	61,73
13	Gemuh	NA	NA	61,04	61,04	61,04
14	Ringinarum	63	62	63,15	63,15	63,15
15	Weleri	NA	NA	61,91	61,91	61,91

No	Kecamatan	Capaian (skor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
16	Rowosari	NA	NA	60,20	60,20	60,20
17	Kangkung	NA	NA	60,33	60,33	60,33
18	Cepiring	NA	NA	63,69	63,69	61,39
19	Patebon	62	60	60,89	60,89	60,89
20	Kota Kendal	95	80	61,46	61,46	61,46

Sumber : Daftar Isian Per Kecamatan, diolah tahun 2019.

7. Sekretariat Daerah

Sekeretariat daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Sekretaris Daerah sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja Sekretariat Daerah ditunjukkan berdasarkan masing-masing bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut capaian kinerja Sekretariat daerah selengkapnya.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemenuhan kebutuhan Kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	%	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga	%	100	100	100	100	100
4	Persentas OPD yang difasilitasi dlam implementasi RB	%	100	100	100	100	100
5	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan pimpinan daerah atau tamu daerah	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	100	100	100
7	% kebijakan kesera yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
8	% Kelurahan dan kecamatan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100
9	% produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
10	% Kerjasama antar Daerah yang di implementasikan	%	100	100	100	100	100
11	% BUMD yang difaslitasi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
12	% Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang tepat waktu, mandiri, profesional.	%	100	100	100	100	100
13	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan laporanevaluasi yang tersusun	%	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretarian Daerah Kabupaten Kendal, Thun 2021

8. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi Sekretariat DPRD adalah : (1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, (2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, (3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan (4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Kendalterdiri dari 10 indikator, adapun indikator yang harus mendapatkan perhatian yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar, Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD yang Memenuhi Standar. Berikut capaian kinerja Sekretariat daerah selengkapnya.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan
Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penurunan pelanggaran disiplin apartur dalam berpakaian dinas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
5	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan OPD yang Memenuhi Standar	laporan	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6	Rata-rata nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	86,50	87,75	87,00	87,25	87,25
7	Persentase arsip dinamis dan statis yang diselamatkan	prosen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Pembahasan Raperda,Hearing,Rapat-Rapat DPRD, Reses dan Kunjungan Kerja	perda	16,00	17,00	17,00	18,00	18,00
9	Jumlah propemperda yang disetujui	kajian	1,00	2,00	6,00	6,00	6,00
10	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan daerah/tamu Pemda	prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sekretarian DPRD Kabupaten Kendal, Thun 2021

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kabupaten Kendal diselenggarakan melalui fasilitasi bagi partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya kemasyarakatan yang lain dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah dan persatuan-keatuan bangsa di daerah agar beragam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dapat terselengggara dengan baik. Masyarakat di Kabupaten Kendal selama ini menjunjung tinggi rasa solidaritas, persaudaraan antar agama serta toleran dalam masyarakat. Demikian pula dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg dan Pemilukada baik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (2018) maupun Pemilihan Bupati yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 pada masa Pandemi – Covid 19 dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel, tidak menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat.

Dalam pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, terutama lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Sosial Kemasyarakatan belum optimal, hal ini antara lain disebabkan lembaga tidak selalu melengkapi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan domisili secara lengkap. Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara tahun 2020 sudah dilaksanakan dengan cukup baik, melalui pemahaman, pembinaan serta penyuluhan terhadap para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan / pelajar, ormas, LSM dan masyarakat sebanyak 3.379 orang. Untuk perkembangan capaian kinerja indikator urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Kendal Tahun 2016 -2020

No	Indikator	satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	2.635	3.105	3.200	8.652	3.379
2.	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	kelompok	5	10	15	20	25

No	Indikator	satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	0	0	68,3	82	75,6
4.	Persentase LSM/Ormas yang dibina kebangsaan	%	7,19	8,82	10,46	12,09	13,73
5	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	%	100	100	100	100	100
6	Persentase penguatan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Jumlah kegiatan penguatan terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di daerah / Jumlah kebijakan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di pemerintah pusat)*100	%	100	100	100	100	100
7	Persentase mitigasi dampak kerawanan bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya / jumlah ancaman terhadap ketahanan ekonomi sosial budaya)*100	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, Tahun 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB.

Tabel 2.63
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020
(Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.439.635,39	5.622.475,38	5.784.865,38	6.052.715,38	5.986.492,88
B	Pertambangan dan Penggalian	221.683,34	279.651,58	290.601,58	307.101,58	313.608,32
C	Industri Pengolahan	10.505.620,53	11.076.050,47	11.763.810,92	12.445.172,22	12.338.134,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	56.202,05	58.778,90	61.548,43	64.819,93	64.617,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.512,95	22.520,15	23.620,15	24.370,15	24.881,20
F	Konstruksi	1.739.413,20	1.868.908,35	1.991.958,35	2.073.768,35	1.997.248,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.200.580,71	3.378.702,01	3.566.378,06	3.752.648,06	3.608.772,06
H	Transportasi dan Pergudangan	563.781,17	604.398,93	642.616,58	694.461,27	470.829,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	886.876,39	948.148,64	1.022.048,64	1.107.313,64	1.059.587,63

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
J	Informasi dan Komunikasi	1.060.960,28	1.199.100,15	1.337.651,10	1.476.151,10	1.679.231,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	486.262,35	511.388,41	527.539,48	541.355,94	550.129,03
L	Real Estate	252.709,43	272.415,49	287.415,49	303.365,49	302.932,49
M,N	Jasa Perusahaan	72.210,02	78.499,07	85.399,07	94.039,07	88.338,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	511.043,35	523.938,00	541.638,00	561.763,00	559.200,80
P	Jasa Pendidikan	609.025,27	660.174,07	710.224,07	763.124,07	760.627,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.392,66	181.985,25	196.840,25	209.700,25	226.845,25
R,S,T,U	Jasa lainnya	345.505,86	378.508,47	411.508,97	444.516,97	412.211,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ADHK		**26.139.414,95**	**27.665.643,32**	29.245.664,52	30.916.386,47	30.443.688,53

Sumber : BPS Kabupaten Kendal , 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur.

1. Panjang Jalan.

   Kabupaten Kendal memiliki luas wilayah 1.002,23 km^2 dan terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 770,993 km (jalan kewenangan Kabupaten Kendal). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2020 sebesar 88,28 % (delapan puluh delapan koma dua delapan persen) dalam kondisi mantap, yaitu kondisi sedang dan baik.

2. Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum.

   Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang strategis karena berada di poros utama transportasi Pulau Jawa bagian utara. Tersedia 4 (empat) terminal di wilayah Kabupaten Kendal yang melayani transportasi baik dalam kota maupun keluar kota. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui terminal-terminal yang ada menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 penumpang angkutan umum sebanyak 3.433.256 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam) orang, meningkat menjadi 4.126.754 (empat juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat) orang pada tahun 2017.

3. Luas Wilayah Industri.

   Sesuai RTRW Kab kendal tahun 2011-2031 di alokasikan pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 5 .109 Ha yang terdiri atas Kawasan Industri dan sentra industri kecil menengah yang berada di Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal dan Patebon. Berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Nasional KEK, kawasan

industri Kendal (KIK) ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kendal seluas 1.000 Ha yang terletak di kecamatan Kaliwungu dan Brangsong. Zona KEK Kendal yaitu Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, dan Zona Industri.

4. Luas Wilayah Kebanjiran.

   Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami kebanjiran memang belum tersedia, namun jika dilihat dari kawasan yang rawan terkena bencana banjir dapat diketahui ternyata terdapat 9 (sembilan) wilayah kecamatan yang rawan terkena bencana banjir. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kendal, Patebon, Ngampel, Kaliwungu, Brangsong, Cepiring, Kangkung, Rowosari, dan Weleri. Luas wilayah yang berpotensi terkena banjir di Kabupaten Kendal mencapai 55.600,21 ha (lima puluh lima ribu enam ratus koma dua puluh satu hektar).

5. Luas Wilayah Kekeringan.

   Selain kebanjiran, Kabupaten Kendal juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah Kecamatan Patebon, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Ngampel, Pegandon, Brangsong, Gemuh, Cepiring. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan. Luas daerah yang berpotensi terkena bencana kekeringan adalah 99.972,78 ha (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh delapan hektar).

6. Luas Wilayah Perkotaan.

   Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

   Berdasarkan perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011 – 2031 menetapkan bahwa wilayah perkotaan terbagi atas 3 (tiga) pusat kegiatan. Pertama adalah Pusat kegiatan nasional yang selanjutnya di sebut sebagi PKN adalah kawasan perkotaaan yang melayani kegiatan skala nasional. Kedua Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Dan yang ketiga adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Kabupaten Kendal sebagai Pusat Kegiatan Nasional bersama dengan Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR). Wilayah yang termasuk dalam pusat kegiatan lokal adalah Kendal, Weleri, Boja, Kaliwungu, dan Sukorejo. Sedangkan pusat pelayanan kawasan adalah Kecamatan Pegandon.

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran/Rumah Makan.

   Jumlah restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2017 sampai tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Tahun 2017 restoran di Kabupaten Kendal berjumlah 67 (enam puluh tujuh) unit, dan di tahun 2020 meningkat menjadi 151 (seratus lima puluh satu) unit.

8. Pelayanan Air Bersih.

   Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2010 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Kendal sebesar 60 % (enam puluh persen), kemudian pada tahun 2015 pencapaiannya sudah sampai pada angka 75 % (tujuh puluh lima persen).

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.

1. Angka Kriminalitas.

   Kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun pada tahun 2018, namun dari 2019 sampai 2020 justru mengalami kenaikan. Tahun 2017 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga), dan tahun 2020 sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kasus.

   Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kabupaten Kendal pada tahun 2018 adalah pencurian, yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) kasus, sedangkan penyalahgunaan narkoba sebanyak 20 (dua puluh kasus, pengamiayaan sebanyak 2 (dua) kasus dan pembunuhan sebanyak 1 (satu) kasus.

2. Kemudahan Perizinan.

   Pelayanan perizinan di Kabupaten Kendal saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui Online Singgle Submission (OSS) diantaranya dilakukan melalui pembangunan Mall Perizinan.

Berikut ditampilkan secara rinci jenis perizinan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin.

Tabel 2.64
Jenis Izin dan Lama Proses Pengurusannya

NO.	JENIS PERIZINAN	JANGKA WAKTU PELAYANAN
1.	Izin/ Persetujuan Prinsip	7 hari
2.	Izin Lokasi	7 hari
3.	Izin IPPT	7 hari
4.	Izin penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Puskesmas	7 hari
5.	Izin Kawasan Industri	7 hari
6.	Izin Mendirikan dan Merobohkan Bangunan (IMMB) selain rumah tinggal dengn luas sampai 100 m^2	7 hari
7.	Izin usaha angkutan orang dengan kendaraan umum	2 hari
8.	Izin usaha angkutan barang dengan kendaraan umum	2 hari
9.	Izin trayek angkutan dengan kendaraan umum	2 hari
10.	Kartu pengawasan angkutan dengan kendaraan umum	2 hari
11.	Izin prinsip angkutan	2 hari
12.	Izin reklame, selain izin pemasangan reklame dengan luas maksimal	7 hari
13.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
14.	Surat Izin Usaha Industri (SIUI)	3 hari
15.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala menengah dan besar; sekarang diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Singgle Submission (OSS)	Badan Usaha 2-2,5 Jam Perorangan 30 menit
16.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 hari
17.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	7 hari
18.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	7 hari
19.	Validasi Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) setelah bukti setor diupload oeleh pemohon dan diinformasikan ke DPMPTSP	10 menit
20.	Izin Usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan	7 hari
21.	Izin warung internet/komputer	7 hari
22.	Izin prinsip dan izin usaha	7 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, 2021

Keterangan : Perhitungan waktu/ lamanya proses perizinan dihitung dari berkas lengkap dan benar

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kendal dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Dari 0,46 (nol koma empat puluh enam) pada tahun 2016 menjadi 0,40 (nol koma empat puluh) pada

tahun 2020. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 (seratus) orang usia produktif di Kabupaten Kendal menanggung 40 (empat puluh) orang usia non produktif, dan termasuk dalam kategori angka ketergantungan sedang. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30 (tiga puluh), angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.

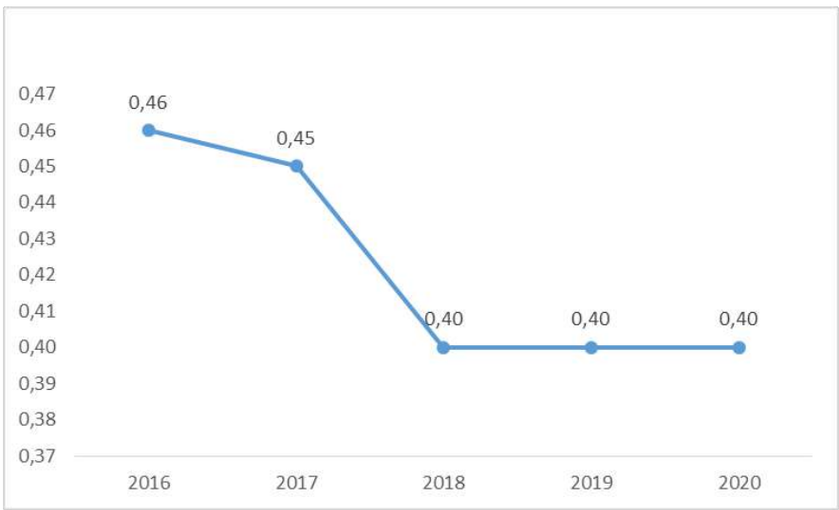

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal Tahun 2021

Gambar 2.6
Angka Ketergantungan di Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

2.5 Hasil Evaluasi RPJMD

2.5.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (*Impact*) Kabupaten Kendal Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengolahan data capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) Tahun 2020 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 357 Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat *impact* Tahun 2020, yang memiliki capaian kinerja **Sangat Tinggi** sebanyak 245 indikator atau 68,63 persen, **Tinggi** sebanyak 49 indikator atau 13,73 persen, **Sedang** sebesar 12 indikator atau 3,36 persen, **Rendah** sebanyak 10 Indikator atau 2,80 persen, dan **Sangat Rendah** sebanyak 41 Indikator atau 11,48 persen.

Capaian IKK tingkat *impact* Kabupaten Kendal Tahun 2020 menunjukkan masih perlu upaya dan komitmen dari seluruh Perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya target Indikator makro, IKU Pemerintah Daerah, dan IKU Perangkat Daerah dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara rinci realisasi dan tingkat capaian masing-masing IKK tingkat *impact* disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak (*Impact*) Kabupaten Kendal Tahun 2020

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,2-6,6	-1,53	-23,18	Sangat Rendah	Lintas PD
2	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rp	32,35	30,91	95,54	Sangat Tinggi	Lintas PD
3	Inflasi	%	4,76	1,68	283,33	Sangat Tinggi	Lintas PD
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,8	9,99	98,10	Sangat Tinggi	Lintas PD
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,5	72,29	95,75	Sangat Tinggi	Lintas PD
6	Pengeluaran per Kapita	Rupiah / kapita/ tahun	11.014.000	11.425.000	103,73	Sangat Tinggi	Lintas PD
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,5	92,85	98,25	Sangat Tinggi	Lintas PD
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,5	77,50	100,00	Sangat Tinggi	Lintas PD
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	8	9,60	83,33	Tinggi	Lintas PD
10	Angka Kematian Balita	per 1000 KH	9,5	0,60	1583,33	Sangat Tinggi	Lintas PD
11	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,03	0,05	61,22	Rendah	Lintas PD
12	Angka Kematian Ibu	per 100000 KH	1100	103,94	1058,30	Sangat Tinggi	Lintas PD
13	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Lintas PD
14	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
15	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80	66,31	82,89	Tinggi	Bag. Organisasi
16	Prosentase perangkat daerah pelayanan yang indeks IKMnya Baik	%	100	96,36	96,36	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
17	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	75,00	75,00	Sedang	Bag. Umum
18	Jumlah jamaah yang terlayani transportasi, komunikasi dan silaturahmi	Nilai angka	90	84,00	93,33	Sangat Tinggi	Bag. Kesra
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,73	7,45	96,38	Sangat Tinggi	Disdikbud
20	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,5	12,95	89,31	Tinggi	Disdikbud
21	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,45	74,43	99,97	Sangat Tinggi	Dinas kesehatan
22	Total Fertillity Rate (TFR)	Indeks	2,2	2,30	104,55	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
23	Prosentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan	%	20	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	PMKS lainya yang tertangani						
24	Prosentase fakir miskin dan PMKS yang mendapat pembinaan	%	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
25	Persentas PSKS yang dibina	%	10	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
26	Prosentase PMKS yang didampingi	%	100	20,00	20,00	Sangat Rendah	Dinas Sosial
27	Prosentase Anak terlantar yang dibina	%	10	10,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
28	Jumlah meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	anak	366	356	97,27	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
29	Prosentase Meningkat-nya kemam-puan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	60	10,00	16,67	Sangat Rendah	Dinas Sosial
30	Cakupan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
31	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	Orang	300	1554	518,00	Sangat Tinggi	Disporapar
32	Atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	125	692	553,60	Sangat Tinggi	Disporapar
33	Prestasi pemuda kendal di lingkup provinsi maupun nasional	orang	60	331	551,67	Sangat Tinggi	Disporapar
34	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.380	5318	385,36	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
35	Prosentase koperasi sehat	%	90	100,00	111,11	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
36	Ketersediaan pangan Utama /beras	%	177	184,80	104,41	Sangat Tinggi	DPP
37	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan Budidaya	%	3,5	0,00	0,00	Sangat Rendah	DKP
38	Prosentase pertumbuhan kunjungan wisata	% / Pertahun	5	-46,00	-920,00	Sangat Rendah	Disporapar
39	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar budaya	3	1,00	33,33	Sangat Rendah	Disdikbud
40	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	Kasus	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
41	Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	2	9	450,00	Sangat Tinggi	PUPR
42	Tersedianya dokumen data base jalan yang up to date	Dok	16	10	62,50	Rendah	PUPR
43	Prosentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	%	100	88,28	88,28	Tinggi	PUPR
44	Jumlah jalan/ jembatan yang terbangun	Jalan/ Jembatan	8	4	50,00	Sangat Rendah	PUPR
45	Prosentase Daerah irigasi berfungsi baik	%	70	63,01	90,01	Sangat Tinggi	PUPR
46	Jumlah kegiatan konservasi	%	54,5	47,92	87,93	Tinggi	PUPR
47	prosentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	%	99	84,00	84,85	Tinggi	PUPR
48	Prosentase Kawasan	%	0	0,00	100,00	Sangat	Dinas

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kumuh					Tinggi	Perkim
49	Prosentase rumah tangga yang mengunakan air minum	%	100	94,00	94,00	Sangat Tinggi	PUPR
50	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	PUPR
51	Nilai Investasi	Trilyun	7715	8.344,217	108,16	Sangat Tinggi	DPMPTSP
52	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,7	7,56	75,40	Tinggi	Disnaker
53	Prosentase angka kriminalitas yang tertangani	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
Pendidikan							
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	53	56,79	107,15	Sangat Tinggi	Disdikbud
2	Prosentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	%	50	47,09	94,18	Sangat Tinggi	Disdikbud
3	Angka kelulusan pendidikan non formal	%	84	86,25	102,68	Sangat Tinggi	Disdikbud
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A	%	100	106,67	106,67	Sangat Tinggi	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	100	89,86	89,86	Tinggi	Disdikbud
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A	%	90	94,56	105,07	Sangat Tinggi	Disdikbud
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	66	73,88	111,94	Sangat Tinggi	Disdikbud
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,02	0,03	66,67	Sedang	Disdikbud
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,1	0,09	111,11	Sangat Tinggi	Disdikbud
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/SDLB/MI ke SMP/SMPLB/MTs	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/SMPLB/MTs ke SMA/SMALB/SMK/ MA	%	90	99,13	110,14	Sangat Tinggi	Disdikbud
12	Prosentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	%	66,85	71,33	106,70	Sangat Tinggi	Disdikbud
13	Prosentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	%	89,79	79,89	88,97	Tinggi	Disdikbud
14	Prosentase SD Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	68,36	70,01	102,41	Sangat Tinggi	Disdikbud
15	Prosentase SMP Memiliki Ruang Perpustakaan Kondisi Baik	%	91,18	75,25	82,53	Tinggi	Disdikbud
16	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SD		1	1,01	99,01	Sangat Tinggi	Disdikbud
17	Rasio Rombongan Belajar/Ruang Kelas SMP		1	0,95	105,15	Sangat Tinggi	Disdikbud
18	Rasio Guru/Siswa SD		0,05	0,06	89,29	Tinggi	Disdikbud
19	Rasio Guru/Siswa SMP		0,05	0,06	81,97	Tinggi	Disdikbud

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
20	Prosentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf	%	97,5	93,93	96,34	Sangat Tinggi	Disdikbud
21	Prosentase PKBM Memiliki Akreditasi	%	75	75,00	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
22	Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi	%	54	56,66	104,93	Sangat Tinggi	Disdikbud
23	Prosentase Pendidik TK Memiliki Sertifikasi	%	44	44,92	102,09	Sangat Tinggi	Disdikbud
24	Prosentase Pendidik SD Memiliki Sertifikasi	%	60	60,52	100,87	Sangat Tinggi	Disdikbud
25	Prosentase Pendidik SMP Memiliki Sertifikasi	%	62	61,07	98,50	Sangat Tinggi	Disdikbud
26	prosentase ketersediaan data kependidikan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Disdikbud
Kesehatan							
1	Prosentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	90	70,00	77,78	Tinggi	Dinas Kesehatan
2	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	62,20	62,20	Rendah	Dinas Kesehatan
3	Cakupan sarana prasarana puskesmas	Puskesmas	78	50,00	64,10	Rendah	Dinas Kesehatan
4	Jumlah RS pemerintah yang dibangun	Buah	1	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
5	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	30	30,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	%	85	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
7	Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	%	90	84,73	94,14	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (status Minimal Madya)	%	50	99,65	199,30	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
9	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,6	6,50	86,15	Tinggi	Dinas Kesehatan
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
11	Prosentase BBLR (Berat badan <2.500 gr)	%	4	4,60	86,96	Tinggi	Dinas Kesehatan
12	Cakupan penggunaan air bersih	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
13	Strata Kabupaten Sehat	Kategori	Padapa	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
14	Cakupan penggunaan jamban keluarga yang memenuhi syarat	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
15	Cakupan Rumah sehat	%	85	75,56	88,89	Tinggi	Dinas Kesehatan
16	Puskesmas memiliki IPAL	unit	30	14,00	46,67	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
17	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
18	Jml seluruh pasien Tb yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk disuatu wilayah tertentu (CNR)	/100.000 pddk	165	136,77	82,89	Tinggi	Dinas Kesehatan
19	Prosentase angka kasus	%	85	90,65	106,65	Sangat	Dinas

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	HIV yang diobati (SUFA)					Tinggi	Kesehatan
20	Persentase desa melaksanakan STBM	%	100	80,00	80,00	Tinggi	Dinas Kesehatan
21	Prosentase puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana pnemonia melalui program MTBS	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
22	Prosentase puskesmas yang melakukan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
23	prosentase penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	87,40	87,40	Tinggi	Dinas Kesehatan
24	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	/100.000 pddk	<55	13,93	394,83	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
25	Prosentase KLB dapat ditangani < 24 jam	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
26	Acute Flaccid Paralysis (AFP) anak usia dibawah 15 tahun	Per 100.000 pddk	≥ 2	0,88	44,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
27	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu	%	100	10,00	10,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
28	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan integrasi sistem informasi kesehatan	%	100	90,00	90,00	Tinggi	Dinas Kesehatan
29	Rasio dokter per satuan penduduk	/100.000 pddk	21,1	31,40	148,82	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
30	Rasio para medis per satuan penduduk	/100.000pddk	45	212,80	472,89	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin ((jumlah yang dilayani/jumlah kunjungan)x100%))	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
32	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes	%	84,5	99,90	118,22	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
33	Cakupan kunjungan bayi	%	97	100,00	103,09	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
35	Cakupan penduduk memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	90	0,00	0,00	Sangat Rendah	
36	Prosentase Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
37	BOR (Bed Occupancy Rate)	%	75	60,57	80,76	Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
38	AVLOS (Average Length Of Stay)	Hari	3,5	3,44	101,74	Sangat Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
39	NDR (Net Date Rate)	%	2,5	3,34	74,85	Sedang	RSUD Dr.H.

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
							Soewondo
40	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Rumah Sakit	Nilai	85	83,17	97,85	Sangat Tinggi	RSUD Dr.H. Soewondo
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Prosentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	%	93	87,00	93,55	Sangat Tinggi	PUPR
2	Prosentase cakupan drainase lingkungan kondisi baik	%	100	97,80	97,80	Sangat Tinggi	PUPR
3	Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	%	85	75,08	88,33	Tinggi	PUPR
4	prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	100	92,10	92,10	Sangat Tinggi	PUPR
5	Prosentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan.	%	12	17,11	142,58	Sangat Tinggi	DLH
6	Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	PUPR
7	Prosentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	Prosen	4	6,00	150,00	Sangat Tinggi	PUPR
Perkim							
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH)	%	98,01	87,85	89,63	Tinggi	Dinas Perkim
2	Prosentase PSU perumahan dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
3	prosentase kawasan permukiman kumuh	%	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perkim
4	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan	%	47,9	40,91	85,41	Tinggi	Dinas Perkim
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
6	Cakupan penanganan kebakaran sesuai dengan Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)	%	100	97,50	97,50	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
7	Prosentase capaian kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
8	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	unit	12	11,00	91,67	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
Ketentraman, ketertiban umum dan							

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	prosentase patroli siaga ketentraman ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	52,00	52,00	Rendah	Satpol PP dan Damkar
2	cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	1.328	1027	77,33	Tinggi	Satpol PP dan Damkar
3	cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	rasio	1,4	1,40	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
4	jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	98	98,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
5	rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	Per Desa/ kelurahan	5	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
6	Tertanganinya konflik sosial yang terjadi	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
7	Cakupan penegakan Perda	%	100	60,00	60,00	Rendah	Satpol PP dan Damkar
8	rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Per 10.000 penduduk	0,6	0,58	96,67	Sangat Tinggi	Satpol PP dan Damkar
9	meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggar Perda	berkas	520	237	45,58	Sangat Rendah	Satpol PP dan Damkar
10	Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Kesbangpol
11	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	3125	22357	715,42	Sangat Tinggi	Kesbangpol
12	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	ormas	5	4,00	80,00	Tinggi	Kesbangpol
13	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	%	80	82,00	102,50	Sangat Tinggi	Kesbangpol
14	Jumlah data dan informasi	Dokumen	23	18,00	78,26	Tinggi	BPBD
15	Prosetase bencana yang tertangani	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	BPBD
16	meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada kordan sertaDinas Kesehatan	%	100	50,00	50,00	Sangat Rendah	BPBD
17	Prosentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	10	10,00	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
Sosial							
1	Prosentase pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainya yang tertangani	%/tahun	20	20,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
2	Prosentase pembinaan	%/tahu	10	10,00	100,00	Sangat	Dinas

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Anak terlantar yang tertangani	n				Tinggi	Sosial
3	Jumlah pembinaan anak cacat dan trauma yang tertangani	Anak	366	356,00	97,27	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
4	Prosentase Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	%/tahun	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
5	Prosentase pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani	%/tahun	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Sosial
Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							-
Ketenagakerjaan							
1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	78	43,00	55,13	Rendah	Disnaker
2	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	93	91,42	98,30	Sangat Tinggi	Disnaker
3	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	95	94,00	98,95	Sangat Tinggi	Disnaker
4	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	75	74,00	98,67	Sangat Tinggi	Disnaker
5	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang terbina	%	65	45,00	69,23	Sedang	Disnaker
6	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Berijin	LPK	24	43,00	179,17	Sangat Tinggi	Disnaker
7	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	91,86	0,00	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
8	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB	%	90	53,00	58,89	Rendah	Disnaker
9	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	orang	23.000	143849,00	625,43	Sangat Tinggi	Disnaker
10	Prosentase Pemeriksaan Perusahaan	%	81,4	0,00	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
11	Prosentase Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	40,78	0,00	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
12	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	77,7	68,75	88,48	Tinggi	Dinas P2KBP3A
13	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49,91	49,91	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
14	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga Legislatif	%	22,22	22,22	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
15	Rasio KDRT dan anak	%	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
16	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	%	13	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas P2KBP3A
17	Cakupan Pengelola Industri rumahan (IR) yang	%	45,52	39,50	86,78	Tinggi	Dinas P2KBP3A

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	mendapatkan pelatihan ketrampilan						
Pangan							
1	Ketersediaan energi perkapita	%	185	187,30	101,24	Sangat Tinggi	DPP
2	Ketersediaan protein perkapita	%	117	131,90	112,74	Sangat Tinggi	DPP
3	Penguatan Cadangan Pangan	%	45	31,50	70,00	Sedang	DPP
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90	98,00	108,89	Sangat Tinggi	DPP
5	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	80	97,92	122,40	Sangat Tinggi	DPP
6	Penanganan daerah rawan pangan	%	50,1	52,72	105,23	Sangat Tinggi	DPP
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,5	87,20	99,66	Sangat Tinggi	DPP
8	Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan	%	86	90,00	104,65	Sangat Tinggi	DPP
Pertanahan							
1	Lahan Pemda Bersertifikat	Bidang	225	134,00	59,56	Rendah	PUPR
2	Jumlah konflik pertanahan milik Pemda	kasus	0	2,00	100,00	Sangat Tinggi	PUPR
Kependudukan dan Pencatatan sipil							
1	Rasio Penduduk ber KTP	%	98	99,69	101,72	Sangat Tinggi	Dispendukcapil
2	Rasio Anak berakte kelahiran	%	99	94,80	95,76	Sangat Tinggi	Dispendukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	95	69,36	73,01	Sedang	Dispendukcapil
4	Rasio Pasangan berakte nikah	%	13	12,00	92,31	Sangat Tinggi	Dispendukcapil
5	Cakupan Akte Kematian	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dispendukcapil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinpermasdes
2	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Unit	266	218,00	81,95	Tinggi	Dinpermasdes
3	Desa yang mendapatkan program TMMD	Desa	16	61,00	381,25	Sangat Tinggi	Dinpermasdes
4	Jumlah aparatur desa yg sudah mengikuti bintek / pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	1862	2863,00	153,76	Sangat Tinggi	Dinpermasdes
5	Jumlah data dan informasi	Dokumen	266	1596,00	600,00	Sangat Tinggi	Dinpermasdes
6	Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	30,5	53,50	175,41	Sangat Tinggi	Dinpermasdes
7	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes, APBDes, dan RKPDes	desa	266	266,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinpermasdes
Pengendalian penduduk dan KB							
1	Rasio akseptor KB (baru)	%	95,5	84,57	88,55	Tinggi	Dinas P2KBP3A
2	Cakupan peserta KB aktif	%	82	70,26	85,68	Tinggi	Dinas P2KBP3A
3	Cakupan Anggota Bina	%	79,32	79,10	99,72	Sangat	Dinas

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Keluarga Balita (BKB) ber KB					Tinggi	P2KBP3A
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	%	1,2	1,15	104,35	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
5	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidakterpenuhi (Unmet Need)	%	10	15,77	157,70	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
6	Angka pemakaian kontrasepsi Pria /CPR bagi Pria	%	1,4	1,38	98,57	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dengan strata berkembang	%	69,23	69,23	100,00	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
8	Prosentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling	%	31,1	29,30	94,21	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
9	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	80	85,10	106,38	Sangat Tinggi	Dinas P2KBP3A
Perhubungan							
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	unit	6	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
2	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
3	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	6	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
4	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	unit	940	910,00	96,81	Sangat Tinggi	Dishub
5	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji Perhubungan Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	unit	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
6	Jumlah uji KIR angkutan umum		12.930	38056,00	294,32	Sangat Tinggi	Dishub
7	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	unit	5	5,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
8	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	62	62,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
9	prosentase Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	86	80,00	93,02	Sangat Tinggi	Dishub
10	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	unit	1.500	1217,00	81,13	Tinggi	Dishub
11	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill)	unit	7.877	6750,00	85,69	Tinggi	Dishub

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kabupaten/ Kota.						
12	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	unit	11	11,00	100,00	Sangat Tinggi	Dishub
13	Prosentase Layanan PJU Berbasis Smart City	Prosen	75	56,00	74,67	Sedang	Dishub
Komunikasi dan Informatika							
1	Jumlah Hotspot yang tersedia	titik	29	85,00	293,10	Sangat Tinggi	Diskominfo
2	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah daerah, Sarana komunikasi (media massa, media internasional, media luar ruang, media tradisional dan media online	SIM	20	147,00	735,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
3	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	75,00	75,00	Sedang	Diskominfo / Protokol
4	Jumlah website SKPD telah memiliki sub domain resmi	SKPD	22	63,00	286,36	Sangat Tinggi	Diskominfo
5	Prosentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Prosen	59	59,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
6	Prosentase kerja sama informasi dengan mas media	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
7	Prosentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
8	Jumlah Perda /perbup dan kajian dalam penyelanggaraan TIK	Dokumen	1	2,00	200,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
Koperasi dan UMKM							
1	Jumlah wirausaha baru mikro	unit	32.337	159845,00	494,31	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
2	Cakupan dukungan manajemen UMKM	Kec	20	35,00	100,00	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
3	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Unit	1.380	1355,00	98,19	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
4	Prosentase Koperasi aktif	%	78,65%	78,00%	99,17	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
Lingkungan Hidup							
1	Terpenuhinya IKLH	Skor	68,00	65,37	96,13	Sangat Tinggi	DLH
2	Jumlah daerah layanan pengangkutanke TPA	Kecamatan	17	17,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
3	Jumlah lokasi Taman dan RTH perkotaan yang tertata	lokasi	34	35,00	102,94	Sangat Tinggi	DLH
4	Jumlah jenis data informasi lingkungan hidup yang dapat diakses	jumlah	5	33,00	660,00	Sangat Tinggi	DLH
5	Jumlah sumber mata air yang tertangani	titik	2	2,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
6	Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani	Ha	20	18,20	91,00	Sangat Tinggi	DLH
7	Prosentase volume timbulan sampah yang	%	13,06	20,50	156,97	Sangat Tinggi	DLH

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	tertangani						
8	Prosentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
9	Jumlah makam yang dipelihara/ dikelola Pemda	lokasi	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	DLH
Penanaman modal							
1	Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	30	8,00	26,67	Sangat Rendah	DPMPTSP
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah	432	676,00	156,48	Sangat Tinggi	DPMPTSP
3	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	dokumen	6	1,00	16,67	Sangat Rendah	DPMPTSP
4	Kecepatan pelayanan perizinan	hari	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Kepemudaan dan Olahraga							
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	70	80,00	114,29	Sangat Tinggi	Disporapar
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	kegiatan	70	80,00	114,29	Sangat Tinggi	Disporapar
3	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	kelompok	24	25,00	104,17	Sangat Tinggi	Disporapar
4	Jumlah wirausaha muda pemula	orang	400	582,00	145,50	Sangat Tinggi	Disporapar
5	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	cabor	33	37,00	112,12	Sangat Tinggi	Disporapar
6	Jumlah klub olahraga	klub	70	120,00	171,43	Sangat Tinggi	Disporapar
7	Jumlah gedung olahraga	unit	10	9,00	90,00	Tinggi	Disporapar
8	Jumlah atlit berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	130	892,00	686,15	Sangat Tinggi	Disporapar
Statistik							
1	Buku Kendal dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
2	Buku PDRB dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Ada	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
Persandian							
1	Prosentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pusat dan Provinsi	%	2,5	na	0,00	Sangat Rendah	Bag. Umum/ Protokol
Kebudayaan							
1	Prosentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya	%	90	75,00	83,33	Tinggi	Disdikbud
2	Prosentase misi budaya yang dilestarikan	%	100	85,00	85,00	Tinggi	Disdikbud
3	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	Kelompok	585	975,00	166,67	Sangat Tinggi	Disdikbud
4	Jumlah grup kesenian	Kelompok	600	676,00	112,67	Sangat Tinggi	Disdikbud
5	Cakupan Kajian Seni	%	90	75,00	83,33	Tinggi	Disdikbud
6	Cakupan Fasilitasi Seni	%	90	70,00	77,78	Tinggi	Disdikbud
7	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	90	85,00	94,44	Sangat Tinggi	Disdikbud
8	Cakupan Organisasi Seni	%	95	80,00	84,21	Tinggi	Disdikbud

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9	Cakupan Gelar Seni dan Budaya	%	95	90,00	94,74	Sangat Tinggi	Disdikbud
Kearsipan							
1	Pengelolaan arsip dinamis dan statis	berkas	910.600	22.144	2,43	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Prosentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara	%	3,52	2,73	77,56	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah arsip yang dialihmediakan	lembar	4.000	2.900	72,50	Sedang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah Arsiparis / Tenaga teknis perpustakaan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	349	314,00	89,97	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	prosentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen	75	65,00	86,67	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan							
1	tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	41.770	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	116.443	87.824	75,42	Tinggi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan		-	-				-
Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	155.652.231	130.754.299	84,00	Tinggi	DKP
2	Tingkat cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	5	2,70	54,00	Rendah	DKP
3	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Kelompok/ tahun	10	4,00	40,00	Sangat Rendah	DKP
4	Produksi perikanan tangkap	Kg	13.223.630	13.818.619	104,50	Sangat Tinggi	DKP
5	Prosentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam kondisi baik	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DKP
6	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok/ tahun	10	4,00	40,00	Sangat Rendah	DKP
7	Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kap/th)	kg/kap/th	18,75	26,41	140,85	Sangat Tinggi	DKP
Pariwisata							
1	Kunjungan wisata	orang	1.850.961	4.497.730	242,99	Sangat Tinggi	Disporapar
2	Prosentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Disporapar
3	Jumlah obyek wisata unggulan	DTW	10	16	160,00	Sangat Tinggi	Disporapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,71	0,036	5,07	Sangat Rendah	Disporapar

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			2.166.641	1735993,92	80,12		
Pertanian							
1	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	429	433	100,93	Sangat Tinggi	DPP
	Produksi pertanian tanaman pangan utama						DPP
2	- Padi	Ton	1.432.243	1.506.027	105,15	Sangat Tinggi	DPP
3	- Jagung	Ton	1.279.057	1.281.515	100,19	Sangat Tinggi	DPP
4	- Kedelai	Ton	8.077	10.156	125,74	Sangat Tinggi	DPP
	Produksi tanaman hortikultura						DPP
5	- Bawang merah	Kwintal	1.634.655	1.487.386	90,99	Sangat Tinggi	DPP
6	- Cabe	Kwintal	267.682	303.258	113,29	Sangat Tinggi	DPP
	Produksi tanaman perkebunan						DPP
7	- Tebu	Ton	106.344,10	109.121	102,61	Sangat Tinggi	DPP
8	- Tembakau	Ton	6.998,43	14.178	202,59	Sangat Tinggi	DPP
9	- Kopi	Ton	7.043,70	7.943	112,77	Sangat Tinggi	DPP
10	- Cengkeh	Ton	1.081,50	1.631	150,82	Sangat Tinggi	DPP
11	- Karet	Ton	307,43	878	285,57	Sangat Tinggi	DPP
12	- Kelapa	Ton	3.339,19	3.562	106,67	Sangat Tinggi	DPP
13	- Kakao	Ton	855,93	930	108,67	Sangat Tinggi	DPP
14	Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian	Even	28	17	60,71	Rendah	DPP
15	Cakupan bina kelompok tani	Kelompok	429	433	100,93	Sangat Tinggi	DPP
	Populasi komoditas peternakan utama						DPP
16	- Sapi potong	ekor	21.106	124.323	589,04	Sangat Tinggi	DPP
17	- Kambing	ekor	38.696	228.759	591,17	Sangat Tinggi	DPP
18	- Domba	ekor	31.354	177.279	565,41	Sangat Tinggi	DPP
19	- Ayam ras pedaging	ekor	50.031.800	55.784.472	111,50	Sangat Tinggi	DPP
20	- Ayam ras petelur	ekor	4.100.000	25.879.054	631,20	Sangat Tinggi	DPP
	Meningkatnya produksi daging dan telur						DPP
21	- daging sapi	kg	4.390.543	4.240.884	96,59	Sangat Tinggi	DPP
22	- daging kambing	kg	686.371	708.420	103,21	Sangat Tinggi	DPP
23	- Daging domba	kg	93.468	101.656	108,76	Sangat Tinggi	DPP
24	- Daging ayam ras pedaging	kg	35.265.	38.567.3	109,36	Sangat	DPP

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			239	97		Tinggi	
25	- Telur ayam ras	kg	226.300.420	231.648.970	102,36	Sangat Tinggi	DPP
	Angka kematian / mortalitas ternak						DPP
26	- Sapi potong	%	2,4	0,00	94051 2,58	Sangat Tinggi	DPP
27	- Domba	%	2,15	0,00	14235 58,23	Sangat Tinggi	DPP
28	- Kambing	%	2,15	0,00	10075 30,71	Sangat Tinggi	DPP
29	- Ayam ras	%	5	0,00	12750 00000,00	Sangat Tinggi	DPP
30	Luas Lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal/dalam, embung, dam parit,long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan	Ha	8.080	9.884	122,33	Sangat Tinggi	DPP
31	Luas Lahan Pertanian Panga Berkelanjutan (LP2B)	Ha	22.666	22.666	100,00	Sangat Tinggi	DPP
32	Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	Ha	13.100	10.136	77,37	Tinggi	DPP
33	Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	Ha	35.000	204.142	583,26	Sangat Tinggi	DPP
34	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	122	632	518,03	Sangat Tinggi	DPP
Perdagangan							
1	Prosentase UTTP yang ditera	%	90	15,72	17,47	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
2	Perkembangan nilai ekspor	%	5	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
3	Cakupan bina kelompok pedagang/ jumlah pedagang	%	100	30,82	30,82	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	%	95	28,57	30,07	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
5	Prosentase pasar yang memenuhi persyaratan	%	16,66	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
6	Prosentase lokasi PKL yang tertata	%	10	0	0,00	Sangat Rendah	Dinas perdagangan
Perindustrian							
1	Prosentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%	4,62	4,01	86,80	Tinggi	Disperinkop & UKM
2	Prosentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT	%	17,89	16,47	92,06	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM
3	Prosentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil	%	0,03	0,36	1200,00	Sangat Tinggi	Disperinkop & UKM

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Melalui sertifikasi Halal						
4	Prosentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	%	3,3	2,64	80,00	Tinggi	Disperinkop & UKM
5	Kontribusi sektor industri Pengolahan dalam PDRB	%	42,14	0	0,00	Sangat Rendah	Disperinkop & UKM
Transmigrasi							
1	Jumlah calon transmigran yang dilatih tentang kemampuan dasar sesuai dengan lokasi dan kebutuhan kompetensi.	KK	28	26,7	95,36	Sangat Tinggi	Disnaker
2	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	20	0	0,00	Sangat Rendah	Disnaker
Urusan Penunjang							
Kepegawaian							
1	Prosentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/ Bintek yang difasilitasi BKPP Kabupaten Kendal pada tahun berjalan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2	Prosentase struktur jabatan yang terisi	%	95	88,70	93,37	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3	Jumlah jenis pelayanan berbasis teknologi informasi	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov	19	16,00	84,21	Tinggi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4	Prosentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan							
1	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	85	81,51	95,89	Sangat Tinggi	Inspektorat
2	prosentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
3	Prosentase aduan masyarakat atas layanan public yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
4	Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Huruf	B	BB	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
5	Tingkat Maturitas Sistem	Level	3	3,00	100,00	Sangat	Inspektorat

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)					Tinggi	
6	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	2,00	66,67	Sedang	Inspektorat
7	Prosentase Aparatur Sipil Negara yang melaporkan hasil kekayaan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Inspektorat
Pengelolaan Keuangan dan Aset							
1	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	23	23,11	100,48	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
Pemerintahan Umum							
1	Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan.	buah	84	98	116,67	Sangat Tinggi	Setwan
2	Prosentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	Prosen	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Setwan
3	% PD yang bernilai IKM baik	%	100	96,36	96,36	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
4	% Pelaksanaan Urusan Sesuai SPM yang telah diterbitkan	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
5	Jumlah Produk Kerjasama Daerah	Dokumen	45	33,00	73,33	Sedang	Bag. Tapem
Perencanaan Pembangunan							
1	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	65	74,50	114,62	Sangat Tinggi	BAPERLITBANG
2	Prosentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD	%	90	62,50	69,44	Sedang	BAPERLITBANG
3	Prosentase Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPERLITBANG
4	Sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPERLITBANG
5	Prosentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	%	65	70,14	107,91	Sangat Tinggi	BAPERLITBANG
6	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	dok	1	0,00	0,00	Sangat Rendah	BAPERLITBANG
ASPEK DAYA SAING							
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan							
	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	92	92	100,00	Sangat Tinggi	
	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	unit	26	26	100,00	Sangat Tinggi	
Lingkungan Hidup							
1)	Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	100	92,2	92,20	Sangat Tinggi	
Fokus Iklim Berinvestasi							
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,							

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian RPJMD 2016-2021			PD Penanggung Jawab
				Capaian RPJMD 2016-2021	Prosentase Capaian	Status Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1)	Angka kriminalitas	Kasus	110	151	72,85	Sedang	
2)	Lama proses perijinan	hari	7	7	100,00	Sangat Tinggi	
Fokus Sumber Daya Manusia							
1)	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	5,8	2,78	47,93	Sangat Rendah	
2)	Rasio ketergantungan	Rasio	0,44	0	0,00	Sangat Rendah	

2.5.2 Capaian Kinerja Program dalam RPJMD 20216-2021 sampai dengan Tahun 2020

Dari hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diperoleh bahwa jumlah program RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 sejumlah 501 program dan jumlah program RKPD Tahun 2020 sejumlah 440 program. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, terdapat 501 (Lima ratus satu) program yang dijabarkan dalam 551 indikator program RPJMD 2016-2021. Adapun capaian indikator program dalam RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun anggaran 2020 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai beikut :

a. Sangat Tinggi, sejumlah 456 Indikator atau 82,76%;
b. Tinggi, sejumlah 52 indikator atau 9,44%;
c. Sedang, sejumlah 8 indikator atau 1,45%;
d. Rendah, sejumlah 11 indikator atau 2,00%;
e. Sangat Rendah, sejumlah 24 indikator atau 4,36%;

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 terdapat indikator belum tercapai diantaranya karena adanya pandemi covid 19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional. Selain itu upaya pencapaian target juga dipengaruhi realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan wabah covid 19. Secara lengkap hasil evaluai terhadap capaian indikator program RPJMD 2016-2021 sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.66
Capaian indikator kinerja program rpjmd kabupaten kendal
Periode 2016-2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	Urusan Wajib																			
1.01	Urusan Pendidikan																			
1.01.1.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00	Sangat Tinggi	84,00	84,00	Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	36,00	6	6,00	23,00	6,00	23,00	6,00	23,00	6,00	23,00	383,33	Sangat Tinggi	92,00	255,56	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	87,75	88,00	87,50	88,00	87,75	88,00	88,00	88,00	100,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.15	Program pendidikan anak usia dini	APK PAUD	Prosen	53,00	43,84	64,00	43,84	63,00	48,07	64,00	56,79	65,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.16	Program wajib belajar pendidikan dasar															0,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	sembilan tahun																			
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	Prosen	0,02	0,09	0,08	0,10	0,07	0,06	0,06	0,19	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	0,04	50,00	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	Prosen	0,10	0,63	0.59	1,23	0	0,58	0,35	0,98	0,23	0,23	100,00	Sangat Tinggi	0,23	43,48	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.18	Program pendidikan non formal	Angka kelulusan pendidikan non formal	Prosen	84,00	81,45	88,51	84,81	90,53	84,83	91,24	86,25	91,60	86,25	94,16	Sangat Tinggi	86,25	102,68	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.20	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Presentase pendidik yang memiliki sertifikasi	Prosen	54,00	51,50	52,75	58,60	54,30	61,07	55,52	58,89	56,66	58,89	103,94	Sangat Tinggi	58,89	109,06	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.22	Program manajemen pelayanan pendidikan	persentase ketersediaan data kependidikan	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Urusan Kesehatan																			
1.02.1.02.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi	Laporan	100,00		100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	12,00	Sangat Rendah	48,00	48,00	Sangat Rendah		Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	dan keuangan	standar																		
1.02.1.02.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15	Program obat dan perbekalan kesehatan	persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	Puskesmas	100,00		96,00	98,00	97,00	90,00	98,00	90,00	99,00	70,00	70,71	Sedang	70,00	70,00	Sedang		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16	Program upaya kesehatan masyarakat	persentase puskesmas terakreditasi	Prosen	30,00		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	333,33	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.17	Program pengawasan obat dan makanan	Cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM / P-IRT)	Prosen	90,00		65,00	91,00	70,00	90,00	75,00	95,00	100,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.19	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	persentase desa siaga aktif minimal madya	Prosen	70,00		58,00	50,00	60,00	50,00	62,00	96,80	100,00	11,18	11,18	Sangat Rendah	11,18	15,97	Sangat Rendah		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.20	Program perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Prosen	0.02		0,03	4,20	0,03	4,20	0,03	4,02	85,00	3,76	4,42	Sangat Rendah	3,76	#VALUE!	#VALUE!		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	persentase desa melaksanakan STBM		100,00		20,00	100,00	40,00	100,00	60,00	100,00	75,00	80,00	106,67	Sangat Tinggi	80,00	80,00	Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.23	Program standarisasi pelayanan kesehatan	persentase fasyankes yang menerapkan integrasi sistem informasi kesehatan		100,00		25,00	43,30	40,00	90,00	80,00	100,00	116,00	80,00	68,97	Sedang	80,00	80,00	Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	orang	90,00		70,00	80,00	75,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	94,12	Sangat Tinggi	80,00	88,89	Tinggi		Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan	Cakupan sarana prasarana puskesmas	Puskesmas	78,00		68,00	68,00	70,00	70,00	72,00	72,00	75,00	50,00	66,67	Sedang	50,00	64,10	Rendah		Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya																		
1.02.1.02.01.26	Program Pengadaan,peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah RS pemerintah yang dibangun	buah	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	persentase warganegara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan	Prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	110,00		122,90	148,70	120,00	80,24	118,00	103,94	116,00		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	/1000 KH	8,00		8,89	9,05	8,75	6,42	8,50	9,60	8,20		0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	
1.02.1.02.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Pelayanan terhadap gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	Prosen	100		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr Soewondo
1.02.1.02.02.33	Program peningkatan kualitas pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan Blud	%	100			100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr Soewondo
1.03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
1.03.1.03.01.01	Program pelayanan	persentase unit kerja internal	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	administrasi perkantoran	yang terlayani																		Penataan Ruang
1.03.1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	60,00		12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	166,67	Sangat Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	12,00	Sangat Rendah	60,00	60,00	Rendah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100,00	86,50	100,00	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	87,25	Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Jalan dan Jembatan yang terbangun	Paket	8,00		0,00	1,00	*0,00*	0,00	*2,00*	3,00	*3,00*	0,00	0,00	Sangat Rendah	4,00	50,00	Sangat Rendah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik	prosen	98,00		84,00	60,00	*88,00*	39,00	*91,00*	87,40	*94,00*	87,00	92,55	Sangat Tinggi	87,00	88,78	Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	persentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	prosen	99,00		30,00	30,00	48,00	10,00	68,00	73,60	88,00	84,00	95,45	Sangat Tinggi	84,00	84,85	Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan	persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	prosen	100,00		70,00	70,00	80,00	71,57	88,00	88,00	94,00	86,38	91,89	Sangat Tinggi	86,38	86,38	Tinggi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	jembatan																		
1.03.1.03.01.20	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen inspeksi kondisi jalan	Dok	10,00		2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	9,00	90,00	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.21	Program tanggap darurat jalan dan jembatan	Jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Kegiatan	5,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	80,00	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Dokumen data base jalan yang up to date	Dok	16,00		2,00	2,00	0,00	1,00	4,00	5,00	4,00	2,00	50,00	Sangat Rendah	14,00	87,50	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	prosen	95,00		75,00	80,00	80,00	80,00	85,00	80,00	85,00	80,00	94,12	Sangat Tinggi	80,00	84,21	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan jasa konstruksi	persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	prosen	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.24	Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Daerah irigasi berfungsi baik	prosen	100,00		50,00	42,00	55,00	45,92	60,00	62,78	65,00	70,00	107,69	Sangat Tinggi	70,00	70,00	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.25	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi	prosen	85,00		65,00	70,05	70,00	71,03	75,00	75,02	80,00	75,08	93,85	Sangat Tinggi	75,08	88,33	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.26	Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya	Persentase kegiatan konservasi	Prosen	54,5		43,66	43,66	45,00	44,28	47,5	47,92	49,08	49,08	100,00	Sangat Tinggi	49,08	90,06	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	air lainya																		
1.03.1.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	prosen	100,00		83,00	94,00	89,00	94,00	100,00	94,00	100,00	94,00	94,00	Sangat Tinggi	94,00	94,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		- Proporsi penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Prosen	50,00		76,83	87,35	70,91	88,00	64,99	92,00	55,00	92,10	167,45	Sangat Tinggi	92,10	184,20	Sangat Tinggi	
1.03.1.03.01.28	Program pengendalian banjir	Persentase menurunnya luasan genangan di daerah rawan banjir	prosen	25,00		0,05	55,00	0,10	55,00	15,00	55,00	20,00	55,00	275,00	Sangat Tinggi	55,00	220,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.29	Program peningkaan infrastruktur perdesaan/perkotaan	persentase permukiman yang dilengkapi prasarana permukiman berkualitas	prosen	30,00		10,00	25,00	15,00	25,00	20,00	25,00	25,00	25,00	100,00	Sangat Tinggi	25,00	83,33	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.31	Program peningkatan sarana dan prasarana umum	persentase ketersediaan sarana prasarana umum	prosen	30		10	20,00	15	20,00	20	20,00	25	20,00	80,00	Tinggi	20,00	66,67	Sedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.34	Program pemanfaatan ruang	persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	Prosen	4,00		13,00	13,00	10,00	10,00	8,00	8,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.35	Program pengendalian pemanfaatan ruang	persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang	prosen	4,00		13,00	13,00	10,00	10,00	8,00	8,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																0,00			
1.03.3.01.01.33	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Perencanaan Tata ruang	-	95,00	-	1,00	56,00	37,86	56,00	56,72	56,00	69,42	56,00	80,67	Tinggi	56,00	58,95	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															0,00			
1.04.1.04.01.01	Program pelayanan	persentase unit kerja internal	prosen	100,00	100	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	administrasi perkantoran	yang terlayani																	Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	bln	12,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	12,00	100	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perumahan rakyat dan permukiman	bln	12,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	bln	12,00	12	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	12,00	86,50	12,00	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	727,08	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.15	Program pengembagan perumahan	cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	98,01	95,96	97,19	96,68	97,61	97,30	97,19	98,61	97,61	87,85	90,00	Sangat Tinggi	87,85	89,63	Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100,00	0	25,00	25,00	50,00	30,27	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.16	Program lingkungan sehat perumahan	persentase kawasan permukiman kumuh	%	0,00	69,9	56,75	56,75	20,95	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	0,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.0	Program	persentase	%	47,90	0,69	19,93	19,93	26,92	19,93	33,92	33,92	40,91	40,91	100,00	Sangat	40,91	85,41	Tinggi	Dinas

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
4.01.17	pemberdayaan komunitas perumahan	peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan													Tinggi					Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.04.1.04.01.18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	cakupan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial	unit	0,00	0	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	0,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																			
1.05.1.05.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100,00	87,25	87,00	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	100,00	Sangat Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang	Laporan	100,00		0,00	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	6,00	Sangat Rendah	24,00	24,00	Sangat Rendah		Satpol PP dan Damkar

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	capaian kinerja dan keuangan	memenuhi standar																		
1.05.1.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase pelaksanaan kegiatan pengamanan	keg	100,00	60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	100,00		31,25	3.105,00	3.105,00	3.200,00	3.200,00	8.652,00	8.652,00	1.150,00	13,29	Sangat Rendah	16.138,25	##########	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase ca paian kegiatan program peningkatan pemberantasan penyakit masya rakat (pekat)	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
1.05.1.05.01.25	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase capaian kegiatan program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Satpol PP dan Damkar
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																			
1.05.1.05.02.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	75,00		75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	133,33	Sangat Tinggi	100,00	133,33	Sangat Tinggi		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.0	Program	Persentase	prosen	100,00	100	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	200,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat		Kantor Kesatuan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.02.03	peningkatan disiplin aparatur	penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas													Tinggi			Tinggi	Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	rata-rata Nilai SKP	6,00		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kasus kriminalitas yang tertangani	Kasus	110,00		150,00	0,00	130,00	0,00	125,00	151,00	115,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	orang	3.125,00		3.125,00	3.105,00	3.125,00	3.200,00	3.125,00	8.652,00	3.125,00	1.150,00	36,80	Sangat Rendah	19.232,00	615,42	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan	ormas	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	80,00	Tinggi	19,00	380,00	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.1.05.02.21	Program pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu/pilkada	prosen	80,00		76,70	82,00	78,00	82,00	79,00	82,00	80,00	82,00	102,50	Sangat Tinggi	82,00	102,50	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1.05.1.05.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	30,00	3,00	2,00	30,00	2,00	30,00	2,00	30,00	2,00	30,00	1.500,00	Sangat Tinggi	30,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	87	86,00	87	86,00	87	86,00	88	86,00	97,73	Sangat Tinggi	86,00	97,73	Sangat Tinggi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.1.05.03.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Persentase peningkatan kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada kordan serta Dinas Kesehatan	Prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.01.1.05.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	Dokumen	20,00	4,00	7,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,00	1,00	50,00	Sangat Rendah	1,00	5,00	Sangat Rendah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial																			
1.06.1.06.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		dinas																		
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	5,00	0	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	5,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12,00	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	50,00	Sangat Rendah	24,00	200,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang tertangani	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.17	Program pembinaan anak terlantar	persentase Anak terlantar yang dibina	%	10,00	15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	10,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase meningkatnya pembinaan anak cacat dan trauma	%	336,00	316	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Sangat Tinggi	10,00	2,98	Sangat Rendah		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.21	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	prosentas PSKS yang dibina	%	42,00	100	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	7,00	16,67	Sangat Rendah		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.16	Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	persentase PMKS yang didampingi	%	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	Sangat Tinggi	20,00	20,00	Sangat Rendah		Dinas Sosial
1.06.1.06.01.22	Program pencegahan dini dan	Persentase Meningkatnya kemampuan	%	*60,00*	0	*10,00*	10,00	*10,00*	10,00	*10,00*	10,00	*10,00*	10,00	100,00	Sangat Tinggi	10,00	16,67	Sangat Rendah		Dinas Sosial

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	penanggulangan korban bencana alam	pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)																		
1.07	Tenaga Kerja																			
1.07.1.07.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	30,00	360	10,00	6,00	10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	Sangat Tinggi	24,00	80,00	Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100,00	88,00	100,00	88,00	100,00	88,00	100,00	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.15	Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Prosentasi Peserta Pelatihan terhadap seluruh pendaftar	%	93,00	100	866,00	86,00	480,00	86,00	600,00	89,00	720,00	50,00	6,94	Sangat Rendah	50,00	53,76	Rendah		Dinas Tenaga Kerja
1.07.1.07.01.16	Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	78,00	73,77	1.864,00	63,02	5.958,00	75,00	6.000,00	75,00	6.000,00	43,00	0,72	Sangat Rendah	43,00	55,13	Rendah		Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1.07.1.07.01.17	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Prosentasi kasus perselesihan hubungan industrial	%	90,00	96,36	715,00	50,00	353,00	50,00	750,00	50,00	750,00	50,00	6,67	Sangat Rendah	50,00	55,56	Rendah		Dinas Tenaga Kerja
1.08	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																			
1.08.1.14.01.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pembentukan Desa Layak Anak	prosen	12,59	3,85	5,59	6,00	7,34	7,34	9,1	10,84	10,84	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.08.1.14.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	prosen	77,78	30,43	33,33	37,68	49,33	50,80	64,1	68,75	68,75	68,75	100,00	Sangat Tinggi	68,75	88,39	Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.08.1.14.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT dan anak	Prosen	0,40	0,4	0,04	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	100,00	Sangat Tinggi	0,04	10,00	Sangat Rendah		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	prosen	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	100,00	Sangat Tinggi	22,22	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.09	Pangan																			
1.10	Pertanahan																			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.10.3.05.01.38	Program peningkatan, penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase penerbitan sertifikat aset Pemerintah Daerah	prosen	81,00		40,50	50,00	47,00	50,00	57,00	50,00	68,50	50,00	72,99	Sedang	50,00	61,73	Rendah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.11	Lingkungan Hidup																		
1.11.1.1.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	20	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	500,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	400,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1.01.07	Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
1.11.1.1.01.15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase volume timbunan sampah yang tertangani	prosen	13,06	8,73	9,43	9,55	10,46	10,71	11,39	21,26	12,39	20,50	165,46	Sangat Tinggi	20,50	156,97	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.03.1.03.01.37	Program pemgembangan kinerja pengelolaan kebersihan/pertamanan	Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah ke TPA	Kec	17,00	12	13,00	14,00	14,00	14,00	15,00	16,00	16,00	17,00	106,25	Sangat Tinggi	17,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.16	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indek Kulaitas Lingkungan Hidup	Score	68,00	49,82	63,49	63,49	65,00	66,29	66,00	66,24	67,00	65,37	97,57	Sangat Tinggi	65,37	96,13	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah sumber mata air yang tertangani	Jumlah	8,00		1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	8,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.18	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani (Ha)	Ha	20,00	6	8,00	9,80	10,00	14,47	12,00	24,00	15,00	18,20	121,33	Sangat Tinggi	18,20	91,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis Data informasi lingkungan yang dapat diakses	Jumlah	5,00	3	4,00	7,00	4,00	7,00	4,00	12,00	5,00	1,00	20,00	Sangat Rendah	30,00	600,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah lokasi taman dan RTH perkotaan yang tertata	Lokasi	34,00	26	26,00	27,00	28,00	27,00	30,00	35,00	32,00	35,00	109,38	Sangat Tinggi	35,00	102,94	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.1.1 1.01.25	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan hidup di wilayah penghasil tembakau	prosen	100,00	40	20,00	92,00	20,00	98,12	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Lingkungan Hidup	
1.04.1.1 1.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah makam yang dipelihara/dikelola Pemda	Lokasi	7,00	7	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	7,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup	
1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan																			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Sipil																			
1.12.1.12.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	60,00	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	166,67	Sangat Tinggi		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	0,00	NA	-	100,00	100	100,00	100	100,00	0	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	60,00	12	12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	80,00	Tinggi		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.12.1.12.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Penduduk ber KTP	Prosen	98,00		84	99,69	88	99,69	92	99,69	96	99,69	103,84	Sangat Tinggi	99,69	101,72	Sangat Tinggi		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																			
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.02	Program Peningkatan Sarana dan	persentase sarana dan prasarana	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Prasarana Aparatur	dengan kondisi baik pada Unit Kerja																		Desa
1.13.1.13.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	88,00	87	88,00	87,25	88,00	87,5	88,00	100,57	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	jumlah desa tertinggal di Kabupaten Kendal	Desa	0,00		85	85,00	65	0,00	45	0,00	23	0,00	0,00	Sangat Rendah	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah BUMDes yang terbentuk	unit	266,00	40	62	67,00	60	33,00	60	38,00	34	50,00	147,06	Sangat Tinggi	211,00	79,32	Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Aktif	Prosen	30,5	28	28,5	28,50	29	53,00	29,5	53,00	30	53,50	178,33	Sangat Tinggi	53,50	175,41	Sangat Tinggi		
1.13.1.13.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Desa yg mendapatkan program TMMD	Desa	16,00	2	2	3,00	3	3,00	3	3,00	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	14,00	87,50	Tinggi		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.13.1.13.01.18	Program peningkatan	Jumlah aparatur desa yg sudah	orang	1.862,00	266	328	266,00	266	843,00	271	400,00	465	822,00	176,77	Sangat Tinggi	2.597,00	139,47	Sangat Tinggi		Dinas Pemberdayaan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	kapasitas aparatur pemerintah desa	mengikuti bintek / pelatihan peningkatan kapasitas																		Masyarakat dan Desa
1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
1.14.1.14.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	12	99	99,00	99	99,00	99	99,00	99	99,00	100,00	Sangat Tinggi	99,00	99,00	Sangat Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	4	4	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang	Laporan	28,00	100	28	28,00	28	28,00	28	28,00	28	28,00	100,00	Sangat Tinggi	28,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	capaian kinerja dan keuangan	memenuhi standar																	Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	88,00	100	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB Aktif	Prosen	82,00	80,9	81,0	80,37	81,3	69,00	81,6	69,35	81,8	70,26	85,89	Tinggi	70,26	85,68	Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Rasio Akseptor KB (baru)	prosen	27,74	27,74	27,74	66,91	27,74	70,00	27,74	77,91	27,74	84,57	304,87	Sangat Tinggi	84,57	304,87	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	persentase PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling		31,10	21	22	28,89	24	33,30	26,6	26,60	28,8	29,30	101,74	Sangat Tinggi	29,30	94,21	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14.1.14.01.23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Cakupan Tribina pada Desa / Kelurahan untuk meningkatkan ketahanan Keluarga (BKB,BKR dan	Prosen	31,46	22,7	24,47	24,47	26,22	26,22	27,97	27,97	29,72	29,10	97,91	Sangat Tinggi	29,10	92,50	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		BKL)																	Perlindungan Anak	
1.14.1.14.01.24	Program pengembangan model oprasional BKB-psyandu-PADU	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	Prosen	79,32	79,23	79,23	79,25	79,27	79,12	79,28	79,28	79,30	79,10	99,75	Sangat Tinggi	79,10	99,72	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.15	Perhubungan																			
1.15.1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	
1.15.1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	
1.15.1.15.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	
1.15.1.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	
1.15.1.15.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	
1.15.1.15.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	88,00	100	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	
1.15.1.15.01.15	Program Pembangunan Prasarana dan	Jumlah Rute lintas penyeberangan	buah	3,00	2	2	2,00	2	2,00	3	3,00	3	3,00	100,00	Sangat Tinggi	3,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Fasilitas Perhubungan																		
1.15.1.15.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana prasarana perhubungan dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Trayek yang terlayani	Trayek	62,00	60	60	60,00	61	62,00	62	62,00	62	62,00	100,00	Sangat Tinggi	62,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah Pelabuhan, Terminal dan Taman Parkir	unit	6,00	5	5	5,00	6	6,00	6	6,00	6	6,00	100,00	Sangat Tinggi	6,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Layanan PJU Berbasis Smart City	%	75,00	0	15	15,00	30	30,00	45	52,00	60	56,00	93,33	Sangat Tinggi	56,00	74,67	Sedang	Dinas Perhubungan
1.15.1.15.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar	unit	12,00	11	11	11,00	11	11,00	12	11,00	12	11,00	91,67	Sangat Tinggi	11,00	91,67	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
1.16	Komunikasi dan Informatika																		
1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1	Program	persentase ASN	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat	Dinas

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.01.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar													Tinggi			Tinggi	Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	88,00	100	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah SistemInformasi ManajemenPemerintahDaerah, Saranakomunikasi(Media Massa,MediaInterpersonal,Media Luar ruang,Media Tradisionaldan MediaOnline)	SIM	20,00	11	15	17	16	52	17	102,00	18	150,00	833,33	Sangat Tinggi	150,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah Perda / Perbup dan kajian dalam penyelenggaraan TIK	dokumen	100,00	1	100	1,00	100	1,00	100	3,00	100	2,00	200,00	Sangat Tinggi	2,00	200,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Prosen	59,00		59	59,00	59	100,00	59	59,00	59	59,00	100,00	Sangat Tinggi	59,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase kerja sama informasi dengan mas media		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.16.01.19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.16.1.1	Program	Persentase		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat	Dinas

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
6.01.21	Kehumasan	pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda													Tinggi			Tinggi		Komunikasi dan Informatika
1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																			
1.17.1.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	45 stel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	55,00		40,00	55,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	100,00	Sangat Tinggi	55,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	130,00		125,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,75	87,00	87,75	87,25	87,75	87,50	87,75	100,29	Sangat Tinggi	87,75	99,72	Sangat Tinggi		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha	Jumlah usaha mikro yang berkembang	unit	32.337	1.285	31.847	15,00	31.962	1.328,00	32.082	1.355,00	32.207	1.355,00	4,21	Sangat Rendah	1.355,00	4,19	Sangat Rendah		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kecil Menengah yang konduksif	menjadi usaha kecil																	Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Wirausaha Baru mikro	unit	32.337	31.719	31.847	100,00	31.962	32.062,00	32.082	32.082,00	32.207	32.207,00	100,00	Sangat Tinggi	32.207,00	99,60	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil		1.380	1.278	1.300	15,00	1.315	1.328,00	1.355	1.355,00	1.355	1.355,00	100,00	Sangat Tinggi	1.355,00	98,19	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi	Orang	9.388,00	9.088	9.138,00	13,24	9.188,00	12,43	9.238,00	15,12	9.288,00	156,00	1,68	Sangat Rendah	156,00	1,66	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	95,00	70	72	77,26	75	83,00	80	91,22	85	100,00	117,65	Sangat Tinggi	100,00	105,26	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.17.1.17.01.20	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Cakupan dukungan manajemen UMKM	kec	20,00	5	6	5,00	0	0,00	0	20,00	0	0,00	0	Sangat Tinggi	30,00	150,00	Sangat Tinggi	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.18	Penanaman Modal																		
1.18.1.18.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas																		Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	40,00	20	40	40,00	40	40,00	40	40,00	40	40,00	100,00	Sangat Tinggi	40,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	11,00	9	11	5,00	11	5,00	11	5,00	11	5,00	45,45	Sangat Rendah	20,00	181,82	Sangat Tinggi		Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	432,00	194	241	173,00	289	149,00	336	561,00	384	676,00	176,04	Sangat Tinggi	1.753,00	405,79	Sangat Tinggi		Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kecepatan Pelayanan Perizinan	Hari	7,00		7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00	100,00	Sangat Tinggi	7,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.18.1.18.01.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Peta potensi investasi kabupaten Kendal	kegiatan	5,00	1	1	1,00	1	0,00	1	0,00	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi	2,00	40,00	Sangat Rendah		Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.19	Kepemudaan dan Olah Raga																			
1.19.1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit	prosen	12,00		12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		Kerja																		
1.19.1.19.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	400,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah pemuda yang yang dilatih pendidikan karakter	orang	300,00	NA	100,00	100,00	150,00	332,00	200,00	662,00	250,00	460,00	184,00	Sangat Tinggi	1.554,00	518,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Prestasi kepemudaan	Keg	15,00		8,00	2,00	8,00	2,00	12,00	2,00	15,00	2,00	13,33	Sangat Rendah	8,00	53,33	Rendah		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausahawan muda	orang	100,00	200	20,00	25,00	20,00	122,00	20,00	135,00	20,00	100,00	500,00	Sangat Tinggi	582,00	582,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Cabor	33,00	29	29,00	32,00	32,00	37,00	33,00	37,00	33,00	37,00	112,12	Sangat Tinggi	143,29	434,21	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.19.1.19.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah	persentase sarpras yang kondisi baik		80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	Sangat Tinggi	80,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Raga																			
1.20	Statistik																			
1.20.1.16.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah data/informasi/statistic daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	Sangat Tinggi	3	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Komunikasi dan Informatika
1.21	Persandian																			
1.22	Kebudayaan																			
1.22.1.01.01.15	Program pengembangan nilai budaya	Persentase misi budaya yang dilestarikan	Prosen	100,00	75	75	0,00	80	0,00	80	0,00	90	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.01.01.16	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	3,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	2	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.01.01.17	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah pembinaan kepada pelaku seni dan budaya	kelompok	585,00	550	565	0,00	575	0,00	580	0,00	585	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.22.1.19.01.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan budaya	Cakupan gelar seni dan budaya	Prosen	95,00		80	0,00	85	0,00	90	0,00	95	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.23	Perpustakaan																			
1.23.1.23.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.23.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	15,75		2,055	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	100,00	Sangat Tinggi	3,42	21,71	Sangat Rendah		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2	Program	Jumlah laporan	Laporan	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat		Dinas Kearsipan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.01.06	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar													Tinggi			Tinggi	dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.23.1.2 3.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	persentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen	75,00		55	0,00	60	100,00	65	65,00	70	65,00	92,86	Sangat Tinggi	65,00	86,67	Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.02.1.0 2.01.34	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	persentase penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen	100,00		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen	100,00		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
		persentase penderita ODGJ berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Prosen	100,00		100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.24.1.0 2.01.16	Program penyelamatan dan pelestariaan dokumeNArsip daerah	persentase arsip dinamis dan stastis yang diselamatkan	Prosen	12,00		4	0,20	12	4,54	12	6,48	12	2,73	22,75	Sangat Rendah	2,73	22,75	Sangat Rendah	Dinas Kesehatan
1.24.1.2 3.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	persentase Sarana dan Prasarana Kearsipan sesuai standar		95,00		77,500	77,50	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	100,00	Sangat Tinggi	90,00	94,74	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.2 3.01.16	Program penyelamatan	persentase arsip dinamis dan	Prosen	10,00		12,000	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	120,00	Sangat Tinggi	Dinas Kearsipan dan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	dan pelestarian dokumeNArsip daerah	stastis yang diselamatkan																		Perpustakaan
1.24.1.23.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	persentase perpustakaan dalam kondisi baik	Prosen	12,00		12,000	0,00	12,00	100,00	12,00	65,00	12,00	65,00	541,67	Sangat Tinggi	65,00	541,67	Sangat Tinggi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.24.1.23.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	persentase Sarana Prasarana Arsip dalam kondisi baik		12,00		12,000	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Urusan Pilihan																			
2.01	Kelautan dan Perikanan																			
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00	12	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100		100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	8,00	7	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,70	87	87,70	87,25	87,70	87,5	87,70	100,23	Sangat Tinggi	87,70	99,66	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Kinerja Aparatur Pemerintah																			
2.01.2.01.01.18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dalam bidang keselamatan pelayaran	kegiatan	24,00	4	4	4,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00	100,00	Sangat Tinggi	16,00	66,67	Sedang		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	155.652.231,00	22.883.000	24.027.885	24.027.885,00	25.229.279	25.379.950,00	26.490.743	26.547.940,00	27.815.280	9.948.428,00	35,77	Sangat Rendah	108.787.203,00	69,89	Sedang		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan Tangkap (kg)	kg	13.223.629,74	2.096.288	2.138.213	2.138.213,00	2.180.977	3.152.489,00	2.224.596	3.543.970,00	2.269.087	1.028.755,00	45,34	Sangat Rendah	11.959.715,00	90,44	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	Orang	13.223.629,74			10,00		10,00		20,00	2.269.087	4,00	0,00	Sangat Rendah	54,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya (kg)	kg	132.769.231,00	22.883.000	24.027.885	24.027.885,00	25.229.279	25.379.950,00	26.490.743	26.547.940,00	27.815.280	9.948.428,00	35,77	Sangat Rendah	85.904.203,00	64,70	Rendah		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.01.2.01.01.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Tingkat konsumsi ikan penduduk (kg/kap/th)	kg/kap/th	18,75		15,43	15,43	16,2	24,25	17,01	26,41	17,86	26,41	147,87	Sangat Tinggi	26,41	140,85	Sangat Tinggi		Dinas Kelautan dan Perikanan
2.02	Pariwisata																			
2.02.1.01.01.17	Program pengembangan kemitraan	1. Cakupan Organisasi Seni	Prosen	95,00	80	85	0,00	90	60,00	90	80,00	95	80,00	84,21	Tinggi	80,00	84,21	Tinggi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Prosen	0,36		0,50	0,50	0,55	0,55	0,53	0,53	0,36	0,36	100,00	Sangat Tinggi	0,36	100,00	Sangat Tinggi		
2.02.1.19.01.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase OW yang dipromosikan	Prosen	100,00		80	90,00	85	100,00	90	100,00	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.02.1.19.01.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah OW unggulan	DTW	10,00		9	12,00	9	15,00	9	16,00	10	16,00	160,00	Sangat Tinggi	68,00	680,00	Sangat Tinggi		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.02.1.19.01.17	Program pengembangan Kemitraan	1. Cakupan Organisasi Seni	Prosen	0,50		0,5	0,00	0,5	0,45	0,5	0,40	0,5	0,40	80,00	Tinggi	0,40	80,00	Tinggi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Prosen	0,01	0,0051	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	39,22	Sangat Rendah	0,00	39,22	Sangat Rendah	
2.03	Pertanian																		
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	212	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	40,00		43	40,00	40	40,00	40	40,00	40	40,00	100,00	Sangat Tinggi	40,00	100,00	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	60,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	80,00	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Prosen	100,10	NA	NA	103,17	100,04	103,17	100,06	103,17	100,08	103,17	103,09	Sangat Tinggi	103,17	103,07	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perke																		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	bunan																			
		Ketersediaan bahan pokok utama/beras (%)	prosen	177,00	171,68	157,57		173,00	174,12	175,00	176,71	177,00	184,80	104,41	Sangat Tinggi	184,80	104,41	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan Energi per kapita	Kkal/kapita	185,00	158	175,00	175,00	179,00	187,14	183,00	195,25	185,00	187,30	101,24	Sangat Tinggi	187,30	101,24	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan Protein per kapita	Kkal/kapita	117,00	117	115,00	115,00	115,00	131,79	116,00	127,29	116,00	131,90	113,71	Sangat Tinggi	131,90	112,74	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan cadangan pangan	%	45,00	27,42	30,00	30,00	35,00	49,70	40,00	48,00	45,00	31,50	70,00	Sedang	31,50	70,00	Sedang		Dinas Pertanian dan Pangan
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	90,00	90	90,00	90,00	90,00	138,00	90,00	113,00	90,00	98,00	108,89	Sangat Tinggi	98,00	108,89	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah	%	80,00	70	72,00	72,00	75,00	96,91	78,00	96,30	80,00	97,92	122,40	Sangat Tinggi	97,92	122,40	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Penanganan daerah rawan pangan	%	50,10	42,8	50,00	42,80	50,00	51,60	50,10	52,52	50,10	52,72	105,23	Sangat Tinggi	52,72	105,23	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87,50	82,1	84,10	84,10	86,80	84,80	86,80	86,80	87,00	87,20	100,23	Sangat Tinggi	87,20	99,66	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	86,00	83,5	80,00	80,00	80,00	83,33	83,30	90,00	83,30	90,00	108,04	Sangat Tinggi	90,00	104,65	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Keikutsertaan dalam pameran promosi produk pertanian	event	28,00	3	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	18,00	64,29	Rendah		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok tani	kelompok	429,00	71	70,00	72,00	71,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	100,00	Sangat Tinggi	359,00	83,68	Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perke	Produksi pertanian pangan utama																		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	bunan																			
		- Padi	ton	1.432.243	260.888	231.975	224.117	233.135	244.331	234.301	241.649	235.472	245.172	104,12	Sangat Tinggi	1.216.157,00	84,91	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Jagung	ton	1.279.057	225.505	209.869	206.894	210.289	195.097	210.710	218.865	211.131	226.122	107,10	Sangat Tinggi	1.072.483,00	83,85	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Kedelai	ton	8.077	1.340	1.341	1945	1.344	2280	1.347	1451	1.351	108	7,99	Sangat Rendah	7.124,00	88,20	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Produksi Tanaman Hortikultura		-																
		- Bawang Merah	kwintal	1.634.655	320.936	258.832	296.894	260.773	184.334	262.729	263.179	264.700	167.050	63,11	Rendah	1.232.393,00	75,39	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Cabe	kwintal	267.682	40.984	45.114	55.759	45.226	69.331	45.339	45.430	45.453	46.753	102,86	Sangat Tinggi	258.257,00	96,48	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Produksi tanaman perkebunan		-																
		- Tebu	Ton	106.344	19.170	18.167	20.671,80	14.998	15.669,30	17.650	17.669,74	17.650	14.816,20	83,94	Tinggi	87.996,84	82,75	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Tembakau	Ton	6.998	806	1.020	1.038,26	1.195	1.331,30	1.280	2.807,09	1.332	3.466,70	260,36	Sangat Tinggi	9.449,48	135,02	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Kopi	Ton	7.044	1.300	1.115	1.206,50	1.132	1.266,35	1.148	1.540,27	1.166	1.541,24	132,22	Sangat Tinggi	6.861,43	97,41	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Cengkeh	Ton	1.082	158	100	252,87	179	242,30	198	276,27	218	279,16	128,23	Sangat Tinggi	1.208,69	111,76	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Karet	Ton	307	36	53	165,04	54	213,40	54	213,61	55	194,49	355,10	Sangat Tinggi	822,80	267,64	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Kelapa	Ton	3.339	599	547	478,34	549	560,79	548	602,74	549	549,77	100,20	Sangat Tinggi	2.790,40	83,57	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Kakao	Ton	856	199	128	153,92	130	156,60	131	156,76	133	140,50	105,31	Sangat Tinggi	806,32	94,20	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi air tanah dangkal/dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan)	Ha	8.080	2.000	1.280	0,00	1.050	2.085,00	1.150	1.314,00	1.250	985,00	78,80	Tinggi	6.384,00	79,01	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Ha	135.996	22.666	22.666	0,00	22.666	22.666,00	22.666	22.666,00	22.666	22.666,00	100,00	Sangat Tinggi	22.666,00	16,67	Sangat Rendah		Dinas Pertanian dan Pangan
		Panjang jalan usaha tani/jalan produksi yang dibangun/diperbaiki	meter	13.100		1.600	0,00	2.500	5.136,00	2.750	5.000,00	3.000	0,00	0,00	Sangat Rendah	10.136,00	77,37	Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		Luas lahan yang mendapat pemupukan menggunakan pupuk bersubsidi	Ha	198.700	31.000	32.000	0,00	33.200	35.801,00	33.500	37.981,00	34.000	99.360,00	292,24	Sangat Tinggi	204.142,00	102,74	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	122,00	122	122,00	112,00	116,00	116,00	150,00	150,00	122,00	122,00	100,00	Sangat Tinggi	122,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Angka kematian / mortalitas ternak																		
		- Sapi potong	Prosen	2,40	2,74	2,80	1,92	2,70	2,03	2,60	0,01	2,50	0,00025518	9.405,13	Sangat Tinggi	0,00	0,01	Sangat Rendah		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	Prosen	2,15	2,52	2,51	2,30	2,46	2,31	2,41	0,01	2,39	0,00015103	14.235,58	Sangat Tinggi	0,00	0,01	Sangat Rendah		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	Prosen	2,15	2,3	2,51	2,21	2,46	2,38	2,41	0,01	2,39	0,00021339	10.075,31	Sangat Tinggi	0,00	0,01	Sangat Rendah		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras	Prosen	5,00	4,78	5,40	3,28	5,30	4,93	5,20	2,10	5,10	0,00000040	12.500.000,00	Sangat Tinggi	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pertanian dan Pangan
2.03.2.03.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Komoditas Peternakan Utama														0,00				
		- Sapi potong	ekor	21.106	20.523	20.606	20.598,00	20.738	20.804,00	20.856	21.364,00	20.986	19.594,00	93,37	Sangat Tinggi	102.883,00	487,46	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Kambing	ekor	38.696	37.776	37.558	37.645,00	37.934	37.920,00	38.140	45.594,00	38.313	33.106,00	86,41	Tinggi	192.041,00	496,28	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Domba	ekor	31.354	30.842	30.438	30.703,00	30.742	30.836,00	30.884	31.628,00	31.044	23.431,00	75,48	Tinggi	147.440,00	470,24	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan
		- Ayam ras pedaging	ekor	50.031.8	8.587.	8.254.	8.321.500,00	8.263.	8.196.500,00	8.295.	10.912.480,0	8.312.	11.178.392,0	134,48	Sangat Tinggi	47.196.672,0	94,33	Sangat Tinggi		Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				00	800	000		000		000	0	000	0			0				
		- Ayam ras petelur	ekor	4.100.000	3.799.915	4.000.000	4.088.100,00	4.000.000	4.198.300,00	4.050.000	5.383.371,00	4.100.000	4.826.068,00	117,71	Sangat Tinggi	22.295.754,00	543,80	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.03.2.03.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produksi daging dan telur ayam ras																		
		- Daging sapi	kg	4.390.543	640.543	742.500	734.949,00	745.000	774.761,00	750.000	854.440,20	750.000	818.050,68	109,07	Sangat Tinggi	3.822.743,88	87,07	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Daging kambing	kg	686.371	108.801	112.750	115.412,00	115.350	112.767,00	115.500	214.026,78	116.720	142.900,43	122,43	Sangat Tinggi	693.907,21	101,10	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Daging domba	kg	93.468	16.393	14.950	15.633,00	15.225	15.306,00	15.430	19.402,82	15.645	29.547,23	188,86	Sangat Tinggi	96.282,05	103,01	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Daging ayam ras pedaging	kg	35.265.239	5.916.994	5.821.500	5.249.052,00	5.833.200	5.896.429,00	5.885.600	6.226.714,83	5.895.710	11.628.391,86	197,23	Sangat Tinggi	34.917.581,69	99,01	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Telur ayam ras	kg	226.300.420	36.204.920	37.720.250	34.474.321,00	37.720.250	38.556.141,00	37.965.000	44.952.224,12	38.345.000	48.633.463,69	126,83	Sangat Tinggi	202.821.069,81	89,62	Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.03.2.03.01.25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Populasi Komoditas Peternakan hasil penerapan teknologi peternakan																		
		- Sapi potong	ekor	21.106	20.523	20.606	20.598,00	20.738	20.804,00	20.856	21.364,00	20.986	19.594,00	93,37	Sangat Tinggi	102.883,00	487,46	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Kambing	ekor	38.696	37.776	37.558	37.645,00	37.934	37.920,00	38.140	45.594,00	38.313	33.106,00	86,41	Tinggi	192.041,00	496,28	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Domba	ekor	31.354	30.842	30.438	30.703,00	30.742	30.836,00	30.884	31.628,00	31.044	23.431,00	75,48	Tinggi	147.440,00	470,24	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Ayam ras pedaging	ekor	50.031.800	8.587.800	8.254.000	8.321.500,00	8.263.000	8.196.500,00	8.295.000	10.912.480,00	8.312.000	11.178.392,00	134,48	Sangat Tinggi	47.196.672,00	94,33	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
		- Ayam ras petelur	ekor	4.100.000	3.799.915	4.000.000	4.088.100,00	4.000.000	4.198.300,00	4.050.000	5.383.371,00	4.100.000	4.826.068,00	117,71	Sangat Tinggi	22.295.754,00	543,80	Sangat Tinggi	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.05	Energi dan Sumber Daya Mineral																			
2.05.1.17.01.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang	Cakupan pembinaan dan pengendalian usaha	Prosen	100,00	100	154	0,00	154	0,00	154	0,00	154	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	pertambangan	pertambangan dan air bawah tanah																		Menengah
2.015.1.17.01.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Prosen	100,00	100	77	0,00	77	0,00	77	0,00	77	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi		1,31	0	0,44	0,67	0,66	1,78	0,88	1,98	1,10	2,64	240,00	Sangat Tinggi	2,64	201,53	Sangat Tinggi		
2.015.1.17.01.18	Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi	cakupan pembinaan dan sosialisasi gugus tugas hemat energi dan air	Orang	478,00	100	103	0,00	103	0,00	103	0,00	103	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi		1,31	0,22	0,44	0,00	0,66	0,00	0,88	0,00	1,10	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		
2.06	Perdagangan																			
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	12,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	12,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	158	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	106,00		5	100,00	3	100,00	5	100,00	5	100,00	2.000,00	Sangat Tinggi	100,00	94,34	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
2.06.2.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	400,00	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	12,00	88,00	12	88,00	12	88,00	12	88,00	733,33	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	persentase UTTP yang ditera		100,00		100	3,12	100	90,00	100	271,92	100	15,72	15,72	Sangat Rendah	15,72	15,72	Sangat Rendah		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Perkembangan nilai ekspor	Prosen	5,00		5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah		100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Dinas Perdagangan
2.06.2.06.01.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase lokasi PKL yang tertata		10,00		10	0,00	10	20,00	10	20,00	10	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perdagangan
2.07	Perindustrian																			
2.07.1.17.01.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	Prosen	4,62	0,25	75,76	0,55	76,55	2,35	77,30	2,77	78	4,01	5,14	Sangat Rendah	4,01	86,80	Tinggi		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.07.1.17.01.18	Program penataan struktur industri	jumlah data industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Kendal	Dokumen	11,00	1	75,76	0,00	76,55	0,00	77,30	0,00	78	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.07.1.17.01.20	Program Pengendalian	Terciptanya kegiatan industri	perusahaan	473,00	60	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Perindustrian,

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	dan Pencegahan Pencemaran Industri	dengan proses produksi terstandar dan berwawasan lingkungan																		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.08	Transmigrasi																			
2.08.1.07.01.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase Jumlah Transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	%	20,00	100	4	0,00	4	50,00	4	50,00	4	10,00	250,00	Sangat Tinggi	10,00	50,00	Sangat Rendah		Dinas Tenaga Kerja
2.08.1.07.01.16	Program transmigrasi lokal	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	KK	28,00	10	20	6,70	10	4,00	10	6,00	10	0,00	0,00	Sangat Rendah	26,70	95,36	Sangat Tinggi		Dinas Tenaga Kerja
3	Urusan Penunjang																			
3.01	Perencanaan																			
3.01.3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	60,00	12	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	158,33	Sangat Tinggi		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	250,00	100	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	38,00	Sangat Rendah		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	183,00	12	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	95%	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	51,91	Rendah		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang	Laporan	500,00	-	95%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	95%	100,00	10.526,32	Sangat Tinggi	500,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	capaian kinerja dan keuangan	memenuhi standar																	
3.01.3.01.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	95%	87,25	95%	87,25	95%	87,25	95%	87,25	9.184,21	Sangat Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.1.13.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data dan informasi	Dokumen	266,00	0	93%	12,00	93%	12,00	93%	12,00	93%	12,00	1.290,32	Sangat Tinggi	12,00	4,51	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.01.3.01.01.15	Program pengembangan data/informasi	Jumlah data dan informasi	dokumen	60,00		12	12,00	12	12,00	12	12,00	12	12,00	100,00	Sangat Tinggi	48,00	80,00	Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah MOU kerjasama perencanaan pembangunan daerah	dokumen	1,00		70	1,00	-	0,00	0	0,00	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.05.01.17	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklnajuti menjadi MoU setiap tahun		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.01.3.01.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah konsep Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	dokumen	13,00		70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.19	Program perencanaan pengembangan kota kota menengah dan besar	Jumlah konsep Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	dokumen	5,00		70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	70%	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi program RKPD dengan RPJMD	prosen	70,00		93%	100,00	93%	100,00	93%	100,00	93%	100,00	10.752,69	Sangat Tinggi	100,00	142,86	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase aspirasi DPRD yang diakomodir dalam RKPD	Prosen	65,00	40	46	42,66	50	58,90	55	62,35	60	70,14	116,90	Sangat Tinggi	70,14	107,91	Sangat Tinggi	
3.01.3.0	Program	Persentase		0,00		4,9%	100,00	4,8%	100,00	4,7%	100,00	4,6%	100,00	217.39	Sangat	100,00	#DIV/	#DIV/0!	Sekretariat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
5.01.21	perencanaan pembangunan daerah	konsistensi program RKPD dengan RPJMD												1,30	Tinggi		0!			Daerah
3.01.3.01.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rata-rata pencapaian sasaran bidang ekonomi	prosen	100,00	-	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	10.000,00	Sangat Tinggi	70,00	70,00	Sedang		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang sosial dan budaya	Prosen	55,00		70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	10.000,00	Sangat Tinggi	70,00	127,27	Sangat Tinggi		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.01.3.01.01.24	Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase konsistensi program dan kegiatan RKPD dengan APBD bidang fisik dan prasarana	prosen	100,00		70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	70%	70,00	10.000,00	Sangat Tinggi	70,00	70,00	Sedang		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3.02	Keuangan																			
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	85,00	65%	70%	80,00	73%	80,00	75%	80,00	80%	80,00	10.000,00	Sangat Tinggi	80,00	94,12	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	210	100,00	210	100,00	47,62	Sangat Rendah	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	80,00	60	60	20,00	65	20,00	75	20,00	75	20,00	26,67	Sangat Rendah	80,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang	Laporan	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	capaian kinerja dan keuangan	memenuhi standar																		
3.02.3.02.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87	87,50	87,25	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah
3.02.3.02.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD teerhadap total pendapatan	Prosen	10,00	10	10,00	16,45	10,00	14,97	10,00	19,67	10,00	23,11	231,10	Sangat Tinggi	23,11	231,10	Sangat Tinggi		Badan Keuangan Daerah
3.02.3.05.01.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD teerhadap total pendapatan	Prosen	23,11		19,45	16,45	14,97	14,97	19,67	19,67	23,11	23,11	100,00	Sangat Tinggi	23,11	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.02.1.13.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	266,00	0	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	37,59	Sangat Rendah		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.02.3.05.01.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.03	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan																			
3.03.3.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
3.03.3.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat/Bintek yang difasilitasi BKPP Kab. Kendal pada tahun berjalan	Prosen	100,00	100	100	150,00	100	122,90	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase struktur jabatan yang terisi	Prosen	95,00	83,07	87	89,30	87	85,28	90	92,45	90	88,70	98,56	Sangat Tinggi	88,70	93,37	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.17	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	Prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.03.3.03.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang menggunakan E-Gov	jenis	19,00	8	10	12,00	12	13,00	14	15,00	16	16,00	100,00	Sangat Tinggi	16,00	84,21	Tinggi		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.04	Penelitian dan Pengembangan																			
3.05	Fugsi Lain																			
3.05.3.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	80	100,00	85	100,00	90	100,00	95	100,00	105,26	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Perkantoran																			
3.05.3.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	87,25	100	87,25	100	87,25	100	87,25	87,25	Tinggi	87,25	99,15	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.17	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase bangunan yang berizin dan laik fungsi		20,00			0,00	5	0,00	10	0,00	15	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.05.3.05.01.18	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Rata-rata waktu pelayanan produk hukum daerah		30,00		30	30,00	30	30,00	30	30,00	30	30,00	100,00	Sangat Tinggi	30,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.20	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Prosen	80,00		55	55,00	60	61,39	65	64,55	75	66,31	88,41	Tinggi	66,31	82,89	Tinggi		Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan	prosen	100,00		100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda																	
3.05.3.05.01.22	Program Pengembangan Perekonomian Daerah	Inflasi	%	4,76	6,29	5,95	6	5,63	2,16	5,32	2,58	5,03	1,68	33,40	Sangat Rendah	1,68	35,29	Sangat Rendah	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.01.23	Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat	Jumlah jamaah yang terlayani transportasi, komunikasi dan silaturahmi	nilai angka	90,00		70	70	75	0	80	84	85	84	98,82	Sangat Tinggi	84,00	93,33	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
3.05.3.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	90,00	90,00	Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	90,00	90,00	Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	12,00		12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	833,33	Sangat Tinggi	100,00	833,33	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	12,00	12	12,00	5,00	12,00	5,00	12,00	5,00	12,00	5,00	41,67	Sangat Rendah	5,00	41,67	Sangat Rendah	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,50	87,00	87,50	87,25	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
	Program Penyelamatan	persentase arsip dinamis dan	Prosen	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dan Pelestarian DokumeNArsip Daerah	stastis yang diselamatkan																	
3.05.3.05.02.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Pembahasan Raperda, hearing, rapat-rapat DPRD, Reses dan Kunjungan Kerja	Dokumen	60,00		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	Sangat Tinggi	60,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.18	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Propemperda yang disetujui	kajian	7,00	1	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	6,00	8,00	133,33	Sangat Tinggi	8,00	114,29	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.02.21	Program Kehumasan	Persentase pemanfaatan fasilitas protokoler dan dokumentasi pada kegiatan Pimpinan Daerah/ tamu Pemda	prosen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
3.05.3.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	99,45	100	99,45	100	99,45	100	99,45	99,45	Sangat Tinggi	99,45	99,45	Sangat Tinggi	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100%	100	99,21	100	99,21	100	99,21	100	99,21	99,21	Sangat Tinggi	99,21	99,21	Sangat Tinggi	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	113,64	Sangat Tinggi	Kecamatan KotaKendal
3.05.3.05.03.15	Program peningkatan	persentase pembinaan di		100,00	100%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan KotaKendal

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.05.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	420,00	100	84,00	100,00	84,00	100,00	84,00	100,00	84,00	100,00	119,05	Sangat Tinggi	100,00	23,81	Sangat Rendah		Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	176,00	100	41,00	100,00	41,00	100,00	32,00	100,00	31,00	100,00	322,58	Sangat Tinggi	100,00	56,82	Rendah		Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	175,00	100	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	35,00	100,00	285,71	Sangat Tinggi	100,00	57,14	Rendah		Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	5,00	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	80,00	Tinggi		Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	25,00	100	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	25,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patebon
3.05.3.05.04.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	25,00	88,00	25,00	88,00	43,00	88,00	25,00	88,00	352,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patebon
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa,	Prosen	156,00	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	64,10	Rendah		Kecamatan Patebon

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa																		
3.05.3.05.04.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	212,00	100	43,00	43,00	43,00	43,00	42,00	42,00	42,00	42,00	100,00	Sangat Tinggi	42,00	19,81	Sangat Rendah		Kecamatan Patebon
3.05.3.05.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	0,80	95,00	0,85	95,00	0,90	95,00	0,95	95,00	10.000,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	1,00	98.97 %	0,80	0,75	0,85	0,76	0,90	0,67	0,95	0,63	66,48	Sedang	0,63	63,16	Rendah		Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	31,00	100,00	31,00	100,00	27,00	100,00	27,00	100,00	370,37	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	1,00	100%	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	100,00	Sangat Tinggi	0,95	95,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	0,00	0%	0,80	0,00	0,85	0,00	0,90	0,00	0,95	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Pegandon
3.05.3.0	Program	rata-rata nilai	rata-rata	88,00	86,50	0,80	87,00	0,85	87,00	0,90	87,00	0,95	87,00	9.157,	Sangat	87,00	98,86	Sangat		Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
5.05.07	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai SKP											89	Tinggi			Tinggi		Pegandon
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	1,00	100%	100	95,00	100	95,00	100	95,00	95	95,00	100,00	Sangat Tinggi	95,00	######	Sangat Tinggi		Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.05.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	1,00	100%	0,80	0,79	0,85	0,85	0,90	0,90	0,95	0,95	100,00	Sangat Tinggi	0,95	95,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pegandon
3.05.3.05.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	100 %	100,00	10.000,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100%	100 %	99,93	1,00	99,93	100	99,93	100	99,93	99,93	Sangat Tinggi	99,93	99,93	Sangat Tinggi		Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.05	Program Peningkatan Kapasitas	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan	prosen	100	100%	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan weleri

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sesuai Standar																		
3.05.3.05.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	11,00	68,75	Sedang		Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	1,00	88,00	1,00	88,00	100	88,00	100	88,00	88,00	Tinggi	88,00	88,00	Tinggi		Kecamatan weleri
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan weleri
3.05.3.05.06.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Weleri
3.05.3.05.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Gemuh
3.05.3.0	Program	Persentase	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat		Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.07.03	peningkatan disiplin aparatur	penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas													Tinggi			Tinggi	Gemuh
3.05.3.05.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	86,75	87,00	87,00	87,25	87,25	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.07.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Gemuh
3.05.3.05.08.01	Program Pelayanan	persentase unit kerja internal	prosen	100,00	100	2.108,00	100,00	2.617,00	100,00	3.108,00	100,00	3.612,00	100,00	2,77	Sangat Rendah	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Cepiring

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Administrasi Perkantoran	yang terlayani																		
3.05.3.05.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	32,00		32,00	100,00	31,00	100,00	31,00	100,00	32,00	100,00	312,50	Sangat Tinggi	100,00	312,50	Sangat Tinggi		Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	20,00	100	18,00	100,00	18,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	500,00	Sangat Tinggi	100,00	500,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	28,00		28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	100,00	28,00	100,00	357,14	Sangat Tinggi	100,00	357,14	Sangat Tinggi		Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	37,00		25,00	4,00	25,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	41,00	110,81	Sangat Tinggi		Kecamatan Cepiring
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00		144,00	100,00	162,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Cepiring
3.05.3.05.08.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan,	prosen	100,00			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Cepiring

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.05.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88%	86,50	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	88,00	Tinggi	0,88	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu
3.05.3.05.09.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
3.05.3.05.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88%	86,50	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	100%	0,88	88,00	Tinggi	0,88	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong
3.05.3.05.10.15	Program peningkatan sistem	persentase pembinaan di bidang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Brangsong

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.05.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
3.05.3.05.11.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	87,00	87,00	87,00	87,25	87,00	87,50	87,00	99,43	Sangat Tinggi	87,00	98,86	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib	Prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa																		
3.05.3.05.11.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Boja
3.05.3.05.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	321,00	100%	61,00	100,00	106,00	100,00	56,00	100,00	55,00	100,00	181,82	Sangat Tinggi	100,00	31,15	Sangat Rendah		Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00	-	0,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	150,00	Sangat Tinggi	24,00	150,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	86,75	86,75	87,00	87,00	87,25	87,25	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Kecamatan Limbangan
3.05.3.05.12.15	Program peningkatan	persentase pembinaan di	%	2.131,00	100%	303,00	303,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	457,00	100,00	Sangat Tinggi	1.674,00	78,55	Tinggi		Kecamatan Limbangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.05.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah		Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah		Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah		Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	87,50	86,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Singorojo
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00	100%	1,00	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Kecamatan Singorojo
3.05.3.05.13.15	Program peningkatan sistem pengawasan	persentase pembinaan di bidang pemerintahan,	%	100,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	1,00	Sangat Rendah		Kecamatan Singorojo

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.05.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100%	1,00	96,00	1,00	96,00	100	96,00	100	96,00	96,00	Sangat Tinggi	96,00	96,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100%	1,00	0,00	1,00	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Kecamatan Sukorejo
3.05.3.05.14.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	1,00	87,25	1,00	87,25	1,00	87,25	1,00	87,25	8.725,00	Sangat Tinggi	87,25	87,25	Tinggi		Kecamatan Sukorejo
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	1,00	0,00	100%	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	Sangat Rendah	0,00	0,00	Sangat Rendah		Kecamatan Sukorejo
3.05.3.0	Program	persentase	Prosen	100	100%	1,00	90,00	1,00	90,00	100	90,00	100	90,00	90,00	Tinggi	90,00	90,00	Tinggi		Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
5.14.15	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		Sukorejo
3.05.3.05.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patean
3.05.3.05.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16	NA		0,00		0,00	4	4,00	4	4,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	25,00	Sangat Rendah		Kecamatan Patean
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan	prosen	100	100		100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patean

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		penyelenggaraan pemerintahan desa																		
3.05.3.05.15.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	prosen	100	100		94,00		94,00	100	94,00	100	94,00	94,00	Sangat Tinggi	94,00	94,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Patean
3.05.3.05.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.16.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00	NA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	4,00	25,00	Sangat Rendah		Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.16.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	86,50	100,00	87,50	1,00	87,50	100	87,50	100	87,50	87,50	Tinggi	87,50	87,50	Tinggi		Kecamatan Pageruyung
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa,	Prosen	100	100	100%	100,00	100%	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pageruyung

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa																		
3.05.3.05.16.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100	1,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Pageruyung
3.05.3.05.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100		1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100		-	100,00	-	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	16,00		-	4,00	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	16,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Plantungan
3.05.3.0	Program	rata-rata nilai	rata-rata	100	86,50	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat		Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.17.07	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Nilai SKP												Tinggi			Tinggi	Plantungan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100		100%	100,00	-	100,00	100%	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.17.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100		1,00	95,00	1,00	95,00	100	95,00	100	95,00	95,00	Sangat Tinggi	95,00	95,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Plantungan
3.05.3.05.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100%	100,00	100%	100,00	10.000,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	1,00	100%	100	100,00	100	100,00	100%	100,00	100%	100,00	10.000,00	Sangat Tinggi	100,00	######	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.05	Program Peningkatan Kapasitas	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan	prosen	1,00	100%	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Rowosari

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Sumber Daya Aparatur	Pelatihan Sesuai Standar																		
3.05.3.05.18.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	88,00	100%	86,75	86,75	87,00	87,00	87,25	87,25	87,50	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	99,43	Sangat Tinggi		Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100,00	86,50	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Rowosari
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100,00	100%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.18.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100,00	100%	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Rowosari
3.05.3.05.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	%	1,00	100,00	1,00	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kangkung
3.05.3.0	Program	Persentase	prosen	100	100	1,00	100,00	0,32	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat	100,00	100,00	Sangat		Kecamatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan														OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020			
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.19.03	peningkatan disiplin aparatur	penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas													Tinggi			Tinggi	Kangkung
3.05.3.05.18.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100		0,00	100,00		100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100	%	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	1,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	100%	100,00	100%	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.19.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Kangkung
3.05.3.05.20.02	Program Peningkatan	persentase sarana dan	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi	Kecamatan Ringinarum

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja																		
3.05.3.05.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88	86,50	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ringinarum
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ringinarum
3.05.3.05.20.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan,	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ringinarum

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
		keagamaan, ekonomi, dan PATEN																		
3.05.3.05.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100	100%	100	94,33	100	94,33	100	94,33	100	94,33	94,33	Sangat Tinggi	94,33	94,33	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100	75%	80	99,24	85	99,24	90	99,24	95	99,24	104,46	Sangat Tinggi	99,24	99,24	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.21.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	87,5	86,50	87,5	87,50	87,5	87,50	87,5	87,50	87,5	87,50	100,00	Sangat Tinggi	87,50	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang sudah melaksanakan pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosen	100	100%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
3.05.3.05.21.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100	100%	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Ngampel
3.05.3.05.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar	Laporan	1,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.22.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	88,00	86,50	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,00	Sangat Tinggi	88,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
	Program Pembinaan dan Fasilitasi	Persentase desa yang sudah melaksanakan	Prosen	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	Pengelolaan Keuangan Desa	pembekalan kepala desa, tertib administrasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa																		
3.05.3.05.22.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN	%	100,00	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Kecamatan Kaliwungu Selatan
3.05.3.05.23.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase unit kerja internal yang terlayani	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
3.05.3.05.23.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
3.05.3.05.23.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
3.05.3.05.23.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	prosen	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
3.05.3.05.23.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi	Laporan	1,00	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan/Program PD	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target RPJMD 2016-2021	Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan															OPD
					2016	2017		2018		2019		2020				Capaian RPJMD sd TA. 2020				
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%	Status Capaian	Capaian	%	Status Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
	dan keuangan	standar																		
3.05.3.05.23.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	rata-rata Nilai SKP	87,75	86,50	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	100,00	Sangat Tinggi	87,75	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
3.05.3.05.23.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level SPIP	3	1	100%	3,00	100%	3,00	100%	3,00	100%	3,00	300,00	Sangat Tinggi	3,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
		2. Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas	%	0,85	70%	0,75	0,80	0,80	0,80	0,82	0,80	0,83	0,80	96,08	Sangat Tinggi	0,80	93,82	Sangat Tinggi		
		3. persentase aduan masyarakat atas layanan pubik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima	%	1,00	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	1,00	100,00	Sangat Tinggi		
		4. Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKjIP)	Skor	B	C	CC	BB	CC	BB	CC	BB	B	BB	100,00	Sangat Tinggi	BB	100,00	Sangat Tinggi		
3.05.3.05.23.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya	%	100,00	39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat
3.05.3.05.23.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3,00	2	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	300,00	Sangat Tinggi	3,00	100,00	Sangat Tinggi		Inspektorat

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mendapatkan otonomi dan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan anggaran, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Pertumbuhan positif di beberapa Negara menunjukkan pemulihan perekonomian global. Pemulihan tersebut didorong oleh program vaksinasi yang terus berjalan di berbagai negara. Di tengah akselerasi vaksinasi Covid-19, dunia masih berhati-hati dengan risiko terjadinya gelombang ketiga dan mutasi virus Covid-19. Mutasi virus yang baru-baru ini muncul diindikasi dapat menyebar lebih cepat sehingga beberapa negara kembali menutup perbatasan dan kembali memberlakukan restriksi perjalanan. Kondisi ini kemudian menahan laju pemulihan ekonomi global pada akhir triwulan I tahun 2021.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh 0,4 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2021. Perbaikan kondisi ekonomi ersebut didorong oleh pertumbuhan pada sebagian besar komponen pengeluaran sejalan dengan mulai dicabutnya pembatasan aktivitas masyarakat. Konsumsi individu tumbuh 1,6 persen (YoY) terutama untuk konsumsi barang seperti kendaraan bermotor dan bagiannya. Sementara itu, konsumsi jasa masih terkontraksi 3,2 persen (YoY), lebih kecil dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 6,8 persen (YoY). Pemulihan konsumsi masyarakat tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Beberapa Negara lainnya juga mengalami pertumbuhan ekonomi kearah positif. Korea Selatan tumbuh 1,8 persen (YoY), lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2020 (1,4 persen, YoY). Selain itu, Singapura telah kembali tumbuh positif pada triwulan I tahun 2021 sebesar 0,2 persen (YoY). Pemulihan ekonomi Singapura didorong oleh pulihnya kinerja industri barang dan mengecilnya kontraksi pada industri jasa. Jepang masih mengalami kontraksi 1,9 persen (YoY) pada triwulan I tahun 2021, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Turunnya kinerja perekonomian

Jepang bersumber dari hampir seluruh kelompok pengeluaran kecuali pengeluaran pemerintah, investasi swasta, dan ekspor.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2021 terkontraksi 0,74 persen (YoY), membaik dibandingkan kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut ditopang oleh peningkatan kinerja sektor eksternal sejalan dengan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat. Ditinjau dari lapangan usaha, pemulihan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif yang terjadi pada enam sektor yakni industri, pengadaan air, jasa keuangan, pertanian, perdagangan listrik dan gas, serta real estat. Sementara itu, sektor lainnya menunjukkan kontraksi yang menipis.

Sektor pertanian tumbuh 2,95 persen (YoY), lebih tinggi baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan I tahun 2020. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan seiring dengan pergeseran panen raya dan cuaca yang mendukung. Laju pertumbuhan sektor pertanian tertahan oleh kontraksi yang terjadi pada subsektor perikanan dan kehutanan. Kontraksi sebesar 1,3 persen (YoY) pada subsektor perikanan disebabkan oleh curah hujan tinggi dan angin kencang yang menurunkan kualitas air dan menyebabkan gagal panen ikan budidaya. Kontraksi 8,9 persen (YoY) pada subsektor kehutanan disebabkan oleh turunnya permintaan bahan kayu bulat untuk industri kayu. Dari sisi pengeluaran, perekonomian juga menunjukkan perbaikan pada setiap komponennya. Konsumsi pemerintah, ekspor, dan impor tumbuh positif sementara komponen lainnya mengalami kontraksi yang mengecil. Meskipun separuh komponen pengeluaran telah tumbuh positif, namun konsumsi rumah tangga yang memiliki share terbesar masih terkontraksi cukup dalam.

Pada triwulan I tahun 2021, hampir semua provinsi di Wilayah Jawa masih mengalami kontraksi, kecuali Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi Jawa Tengah terkontraksi sebesar 0,9 persen (YoY), akan tetapi kondisinya lebih baik dibandingkan Triwulan II-IV tahun 2020 yang terkontraksi lebih dalam pada kisaran -3 hingga -5 persen (y-on-y). Secara keseluruhan semua provinsi di Wilayah Jawa mengalami perbaikan ditandai dengan kontraksi yang tidak sedalam triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha dengan kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -31,04 persen. Sementara dari sisi

pengeluaran, yang mengalami kontraksi terdalam sehingga tumbuh negatif adalah komponen Impor Barang dan Jasa sebesar -2,28 persen.

Dibandingkan dengan kinerja pada Triwulan IV-2020, ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2021 kembali mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 1,69 persen setelah sebelumnya terkontraksi sebesar -1,89 persen (q-to-q). Dilihat dari sisi produksi, kinerja lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 18,33 persen. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 11,93 persen. Struktur ekonomi Jawa Tengah Triwulan I-2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,05 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 61,08 persen.

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah, yaitu sebesar 61,08 persen. Komponen lainnya, yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut meliputi komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,56 persen, komponen PMTB sebesar 30,42 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,94 persen, dan komponen PKLNPRT sebesar 1,17 persen. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB Jawa Tengah memiliki peran sebesar 38,81 persen. Untuk besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2021 mencapai Rp345.614,94 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp244.406,10 miliar.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, dan dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga

dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, kita berharap masyarakat terus melakukan disiplin di dalam protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Pemerintah tetap akan menjalankan 3T yaitu *testing*, *tracing*, dan *treatment* di dalam mendukung pengendalian penyebaran Covid-19.

Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di sebagian besar lapangan usaha Jawa Tengah antara lain Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Anggaran pada penanganan Covid-19 yang berfokus pada kesehatan (pengadaan APD, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi, revitalisasi rumah sakit rujukan, insentif tenaga kesehatan); pemulihan ekonomi (pembuatan masker, paket sembako, pasar murah, penguatan BUMDes, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendidikan perkoperasian dan UKM, subsidi bunga pinjaman bagi koperasi); dan penyediaan jaring pengaman sosial (bantuan pangan non tunai, pemberian vitamin kelompok rentan, tambahan alokasi fakir miskin non produktif, logistik permakanan) dapat memberikan dampak pada turunnya laju konsumsi rumah tangga. Untuk mengembalikan perekonomian secara optimal pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan perbaikan-perbaikan yang terkena dampak seperti perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kebijakan percepatan pemulihan perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Inovasi dunia industri dari skala kecil hingga besar yang pemasarannya melalui Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi opsi terbaik.

3.2 Kondisi Perekonomian Daerah

Adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2020 mengalami kontraksi dimana tahun 2019 diangka 5,71% melambat menjadi -1,53% di tahun 2020. Angka kemiskinan di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 9,44% meningkat menjadi 9,99% di tahun 2020. Tingkat pengangguran juga meningkat dari 6,26% pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,56% pada tahun 2020. Dengan kondisi makro yang demikian, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal harus melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian Kabupaten Kendal untuk tahun-tahun yang akan datang. Selain perekonomian, potensi daerah dan sumber daya manusia yang unggul juga menjadi salah satu

prioritas, karena di era globalisasi dan era revolusi industri 4.0, daerah juga dituntut agar mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

3.3 Kinerja Keuangan Daerah

Mendasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut". Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Kendal diwujudkan dalam APBD yang dapat ditinjau dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
b. Pendapatan Transfer, terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

   Pendapatan Transfer terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Desa.

Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.1
Tren dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

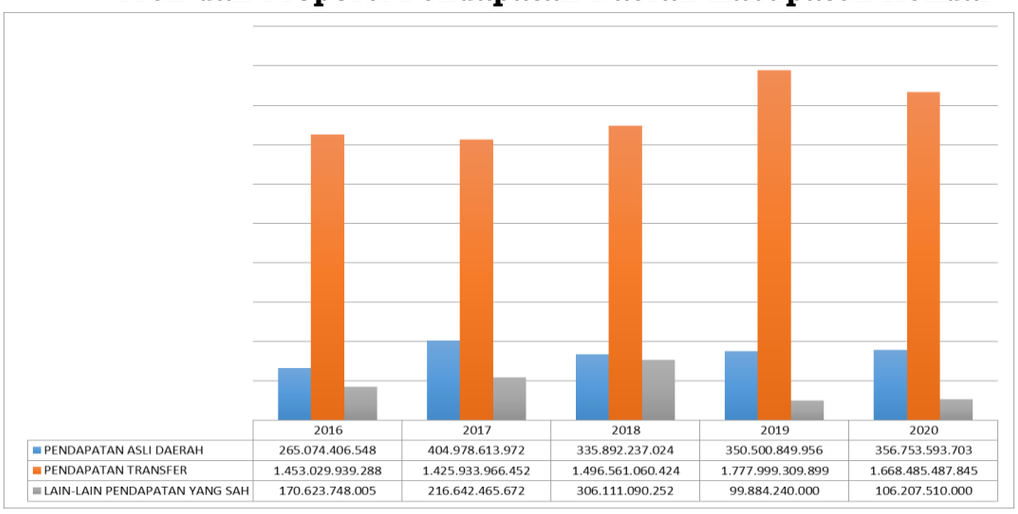

	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN ASLI DAERAH	265.074.406.548	404.978.613.972	335.892.237.024	350.500.849.956	356.753.593.703
PENDAPATAN TRANSFER	1.453.029.939.288	1.425.933.966.452	1.496.561.060.424	1.777.999.309.899	1.668.485.487.845
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	170.623.748.005	216.642.465.672	306.111.090.252	99.884.240.000	106.207.510.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Total realisasi pendapatan daerah mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,18%. Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal sebagian besar berasal dari PAD. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, realisasi PAD mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,46%, Pendapatan Transfer meningkat sebesar 3,93% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah rata-rata meningkat sebesar 1,81%.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

   Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, PAD Kabupaten Kendal sebagian besar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.2
Tren dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaa Kekayaan Daerah yang dipisahkan)

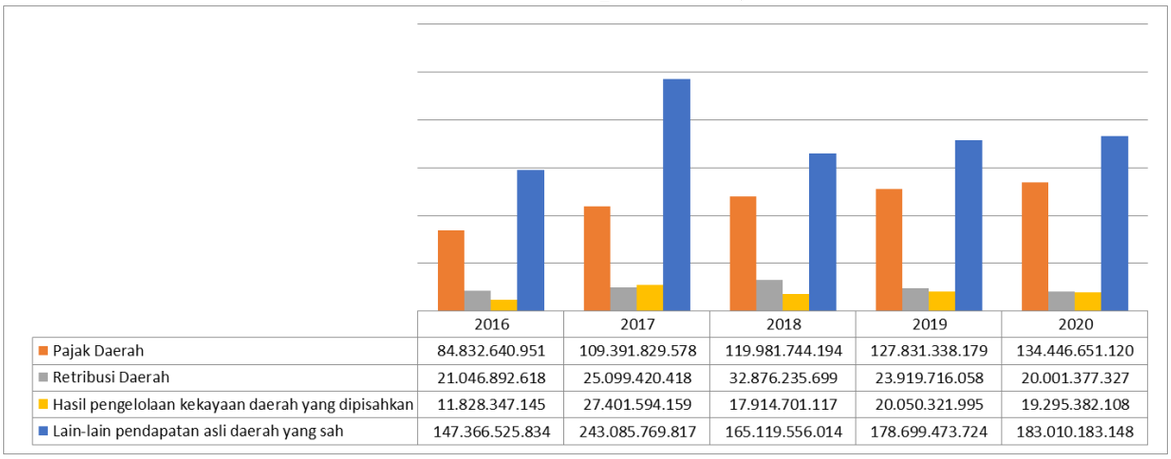

	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	84.832.640.951	109.391.829.578	119.981.744.194	127.831.338.179	134.446.651.120
Retribusi Daerah	21.046.892.618	25.099.420.418	32.876.235.699	23.919.716.058	20.001.377.327
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.828.347.145	27.401.594.159	17.914.701.117	20.050.321.995	19.295.382.108
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	147.366.525.834	243.085.769.817	165.119.556.014	178.699.473.724	183.010.183.148

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

2. Pendapatan Transfer

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Transfer terdiri dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
b. Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Dalam kurun waktu 2016-2020, sumber utama Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 74,92%, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 21,22% dan Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 3,86%. Untuk mengetahui trend dan proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.3
Tren dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal

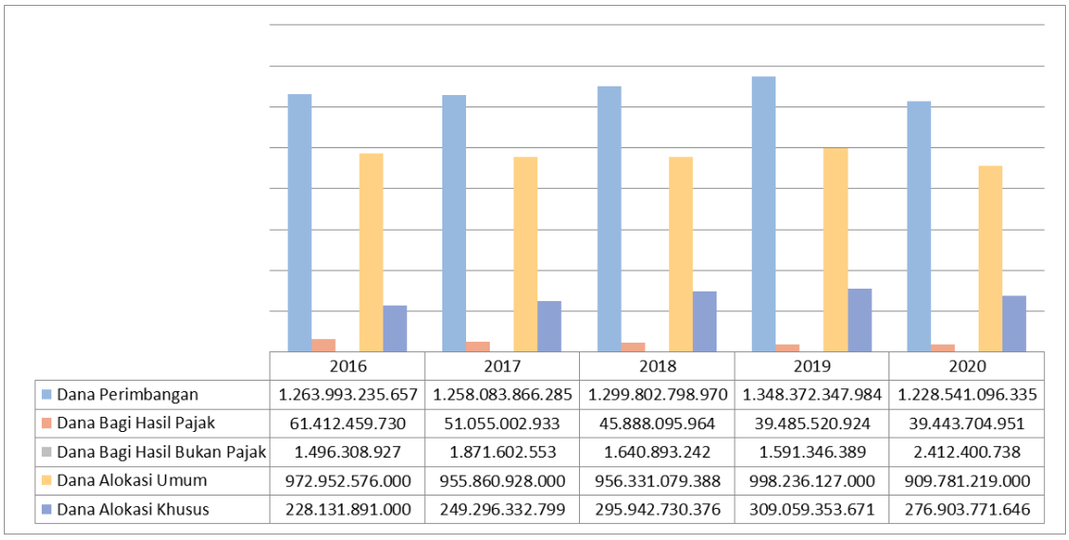

	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Perimbangan	1.263.993.235.657	1.258.083.866.285	1.299.802.798.970	1.348.372.347.984	1.228.541.096.335
Dana Bagi Hasil Pajak	61.412.459.730	51.055.002.933	45.888.095.964	39.485.520.924	39.443.704.951
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.496.308.927	1.871.602.553	1.640.893.242	1.591.346.389	2.412.400.738
Dana Alokasi Umum	972.952.576.000	955.860.928.000	956.331.079.388	998.236.127.000	909.781.219.000
Dana Alokasi Khusus	228.131.891.000	249.296.332.799	295.942.730.376	309.059.353.671	276.903.771.646

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Untuk mengetahui trend dan proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 3.4
Tren dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Kendal
(Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya)

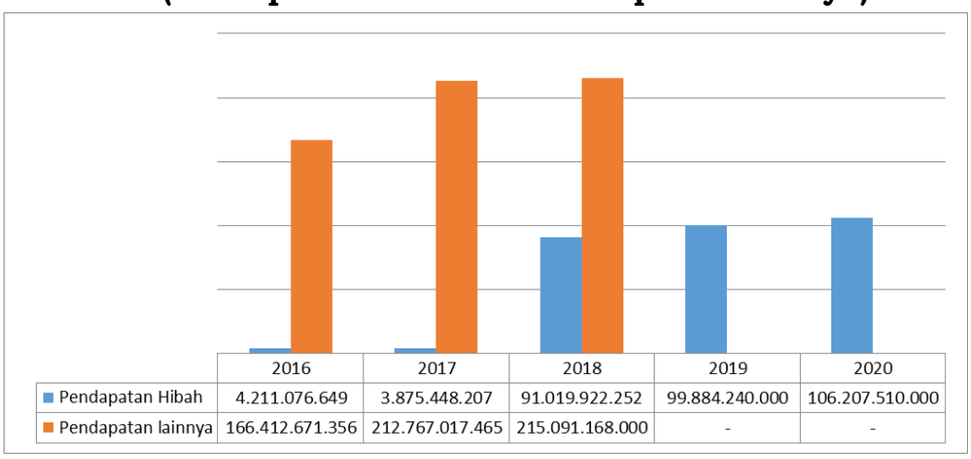

	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Hibah	4.211.076.649	3.875.448.207	91.019.922.252	99.884.240.000	106.207.510.000
Pendapatan lainnya	166.412.671.356	212.767.017.465	215.091.168.000	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	**1.888.728.093.841**	**2.047.555.046.096**	**2.138.564.387.700**	**2.228.384.399.855**	**2.131.446.591.548**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**265.074.406.548**	**404.978.613.972**	**335.892.237.024**	**350.500.849.956**	**356.753.593.703**
Pendapatan Pajak Daerah	84.832.640.951	109.391.829.578	119.981.744.194	127.831.338.179	134.446.651.120
Pendapatan Retribusi Daerah	21.046.892.618	25.099.420.418	32.876.235.699	23.919.716.058	20.001.377.327
Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.828.347.145	27.401.594.159	17.914.701.117	20.050.321.995	19.295.382.108
Pendapatan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	147.366.525.834	243.085.769.817	165.119.556.014	178.699.473.724	183.010.183.148
PENDAPATAN TRANSFER	**1.453.029.939.288**	**1.425.933.966.452**	**1.496.561.060.424**	**1.777.999.309.899**	**1.668.485.487.845**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	**1.263.993.235.657**	**1.258.083.866.285**	**1.299.802.798.970**	**1.348.372.347.984**	**1.228.541.096.335**
Dana Bagi Hasil Pajak	61.412.459.730	51.055.002.933	45.888.095.964	39.485.520.924	39.443.704.951
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.496.308.927	1.871.602.553	1.640.893.242	1.591.346.389	2.412.400.738
Dana Alokasi Umum	972.952.576.000	955.860.928.000	956.331.079.388	998.236.127.000	909.781.219.000
Dana Alokasi Khusus	228.131.891.000	249.296.332.799	295.942.730.376	309.059.353.671	276.903.771.646
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**35.237.692.000**	**-**	**27.000.000.000**	**276.891.111.000**	**293.058.283.000**
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian	35.237.692.000	-	27.000.000.000	36.454.064.000	44.612.446.000
Pendapatan Dana Desa	-	-	-	240.437.047.000	248.445.837.000
Transfer Pemerintah Provinsi*)	**153.799.011.631**	**167.850.100.167**	**169.758.261.454**	**152.735.850.915**	**146.886.108.510**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	139.793.646.915	128.496.428.284
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	153.799.011.631	167.850.100.167	169.758.261.454	12.942.204.000	18.389.680.226
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**170.623.748.005**	**216.642.465.672**	**306.111.090.252**	**99.884.240.000**	**106.207.510.000**
Pendapatan Hibah	4.211.076.649	3.875.448.207	91.019.922.252	99.884.240.000	106.207.510.000
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pendapatan lainnya	166.412.671.356	212.767.017.465	215.091.168.000	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021

Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.5
Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020

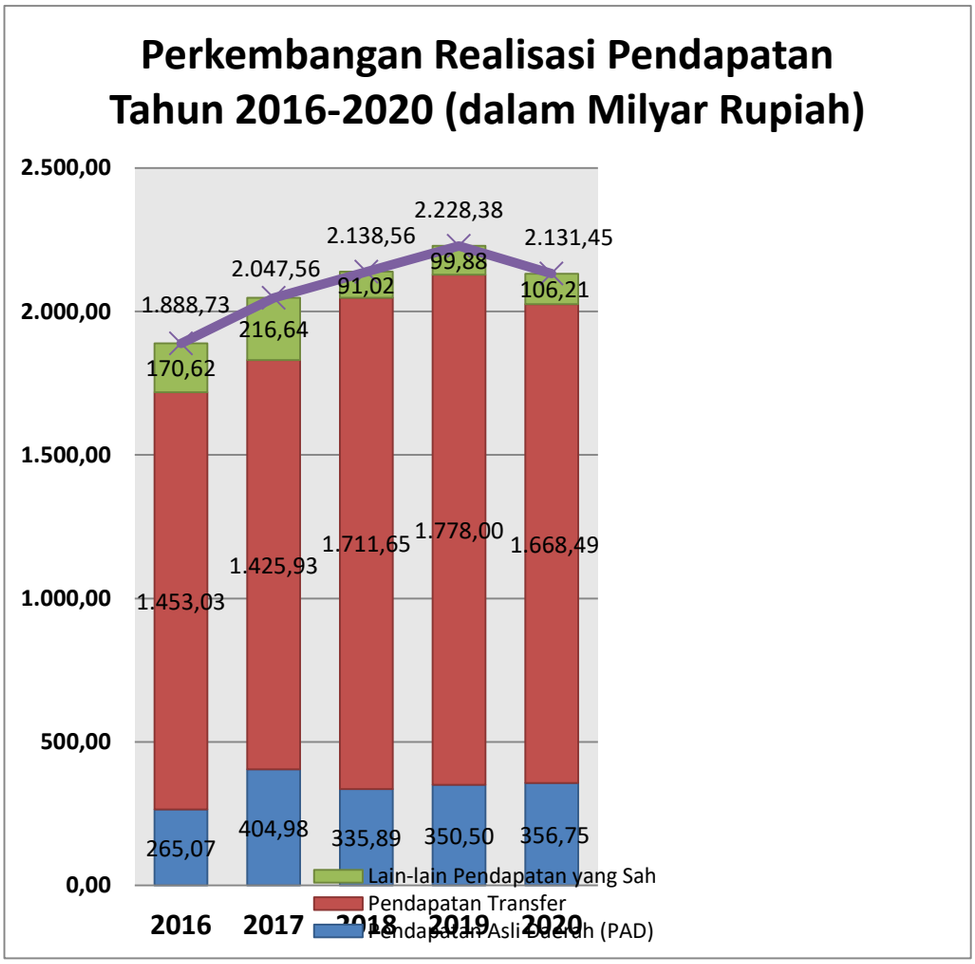

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Dari grafik tersebut diketahui total Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan. Hal ini karena adanya Pandemi *Covid 19* yang melanda tidak hanya di Indonesia akan tetapi seluruh dunia.

1. Permasalahan dan Solusi

Realisasi target Pendapatan Daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi dan

adanya pandemi *covid-19* yang berpengaruh pada keadaan ekonomi maupun sosial masyarakat. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain belum optimalnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah pengelola pajak daerah, Organisasi Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dalam hal keterpaduan data dan pengkoneksian sistem pengelolaan Pendapatan Daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi Pendapatan Daerah dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain :

a. meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah melalui penyederhanaan prosedur pelayanan perpajakan dan terus memperbaiki serta menyempunakan sistem informasi perpajakan untuk lebih memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi daerah melalui perbaikan sarana prasarana maupun penerapan E-Retribusi secara bertahap.
c. menyelenggarakan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
d. melakukan sosialisasi/ penyuluhan kepada wajib pajak/ retribusi agar membayar pajak sesuai ketentuan dan penegakan disiplin pembayaran pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
e. mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisa serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya.
f. meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah maupun antara Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah

terkait lainnya sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas Organisasi Perangkat Daerah terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

g. melakukan pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran (kanal pembayaran) serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan Bank Jateng, Kantor Pos, Indomaret, Tokopedia, Gopay dan agen Laku Pandai Bank Jateng.
h. meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Perangkat Daerah pengampu Dana Transfer, Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan Dana Transfer.

3.3.2 Belanja Daerah

Mendasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Struktur Belanja Daerah juga mengalami perubahan, yakni terdiri dari :

1) Belanja Operasi;
2) Belanja Modal;
3) Belanja Tidak Terduga; dan
4) Belanja Transfer.

Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,44%. Gambaran realisasi belanja daerah Kabupaten Kendal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.6
Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2020

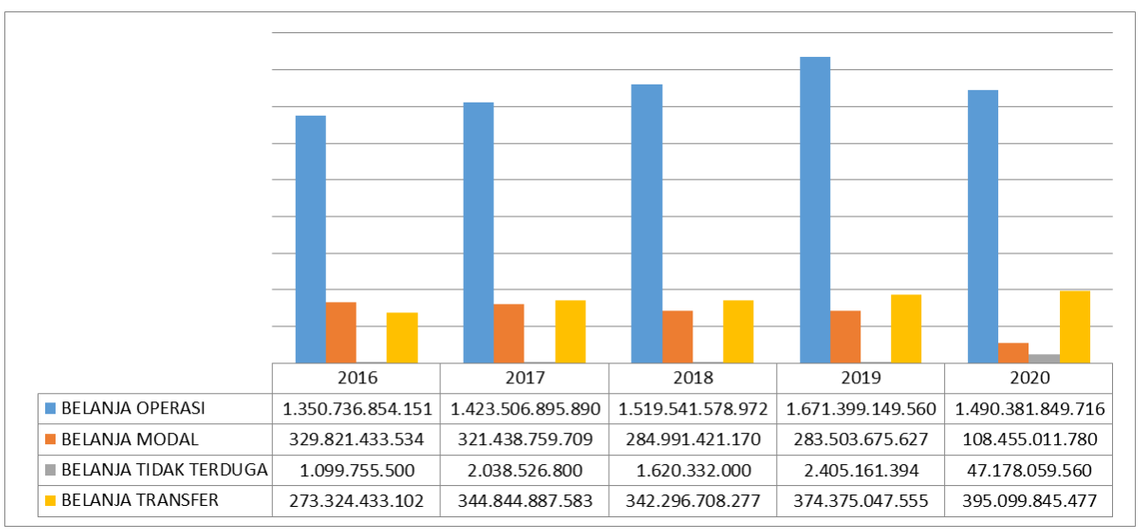

	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA OPERASI	1.350.736.854.151	1.423.506.895.890	1.519.541.578.972	1.671.399.149.560	1.490.381.849.716
BELANJA MODAL	329.821.433.534	321.438.759.709	284.991.421.170	283.503.675.627	108.455.011.780
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.099.755.500	2.038.526.800	1.620.332.000	2.405.161.394	47.178.059.560
BELANJA TRANSFER	273.324.433.102	344.844.887.583	342.296.708.277	374.375.047.555	395.099.845.477

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas:

a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan /anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Gambaran realisasi belanja operasi Kabupaten Kendal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.7
Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

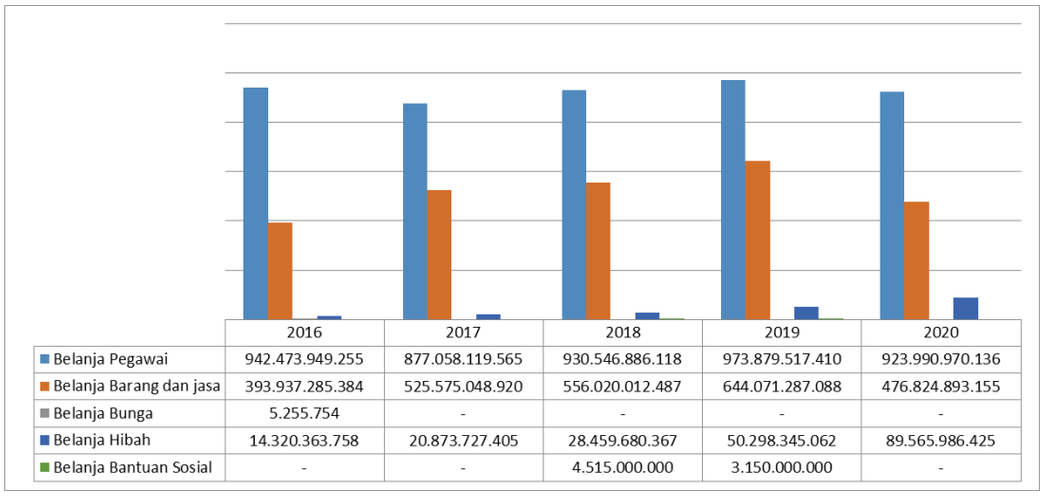

	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	942.473.949.255	877.058.119.565	930.546.886.118	973.879.517.410	923.990.970.136
Belanja Barang dan jasa	393.937.285.384	525.575.048.920	556.020.012.487	644.071.287.088	476.824.893.155
Belanja Bunga	5.255.754	-	-	-	-
Belanja Hibah	14.320.363.758	20.873.727.405	28.459.680.367	50.298.345.062	89.565.986.425
Belanja Bantuan Sosial	-	-	4.515.000.000	3.150.000.000	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri atas:

a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan
f. Belanja Aset Lainnya.

Gambaran realisasi belanja modal Kabupaten Kendal sebagaimana gambar sebagai berikut.

Gambar 3.8
Realisasi Modal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

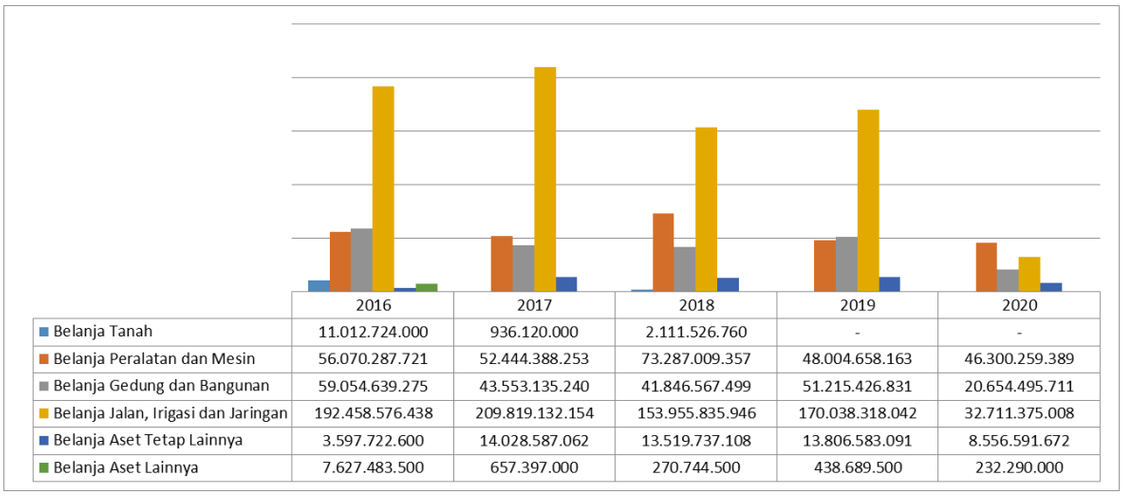

	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Tanah	11.012.724.000	936.120.000	2.111.526.760	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	56.070.287.721	52.444.388.253	73.287.009.357	48.004.658.163	46.300.259.389
Belanja Gedung dan Bangunan	59.054.639.275	43.553.135.240	41.846.567.499	51.215.426.831	20.654.495.711
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.458.576.438	209.819.132.154	153.955.835.946	170.038.318.042	32.711.375.008
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.597.722.600	14.028.587.062	13.519.737.108	13.806.583.091	8.556.591.672
Belanja Aset Lainnya	7.627.483.500	657.397.000	270.744.500	438.689.500	232.290.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

3. Belanja Tak Terduga

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
   b. Belanja Bantuan Keuangan, adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya

Perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	**1.954.982.476.287**	**2.091.829.069.982**	**2.148.450.040.419**	**2.331.683.034.136**	**2.041.114.766.533**
BELANJA OPERASI	**1.350.736.854.151**	**1.423.506.895.890**	**1.519.541.578.972**	**1.671.399.149.560**	**1.490.381.849.716**
Belanja Pegawai	942.473.949.255	877.058.119.565	930.546.886.118	973.879.517.410	923.990.970.136
Belanja Barang dan jasa	393.937.285.384	525.575.048.920	556.020.012.487	644.071.287.088	476.824.893.155
Belanja Bunga	5.255.754	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	14.320.363.758	20.873.727.405	28.459.680.367	50.298.345.062	89.565.986.425
Belanja Bantuan Sosial	-	-	4.515.000.000	3.150.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	**329.821.433.534**	**321.438.759.709**	**284.991.421.170**	**283.503.675.627**	**108.455.011.780**
Belanja Tanah	11.012.724.000	936.120.000	2.111.526.760	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	56.070.287.721	52.444.388.253	73.287.009.357	48.004.658.163	46.300.259.389
Belanja Gedung dan Bangunan	59.054.639.275	43.553.135.240	41.846.567.499	51.215.426.831	20.654.495.711
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	192.458.576.438	209.819.132.154	153.955.835.946	170.038.318.042	32.711.375.008
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.597.722.600	14.028.587.062	13.519.737.108	13.806.583.091	8.556.591.672
Belanja Aset Lainnya	7.627.483.500	657.397.000	270.744.500	438.689.500	232.290.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.099.755.500**	**2.038.526.800**	**1.620.332.000**	**2.405.161.394**	**47.178.059.560**
Belanja Tidak Terduga	1.099.755.500	2.038.526.800	1.620.332.000	2.405.161.394	47.178.059.560
BELANJA TRANSFER	**273.324.433.102**	**344.844.887.583**	**342.296.708.277**	**374.375.047.555**	**395.099.845.477**
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)	11.648.013.393	11.251.676.120	16.596.348.783	21.038.517.880	14.976.918.783
Bagi Hasil Pajak	9.041.322.169	8.785.730.200	12.786.657.600	18.523.317.758	13.740.139.419
Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.606.691.224	2.465.945.920	3.809.691.183	2.515.200.122	1.236.779.364
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	261.676.419.709	333.593.211.463	325.700.359.494	353.336.529.675	380.122.926.694
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	972.828.057	332.386.381.369	324.664.937.400	352.332.216.900	379.162.169.500
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	260.703.591.652	1.206.830.094	1.035.422.094	1.004.312.775	960.757.194
SURPLUS / (DEFISIT)	**(66.254.382.446)**	**(44.274.023.886)**	**(9.885.652.719)**	**(103.298.634.281)**	**90.331.825.015**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	**378.467.152.223**	**297.142.223.911**	**234.877.915.025**	**212.488.849.034**	**97.695.464.753**
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	378.230.336.423	297.125.254.911	234.868.200.025	212.484.349.034	97.690.214.753

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	236.815.800	16.969.000	9.715.000	4.500.000	5.250.000
PENGELUARAN DAERAH	**15.087.514.866**	**18.000.000.000**	**12.500.000.000**	**11.500.000.000**	**6.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	87.514.866	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	**363.379.637.357**	**279.142.223.911**	**222.377.915.025**	**200.988.849.034**	**91.695.464.753**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	297.125.254.911	234.868.200.025	212.492.262.306	97.690.214.753	182.027.289.768

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021

Gambar 3.9
Realisasi Belanja Tahun 2016-2020 (dalam Milyar)

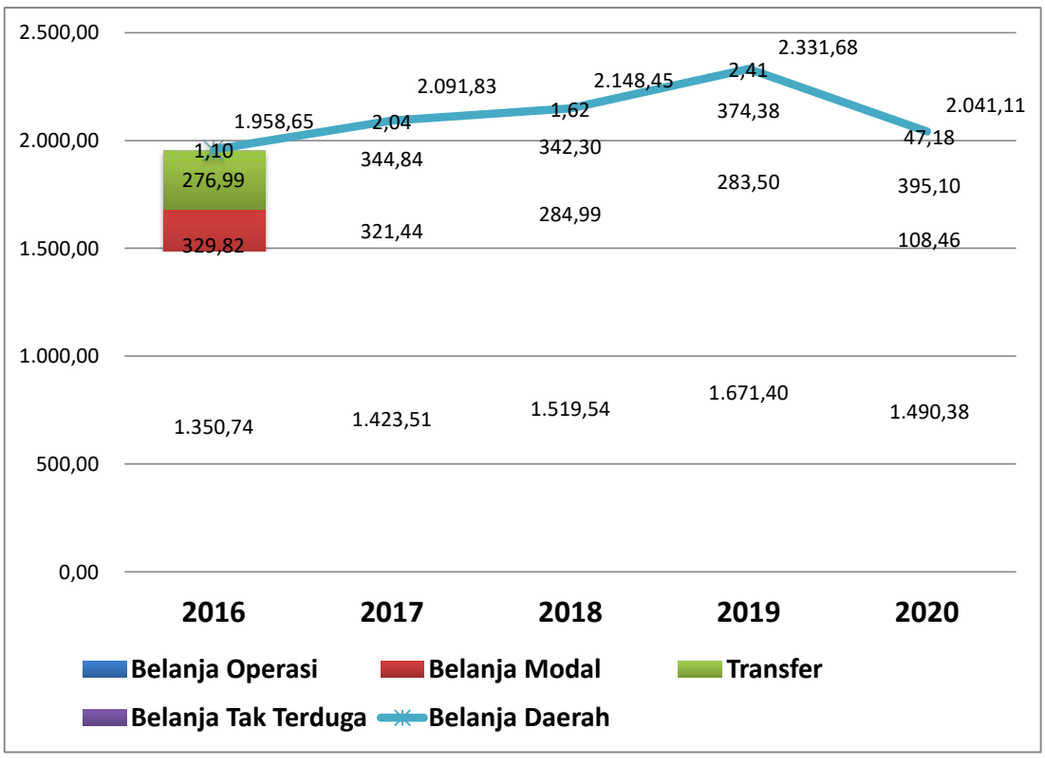

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2021

Proporsi Belanja langsung terhadap total Belanja Daerah dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 terus meningkat, namun pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan karena adanya wabah pandemi C*ovid 19* yang menyebabkan adanya kebijakan anggaran belanja *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran guna penanganan wabah tersebut .

1. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain :

a. Adanya aturan penganggaran Belanja Tidak Terduga yang bersifat penyediaan,
b. Belanja Pegawai penyediaan CPNS, Acres dan PPPK, sisa tunjangan pegawai pensiun dan sisa insentif pemungutan,
c. Belanja Hibah untuk BOP PAUD ada sisa karena mendasarkan pada Dapodik tahun sebelumnya.
d. *Refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran akibat pandemi *Covid-19*.

Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, di samping itu juga ada efisiensi/ penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/ kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2020 antara lain:

a. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
b. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila terlambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
c. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana hibah pemerintah, dana bagi hasil pajak serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
d. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya
e. Perlunya efektivitas kerja dan pencermatan untuk efisiensi anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang berupa belanja tidak langsung termasuk belanja pegawai.
f. Perlunya konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan penerapan Analisis standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku.
g. Penyelarasan program Perangkat Daerah dengan prioritas program nasional, regional dan daerah.

3.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kendal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN DAERAH	**378.467.152.223**	**297.142.223.911**	**234.877.915.025**	**212.488.849.034**	**97.695.464.753**
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	378.230.336.423	297.125.254.911	234.868.200.025	212.484.349.034	97.690.214.753
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	236.815.800	16.969.000	9.715.000	4.500.000	5.250.000
PENGELUARAN DAERAH	**15.087.514.866**	**18.000.000.000**	**12.500.000.000**	**11.500.000.000**	**6.000.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000	18.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	87.514.866	-	-	-	-
Pembiayaan Neto	**363.379.637.357**	**279.142.223.911**	**222.377.915.025**	**200.988.849.034**	**91.695.464.753**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	297.125.254.911	234.868.200.025	212.492.262.306	97.690.214.753	182.027.289.768

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021

1. **Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebagaimana hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan Kembali Piutang merupakan pengembalian pokok pinjaman bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disalurkan sejak tahun 2001 dan saat ini sudah tergolong dalam piutang macet.

2. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan di Tahun Anggaran 2016-2020 yang meliputi penganggaran untuk penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.

3. **PEMBIAYAAN NETO**

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

4. **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**

Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari Tahun Anggaran 2016 sampai pada Tahun 2019 selalu mengalami penurunan kemudian Tahun 2020 mengalami kenaikan SiLPA untuk senilai Rp84.337.075.015,00. Kenaikan nilai SiLPA ini disebabkan karena kondisi wabah *Covid 19* yang mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana sesuai rencana.

3.4 Analisis Keuangan Daerah

3.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam

membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal. Jika nilainya tinggi, menunjukkan derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat yang menggambarkan perbandingan antara kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan atau penerimaan daerah di APBD. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Tahun	PAD	Pendapatan	%
2016	263.274.261.742	1.833.356.474.931	14,36
2017	395.818.878.534	2.057.834.605.083	19,23
2018	338.052.929.990	2.127.823.036.990	15,89
2019	412.512.717.638	2.344.033.949.116	17,60
2020	333.650.044.139	2.149.414.537.843	15,52
2021	415.542.060.688	2.278.236.519.171	18,24
Rata-Rata	**359.808.482.122**	**2.131.783.187.189**	**16.81**

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal periode 2016-2021 adalah sebesar 16,81%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih kecil. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tata kelola potensi pajak dan retribusi daerah, serta sumber-sumber PAD lainnya masih harus terus dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan peran dan proporsi PAD sebagai sumber dana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

3.4.2 Indeks Kinerja Keuangan

Indeks Kinerja Keuangan (IKK) diukur dengan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

1. Ketergantungan Fiskal (KF)

   Ketergantungan Fiskal merupakan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah dikurang belanja pegawai dalam total pendapatan anggaran daerah di APBD. Belanja pegawai dalam hal ini adalah belanja pegawai yang diperuntukan bagi PNS, Bupati dan Wakil

Bupati serta hak-hak yang diterima oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kendal selama 2016-2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Ketergantungan Fiskal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	DAU	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai Terhadap DAU	Sisa	Pendapatan	%
2016	972.952.576.000	942.473.949.255	96,87	297.125.254.911	1.833.356.474.931	16,21
2017	955.860.928.000	877.058.119.565	91,76	234.868.200.025	2.057.834.605.083	11,41
2018	956.331.079.388	930.546.886.118	97,30	212.492.262.306	2.127.823.036.990	9,99
2019	998.236.127.000	973.879.517.410	97,56	97.690.214.753	2.344.033.949.116	4,17
2020	909.781.219.000	923.990.970.136	101,56	182.027.289.768	2.149.414.537.843	8,47
2021	931.382.224.000	1.129.394.130.453	121,26	0	2.278.236.519.171	0,00
Rata-Rata	954.090.692.231	962.890.595.490	101,05	170.700.536.961	2.131.783.187.189	8,37

Dari data tersebut dapat di lihat bahwa rata-rata DAU yang digunakan untuk belanja pegawai adalah sebesar 101,05%. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh Kabupaten Kendal tidak semuanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Hal tersebut tampak pada angka indeks yang rata-rata adalah sebesar 8.37%. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masih ada DAU yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

2. Kapasitas Penciptaan Pendapatan (KPP)

Kapasitas Penciptaan Pendapatan merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD berdasarkan Kapasitas Penciptaan Pendapatan di daerah. Proporsi PAD disini tidak dinyatakan terhadap total nilai APBD namun dinyatakan sebagai persentase dari PDRB kabupaten. Kapasitas Penciptaan Pendapatan selama 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kapasitas Penciptaan Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

TAHUN	PAD	PDRB	%
2016	263.274.261.742	26.970.000.000.000	0,98
2017	395.818.878.534	35.570.000.000.000	1,11
2018	338.052.929.990	28.830.000.000.000	1,17
2019	412.512.717.638	30.900.000.000.000	1,33
2020	333.650.044.139	30.910.000.000.000	1,08
Rata-Rata	**348.661.766.409**	**30.636.000.000.000**	**1,14**

Dari tabel di atas diketahui bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menciptakan kenaikan pendapatan masih cukup rendah yaitu

berada di angka 1,33%. Hal ini berarti harus diupayakan kegiatan-kegiatan yang menjadi pemacu untuk dapat terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

3. Proporsi Belanja Modal (PBM)

Proporsi Belanja Modal merupakan indikator yang menunjukkan arah pengelolaan belanja pemerintah yang memberikan manfaat jangka panjang sehingga memberikan efek multiplier yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. PBM dirumuskan sebagai persentase belanja modal dengan total belanja pada APBD.

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	Belaja Modal	Belanja	%
2016	329.821.433.534	1.954.982.476.287	16,87
2017	321.438.759.709	2.091.829.069.982	15,37
2018	284.991.421.170	2.148.450.040.419	13,26
2019	283.503.675.627	2.331.683.034.136	12,16
2020	108.455.011.780	2.041.114.766.533	5,31
2021	174.670.048.442	2.312.194.067.943	7,55
Rata-rata	**250.480.058.377**	**2.146.708.909.217**	**11,75**

Proporsi Belanja modal menggambarkan besarnya persentase belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Selama periode 2013-2017 alokasi belanja modal mengalami fluktuasi sangat tergantung pada penetapan skala prioritas pada perencanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya. Selain itu, hal ini juga sering dipengaruhi oleh kebijakan posting anggaran terkait dengan pengakuan/pencatatan aset pada akhir tahun kegiatan.

4. Kontribusi Sektor Pemerintah

Kontribusi Sektor Pemerintah merupakan indikator yang menunjukkan kontribusi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian, dimana dinyatakan sebagai persentase total belanja pemerintah terhadap PDRB Kabupaten.

Tabel 3.8
Kontribusi Sektor Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2020

TAHUN	Belanja	PDRB	%
2016	1.954.982.476.287	26.970.000.000.000	7,25
2017	2.091.829.069.982	35.570.000.000.000	5,88
2018	2.148.450.040.419	28.830.000.000.000	7,45
2019	2.331.683.034.136	30.900.000.000.000	7,55
2020	2.041.114.766.533	30.910.000.000.000	6,60
Rata-rata	**2.113.611.877.471**	**30.636.000.000.000**	**6,95**

Kontribusi sektor pemerintah dalam mengerakkan pembangunan daerah berada di kisaran angka rata-rata 1,45%. Hal ini menunjukan bahwa belanja sektor pemerintah relatif stabil setiap tahunnya. Berdasarkan 4 (empat) indikator di atas maka dapat diketahui Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Indeks Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

TAHUN	KF	KPP	PBM	KSP	Jumlah	IKK
2016	96,87	0,98	16,87	7,25	121,97	30,49
2017	91,76	1,11	15,37	5,88	114,12	28,53
2018	97,30	1,17	13,26	7,45	119,18	29,80
2019	97,56	1,33	12,16	7,55	118,60	29,65
2020	101,56	1,08	5,31	6,60	114,55	28,64
2021	121,26		7,55		128,81	64,41
Rata-rata	101,05	1,13	11,75	6,95	119,54	35,25

Berdasarkan tabel di atas dimana angka IKK berada di angka yang relatif stabil menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di Kabupaten Kendal cenderung tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Hal ini dapat diartikan sebagai kestabilan kinerja keuangan daerah namun dapat juga diartikan sebagai belum optimalnya upaya daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga belanja pembangunan cenderung juga mengalami stagnasi ketersediaan alokasi anggaran.

3.5 Kerangka Pendanaan

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2013-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019–2023 diupayakan dapat meningkat. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel 3.4. Untuk memenuhi kebutuhan belanja, salah satunya dapat digunakan melalui pinjaman daerah.

1. Pendapatan Daerah

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, upaya yang ditempuh diantaranya adalah meningkatkan PAD. Untuk pencapaian PAD dengan menggunakan kebijakan/strategi yaitu :

1. Intensifikasi Pajak Asli Daerah (PAD), meliputi penagihan secara intensif terhadap sumber-sumber pajak asli daerah, penilaian kepada individu wajib pajak, untuk meng upgrade data wajib pajak, sehingga target dapat dinaikkan, sedangkan dari segi teknologi langkah yang diambil untuk menaikkan potensi PAD adalah melakukan modernisasi

alat untuk memantau potensi pajak, sehingga tarip pajak yang dikenakan sesuai dengan realita di lapangan. Intensifikasi dilakukan juga terhadap Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menaikkan tarif PBB dan BPHTB.

2. Ekstensifikasi Pajak Asli Daerah (PAD), meliputi Pendataan wajib pajak baru, sebagai upaya menggali potensi pajak asli daerah, baik dari pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, PBB, BPHTB dan seterusnya. Hal tersebut akan meningkatkan target pajak asli daerah.

2. Belanja Daerah

Kenaikan anggaran belanja pegawai yang di tahun direncanakan dalam RPJMD 2021 – 2026, digunakan untuk penyediaan adanya tambahan ASN di tahun 2022, dan penyediaan tambahan ASN di tahun-tahun berikutnya. Pada belanja barang terdapat kenaikan pagu anggaran yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pagu anggaran hibah pada RPJMD 2021 – 2026 diberikan pada lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang menunjang program prioritas daerah.

Kenaikan dan penurunan belanja modal pada RPJMD 2021-2026 dipergunakan untuk prasyarat penggunaan Dana Transfer Umum (DTU) yang mewajibkan sebesar 25 % belanja modal dari DTU, dalam rangka infrastruktur pelayanan publik dan meningkatkan aset daerah.

Kenaikan pagu anggaran dipergunakan untuk penyediaan apabila terjadi keadaan darurat atau kepentingan mendesak, dan dalam rangka memenuhi aturan kenaikan belanja tidak terduga harus mengalami kenaikan 15 % samapai dengan 10 % dari tahun sebelumnya.

Pada belanja bagi hasil pagu anggaran pada RPJMD 2021-2021 digunakan untuk menyesuaikan target pendapatan yang mengalami kenaikan targetnya, sebesar 10 %. Belanja bantuan keuangan pada obyek belanja Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan, untuk memenuhi syarat penganggaran sebesar 10 % dari DTU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, sedangkan pada obyek belanja Dana Desa (DD) merupakan penerusan dari pemerintah pusat. Sedangkan pada obyek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada dusun, dipenuhi dalam rangka untuk melaksanakan visi misi dan program unggulan Bupati Kendal tahun 2021-2026.

3. Pembiayaan Daerah

SILPA digunakan untuk penyeimbang di tahun 2022-2023 antara pendapatan, belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan

memperhitungkan capaian pendapatan, sedangkan di tahun 2024 terdapat pencairan dana cadangan pilkada dan pilkades. Pembentukan Dana Cadangan tahun Anggaran pada tahun 2022 dan 2023 senilai Rp.25.000.000.000,00 diperuntukkan untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2024. Selain itu dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD sesuai dengan peraturan daerah tentang BUMD yang telah ditetapkan dalam peraturan pentertaan modal. Kenaikan SILPA juga digunakan untuk penyeimbang antara pendapatan, belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan capaian pendapatan.

Tabel 3.10

Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
PENDAPATAN DAERAH	**2.278.236.519.171,00**	**2.398.503.775.879,00**	**2.440.917.666.527,00**	**2.489.524.785.430,00**	**2.535.875.206.109,00**	**2.581.943.213.844,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**415.542.060.688,00**	**565.639.024.396,00**	**608.052.915.044,00**	**656.660.033.947,00**	**703.010.454.626,00**	**749.078.462.361,00**
Hasil Pajak Daerah	174.220.000.000,00	301.061.000.000,00	329.367.099.980,00	358.959.809.978,00	387.159.150.976,00	413.516.627.674,00
Hasil Retribusi Daerah	19.312.746.900,00	30.082.300.000,00	33.332.724.900,00	37.199.027.615,00	41.195.954.933,00	45.247.666.060,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.345.000.000,00	19.000.000.000,00	19.228.000.000,00	19.458.736.000,00	19.692.240.000,00	19.928.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	206.664.006.288,00	215.495.724.396,00	226.125.090.164,00	241.042.460.354,00	254.963.108.717,00	270.385.668.627,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.768.204.458.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**
Transfer Pemerintah Pusat	**1.602.490.919.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**
Dana perimbangan	**1.314.796.489.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**
Dana Transfer Umum	**969.343.594.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00
Dana Alokasi Umum	931.382.224.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00
Dana Transfer Khusus.	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**
Dana Alokasi Khusus Fisik	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00
Dana Insentif Daerah	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**
Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00
dana otonomi khusus						
dana keistimewaan						

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dana Desa	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**
Dana Desa	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00
Transfer Antar-Daerah	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**
Hibah dari Pemerintah	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	**2.312.194.067.943,00**	**2.437.603.775.879,00**	**2.446.417.666.527,00**	**2.561.624.785.430,00**	**2.557.375.206.109,00**	**2.603.443.213.844,00**
BELANJA OPERASI	**1.758.177.938.243,00**	**1.699.899.388.262,00**	**1.721.928.171.039,00**	**1.841.759.388.670,00**	**1.820.665.378.118,00**	**1.843.963.323.471,00**
Belanja Pegawai	1.129.394.130.453,00	1.148.968.320.879,00	1.150.137.740.439,00	1.164.336.128.670,00	1.180.140.532.118,00	1.193.802.823.871,00
Belanja Barang dan Jasa	548.064.846.490,00	504.266.270.383,00	514.961.530.600,00	525.194.360.000,00	570.294.846.000,00	580.782.499.600,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	68.898.961.300,00	34.844.797.000,00	45.008.900.000,00	140.408.900.000,00	58.410.000.000,00	57.558.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.820.00.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00
BELANJA MODAL	**174.670.048.442,00**	**238.323.090.772,00**	**203.240.000.000,00**	**195.270.000.000,00**	**207.894.804.400,00**	**225.623.948.000,00**
Belanja Modal	174.670.048.442,00	238.323.090.772,00	203.240.000.000,00	195.270.000.000,00	207.894.804.400,00	225.623.948.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.860.000.000,00**	**11.860.000.000,00**	**12.860.000.000,00**	**12.860.000.000,00**	**13.860.000.000,00**	**15.860.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	7.860.000.000,00	11.860.000.000,00	12.860.000.000,00	12.860.000.000,00	13.860.000.000,00	15.860.000.000,00
BELANJA TRANSFER	**371.486.081.258,00**	**487.521.296.845,00**	**508.389.495.488,00**	**511.735.396.760,00**	**514.955.023.591,00**	**517.995.942.373,00**
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA)**	**15.766.568.258,00**	**33.114.330.000,00**	**36.269.982.488,00**	**39.615.883.760,00**	**42.835.510.591,00**	**45.876.429.373,00**

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	13.835.268.818,00	30.106.100.000,00	32.936.709.998,00	35.895.980.998,00	38.715.915.098,00	41.351.662.767,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.931.299.440,00	3.008.230.000,00	3.333.272.490,00	3.719.902.762,00	4.119.595.493,00	4.524.766.606,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**355.719.513.000,00**	**454.406.966.845,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	355.719.513.000,00	454.406.966.845,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	**(33.957.548.772,00)**	**(39.100.000.000,00)**	**(5.500.000.000,00)**	**(72.100.000.000,00)**	**(21.500.000.000,00)**	**(21.500.000.000,00)**
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan	**51.957.548.772,00**	**75.000.000.000,00**	**55.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	51.957.548.772,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Pencairan dana cadangan	-	-	-	50.000.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**18.000.000.000,00**	**35.900.000.000,00**	**49.500.000.000,00**	**22.900.000.000,00**	**23.500.000.000,00**	**23.500.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan Daerah	**-**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	**18.000.000.000,00**	**10.900.000.000,00**	**24.500.000.000,00**	**22.900.000.000,00**	**23.500.000.000,00**	**23.500.000.000,00**
PDAM (Bagian Laba)		-	-	-	-	-
Bank Jateng/BPD	13.000.000.000,00	5.000.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00
BPR BKK Kendal						
PDAM	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
PD Farmasi		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
PD Aneka Usaha Daerah		400.000.000,00	500.000.000,00			
PD BPR Kendhali Artha		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	900.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembiayaan Netto	**33.957.548.772,00**	**39.100.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**72.100.000.000,00**	**21.500.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021)

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan.
   a. Masih rendahnya APK PAUD dan APK SMP, tahun 2020 APK PAUD sebesar 56,79% dan APK SMP sebesar 86,25%.
   b. Masih kurangnya ruang kelas dalam kondisi baik baik SD maupun SMP. Tahun 2020 untuk SD sebesar 71,33% dan SMP sebesar 79,89%
   c. Masih kurangnya ruang perpustakaan SD dan SMP dalam kondisi baik, tahun 2020 SD sebesar 71,33% dan SMP sebesar 79,89%.
   d. Masih rendahnya persentase pendidik memiliki sertifikasi, tahun 2020 untuk TK sebesar 44,92% SD sebesar 60,52% dan SMP sebesar 61,07%;
   e. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Tengah dan target nasional.
   f. Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Kendal.
   g. Masih kurangnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas serta belum memenuhi Standar Kompetensi.
   h. Masih tingginya angka putus sekolah (APts) sehingga akan mempengaruhi indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten Kendal dalam hal bidang Pendidikan.
   i. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.
2. Kesehatan.
   a. Masih ditemukan kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, tahun 2020 AKB sebesar 10/ 1.000 KH, AKABA sebesar 12,4/ 1.000 KH dan AKI sebesar 115,79/100.000 KH. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, tenaga

kesehatan yang belum optimal, dan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat belum optimal

b. Masih ditemukannya gizi buruk dan stunting, tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,05% dan balita stunting sebesar 17,54% berdasarkan data EPPBGM 2020.
c. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan (puskesmas sesuai permenkes 75/2016 masih 30% pada tahun 2020..
d. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana PMK No 4 tahun 2019.
e. Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan seha, tahun 2020 rumah ber PHBS sebesar 84,73%
f. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, Jantung)

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
   a. Belum optimalnya kinerja sistem irigasi, capaian tahun 2020 indeks kinerja sistem irigasi tercatat sebesar 1,02 %;
   b. Masih terdapat drainase jalan dalam kondisi tidak baik, pada tahun 2020 drainase jalan kondisi baik sebesar 87 %;
   c. Masih terdapat jalan dalam kondisi tidak baik (rusak berat, sedang dan ringan) sebesar 32,97 % pada tahun 2020;
   d. Belum optimalnya pencapaian SPM tahun 2020, akses air minum layak dan aman sebesar 93 %, Akses sanitasi layak sebesar 92 %.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
   a. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni, tahun 2020 sebesar 13,09 % rumah tidak layak huni belum tertangani;
   b. Masih terdapat Kawasan kumuh sebesar 134,76 ha pada tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Nomor : 648.2/121/2021;
   c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perumahan, baru sebesar 40,91 %.
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
   a. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah, tahun 2020 sebesar 90%
   b. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

c. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru sebesar 95% pada tahun 2020.
d. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.

6. Sosial.
   a. Masih minimnya peningkatan kapasitas ataupun pemberdayaan pada lembaga kesejahteraan sosial, tahun 2020 sebesar 9%
   b. Rendahnya cakupan pemenuhan standar pelayanan minimal pada kelompok PPKS.
   c. Belum optimalnya penanganan PPKS diluar korban HIV dan NAPZA.
   d. Belum validnya data kemiskinan.
   e. Belum optimalnya pemenuhan standar taman makam pahlawan, tahun 2020 sebesar 0,7%

4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja.
   a. Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah. Tahun 2020 sebesar 7,56%;
   b. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, tahun 2020 Pencari kerja yang ditempatkan sebesar 43%;
   c. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
   d. Menurunnya Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama/ PB tahun 2020 menjadi sebesar 53%.
2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak.
   a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak, tahun 2020 sebesar 0,03%;
   b. Masih belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, hal ini karena pada tahun 2020 baru sebesar 8% cakupan pembentukan desa layak anak;
   c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga, hal ini dapat dilihat dari Cakupan IR yang mendapat pelatihan baru mencapai 20% pada tahun 2020 ini masih banyak perlu

pembinaan dan pelatihan mengingat munculnya pelakuku IR Baru;

d. Belum optimalnya pelaksanaan PUG, tahun 2020 kelembagaan PUG yang aktif sebesar 60%.

3. Pangan.
   a. Belum terpenuhinya ketersediaan cadangan pangan daerah yang tersedia (capaian tahun 2020 mencapai sebesar 31,5% dari 100 ton).
   b. Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan, sampai dengan 2020 sebesar 52,72%.
   c. Belum optimalnya tingkat konsumsi pola pangan bergizi seimbang dan aman (B2SA) secara luas dalam masyarakat, tahun 2020 skor PPH sebesar 87,2.
4. Pertanahan.

   Masih terdapat bidang tanah milik Pemda yang belum bersertifikat Tahun 2020 tanah milik Pemda bersertifikat 42,01 %.
5. Lingkungan hidup.
   a. Capaian indek kualitas lingkungan hidup sebesar 66,37 (kurang baik);
   b. Belum terpenuhinya penyediaan ruang terbuka hijau (17,73 % pada tahun 2020);
   c. Menurunnya persentase sampah tertangani, capaian tahun 2020 sebesar 20,5 %;
   d. Belum optimalnya daerah layanan pengangkutan ke TPA, baru 17 kecamatan dari total 20 kecamatan yang ada.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
   a. Masih rendahnya persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak dimana pada tahun 2020 baru mencapai 33,09%.
   b. Masih adanya penduduk belum memiliki KTP elektronik. Kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2020 sebesar 99,31%.
   c. Masih rendahnya persentase kepemilikan akta kelahiran (tahun 2020 sebesar 69,36%).
   d. Belum optimalnya kepemilikan akta kelahiran anak (kelompok usia 0-18 tahun) sebesar 95,07% pada tahun 2020.
   e. Rendahnya kepemilikan dokumen perkawinan, tahun 2020 sebesar 12,98%.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa.
    a. Belum semua desa memiliki BUMDes, sampai dengan tahun 2020 hanya sebanyak 180 BUMDes dari sebanyak 266 desa (67,6%), dan sebanyak 0,64% dari 180 BUMDes memiliki kategori strata maju.
    b. Belum semua desa mencapai strata desa mandiri (tahun 2020 sebesar 4,51%)
    c. Belum semua desa memiliki perangkat desa dengan kompetensi tata kelola pemerintahan desa (lebih kurang 23 – 27%)
    d. Belum optimalnya pembentukan kawasan perdesaan (tahun 2020 sebesar 20%).
    e. Belum semua dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes sesuai dengan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
    a. Masih Tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten Kendal (2,2).
    b. Masih kurangnya optimalnya kesadaan masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB (1,38%).
    c. Masih cukup tingginya unmet need KB berdasarkan data 2020 adalah 15,77%.
    d. Belum optimalnya cakupan bina keluarga balita (BKB), tahun 2020 sebesar 70,26%
9. Perhubungan.
    a. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum yang ditandai dengan persentase terminal tipe C sesuai standar sebesar 75%, pemenuhan halte baru sebesar 80%, layanan angkutan darat sebesar 72%.
    b. Belum optimalnya cakupan rasio ijin trayek, pada tahun 2020 sebesar 75 %;
    c. Belum semua sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik, pada tahun 2020 sebesar 60%.
10. Komunikasi dan informatika.
    a. Belum optimalnya capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebesar 88,8 di tahun 2020.
    b. Belum optimalnya capaian indek SPBE dimana di tahun 2018 baru mencapai 3,76 pada tahun 2020.

c. Belum optimalnya pemasangan hotspot di ruang publik, jumlah hotspot baru 85 titik pada Tahun 2020.
d. Pengembangan sistem SPBE belum terkelola dengan baik, dikarenakan adanya penambahan indeks domain manajemen SPBE.
e. Belum terukurnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
f. Masih terdapat area ruang publik yang blankspot Mobile Broadband 4G dan bahkan ada yang blankspot internet di beberapa wilayah desa di 8 Kecamatan.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.
    a. Menurunnya pertumbuhan UKM tahun 2020 menjadi 5,2%.
    b. Belum optimalnya pembinan terhadap koperasi, tahun 2020 koperasi aktif sebesar 78,00%.
    c. Rendahnya cakupan usaha mikro yang berijin, tahun 2020 sebesar 7,3%.
    d. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil. Tahun 2020 Usaha mikro yang berkembang sebesar 4,80%.
12. Penanaman modal.
    a. Menurunnya jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di tahun 2020 (3,146 Trilyun) walaupun jumlah investor di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
    b. Belum semua investor/pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sesuai ketentuan, tahun 2020 baru sebesar 85%.
13. Kepemudaan dan olah raga.
    a. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten Kendal. Sampai Tahun 2020 baru 25 organisasi kepemudaan yang mendapatkan pembinaan.
    b. Terbatasnya sarana dan prasarana olah raga untuk pembinaan atlit. Tahun 2020 hanya terdapat 9 gedung olah raga.
    c. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga, hal ini karena tidak adanya event pertandingan pada tahun 2020 terkait dengan adanya pandemi Covid-19.

14. Statistik;
    a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
    b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah.
    c. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
15. Persandian.
    a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian.
    b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Kendal dengan pusat dan provinsi.
    c. Peningkatan risiko dan celah keamanan informasi dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (penyelenggaraan SPBE) Pemerintah Daerah sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era siber. sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian tahun 2020 baru sebesar 22,84%
16. Kebudayaan.
    a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten Kendal, tahun 2020 baru 1 cagar budaya yang dilestarikan.
    b. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival tahun 2020 sebesar 75%
    c. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk aktualisasi seni dan budaya, belum adanya gedung seni.
17. Perpustakaan.
    a. Belum optimalnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung di tahun 2016 sebesar 18.195 menjadi 3.891 ditahun 2020.
    b. Masih ditemukannya perpustakaan dengan kondisi kurang baik, tahun 2020 perpustakaan kondisi baik sebesar 65%.
18. Kearsipan.
    a. Belum optimalnya pemeliharaan arsip inaktif dan statis dimana pada tahun 2020 baru mencapai 2,73%.

b. Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai, tahun 2020 sarana prasarana yang terpelihara sebesar 26,19%
c. Masih ditemukannya arsip daerah yang belum di lestarikan dan diselamatkan tahun 2020 sebesar 1,76%

4.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. kelautan dan perikanan.
   a. Menurunnya produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 budidaya menjadi 22.509.480 kg, dikarenakan belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana BBI (Balai Benih Ikan) yang belum optimal.
   b. Belum optimalnya pembinaan kelompok pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan dengan teknologi tepat guna dan jumlah kelompok yang dibina terbatas setiap tahun, tahun 2020 hanya sebanyak 12 kelompok.
   c. Tingkat konsumsi ikan rata-rata masih rendah tahun 2020 sebesar 30,93 Kg/ per kapita per tahun lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah (2020) sebesar 33 kg/ per kapita/ tahun. Hal ini disebabkan pemahaman tentang nilai gizi ikan, pangan beragam dan daya beli masyarakat.
2. Pariwisata.
   a. Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada tahun 2020 sebesar 459,342 orang, hal ini karena adanya pandemi Covid-19.
   b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru, tahun 2020 hanya 3 objek wisata yang dikembangkan.
   c. Belum semua SDM pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikat atau memenuhi standar kompetensi, tahun 2020 sebesar 81,21%.
   d. Belum optimalnya pengembangan industri kreatif.
   e. Kurangnya daya tarik wisata Kendal, sehingga belum memberikan dampak wisata lain yang ada di sekitarnya.
   f. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPK).
3. Pertanian.
   a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas pertanian terutama tanaman pangan utama (padi dan jagung), tahun 2020 produksi padi sebesar 245.172 ton, jagung 226.122 ton.

b. Belum optimalnya penanganan angka kesakitan dan kematian hewan, tahun 2020 angka morbiditas hewan sebesar 1.916 ekor.
c. Belum optimalnya penggunaan varietas bibit unggul, tanaman pangan sebesar 94,46 %, tanaman hortikultura sebesar 75,06 % dan tanaman perkebunan sebesar 69,17 %.

4. Perdagangan.
   a. Rendahnya peningkatan sarana dan prasaran Distribusi Perdagangan, kondisi ini dapat dilihat dari pasar yang memenuhi persayaratan hanya sebesar 8,33% di tahun 2020.
   b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, hal ini ditunjukan dengan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah baru mencapai 28,57% di tahun 2020.
   c. Rendahnya nilai produk ekspor di Kabupaten Kendal, tercatat pada tahun 2020 menunjukkan penurunan.
   d. Masih belum optimalnya penataan PKL di Kabupaten Kendal, hal ini dapat terlihat dari lokasi PKL yang dilakukan penataan ditahun 2020 baru mencapai 20%.
   e. Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen, yang ditunjukkan dengan UTTP yang ditera masih belum semuanya, tercatat pada tahun 2020 UTTP yang ditera sebesar 15,72%.
   f. Pemenuhan dan pengelolaan pupuk untuk kebutuhan pertanian dan pangan yang belum optimal.

5. Energi

   Belum optimalnya energi panas bumi yang termanfaatkan, dari tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 1 unit.

6. Perindustrian.
   a. Rendahnya status IKM yang berijin, antara lain IKM memiliki Izin usaha industri kecil melalui P-IRT baru mencapai 16,47%.
   b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil dimana pada tahun 2020 baru sebesar 4,01%.
   c. Rendahnya kondisi industri yang memiliki standar produksi layak, hal ini ditunjukkan dengan industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi hanya sebesar 2,64% di tahun 2020.
   d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA)

e. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Industri Daerah dan Nasional.

7. Transmigrasi
   a. Terbatas jumlah kuota pengiriman calon trasmigran

4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintah

1. Perencanaan
   a. Belum optimalnya pencapaian target target dalam perencanaan pembangunan dalam RPJMD (tahun 2020 sebesar 75%)
   b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran (usulan masyarakat yang diakomodir sampai dengan 2020 sebesar 74,5%)
2. Penelitian dan Pengembangan
   a. Belum semua dokumen perencanaan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian ilmiah.
   b. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk peningkatan inovasi dan pembangunan daerah
   c. Belum adanya tenaga fungsional peneliti di Baperlitbang Kabupaten Kendal.
   d. Belum terwwujudnya inovasi daerah yang memadai
3. Keuangan.
   a. Pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal (tahun 2020 sebesar 16,68%) menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal, kurangnya pemanfaatan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
   b. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah/BMD untuk pelayanan publik dan kerjasama dengan pihak swasta yang mendatangkan pendapatan daerah.
4. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
   a. Pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, belum semua PNS mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran setiap tahunnya
   b. Profesionalisme ASN cukup baik dengan nilai 75,28. Ditahun mendatang Indeks Profesionalitas ASN dapat ditingkatkan.
   c. Pengembangan pola karir dengann sistem merit bagi ASN sedang

disiapkan tahapan tahapan utk pemenuhannya.

5. Pengawasan
   a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP sampai dengan tahun 2020 pada level 2.
   b. Pengawasan kinerja OPD belum optimal.
   c. Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas, data tahun 2020 temuan BPK yang ditindaklanjuti baru mencapai 81,51%.
6. Kewilayahan.
   a. Belum optimalnya realisasi dana desa.
   b. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
7. Sekretariat Daerah
   a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat
   b. Belum optimalnya penataan organisasi.
8. Sekretariat Dewan
   a. Belum optimalnya pelayanan pada DPRD
9. Kesbangpolinmas
   a. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat
   b. Masih terdapat lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan LSM terdaftar di Kesbangpol;
   c. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lembaga swdaya masyarakat dalam masyarakat, data tahun 2018 sebanyak 3.200 orang peserta.
   d. Belum optimalnya Pendidikan politik bagi pemilih perempuan dan pemilih pemula di perdesaan.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

2. **Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi**

   Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

3. **Transformasi Struktural Berjalan Lambat**

   Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatkan kualitas UMKM belum optimal.

4. **Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital**

   Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

b. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

1. **Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**

   Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat penganguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan

pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

2. **Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk**

   Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaminan perlindungan sosial.

3. **Pemenuhan Layanan Dasar**

   Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derjat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.

4. **Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda**

   Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sekktor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

5. **Pengentasan kemiskinan**

   Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat

6. **Peningkatan Produktifitas dan daya saing**

   Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

d. Membangun Kebudyaan dan Karakter bangsa

1. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
2. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
5. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
6. Rendahnya budaya literasi.
7. Belum optimalnya peran keluarga.

e. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kuramgya sanitasi dan air minum yang layak.
2. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
3. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
4. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
5. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
6. Konektivitas Transportasi Jalan.
7. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim

1. Belum tercapainya indeks kualitas lingkugan hidup.
2. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

1. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir.
2. Pemberantasan korupsi belum optimal.
3. Indek profesionalisme ASN.
4. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintah.
5. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas.
6. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan social ekonomi berkelanjutan.

4.2.2. Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Isu Strategi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan wilayah.
2. Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung.
5. Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.
6. Kedaulatan pangan dan energi.
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

4.2.3. Isu Pembangunan Kabupaten Kendal 2021 – 2026

1. Tantangan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kendal

a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1) Dalam 20 tahun mendatang, Kabupaten Kendal menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 905.451 jiwa dengan laju pertumbuhan 0.18 % diperkirakan meningkat mencapai sekitar 940.296 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, penyebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.
2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kendal yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing

perekonomian Kabupaten Kendal. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah :

a. mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, tingkat sosial ekonomi, dan gender;
b. meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai;
c. meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan
d. mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular.

Namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah perkotaan dan perdesaan, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan Kabupaten Kendal secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan kondisi demografi.

3) Kualitas hidup dan peran perempuan serta anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh :
   a. tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; dan
   b. kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

   Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olah raga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti :
   a) menipisnya nilai budaya dan agama;
   b) menurunkan ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial dan bencana alam; dan
   c) meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.
4) Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan Kabupaten Kendal untuk dapat mempertahankan jati diri masyarakat ketimuran yang berpegang pada norma dan kesopanan, dan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan agama serta peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.
5) Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern

dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

6) Proses pelayanan sosial harus disertai upaya menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Masih ada permasalahan sosial yang belum terjangkau karena keterbatasan kemampuan pemerintah.

b. Ekonomi

1) Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 4 % per tahun dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari daerah–daerah lain yang lebih maju.
2) Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Banyak usaha mikro yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB dan PPKM.
3) Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi persaingan ekonomi antardaerah yang makin tinggi akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan. Untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing nasional sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
4) Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk Kabupaten Kendal. Dalam angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan

kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen lebih berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.

5) Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian daerah yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
6) Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.
7) Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar

rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan kemajuan IPTEK, tantangan yang dihadapi adalah :

1) meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat;
2) menciptakan rasa aman;
3) memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan;
4) memperkuat sinergi kebijakan IPTEK dengan kebijakan sektor lain;
5) mengembangkan budaya IPTEK di kalangan masyarakat;
6) meningkatkan komitmen daerah terhadap pengembangan IPTEK;
7) mengatasi degradasi fungsi lingkungan;
8) mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; dan
9) meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya IPTEK, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan IPTEK.

d. Sarana dan Prasarana

1) Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan

pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

2) Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi daerah adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan tranportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.

3) Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana teknologi informasi komunikasi tersebut dapat diterima masyarakat sesuai dengan pendidikan dan etika moral. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses penyalurannya untuk keperluan masyarakat karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarananya.
4) Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah :
   a. melakukan reformasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat;
   b. mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan
   c. melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah.

   Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5) Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

e. Politik

1) Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.

2) Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kendal. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi dan keadilan sosial. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.

3) Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintah daerah secara profesional.

4) Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi.

f. Hukum dan Aparatur

1) Tantangan ke depan di dalam mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran

merupakan syarat mutlak dalam upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kendal.

2) Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya seiring dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi.

3) Proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi Industri 4.0, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informasi (TI), meningkatkan perubahan manajemen pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk satu data daerah, *e-government*, *e-procurement*, *e-business* dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Pandemi Covid-19 telah memacu penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk Pendidikan dan pelayanan publik) memanfaatkan TI dan tatanan baru dalam kesehatan dan mobilitas penduduk internal Kabupaten Kendal dan antar daerah.

g. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan dan pemanfaatan lahan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi :

a. arahan lokasi kegiatan;
b. batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; dan
c. efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan.

Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perdesaan dan perkotaan perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk memeratakan pembangunan fisiknya, tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing desa / kelurahan maupun kota. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam yang ada selama ini dan belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Kendal.

h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis kesehatan. Ketiga krisis itu menjadi tantangan Kabupaten Kendal jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Kendal, yaitu terancamnya moral masyarakat, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya

konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestrasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

2) Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Hal ini akan menjadikan krisis lahan yang berarti bahwa kebutuhan akan lahan baik untuk aktivitas budidaya maupun untuk aktivitas lindung tidak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Pada sisi yang lain, terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa deforestrasi hutan mangrove dan degradasi terumbu karang juga menyebabkan hilangnya potensi pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Kasus pencemaran lingkungan yang semakin meningkat, hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik

oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam pembangunan Kabupaten Kendal yang berdaya saing.

4.2.4. Isu Strategis RPJMD Tahun 2021 – 2026

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
A	**Pelayanan Dasar**	**Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar**
1.	Pendidikan Belum semua penduduk mendapatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan baik PAUD, SD maupun SMP.	
2.	Kesehatan Derajat kesehatan belum optimal hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kematian ibu, bayi, angka kesakitan.	
3.	Pekerjaan Umum Belum terpenuhi air minum yang layak dan sanitasi layak	
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Belum terpenuhinya keesedian rumah bagi penduduk	
5.	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Belum optimalnya penegakkan perda dan penanganan bencana	
6.	Sosial Belum semua anak terlantar, disabilitas terlantar, Lansia terlantar, PGOT dan korban bencana terlantar diluar panti mendapatkan pelayanan dasar.	
B	**Non Pelayanan Dasar**	**Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0**
1.	Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja belum sesuai	

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
	dengan tenaga yang tersedia hal ini dikarena kompetensi belum sesuai dengan permintaan pasar	
2.	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak Masih belum optimalnya kualitas dan perlindungan pada perempuan dan anak	
7.	Pemuda dan Olahraga Belum optimalnya prestasi olahraga dan pemuda	
8.	Perpustakaan Belum optimalnya minat baca pada masyarakat	
9.	Kebudayaan Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya	
		Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah
10.	Koperasi dan UKM menurunnya % koperasi aktif dan belum optimalnya pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil.	
11.	Penanaman Modal Belum optimalnya daya tarik investasi	
12.	Ketahanan Pangan Ketersediaan dan distribusi pangan belum optimal	
13.	Perikanan dan Kelautan Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	
14.	Perindustrian belum optimalnya pengembangan industri kecil	
15.	Perdagangan Belum optimalnya peningkatan eksport perdagangan dan implementasi perdagangan secara daring (*e- commerce*)	
16.	Pariwisata Belum optimalnya kunjungan wisata karena belum optimalnya pengembangan obyek wisata, pengembangan industri kreatif belum optimal	
		Konektifitas antar

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
		wilayah yang belum optimal, ketahanan bencana dan kualitas lingkungan yang belum optimal
17.	Urusan Pekerjaan Umum Kualitas jalan, jembatan, irigasi dan drainase belum baik	
18.	Urusan Perhubungan e. Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan f. Belum optimalnya pelayanan perhubungan laut	
19.	Urusan Lingkungan Masih kurangnya kualitas lingkungan, pengelolaan sampah belum optimal, pengawan industri atas pengelolaan limbah belum optimal.	
		Belum Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Smartcity, dan inovasi daerah
20.	Komunikasi dan Informasi Belum optimalnya pencapaian Indeks SPBE	
21.	Keuangan Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	
22.	Perencanaan Belum optimalnya akuntabilitas perencanaan daerah	
23.	Kepegawaian Belum optimalnya Indeks Profesionalisme ASN dan indeks Merit System	
24.	Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian	
25.	Adminstarasi Kependudukan dan Catatan Sipil Belum semua penduduk memiliki administrasi kependudukan catatan sipil	
26.	Kelitbangan Belum optimalnya pencapaian indek daya saing dan inivasi daerah	
27.	Statistik Belum terciptanya Satu data dalam perencanaan pembangunan	

No	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Stratategi
28.	Kearsipan Belum optimalnya pencapaian indeks kearsipan	
29.	Pengawasan Masih terjadi temuan dalam pelaksanaan pembangunan	
30.	Persandian Belum optimalnya pengelolaan sandi dalam pemerintahan	
31.	Kewilayahan Belum optimalnya pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan	

Analisis SWOT yaitu sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan uraian tentang gambaran daerah. Analisis ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan dan dikelompokkan sesuai kontribusi masing-masing. Analisis SWOT meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

A. Faktor-Faktor Internal

No	Faktor Internal	Uraian
1	Kekuatan	• Kabupaten Kendal terletak di kawasan strategis pengembangan perekonomian Jawa Tengah yaitu Kawasan Kedungsapur dengan pusat pertumbuhan di Kota Semarang. Kabupaten Kendal merupakan kawasan pengembangan bagi industri dan perumahan-pemukiman. • Memiliki kawasan industri yang akan dikembangkan secara terpadu dekat dengan pelabuhan, rel kereta api dan jalan bebas hambatan (tall). Sehingga memudahkan pengiriman bahan baku dan hasil industri ke kota-kota industri lainnya di Pulau Jawa. • Kabupaten Kendal merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang unggul. Telah menjadi pemasok kebutuhan bahan pangan bagi Kota Semarang dan sekitarnya, antara lain : beras, sayur mayur, telor, daging ayam dan ikan (hasil perikanan laut dan ikan air tawar). • Kabupaten Kendal tersedia lahan pertanian/

No	Faktor Internal	Uraian
		perkebunan dan lahan pertambakan yang dapat dioptimalkan bagi agro industri dan pengembangan perikanan budidaya secara intensif. • Potensi hasil kerajinan dan UMKM di Kabupaten Kendal sangat beragam, terutama pengolahan makanan, kuliner dan kerajinan lainnya. Industri kecil kerajinan dan UMKM memanfaatkan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat. • Potensi ekonomi lokal dan perdagangan informal (usaha mikro dan perdagangan eceran, pedagang kaki lima) menjadi "jaring pengaman" bagi masyarakat desa dan kelompok berpendapatan rendah. Sektor informal dan pasar tradisional menjadi penampung bagi tenaga kerja kurang terampil tetap bekerja dan tenaga kerja lanjut usia. • Sistem sosial budaya masyarakat Kendal yang kondusif dan toleran mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang sedang tumbuh dan dapat menerima pada pendatang yang beragam budaya dan suku bangsa.
2	Kelemahan	• Jumlah kelompok usia produktif (15 – 54 tahun) yang menganggur (tahun 2018) sebesar 6,06% lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Tengah (sebesar 4,51%). Demikian pula jumlah perempuan yang menganggur lebih banyak daripada tenaga kerja laki-laki. • Rata-rata pendidikan para pencari kerja masih rendah (lulus SD/SMP) dan keterampilan yang bersertifikasi para pencari kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di bidang industri dan jasa-jasa lainnya. • Banyaknya penduduk miskin masih relatif tinggi 9,84%. Kelompok masyarakat miskin antara lain buruh tani, buruh nelayan dan penganggur. Kelompok tersebut berpendidikan rendah, keterampilan terbatas dan kurang memiliki akses permodalam usaha, peralatan usaha dan lahan pertanian. • Potensi tenaga kerja perempuan kelompok

No	Faktor Internal	Uraian
		usia produktif (15 – 64 tahun) yang belum mendapatkan pelatihan keterampilan dan usaha masih cukup besar. Hal ini diketahui dari sumbangan ekonomi rumah tangga masih rendah (tahun 2018 sebesar 34,86%) saja. • Perkembangan wilayah Kendal bagian Utara (kawasan Pantai Utara) lebih cepat daripada perkembangan wilayah Kendal Bagian Selatan, hal ini berdampak pada tumbunya kesempatan kerja dan peluang berusaha. • Dalam pembangunan perkoperasian dan lembaga keuangan mikro belum optimal. Hal ini dikayahui dari besarnya kopresi aktif baru 64,3% pada tahun 2018 dan LKM belum merata di semua wilayah.

B. Faktor-Faktor Ekternal

No	Faktor Internal	Uraian
1	Peluang	• Provinsi Jawa Tengah menjadi tujuan investasi tertinggi nasional (tahun 2018) berdampak pada peningkatan penanaman modal di Kabupaten Kendal dan sekitarnya. • Kondisi stabilitas politik nasional, turunnya suku bunga kredit dan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing telah dapat menarik meningkatnya nilai investasi di Jawa Tengah dan sekitarnya. • Fasilitasi pemerintah pusat dalam pelayanan perizinan usaha dengan sistem OSS dan pelayanan perizinan satu pintu telah dapat meningkatkan penanaman modal di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Kendal. • Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan pinjaman daerah dari pihak ke tiga untuk mendapatkan dana pembangunan daerah selain dari bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Provinsi. • Pemerintah daerah dapat membuka peluang bagi pengembangan perekonomian daerah, melalui kerjasama antar

No	Faktor Internal	Uraian
		pemerintah kabupaten/kota, kerjasama dengan dunia usaha dan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam berbagai bidang pembangunan, antara lain inovasi daerah dan penelitian dan pengembangan Iptek guna mendorong pemanfaatan potensi daerah bagi kesejahteraan rakyat. • Perkembangan inovasi dan kreativitas daerah di era otonomi daerah memberikan peluang bagi perkembangan unggulan daerah, antara lain pariwisata dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi kreatif berbasis unggulan daerah. • Pembangunan bidang pemuda dan olahraga belum optimal, terutama terkait dengan pelatihan kewirausahaan pemuda, prestasi olah raga dan pembinaan organisasi massa kepemudaan.
2	Tantangan	• Sejak April 2020 kita mengalami Pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya perekonomian nasional dan daerah memerlukan perhatian dalam pengembangan ekonomi. Pemulihan kesehatan dengan vaksinasi untuk mencapai "*herb immunity*" dan pemulihan perekonomian daerah. Kabupaten Kendal dapat mengembangkan unggulan daerah (pertanian, peternakan, perikanan dan UKM dan menyerap tenaga kerja daerah. Tatanan sosial baru menjadikan pelaksanaan PPKM, pengaturan mobilitas sosial masyarakat dan pemulihan perekonomian berdasarkan potensi/ unggulan daerah. • Perkembangan otonomi daerah di era globalisasi telah menjadikan masing-masing pemerintah daerah harus bersaing dalam membangun perekonomian daerah, menarik investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Tuntutan masyarakat dan kalangan dunia usaha tentang pelayanan publik yang mudah dan cepat semakin meningkat. Hal ini menjadikan masing-masing perangkat daerah harus melakukan inovasi baru. • Terjadi ketertinggalan perkembangan pembangunan perdesaan dibandingkan

No	Faktor Internal	Uraian
		dengan wilayah perkotaan sehingga perkembangan perkotaan lebih cepat dibandingkan perdesaan. Hal ini dikatahui dari penduduk miskin di perdesaan lebih banyak daripada perkotaan. • Keterwakilan perempuan di parlemen masih relatif rendah (2018 sebesar 22,8%) belum mencapai kuota keterwakilan sebesar 30%. • Dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, diketahui rata-rata lama sekolah belum mencapai 12 tahun. Rata-rata pendidikan perempuan (rata-rata 7,4 tahun (lebih rendah daripada laki-laki (rata-rata 8 tahun). • Sumbangan sektor usaha pariwisata dalam pendapatan daerah masih rendah, dibandingkan dengan jumlah potensi wisata bahari, wisata alam dan wisata buatan yang tersedia di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan analisis permasalahan dan tantangan dan SWOT maka isu strategis Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut ini :

1. **Pemulihan kondisi sosial dan perekonomian Kabupaten Kendal**

   Sejak bulan April 2020 terjadinya pandemi Covid 19 telah berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat dengan membentuk *herd imunity* dan pemulihan sistem sosial. Pada tahun-tahun mendatang perlu pemulihan perekonomian daerah dengan bertumpu pada unggulan daerah, terutama bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta kerajinan skala usaha kecil dan mikro yang memiliki daya tahan dalam gejolak perekonomian dan menyerap tenaga kerja setempat.

2. **Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar**

   Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum optimal pada tahun 2020 baru mencapai 72,29 kondisi optimal pencapaian sejahtera apabila IPM mencapai 80, dan gambaran pembentuk IPM dapat dilihat dilihat sebagai berikut:

   1) Pendidikan yang belum optimal.

      Beberapa permasalahan di Kabupaten Kendal di bidang pendidikan adalah masih rendahnya rata rata lama sekolah (7,45 tahun) dibawah provinsi dan nasional, angka putus sekolah yang masih

cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata disemua wilayah di Kabupaten Kendal, namun demikian kualitas pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara daerah atas dan daerah bawah, demikian kualitas guru menjadi permasalahan.

2) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita serta tingginya stunting. Angka kesakitan di Kabupaten Kendal masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetis Mellitus, Kanker, Jantung). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yangtidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewjudkan masyarakat yang sehat. Perwujudan keluarga sehat masih menjadi prioritas dalam tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2020 indeks Keluarga Sehat baru mencapai angka 0,20. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dilihat kepuasaan masyarakat baru mencapai 83,17.

3) Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar

Kabupaten Kendal telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tdak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Kendal, Namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah Kabupaten Kendal. Pengangguran di Kabupaten Kendal masih tinggi, urusan tenaga kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan pasar. Kabupaten Kendal memiliki potensi kedepan untuk menjadikan calon tenaga kerja terserap dalam industri yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri Kendal.

4) Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air

minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada ketentraman, kertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial.

5) Masih tingginya PMKS/PPKS yang belum ditangani, belum optimalnya pelayanan SPM Sosial (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, gelandangan)
6) Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal
   Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan perempuan (IPG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan pada perempuan dan anak. Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal. Pemuda harus memiliki prestasi termasuk prestasi olahraga.
7) Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca
   Masih belum optimalnya pemajuan kebudayaan dikerena kurang kualitas sarana dan prasarana. Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

3. Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal dan merata dalam Era Industri 4.0

Pertumbuhan ekonomi secara makro terdampak oleh Pandemi Covid-19 sehingga mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten Kendal -1,53% masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (-2,07%). Tahun 2021 – 2026 memerlukan dukungan dan fasilitasi bagi pemulihan sosial kemasyarakatan dan ekonomi daerah, terutama memanfaatkan produk unggulan daerah (perdagangan, pertanian, peternakan dan UKM).

Rendahnya pertumbuhan ekonomi mempengaruhi dan membatasi kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kontribusi sektor lapangan usaha. Kontribusi sektor lapangan usaha dalam pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku didominasi oleh sektor industri pengolahan 42,29%, sector pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,24%. Terjadi ketidakseimbangan kontribusi antar sub sector

pertumbuhan ekonomi dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Kendal. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemulihan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, terutama sebagai berikut :

a. Perindustrian dan UMKM

1. Masih belum optimalnya pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan peningkatan transaksi perdagangan secara daring (*e-commerce*)
2. Aksessibilitas yang menghubungkan antar potensi ekonomi (industry dan pariwisata) belum optimal.
3. Belum optimalnya dampak kawasan industri pada pengembangan kluster pengembangan industri di daerah sekitarnya.
4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi sebagai dampak perkembangan jalan tall.
5. Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil hanya 6,69% tahun 2020. Karena masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan dan pemasaran serta branding teknologi berbasis teknologi. Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Belum optimalnya kemitraan *e-commerce* dengan UMKM.

b.Penamanan Modal

Belum optimalnya pertumbuhan nilai investasi dikarenakan belum terpetakan potensi investasi dan kebijakan terkait dengan insetif bagi investor

c. Pertanian Perkebunan dan Perikanan

Berkurangnya lahan pertanian berdampak pada penurunan produktivitas hasil pertanian, beban produksi pertanian tidak sebanding hasil hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani (NTP 103,21). Produksi perikanan budidaya dan tangkap mengalami penurunan.

d.Perdagangan

Potensi ekspor di Kabupaten Kendal belum optimal dalam pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakantermasuk pengembangan ekonomi kreatif.

e. Pariwisata

Belum optimalnya kontribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah karena kualitas obyek wisata kurang menarik, belum terkoneksi paket wisata antar kabupaten Kota (Travel Pattern), pengembangan desa wisata.

4. **Konektifias antar wilayah yang belum optimal dikarenakan kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah, dan kualitas lingkungan yang belum optimal**
   a. Kualitas infrastruktur yang tidak baik menyebabkan konektifitas antar wilayah terganggu. Masih ditemukannya jalan rusak sepanjang jalan Kab. Kendal, jalan yang tidak memiliki drainase baik.
   b. Masih kurangnya kualitas sarana prasarana perhubungan (perlengkapan jalan seperti rambu, marka, guardrill, halte dan perlengkapan angkutan) dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Belum optimalnya pemanfaatan terminal dan masih ada terminal yang belum memenuhi standart.
   c. Indek kualitas lingkungan hidup masih kurang baik (65,37) hal ini dilihat dari rendahnya indek kualitas air, indeks kualitas udara dan indek kualita tutupan lahan. Untuk mencapai pencemaran air dan udara menjadi unsur penting. Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri kendal harus mampu menekan pencemaran udara akibat industri, pencemaran limbah industri. Belum optimalnya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, perubahan iklim berdampak pada penurunan kualitas lingkungan
   d. Masih belum terpenuhinya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh. Pencapaian standar pelayanan pekerjaan umum (air bersih dan sanitasi) dan perumahan (rumah layak huni untuk korban bencana dan rumah yang terkena damapak program) belum tercapai.
   e. Belum optimalnya penanganan bencana hal ini dilihat dari masih kurangnya infrastruktur penanganan kebencanaan.
   f. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian Kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Rasio TPA dengan jumlah penduduk masih kurang, sampah yang tertangani menurun (20,5%)

5. **Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Smartcity, dan Inovasi Daerah**

   Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan, Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolan keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian, hal ini dapat dilihat dari pengelolaan asset daerah yang belum sesuai standar. Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi ASN. Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah, Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIL telah mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten. Selain itu indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Ekletronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan trasparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan OPD di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua OPD memberikan pelimbahan kewenangan di Kecamatan.

6. **Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa belum menuju Pencapaian Indek Desa Membangun**

   Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal dilihat dari minimnya sarana dan prasarana pemerintah desa, partisipasi masyarakat yang masih kurang, peran kelembagaan masyarakat yang belum optimal, Implementasi teknologi tepat guna masih belum optimal, pengelolaan asset desa belum optimal, kemandirian desa belum optimal, peran KPMD belum mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

7. **Munculnya Pandemi COVID 19**

   Munculnya pandemic COVID 19 tahun 2020 menyebabkan perubahan perilaku pada beberapa sector yaitu:

   a. Pendidikan, belum semua anak sekolah mampu mengakses pendidikan secara daring dikarenakan akses internet yang belum terjangkau dibeberapa wilayah
   b. Kesehatan, belum semua faskes memiliki ruang isolasi secara standar
   c. Belum semua masyarakat mendapatkan akses untuk vaksinasi

d. PKM mikro belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh
e. Banyak tenaga kerja yang di rumahkan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dan kemiskinan menjadi meningkat
f. Banyaknya pasar dan industry yang belum menerapkan protokol kesehatan.

8. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kendal. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Kendal memiliki angka kemiskinan yang cukup baik, namun dibandingkan Kota Semarang masih cukup jauh. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak OPD, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi OPD dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kendal dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **"Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan".**

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. **Handal**

   Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

2. **Unggul**

   Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

3. **Makmur**

   Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

4. **Bekeadilan**

   Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

5.2. Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Misi pertama: **Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif *(start up*).**

   Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

   a. Industri, yaitu dengan
      1) Penyebaran dan pemerataan industry;
      2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal;
      3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industry;
      4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah.
   b. Pariwisata, yaitu dengan
      1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata;
      2) Pengembangan destinasi pariwisata;
      3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif;
      4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing.
   c. UMKM, yaitu dengan
      1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM;
      2) Inkubasi usaha;
      3) Peningkatan daya saing UMKM.

2. Misi kedua: **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0**

   Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

   a. SDM Unggul
      1) Membangun peran lebih pendidikan untuk mendorong wajib belajar 12 tahun;
      2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi;
      3) Membangun ruang belajar informal dimasyarakat; dan

4) mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.

b. Daya Saing
   1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM Berkualitas dan berdaya saing;
   2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.

c. Revolusi Industri 4.0
   1) Peningkatan penguasaan teknologi;
   2) Perluasan pasar industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran online.

3. Misi ketiga: **Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan**

Misi ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beagama. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Inklusif
   1) Memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang beragama yang harmonis;
   2) Mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal di berbagai event daerah, nasional, maupun global.

b. Makmur/Kesejahteraan
   1) Menjamin rasa aman bagi masyarakat dengan penguatan peran Polri dan TNI sampai unit terkecil lingkunganmasyarakat Kabupaten Kendal;
   2) Penataan kawasan dan pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal.

c. Kelembagaan
   1) Penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan kehidupan beragama;
   2) Mendorong peran aktif seluruh stakeholder dalam pembangunan Kabupaten Kendal.

4. Misi keempat: **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Infrastruktur Berkeadilan
    1) Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
    2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi *channel*;
    3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur.
b. Berkelanjutan
    1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal.
    2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

5. Misi kelima: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagipartisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakat secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. e-Government
    1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
    2) Mendorong optimalisasi *e-Planning, e-Monitoring, e-Musrenbang, e-Services, e-Budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.
b. Partisipatif

    Mendorong pendekatan pembangunan konsep *bottom-up* dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten
c. Good Governance

Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, *public services*, berorientasi konsesus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan)

5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Kabupaten Kendal.

Tabel V.1.

Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka MenengahKabupaten KendalTahun 2021-2026

Visi: **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MIsi 1 : Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif *(start up)*													
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal	Pertumbuhan ekonomi			%	-1,53	2,5-3,2	4,28-5,5	5,33-5,64	5,38-5,70	5,43-5,76	5,49-5,82	5,49-5,82	
		Meningkatnya kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	%	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Perindustrian, ESDM
			Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,036	0,26	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45	Pariwisata
			Prosentase pelaku ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	6	6	12	18	24	30	36	36	Pariwisata
			Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	3,1	3,1	3,4	3,45	3,5	3,55	3,6	3,6	Pertanian, Kelautan dan Perikanan
			Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	%	-3.8	-2	-1	0,5	1	1,5	2	2	Perdagangan, Penanaman Modal

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87,2	87,2	87,3	87,3	87,4	87,4	87,5	87,5	Pangan
	Tingkat pengangguran terbuka			%	7,56	7,14	6,73	5,63	5,43	5,23	5,15	5,15	
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,5	73,4	75,99	78,58	81,17	83,76	86,35	86,35	Tenaga Kerja
		Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Prosentase UMK yang berkembang	%	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7	Koperasi UMKM
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	Trilliun	3,146	1,61	2,5	2,75	3	3,3	3,6	16,76	Penanaman Modal
	Angka Kemiskinan			%	9,99	9,89-9,79	9,79-9,59	9,59-9,39	9,39-9,19	9,19-8,89	8,89-8,69	8,89-8,69	
		meningkatnya kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat Kesejahteraan I	%	20,25	20,19	19,95	19,87	19,77	19,68	19,57	19,57	Sosial
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0													
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur	Indek Pembangunan Manusia (IPM)			indek	72,29	72,61	73,61	74,61	75,61	76,61	77,61	77,61	
		Meningkatnya SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah	Tahun	12,95	13,1	13,25	13,4	13,55	13,7	13,85	13,85	Pendidikan, Kebudayaan , Perpustakaan
			rata -rata lama sekolah	Tahun	7,45	7,65	7,85	8,05	8,25	8,45	8,65	8,65	Pendidikan, Kebudayaa, Perpustakaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,53	74,63	74,73	74,83	74,93	75	75	Kesehatan, Dalduk KB, Pemuda Olahraga
		meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,85	92,95	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4	93,4	PPPA
Misi 3: Mewuiudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stoke holder pembangunan.													
Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	Angka kriminalitas			Per 100.000 penduduk	151	150	149	148	147	146	145	145	
		Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Kesbangpol
			Persentase penurunan ganguan keamanan dan ketertiban	%	1	1	1	1	1	1	1	5	Trantibuml inmas (Satpol PP)
Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan			%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kebudayaan
		Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase cagar budaya yang diselestarikan	%	3	100	100	100	100	100	100	100	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			nilai	0,7095	0,7190	0,7205	0,7220	0,7235	0,7250	0,7265	0,7265	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas desa	Jumlah Desa Mandiri	desa	12	1	2	3	3	3	3	27	
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilandengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan													
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas			%	80,212	80,158	80,908	82,050	83,198	84,344	85,490	85,490	
		Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	PUPR
			Persentase drainase kondisi baik	%	87	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39	PUPR
			Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45	PUPR
			Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00	PUPR, Pertanahan
		Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase Capaian Universal Acces	%	94,67	95,17	95,67	96,17	96,67	97,17	97,67	97,67	PUPR, Perkim
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas	angka	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	Perhubungan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks	63,78	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82	LH
		Meningkatnya kualitas	Indeks kualitas air	Indeks	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74	LH

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ketahanan terhadap bencana		lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	Indeks	75,16	72,7	72,79	72,88	72,96	723,06	73,15	73,15	LH
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93	LH
	Indeks Resiko Bencana (IRB)			Indeks	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	60	61	62	63	64	65	66	66	Trantibuml inmas (BPBD)
Misi 5: . Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.													
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	61,39	64,41	66,35	67,75	68,32	69,2	69,5	69,5	
		Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	nilai	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55	78,55	Setda, Perencanaan, Litbang
			Kasus Korupsi	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Pengawasan
			Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
		Meningkatnya birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	indeks	75,28	75,78	76,28	76,78	77,28	77,78	78,28	78,28	Kepegawaian
			Indeks SPBE	indeks	3,76	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91	3,91	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Kearsipan
			Indek	indeks	32,88	32,88	32,88	32,9	32,92	32,96	33,04	33,04	Setda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			kematangan kelembagaan										
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata rata IKM	nilai	83,17	87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77	88,9	Dukcapil, Setwan, Kecamatan

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. **Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif *(start up*).**

   Misi ini ditujukan untuk mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

   a. Industri, yaitu dengan
      1) Penyebaran dan pemerataan industri
      2) Optimalisasi potensi sumber daya lokal
      3) Mempertahankan dominasi kontribusi sektor industri
      4) Peningkatan daya saing dan produktivitas industri berbasis potensi dan keunggulan daerah
   b. Pariwisata, yaitu dengan
      1) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pariwisata
      2) Pengembangan destinasi pariwisata
      3) Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif
      4) Terintegrasi, bernilai tambah dan berdaya saing
   c. UMKM, yaitu dengan
      1) Peningkatan kapasitas dan produk UMKM.
      2) Inkubasi usaha

3) Peningkatan daya saing UMKM
4) Digitalisasi Pemasaran

Dengan indikator tujuan pada misi ini yaitu 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka; dan 3) Angka Kemiskinan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

a. peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan;
c. meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani;
d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan;
e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran pandemi Covid 19, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;

i. peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro,pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
j. peningkatan upaya penurunan kesmiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial.

Pada misi ini juga dikaitkan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomer 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Percepatan pembangunan ekonomi berdasarkan perpres tersebut adalah pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Kendal, pembangunan Industri berbasis baja, Pengembangan Kawasan Industri Kendal dan Pengembangan pelabuhan perikanan pantai Tawang.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusi Kendal, sehingga bisa bersaing secara regional, nasional ataupun internasional. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. SDM Unggul
    1) Mendorong wajib belajar 12 tahun,
    2) Perluasan akses terhadap perguruan tinggi,
    3) Membangun ruang belajar informal di masyarakat, dan
    4) mendorong kembalinya nilai-nilai kemasyarakatan yang beragama dan berbudi pekerti luhur.
b. Daya Saing
    1) Membuat iklim pendidikan yang nyaman dan berbudaya dalam mendorong SDM berkualitas dan berdaya saing,
    2) Mendongkrak daya saing melalui inovasi dan teknologi Informasi.
c. Revolusi Industri 4.0
    1) Peningkatan penguasaan teknologi,
    2) Perluasan pasar industri dan UMKM melalui optimalisasi pemasaran online.

Misi kedua ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaran beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan.
b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda.
c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca.
d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dalam penanaganan pandemi COVID-19.
e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB.
f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di masa pendemi Covid-19.
g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peingkatan PUG disemua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong

Misi ini ditujukan untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu:

a. Inklusif
    1) Memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang beragama yang harmonis,
    2) Mengangkat kebudayaan dan kearifan lokal di berbagai event daerah, nasional, maupun global.

b. Makmur/Kesejahteraan
   1) Menjamin rasa aman bagi masyarakat dengan penguatan peran Polri dan TNI sampai unit terkecil lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal,
   2) Penataan kawasan dan pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal.
c. Kelembagaan
   1) Penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat dan kehidupan beragama,
   2) Mendorong peran aktif seluruh *stakeholder* dalam pembangunan Kabupaten Kendal.

Misi ketiga ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Angka Kriminalitas), 2) Indeks Desa Membangun. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

a. Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan bela negara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif.
b. meningkatkan kententraman dan ketertiban umum melalui peneggakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM.
c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa melalui penataan desa, peningkatan administrasi desa, peningkatan dan pembentukan BUMDES.

4. Mewujudkan pembangunan infrastrukur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kendal secara berkelanjutan. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. Infrastruktur Berkeadilan
   1) Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
   2) Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/ distribusi *channel*;

3) Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan Infrastruktur;
4) Mendorong infrastruktur yang layak anak, lansia dan difabel.

b. Berkelanjutan
1) Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
2) Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Misi keempat ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas 2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup dan 3) Indeks Resiko Bencana (IRBI). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu :

a. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui pembangunan dan rehabilitas;
b. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
c. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penangan limbah sesuai SPM;
d. Peningkatan penangaanan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;
e. peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalaui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan peneggakan perda RTRW;
f. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati;
h. Meningkatan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan

early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.

Pada misi ini juga dikaitkan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomer 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan perpres tersebut adalah pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong, pembangunan bendungan Bodri, pembangunan bending karet sungai Bodri, revitalisasi kawasan bekas sungai Bodri, Pembangunan Prasarana Konversi SDA Sungai Blorong, Pembangunan Jalan Akses KEK Kendal-KPI Patebon (Industri Baja) dan Akses jalan pantura Kendal ke KPI Kendal, Pembangunan Interchange di Arteri Kaliwungu ke KI Kendal, Pembangunan Outer Ringroada Kendal – Semarang (Harbor Toll), pembangunan Kendal Sea Port, Pembangunan gardu induk KI Kendal, Pembangunan Pipa Gas Distribusi Semarang Kendal dan pembangunan Rusunawa KI Kendal.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagipartisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kemasyarakat secara optimal. Adapun kata kunci dalam misi ini yaitu :

a. *E-Government*
   1) Mendorong keterbukaan informasi dan data terpusat serta *Command Center*;
   2) Mendorong optimalisasi *e-planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi.

b. *Partisipatif*
   1) Mendorong pendekatan pembangunan konsep *bottom-up* dengan memberikan ruang bagi desa/dusun dan unit pemerintahan daerah terkecil (RT dan RW) dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan melalui bantuan anggaran Pemerintah Kabupaten.

c. *Good Governance*

1) Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjaga kesinergian dan penerapan prinsip prinsip *good governance* (partisipatif, keadilan hukum, transparansi, *public services*, berorientasi konsesus, efektif dan efisien, bervisi strategis, berkeadilan).

Misi kelima ini memiliki indikator tujuan yaitu 1) Indeks Reformasi Birokasi. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu :

a. Peningkatan biroktrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;
c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi *e- planning*, *e-monitoring*, *e-musrenbang*, *e-services*, *e-budgeting* sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas 1 data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;
d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan setiap tahun:

- Tahun 2021

  Memiliki arah kebijakan dengan fokus pada aspek pemulihan ekonomi, kesehatan, sosial dan infrastruktur.

- Tahun 2022 “Kendal *Recovery*”

  Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2022 di prioritaskan pada **“Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal”**. Fokus dari pembangunan tahun 2022 adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dengan melakukan penguatan kepada UMKM, penguatan industri, pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kemudahan investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sektor usaha ekonomi kreatif. Kondisi ini akan didukung dengan kualitas infrastruktur, baik akses maupun sarana prasarana pendukung pemulihan ekonomi juga meningkatkan kualitas kesehatan yang berbasis Promotif dan Preventif, peningkatan pelayanan rujukan dan faskes tingkat pertama, serta mencapai standar pelayanan minimum. Kualitas infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi difokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan poros desa, peningkatan kualitas jembatan dan peningkatan kualitas irigasi.

- Tahun 2023 "*Competitive* Kendal"

  Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada **"Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal"**. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era *industry 4.0.*

- Tahun 2024 "Kendal *Smart City*"

  Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada **"Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City".** Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean dan Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy* dan *Smart Transportation.*

  Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

- Tahun 2025 "Kendal *Inclusive*"

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 di prioritaskan pada "**Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan".** Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.

Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa.

- Tahun 2026 "*Sustainable* Kendal"

  Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 merupakan akhir periode RPJMD tahun 2021-2026, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 di prioritaskan pada "**Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan".** Adapun Fokus kebijakan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Kabupaten Kendal tahun 2021-2026, berikut disajikan tabel program prioritas tahun 2021 - 2026:

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
1.	Tahun 2022 "Kendal *Recovery*"	**"Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal"**.	meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penguatan kepada UMKM, penguatan industri, pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kemudahan investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sektor UMKM	Ekonomi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	PERINDUSTRIAN
					- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PARIWISATA
					PERTANIAN - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian	PERTANIAN

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
					PERIKANAN - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PERIKANAN DAN KELAUTAN
					KOPERASI UMKM - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM	KOPERASI UMKM
					PENANAMAN MODAL - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL
					PERDAGANGAN - Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengembangan Ekspor - Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PERDAGANGAN
					- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
					Masyarakat Hukum Adat" - Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa	
				Infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					- Program Pengembang Perumahan - Program Kawasan	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
					Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PERMUKIMAN
					Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN
					- Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota - Program Pengelolaan Persampahan	LINGKUNGAN HIDUP
				Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	KESEHATAN
2.	Tahun 2023 "*Competitive* Kendal"	**"Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal"**	mengoptimalkan sumber daya manusia di kabupaten kendal dengan mewujudkan SDM kendal berdaya saing	Pendidikan	- Program pengelolaan pendidikan	PENDIDIKAN
				Kebudayaan dan karakter	- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	KEBUDAYAAN

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
					Program Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN
				Kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	KESEHATAN
				Keluarga Berencana	- Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB) - Program Pengendalian Penduduk	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				Olahraga	- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PEMUDA OLAHRAGA
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				Kualitas ASN	- Program Kepegawaian Daerah - Program Pengembangan Sumberdaya	KEPEGAWAIAN

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
3.	Tahun 2024 "Kendal *Smart City*"	**Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City"**	peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean dan Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart government, Smart Education, Smart Health, Smart economy* dan *Smart Transportation.*	Komunikasi dan Informatika	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEARSIPAN
				- Kelembagaan dan perencanaan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	SETDA, PERENCANAAN,
				- Pengawasan	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PENGAWASAN

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
				- Penganggaran	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KEUANGAN
4.	Tahun 2025 "Kendal *Inclusive*"	"**Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan".**	Penguatan ekonomi dalam ketersediaan pangan dan pengendaliam kemiskinan	Ketahanan pangan	- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan	PANGAN
				Penanganan kemiskinan berkelanjutan	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SOSIAL
			penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana		Program Penyelenggaraan Jalan	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN
					Program Penanggulangan Bencana	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
			peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi	Lingkungan Hidup	- Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota - Program Pengelolaan Persampahan	LINGKUNGAN HIDUP
5.	Tahun 2026 "*Sustainable* Kendal"	"**Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan".**	peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas,serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.	Peningkatan pendapatan masyarakat	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM	KOPERASI UMKM
					- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Penempatan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
				Peningkatan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Keamanan dan kenyamanan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Prioritas tahun		Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
				Toleransi	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	KESBANGPOL
				Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anank	- Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDNGAN ANAK

6.3. Arah Kebijakan Pembangunan *mainstreaming*

Pembangunan di Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, stunting dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja tetapi dilaksanakan oleh hampir semua perangkat daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing masing perangkat daerah dengan tidak merubah struktur anggaran.

Isu stunting juga dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan stunting. Penyebab terjadinya stunting dari ekonomi, sosial dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari dana desa.

Isu kemiskinan juga diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
Misi ke-1 :Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif*(start up*)							
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kualitas sektor industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata berbasis potensi unggulan daerah.	Persentase pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB	peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal	Penguatan Struktur Ekonomi Kendal: Mempertahankan Dominasi Industri, Mendorong Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pariwisata, UMKM, Ekonomi Kreatif Pertanian dan Perikanan.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	PERINDUSTRIAN
			Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi kreatif, wirausaha pemula serta pengembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan		- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata	PARIWISATA
			Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Persentase pertumbuhan pertanian kehutanan dan perikanan dalam PDRB	meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan prasarana pertanian yang		- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PERTANIAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
				mendorong produksi pertanian serta meningkatkan kapasitas petani		- Program Penyuluhan Pertanian	
				Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolah ikan		- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PERIKANAN DAN KELAUTAN
			Persentase pertumbuhan Perdagangan besar dan retail dalam PDRB	Peningkatatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas ekspor, penataan ijin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar sesuai dengan protokol kesehatan mencegah penyebaran pandemi covid 19, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen		- Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengembangan Ekspor - Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PERDAGANGAN
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang		- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PANGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
						- Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan	
Mengurangi Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penurunan pengangguran melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan perselisihan tenaga kerja.		- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Penempatan Tenaga Kerja	TENAGA KERJA
						- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL
		meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengedepankan penguatan UMKM	Prosentase UMK yang berkembang	peningkatan kualitas dan kuantitas usaha mikro melalui fasilitasi izin usaha dan PIRT, peningkatan akses permodalan dengan koperasi, pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi		- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM	KOPERASI UMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
	Angka Kemiskinan	meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial	Tingkat kesejahteraan I	peningkatan upaya penurunan kesmiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kab.Kendal.	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SOSIAL
Misi ke-2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0							
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berbudi pekerti luhur	IPM	Meningkatkan SDM yang cerdas dan berbudi pekerti luhur	Harapan lama sekolah Rata -rata lama sekolah	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin dan berprestasi, pemberian perlengkapan sekolah sesuai dengan SPM, peningkatan pendidikan 12 tahun, peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, mendukung pembelajaran daring dengan mengaplikasikan *Learning Management System* pada jenjang pendidikan kewenangan kabupaten serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan	Memberikan memenuhi dan menjamin pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta mampu meningkatkan dan kesejahteraan	- Program pengelolaan pendidikan	PENDIDIKAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
				Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda		- Program Pengembangan Kebudayaan - Program Pengembangan Kesenian Tradisional	KEBUDAYAAN
				Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca		Program Pembinaan Perpustakaan	PERPUSTAKAAN
		meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan keselamatan ibu dan anak, peningkatan peran serta masyarakat, peningkatan kepemilikian jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) menuju UHC (*Universal Health Coverage*) perilaku hidup bersih dan sehat.		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	KESEHATAN
				peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB		- Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB)	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
						- Program Pengendalian Penduduk	
				Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PEMUDA OLAHRAGA
		meningkatnya pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peingkatan PUG disemua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangaan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus		- Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) - Program Perlindungan Khusus Anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDNGAN ANAK
Misi ke-3 : Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stoke holder pembangunan							
Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah	Angka kriminalitas						
		Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah kasus konflik	Pencegahan terjadinya konflik sosial melalui peningkatan pemahaman cinta tanah air, pelaksanaan belanegara, peningkatan kerukunan antar umat beragama serta pelaksanaan pemilu yang kondusif	Pencegahan konflik difokuskan pada peningkatan bela negara cinta tanah air	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	PEMERINTAHAN UMUM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
			Persentase penurunan ganguan keamanan dan ketertiban	meningkatkan kententraman dan ketertiban umum melalui peneggakan perda, peningkatan disiplin aparatur, dan peningkatan pelayanan HUMANIS sesuai dengan SPM	SDM yang berkualitas didukung dengan memperteguh keragaman, budaya dan kehidupan beragama di era disrupsi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	TRANTIBUM
Meningkatkan kualitas kebudayaan daerah	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Meningkatnya kualitas pelestarian budaya dan warisan budaya	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan cagar budaya, meningkatkan promosi budaya dan warisan budaya, mengadakan event kebudayaan sebagai salah satu sarana promosi kebudayaan, memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat melalui berbagai event yang dilaksanakan, menjaga keberadaan cagar budaya yang ada dan mempromosikan cagar budaya sebagai salah satu destinasi pariwisata maupun destinasi pembelajaran siswa.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga budaya dan cagar budaya serta peningkatan promosi kebudayaan local daerah dalam berbagai event yang diadakan di daerah.	Program Pengembangan Kebudayaan	KEBUDAYAAN
			Persentase cagar budaya yang diselestarikan			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
Meningkatnya kemandirian desa	Indek Desa Membangun	Meningkatnya kualitas desa	Persentase Desa Mandiri	Peningkatan kualitas desa melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penataan desa, peningkatan administrasi desa, mendorong inovasi masyarakat melalui fasilitas dan kerjasama, peningkatan dan pembentukan BUMDES	Mendorong Partisipasi Masyarakat Desa Sebagai Etalase dan Subjek Pembangunan Kabupaten Kendal (Desa Membangun Kendal)	- Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
Misi ke-4 :Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilandengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.							
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan tata ruang	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan tata ruang wilayah	Persentase jalan kondisi mantap	Peningkatan konektivitas wilayah melalui kualitas infrastruktur jalan, drainase pembangunan dan rehabilitasi, manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan pengembangan penerangan jalan kewenangan kabupaten, melalui peningkatan kelas jalan, peningkatan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan, perbaikan drainase rusak berat dan ringan serta pembangunan drainase baru.	Membangun Keterpaduan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pemantapan Pemerataan Pembangunan.	Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
			Persentase drainase kondisi baik			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
			Persentase luasan daerah irigasi kondisi baik	Peningkatan kualitas pengendali banjir, longsor melalui peningkatan kapasitas dan kualitas irigasi dan drainase		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PUPR
			Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman RTRW dan penegakan perda RTRW	Penataan Kawasan dan Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dengan Mendudukan Tata Ruang Sebagai Kompas Investasi di Kabupaten Kendal.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
		Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase capaian universal akses	Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS,		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
				pelayanan air minum dan penangan limbah sesuai SPM		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Peningkatan penangaanan perumahan dan kawasankumuh melalui peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni dan tertata rapi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas perumahan dengan PSU kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM		- Program Pengembang Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PERKIM
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	indek konektivitas	meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanantransportasi sperti Bus Rapid transit dan layanan angkutan feeder pedesaan berbasis IT.	pemantapan transportasi yang *smart*, kualitas manajemen perhubungan	Penyelenggaraan LLAJ	PERHUBUNGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan terhadap bencana	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana	Indeks kualitas air Indeks kualitas udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati dengan RTH yang cukup dan berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada peningkatan kualitas uji air udara, tanah, pengelolaan 3R	- Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan LH Kab/Kota - Program Pengelolaan Persampahan	LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	meningkatan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui menerapkan strartegi pengurangan resiko dan kesiap siagaan penanganan bencana, penguatan desa tangguh bencana, peningkatan *early warningsistem*, dan prasarana penanganan bencana	Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim.	Program Penanggulangan Bencana	TRANTIBUM
Misi ke-5 :Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagipartisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.							
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi						
		Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan pengukuran pencapaian kinerja memperkuat kelembagaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatan peran RT RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi, perencanaan, litbang dan peningkatan kualitas APBD	Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Garda Terdepan Membangun TataKelola Yang Bersih dan Transparan Dengan Prinsip Good Governance	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	SETDA, PERENCANAAN,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
						- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
			Kasus Korupsi			- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	PENGAWASAN
			Opini BPK			- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	KEUANGAN
		Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Indek Profesionalisme ASN	Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN	Peningkatan birokrasi yang Kapebel difokuskan pada pengembangan smart city disegala aspek	Program Kepegawaian Daerah	KEPEGAWAIAN
			Indeks SPBE	Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan pembangunan berbasis elektronik, Mendorong optimalisasi E- Planning, E-Monitoring, E-Musrenbang, E-Services, E-Budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta		- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK, PERSANDIAN DAN KEARSIPAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
				kualitas persandian. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi		- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	
			Indeks kematangan kelembagaan	Peningkatan kematangan organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas, penjaminan mutu layanan daerah, ketaatan terhadap SOP, terukurnya kinerja daerah, manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, adanya pengembangan inovasi layanan dan peningkatan kualitas budaya organisasi.		- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengembangan Sumberdaya - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Program Penyelenggaraan Pengawasan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM	Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli, peningkatan penyelesaian pengaduan yang terintegrasi dan peningkatan sarana prasarana pelayanan		- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIAT DPRD, KEWILAYAHAN

6.3. Agenda Prioritas

1. Aspek 1: UMKM, Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a Peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja

b Peningkatan kualitas dan kuantitas investasi

c Peningkatan jumlah wirausaha muda pemula

d Penguatan dan penambahan lapangan kerja

e Pembangunan infrastruktur penunjang destinasi wisata

f Peningkatan peran Pariwisata dalam pembangunan daerah

g Pembentukan kelompok sadar wisata penerapan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) pelaku wisata, penerapan *E-Tourism*, dan *E-Marketing*, serta pengembangan produk UMKM yang sesuai dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

h Pembinaan dan Peningkatan kapasitas BUMD dan BUMDes.

i Pemetaan dan Pemanfaatan Aset Pariwisata Daerah.

2. Aspek 2: Keterpaduan Infrastruktur, Berdaya Saing, dan Optimalisasi Peran Teknologi Informatika dan Komunikasi

a. Pembangunan Jalan strategis peningkatan ekonomi daerah.

b. Pembangunan jalan distribusi barang dari Desa-Kota.

c. Pemantauan lalu lintas melalui CCTV sebagai bagian dari *Smart City* Kendal.

d. Pembangunan Trayek Angkutan dan Moda Transportasi Publik yang terintegrasi.

e. Peningkatan Fungsi Terminal dan stasiun yang terintegrasi pusat-pusat kegiatan kota, dengan fokus pengembangan pada stasiun yang memungkinan untuk dilakukan integrasi.

f. Memfasilitasi percepatan ekonomi di Kabupaten Kendal sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 79 tahun 2019.

g. Pembangunan dan peningkatan jaringan TIK.

h. Penyediaan dan pemerataan akses internet gratis.

i. Penyediaan dan peningkatan jaringan internet dan TIK yang mendukung pelayanan pendidikan.

3. **Aspek 3: SDM dan Tatanan Kelembagaan Masyarakat yang Beragama dan Berbudaya**
   a. Wajib Belajar 12 Tahun.
   b. Program bantuan beasiswa daerah.
   c. Peningkatan kualitas pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.
   d. Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas di seluruh kecamatan dengan ketersediaan fasilitas rawat inap.
   e. Optimalisasi posyandu ibu, anak dan lansia.
   f. Peningkatan penanganan kemiskinan dengan memperkuat data dan pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pemberian jaminan perlindungan sosial.
   g. Peningkatkan kesejahteraan pengelola takmir.

4. **Aspek 4: Ketahanan dan Pembangunan yang Berkelanjutan**
   a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rencana penanggulangan bencana daerah.
   b. Optimalisasi forum penanggulangan bencana untuk mendorong peran aktif masyarakat.
   c. Program pengelolaan risiko bencana untuk mitigasi bencana.
   d. Program rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim.
   e. Program desa tangguh bencana,.
   f. Program kampung iklim berbasis komunitas.
   g. Pembangunan infrastruktur pencegah bencana banjir dan longsor.
   h. Menerapkan kurikulum sekolah siaga bencana pada tingkat SD, SMP, SMA sederajat.
   i. Program bantuan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
   j. Pembangunan infrastruktur pembentuk struktur ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal.
   k. Elektrifikasi perdesaan berbasis EBT dan peningkatan porsi EBT dalam bauran energi (*energy mix*).
   l. Program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di 5 pusat kegiatan Kabupaten Kendal.
   m. Program penghijauan dan pemeliharaan RTH.
   n. Melakukan Revitalisasi Penataan Alun-alun Kota Kendal.
   o. Melakukan Revitalisasi Penataan Alun-alun Kaliwungu.

p. Penggunaan alat deteksi dini Covid-19 (GeNose) di fasilitas kesehatan dan bangunan pemerintahan.
q. Penggunaan teknologi pencegahan dini dengan sinar UV untuk sterilisasi lantai masjid dan gedung pemerintahan.

5. Aspek 5: Good Governance

a. Pembangunan Mall Pelayanan Publik.
b. Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
c. Melakukan Reformasi birokrasi berbasis *merit system*.
d. Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
e. Membuat *Command Center (E-monitoring*).
f. Melaksanakan perencanaan pembangunan berbasis elektronik (*e-planning*).
g. Peningkatan Kerja sama luar negeri.
h. Peningkatan Kerja sama Swasta dan Pemerintah Pusat.
i. Penyediaan dan pengelolaan data tanah dan aset daerah yang transparan.
j. Peningkatan kerja sama lembaga penelitian pemerintah, swasta dan akademisi.
k. Pengembangan skema pembiayaan pembangunan yang kreatif dan innovatif.
l. Pembinaan dan penanaman prinsip-prinsip *Good Governance* pada setiap ASN.
m. Pembuatan dan peningkatan fungsi Web *Open Data Kendal Smart City*.
n. Inventarisasi dan *asset management* berbasis digital.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 meliputi :

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mendasarkan perkembangan capaian pendapatan daerah 5 tahun kebelakang (2016-2021), selama belum terjadi pandemi covid 19 pendapatan mengalami kenaikan akan tetapi selama terjadinya

pandemic covid 19 ini pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan. Sehingga pendapatan daerah harus mempertimbangkan dari sisi Pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi. Khusus Pendapatan Asli Daerah diperlukan strategi dan kebijakan umum pengelolaan pendapatan asli daerah sebagai berikut :

a. Pendataan, pemutakhiran serta pemetaan potensi pendapatan;
b. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber–sumber pendapatan asli daerah;
c. Review peraturan-peraturan yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
d. Pemanfaatan aset-aset pemerintah daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan;
e. Pengembangan BUMD serta peningkatan profesionalisme dan tata kelola BUMD.

Disamping itu dalam hal pembiayaan diperlukan inovasi-inovasi diantaranya melalui CSR (*Corporated Social Responsibility*) ataupun KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang menjadi kewengangan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kendal, mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kerangka pendanaan belanja daerah diantaranya diarahkan untuk :

a. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
b. Melaksanakan pemenuhan belanja daerah yang sifatnya wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum);
c. Melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;

Dalam rangka pendanaan belanja daerah dan guna percepatan pencapaian target pembangunan daerah upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui pinjaman daerah.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu di bayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diperlukan dalam rangka penyiapan dana cadangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ataupun untuk penyertaan (investasi) daerah. Untuk penyertaan modal tersebut diantaranya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2013-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019–2023 diupayakan dapat meningkat. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Untuk memenuhi kebutuhan belanja, salah satunya dapat digunakan melalui pinjaman daerah.

Tabel 7.1

Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022-2026

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PENDAPATAN DAERAH	**2.278.236.519.171,00**	**2.398.503.775.879,00**	**2.440.917.666.527,00**	**2.489.524.785.430,00**	**2.535.875.206.109,00**	**2.581.943.213.844,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**415.542.060.688,00**	**565.639.024.396,00**	**608.052.915.044,00**	**656.660.033.947,00**	**703.010.454.626,00**	**749.078.462.361,00**
Hasil Pajak Daerah	174.220.000.000,00	301.061.000.000,00	329.367.099.980,00	358.959.809.978,00	387.159.150.976,00	413.516.627.674,00
Hasil Retribusi Daerah	19.312.746.900,00	30.082.300.000,00	33.332.724.900,00	37.199.027.615,00	41.195.954.933,00	45.247.666.060,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.345.000.000,00	19.000.000.000,00	19.228.000.000,00	19.458.736.000,00	19.692.240.000,00	19.928.500.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	206.664.006.288,00	215.495.724.396,00	226.125.090.164,00	241.042.460.354,00	254.963.108.717,00	270.385.668.627,00
PENDAPATAN TRANSFER	**1.768.204.458.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**	**1.738.374.751.483,00**
Transfer Pemerintah Pusat	**1.602.490.919.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**	**1.572.661.212.483,00**
Dana perimbangan	**1.314.796.489.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**	**1.284.966.782.483,00**
Dana Transfer Umum	**969.343.594.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**	**939.513.887.362,00**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00	37.961.370.362,00
Dana Alokasi Umum	931.382.224.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00	901.552.517.000,00
Dana Transfer Khusus.	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**	**345.452.895.121,00**
Dana Alokasi Khusus Fisik	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00	100.837.472.121,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00	244.615.423.000,00
Dana Insentif Daerah	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**	**36.634.400.000,00**
Dana Insentif Daerah	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00	36.634.400.000,00
dana otonomi khusus						
dana keistimewaan						

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dana Desa	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**	**251.060.030.000,00**
Dana Desa	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00	251.060.030.000,00
Transfer Antar-Daerah	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**	**165.713.539.000,00**
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00	155.825.539.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00	9.888.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**	**94.490.000.000,00**
Hibah dari Pemerintah	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00	94.490.000.000,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	**2.312.194.067.943,00**	**2.407.603.775.879,00**	**2.446.417.666.527,00**	**2.561.624.785.430,00**	**2.557.375.206.109,00**	**2.603.443.213.844,00**
BELANJA OPERASI	**1.758.177.938.243,00**	**1.701.339.932.879,00**	**1.721.928.171.039,00**	**1.841.759.388.670,00**	**1.820.665.378.118,00**	**1.843.963.323.471,00**
Belanja Pegawai	1.129.394.130.453,00	1.148.968.320.879,00	1.150.137.740.439,00	1.164.336.128.670,00	1.180.140.532.118,00	1.193.802.823.871,00
Belanja Barang dan Jasa	548.064.846.490,00	492.142.650.700,00	514.961.530.600,00	525.194.360.000,00	570.294.846.000,00	580.782.499.600,00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	68.898.961.300,00	48.408.961.300,00	45.008.900.000,00	140.408.900.000,00	58.410.000.000,00	57.558.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	11.820.00.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00	11.820.000.000,00
BELANJA MODAL	**174.670.048.442,00**	**189.170.000.000,00**	**203.240.000.000,00**	**195.270.000.000,00**	**207.894.804.400,00**	**225.623.948.000,00**
Belanja Modal	174.670.048.442,00	189.170.000.000,00	203.240.000.000,00	195.270.000.000,00	207.894.804.400,00	225.623.948.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	**7.860.000.000,00**	**11.860.000.000,00**	**12.860.000.000,00**	**12.860.000.000,00**	**13.860.000.000,00**	**15.860.000.000,00**
Belanja Tidak Terduga	7.860.000.000,00	11.860.000.000,00	12.860.000.000,00	12.860.000.000,00	13.860.000.000,00	15.860.000.000,00
BELANJA TRANSFER	**371.486.081.258,00**	**505.233.843.000,00**	**508.389.495.488,00**	**511.735.396.760,00**	**514.955.023.591,00**	**517.995.942.373,00**
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA)**	**15.766.568.258,00**	**33.114.330.000,00**	**36.269.982.488,00**	**39.615.883.760,00**	**42.835.510.591,00**	**45.876.429.373,00**

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	13.835.268.818,00	30.106.100.000,00	32.936.709.998,00	35.895.980.998,00	38.715.915.098,00	41.351.662.767,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.931.299.440,00	3.008.230.000,00	3.333.272.490,00	3.719.902.762,00	4.119.595.493,00	4.524.766.606,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**355.719.513.000,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**	**472.119.513.000,00**
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	355.719.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00	472.119.513.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	**(33.957.548.772,00)**	**(9.100.000.000,00)**	**(5.500.000.000,00)**	**(72.100.000.000,00)**	**(21.500.000.000,00)**	**(21.500.000.000,00)**
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan	**51.957.548.772,00**	**55.000.000.000,00**	**55.000.000.000,00**	**95.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	51.957.548.772,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Pencairan dana cadangan	-	-	-	50.000.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	**18.000.000.000,00**	**45.900.000.000,00**	**49.500.000.000,00**	**22.900.000.000,00**	**23.500.000.000,00**	**23.500.000.000,00**
Pembentukan Dana Cadangan Daerah	**-**	**25.000.000.000,00**	**25.000.000.000,00**			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	**18.000.000.000,00**	**20.900.000.000,00**	**24.500.000.000,00**	**22.900.000.000,00**	**23.500.000.000,00**	**23.500.000.000,00**
PDAM (Bagian Laba)		-	-	-	-	-
Bank Jateng/BPD	13.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00
BPR BKK Kendal						
PDAM	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
PD Farmasi		500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
PD Aneka Usaha Daerah		400.000.000,00	500.000.000,00			
PD BPR Kendhali Artha		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	900.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-

U R A I A N	APBD 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembiayaan Netto	**33.957.548.772,00**	**9.100.000.000,00**	**5.500.000.000,00**	**72.100.000.000,00**	**21.500.000.000,00**	**21.500.000.000,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

Sumber : (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021)

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasa (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP, Persentase SD dan SMP terakreditasi minimal B, Persentase ruang kelas dalam kondis baik, Persentase tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikasi.

b. Program pengembangan kurikulum

Program ini diarahkan pada penyusunan muatan lokal yang akan disampaikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Mutan lokal diperlukan agar siswa dapat mengetahui dan memahami apa saja kearifan lokal yang ada, sehingga bisa dilestarikan dan dipraktekkan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal.

c. Program pendidik dan tenaga kependidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan pamong budaya serta pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SD dan SMP. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Presentase Pendidik bersertifikat

d. Program pengendalian perizinan pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan di Kabupaten Kendal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi perijinan yang dikeluarkan.

2. Kesehatan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk, Akreditasi Puskesmas / RS Paripurna, Akreditasi Lab, Prevalensi Baduta stunting, Strata Kabupaten Sehat, Insiden Rate DBD, Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu dan % Penduduk memiliki JKN

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada penyebaran dan pemenuhan tenaga kesehatan yang merata disetiap fasilitas kesehatan dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Proporsi pembinaan Mutu makanan dan Minuman dan Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Rumah Tangga PHBS.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)

Program ini diarahkan pada manajemen sumber daya air sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase luasan wilayah banjir dan tergenang dan Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan Bangunan Gedung Milik Daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase gedung milik Pemda yang memiliki IMB, Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan, Persentase SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan.

f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam RTRW. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya.

g. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan jalan kabupaten, terutma yang menuju pada ruas-ruas strategis yang mendukung pariwisata. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik, Persentase panjang jalan kabupaten dengan berem dan utilitas kondisi baik, Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik.

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan tenaga kerja dibidang jasa konstruksi dalam meningkatkan kapasitasnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, Persentase kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang tekena bencana dan relokasi program pemerintah daerah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, Persentase Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik.

e. **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Program ini diarahkan pada pembinaan pengembang perumahan dan kawasan permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % pengembang perumahan dan kawasan pemukiman yang bersertifikat.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini diarahkan pada pengendalian gangguan trantibum yang dilakukan oleh masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, % pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan, Cakupan petugas Linmas di Kabupaten per RT, % PPNS yang dibina

b. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar pelayanan Minimal kebakaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan kebakaran sesuai standar waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dan Persentase kelompok Balakar per kecamatan.

c. **Program Penanggulangan Bencana**

Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kelompok relawan bencana yang aktif, Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dan Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi.

6. Sosial.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Pemberdayaan Sosial**

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PSKS dibina

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada penanganan korban kekerasan warga negara migran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban kekerasan warga negara migran yang ditangani

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada pelayanan terhadap PPKS yang berada diluar panti sosial. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PPKS non panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PPKS Fakir Miskin dan anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada pemenuhan pemenuhan sandang dan pangan korban bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase korban bencana ditangani

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada pemenuhan fasilitas yang harus disediakan pada makam pahlawan sesuai dengan standar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan standar sarana dan prasrana Taman Makam Pahlawan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dukumen

perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada penyelesaian sengketa terkait perburuhan, sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

2. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan OPD, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase OPD yang mengimplementasikan PUG.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada penanganan terhadap perempun yang menjadi korban kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kekerasan perempuan yang ditangani.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang dibina

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengelolaan data pilah gender disetiap OPD, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase OPD yang memiliki data pilah gender.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak ditingkat kecamatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kecamatan layak anak

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada penanganan anak yang menjadi korban kekerasan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kekerasan pada anak yang ditangani.

3. Pangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan bahan pangan pada lumbung pangan yang menjadi cadangan pangan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase lumbung pangan aktif

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyedian sumber protein dan energi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Angka Ketersediaan protein dan Angka Ketersediaan Energi.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan baik yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit maupun karena bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penanganan desa rawan pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pengawasan pangan utamanya pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pangan yang aman dikonsumsi.

4. Pertanahan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada kepastian bagi mayarakat yang tanahnya menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah mendpatkan haknya tepat waktu. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu.

b. Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada asset pemerintah daerah yang berupa tanah telah memiliki dokumen yang diperlukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persntase tanah Pemda yang bersertifikat.

5. Lingkungan hidup;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyedian dokumen lingungan hidup yang berkualitas. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pemantauan kualitas air dan udara untuk memastikan tingkat pencemaran yang terjadi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan pemantauan kualitas air, Cakupan pemantauan kualitas udara dan Presentase kampung iklim yang terbentuk.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pemeliharaan RTH, sehingga dapat menjadikan lingkungan yang asri. Program ini dilakukan untuk

mencapai indikator kinerja yaitu Presentase RTH yang terpelihara dengan baik.

d. **Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**

Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah B3, sehingga tidak mencemari lingkungan disekitarnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan.

e. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

f. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini diarahkan pada penyiapan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, hal ini dimulai dari sekolah dan kelompok masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten dan Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh pendampingan PBLH.

g. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Program ini merupakan penghargaan pada sekolah dan individu yang dinilai peduli terhadap lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dan Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah / Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat terkait perusakan lingkungan ditindaklanjuti. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

i. **Program Pengelolaan Persampahan**

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengolahan sampah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Timbulan sampah yang ditangani, Persentase cakupan area pelayanan persampaahan dan Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indek pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu indek pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % OPD yang memanfakan data dukcapil, % kelancaran sistem adminduk dan % MoU pelayanan kependudukan yang disepakati.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % ketersediaan profil Kependudukan dan catatan sipil.

7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan dan pemantauan sarana dan prasarana didesa dalam pelayanan terhadap masyarakat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi kejasama antar desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada pembinaan administrasi desa baik dalam perencanaan maupun penganggaran. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik dan Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada pembinaan BUMDes sehingga bisa mandiri dan bersaing dengan usaha lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dan Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pembatasan dan pengurangan pernikahan diusia dini. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase penurunan usia pernikahan dini.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu unmeet need.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Program ini diarahkan pada peningkatan pembinaan keluarga. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina.

9. Perhubungan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase terminal penumpang tipe c sesuai standar, Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan, Persentase pemenuhan kebutuhan APILL, Persentase kendaraan (angkutan umum

dan angkutan barang) yang lulus uji KIR dan Persentase realisasi pendapatan parkir.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % pemenuhan pelabuhan sesuai standar.

10. Komunikasi dan informatika;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada penyediaan pelayanan publik secara online dengan menyiapkan akses internet distiap OPD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan % layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada pemberian layanan perizinan terkait dengan usaha simpan pinjam. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan.

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pengawasan koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentasi koperasi/KSP yang diawasi.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP, sehingga akan memberikan rasa aman pada masyarakat yang memiliki simpanan.. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai

d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus koperasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian.

e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemberdayaan koperasi dalam mengelola usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase koperasi yang dilakukan pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % usaha mikro yang diberdayakan.

g. Program Pengembangan Umkm

Program ini diarahkan pada pengembahan usaha mikro. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % Usaha mikro yang dikembangkan.

12. Penanaman modal;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen investasi Kabupaten Kendal untuk menerik investor. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase dokumen yang mendukung investasi di Kabupaten Kendal.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat investor menanamkan modal di Kabupaten Kendal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu % calon investor yang memiliki kepeminatan investasi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan prima dalamperizinan penanaman modal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Lama waktu penyelesaian pelayanan perizinan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase investor/pelaku usaha berijin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyedian data perizinan dan non perizinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Prosentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola sisten informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga;

Rencana program yang akan dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaaan dan sosial kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator peningkatan partisipasi pemuda.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan atlet secara berjenjang dalam rangka pengembangan cabang olahraga prestasi tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi cabang olahraga di daerah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kepramukaan tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan.

14. Statistik;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Statistik Sektoral**. Pelaksanaan program ini untuk

mencapai indikator persentase ketersediaan data dan informasi statistik yang dirilis/ diunggah perangkat daerah ke portal data kendal.

15. Persandian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan aplikasi persandian.

.

16. Kebudayaan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk mengembangakna kebudayaan daerah dan mencapai indikator terlaksananya pelestarian cagar budaya daerah.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program pengembangan dan pembinaaan kesenian tradisional dalam masyarakat. Program ini diarahlan untuk mencapai indikator persentase kelompok kesenian tradisional yang dibina (%).

c. Program pembinaan sejarah

Program ini dilakanakan untuk melestarikan dan pembinan sejarah lokal. Program ini dilaksnaakan untuk mencapai indikator jumlah sejarah lokal yang dilestarikan.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya

Program ini diarahkan untuk melestarikan dan memelihara benda peninggalan, situs dan Kawasan cagar budaya. Tujuan program mencapai indikator persentase benda, situs dan kawasn cagar budaya dilestarikan (%).

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dilaksanakan untuk mengembangkan perlindungan koleksi benda sejarah/ warisan budaya yang dilindungi. Pelaksanaan program untuk mencapai persentase koleksi benda sejarah yag dilindungi (%).

17. Perpustakaan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Pelaksanaan program ini untuk meningkatkan minat baca

dan pembinaan perpustakaan secara aktif. Indikator program yang akan dicapai adalah persentase perpustakaan aktif (%).

18. Kearsipan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program pembinaan dan pengelolaan arsip secara baku. Program ini untuk mencapai indikator persentse OPD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku (%).

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan arsip penting dan penyelamatan arsip. Pelaksnaaan program untuk mencapai indikator persentase arsip statis yang dialihmediakan.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan arsip tertutup oleh pihak yang berkepentingan. Pelaksanaannya untuk mencapai indikator persentase ijin pemanfataan arsip tertutup yang dikeluarkan (%).

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program dilaksanakan dalam upaya meningkatakan potensi dan pembinaan nelayan perikanan tangkap untuk nelayan kecil/tradisional. Program ini untuk mencapai indikator produksi perikanan tangkap nelayan.

b. Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksnaakan dalam rangka pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kelompok pembudidaya ikan skala kecil dan tradisional, baik di tammbak atau kolam ikan. Program dilaksanakan untuk mencapai indikator produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat. Indikator capaian adalah tingkat konsumsi ikan/ kapita per tahun.

2. Pariwisata

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

Program inidilaksanakn dengan tujuan utuk mengembangkan potensi wisata unggulan daerah dan daya Tarik wisata. Program ini untuk mencapai indikator persentase PAD dari sector pariwisata.

b. Program Pemasaran pariwisata

Program ini dilaksanakan dalam rangka promosi dan peninaktan jumlah kunjungan wisatawan di DTW. Program ini untuk mencapai indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan di seluruh DTW Kabupaten Kendal (%).

c. Pogram pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI

Program ini diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata; pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif. Indiaktor program ini adalah persentase pelaku ekonomi kreatif yang berkembang (%).

d. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pengemabngan dan peningkatan keterampilan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif. Indikator program ini adalah persentase tenaga pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi.

3. Pertanian

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan bagi pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dengan bibit ungguln dan tamanan hortikultura dengan varietas bibit unggul. Indikator program ini adalah : (1) persentase luas tanaman pangan yang menggunakan bibit unggul; (2) persentase luas tanaman

perkebunan yang menggunakan bibit unggul dan (3) persentase luas tanaman hortikultura yang menggunakan bibit unggul.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan lahan pertanian yang menapatkan layanan pengairandari sumber-sumber air (irgasi, embung, damparitlongstorage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan. Indikator program ini adalah : (1) luas lahan pertanian yang mendapatkan pengaiaran dan (2) luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (Ha).

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan hama penyakit ternak ruminansia. Indikator program ini adalah angka morbiditas ternak ruminansia.

d. Program Pengendalia dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana pertanian yang mengakibatkan dampak ekonomi dan social bagi usaha pertanian. Indikator keberhasilan program ini adalah persentase bencana pertanian yang ditangani.

e. Program Perijinan Usaha Pertanian

Program ini dilakasanakan dalam rangka pengembangan usaha dan menumbuhkan pembinaan pelaku usaha pertanian yang potensial di daerah. Indikator peogran ini adalah persentase rekomendasi perijinan usaha pertanian (%).

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan kapasitas petani dan kelompok tani yang terampil dan mumpuni. Indikator program ini adalah persentase cakupan kelompok tani yang aktif.

4. Energi dan sumber daya mineral

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan. Program ini dilaksanakan dalam pengembangan energi baru baik dari sumber alam maupun sumber energi buatan. Indikator program ini adalah : (1) persentse energi perbarukan yang diawasi dan (2) Penatausahaan ijin pemenfaatan langsung panas bumi di daerah.

5. Perdagangan;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perijinan dan Paendaftaran Perusahaan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha untuk emmeperoleh rekomendasi izin sesuai dengan peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan), dengan indikator adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi perijinan usaha yang sesuai.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional sebagai pelayanan bagi pedagang dan pelaku usaha kecil/pedagang. Indikator program ini adalah persentase pasar yang memiliki infrastruktur memadai.

c. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini dilaksanakan dengan tujuan menjaga stabilitas harga untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama pada Hari Raya dan Natal tahun Baru di masyarakat. Indikator dari program ini adalah persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tahun berjalan.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor dari produk daerah dan meningkatkan hasil ekspor. Indikator dari program ini adalah persentese pertumbuhan ekspor/ tahun.

e. Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen

Program pelayanan pengukuran, perlindungan konsumen dan standaridasi UTTP. Indikator program ini adalah persentase UTTP yang ditera/tera ulang yang pada pelaku usaha kesil sesuai kewenangan daerah.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini sebagai upaya memperluas promosi dan pemasaran dari produk UMKM dari kabupaten Kendal. Indikator dari program ini adalah persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dan pemasaran.

6. Perindustrian;

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Program ini bertujuan dalam rangka menyiapkan RIPIK sampai dengan ditetapkannya Perda tentang rencana Pembangunan Industri. Indikator program ini adalah persentse terselesaikannya RIPIK dan ditetapkannya Perda tentang RIPIK.

b. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan usaha perindustrian dan peningkatan penanaman modal pada usaha industri kecil. Indikator dari program ini adalah persentse IKM yang diusulkan mendapatkan Ijin Usaha Industri (IUI).

c. **Program Pengelolaan SIM Industri Nasional**

Program ini bertujun untuk menyediakan data dan informasi terpadu tentang industri secara nasional dan terintegrasi. Indikator dari program ini adalah persentese ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini.

7. Transmigrasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

Program ini ditujukan untuk menyiapkan lokasi trasmigrasi yang dapat menerima calon transmigran. Indikator program ini adalah prosentase ketersediaan Kawasan trasmigrasi yang ditetapkan sebagai Kawasan penerima transmigran.

b. **Program Pembangunan Kawasan Transimigrasi**

Program ini dilaksanakan dalam upaya menyiapkan keterampilan bagi calon transmigran dilatih dan siap ditempatkan di lokasi. Indikator dari program ini adalah persentase calon transmigran yang memiliki kompetensi.

D. Urusan Penunjang Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kensdal yang dilayani oleh Sekretariat Daerah**

Pelaksanaan program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : persentase pemenuhan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran, persentase pemenuhan

kebutuhan rumah tangga; persentase kebutuhan OPD yang difasilitasi protokoler dan dokumentasi pada kegiatan pimpinan daerah atau tamu daerah dan persentase terpenuhinya fasilitas protokol dan komunikasi pimpinan daerah.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat

Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan bantuan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada kelompok keagamanaan dan pembinaan tertib administrasi bagi kecamatan dan kelurahan. Indikator tujuan ini adalah persentase kebijakan kesejahteraaan rakyat yang difasilitasi; persentase kelurahan dan kecamatan yang tertib administrasi; persentase produk hukum yang difasilitasi; persentase kerjasama antar daerah yang diimplementasikan dan persentase BUMD yang difasilitasi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Pelaksanaan program ini adalah untuk mencapai indikator persentase pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pelaksanaan program ini ditujukan agar pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD secara lengkap. Indikator dari program ini adalah persentase kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terfasilitasi.

3. Perencanaan Pembangunan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah

Progran ini dilaksanakan Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan perencanaan dan evaluasi yang sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pencapaian realisasi target program tahunan; persentase kesesuaian RPKD dengan RPJMD; Persentase kesesuaian Renja dengan RKPD; persentase kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan APBD; dan persentase kesesuaian Renja dengan Renstra PD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan).

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah. Indikator capaian dalam program ini adalah persentase indikator OPD dibawah bidang PPM; persentase realisasi indikator OPD dibawah bidang Perekonomian; persentase realisasi indikator OPD dibawah bidang rumpun SDA; persentase realiaasi OPD dibawah rumpun infrastruktur dan persentase realisasi OPD dibawah rumpun kewilayahan.

4. Keuangan Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikeator pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : persentase kesesuaian APBD dengan KUA PPAS; persentase kesesuaian pelaporan keuangan tepat waktu (kepada Menteri Keuangan, KPPN, KPP dan Taspen); persentase OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan; persentase system keuangan yang terintegrasi;

b. Program Pengelolaan BMD

Program ini ditujukan untuk mencapai persentase pengelolaan aset daerah yang dikelola dengan baik.

c. Program pengelolaan pendapatan daerah

Program ini dilaksanakan dengan indikator adalah persentase pertumbuhan WP baru; persentase pertumbuhan pajak daerah per tahun; persentase realisasi pajak daerah.

5. Kepegawaian Daerah

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**. Pelaksanaan program ini ditujukan agar pengelolaan manajemen kepegawaian daerah yang semakin baik dan professional. Untuk mencapaian dirumuskan indikator sebagai berikut: persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan, persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang terupdate; persentase ASN menyusun SKP dan penilaian tepat waktu; tingkat kedisiplinan ASN; persentase struktur jabatan ASN yang terisi dan pesentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi dan persentase jabatan struktural yang dievaluasi.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program pengembangan SDM Aparatur**. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan SDM ASN yang professional. Dengan indikator persentase ASN yang direncanakan mengikuti pengembangan kompetensi dan pesentase ASN yang lulus diklat pra jabatan/ latsar dan diklat kepemimpinan.

7. Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah **Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah,** yang diarahkan pada kegiatan riset dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta kegiatan perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD.

8. Inspektorat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**

   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah yang secara efektif. Indikator program ini adalah persentase penyelenggaraan pengawasan di daerah.

b. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator nilai PMPRB TPI.

9. Kecamatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik

   Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di kecamatan dengan indikator nilai IKM.

b. Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Pelaksanaan program ini ditujukan meningkatkan musrenbang dalam perencanaan pembangunan desa dan kelurahan yang dibina dan menunjukkan peningkatan semakin baik. Indikator dari program ini adalah persentase rata-rata usulan yang terakomodir dalam

perencanaan; persentase sarana dan prasarana kelurahan sesuai ketentuan; persentase kelembagaan kelurahan yang dibina.

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertuban Umum

Program ini ditujukan untuk meningkatan ketertiban umum dan ketenteraman dalam masyarakat. Dengan indikator persentase koordinator trantibum yang dilaksanakan.

d. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Pelaksanaan dari program ini adalah mencapai indikator prosentase kelompok masyarakat perangkat desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi bagi pemeritah desa, dengan indikator capaian persentase desa yang uang memiliki APBDes tepat waktu.

10. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan program ini dilakukan dalam rangka penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela Negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat dalam peran politik dan meningkatkan partai politik.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Program ini difokuskan pada fasilitasi organisasi massa dan organisasi keagamaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya difokuskan pada penguatan ketahanan ekonomi sosial, penguatan FKUB dan pencegahan narkoba.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial difokuskan pada fasilitasi pencegahan dan penangaan konflik sosial.

Tabel VII.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

URAIAN	TAHUN (Ribu Rupiah)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PENDAPATAN DAERAH	2.278.236.519,171	2.398.503.775,88	2.440.917.666,527	2.489.524.785,430	2.535.875.206,109	2.581.943.213,844
PENDAPATAN ASLI DAERAH	415.542.060,688	565.639.024,40	608.052.915,044	656.660.033,947	703.010.454,626	749.078.462,361
PENDAPATAN TRANSFER	1.768.204.458,483	1.738.374.751,48	1.738.374.751,483	1.738.374.751,483	1.738.374.751,483	1.738.374.751,483
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	94.490.000,000	94.490.000,00	94.490.000,000	94.490.000,000	94.490.000,000	94.490.000,000
BELANJA DAERAH	2.312.194.067,943	2.437.603.775,88	2.446.417.666,527	2.561.624.785,430	2.557.375.206,109	2.603.443.213,844

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIDIKAN								772.795.046,53											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					587.362.910,51		586.725.448,53		587.592.703,02		581.468.630,05		579.783.316,35		574.306.342,51		2.909.876.440,46	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pendidikan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100		100		100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100		100		100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					167.145.813,75		170.411.498,00		172.932.072,90		181.370.209,27		183.183.911,37		188.679.428,71		896.577.120,25	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP	Jumlah siswa PAUD, Pendidikan Kesetaraan, SD dan SMP dibagi Jumlah penduduk usia 5 -18 tahun dikalikan 100.	%	87,62	87,62		87,65		87,69		87,7		87,7	-	87,72	-	87,72	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					18.572,50		6.778,00		7.049,12		7.190,10		7.549,61		7.776,10		36.342,93	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pendidikan
	Prosentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan		%	12,95	13,00		13,20	-	13,35		13,50		13,65	-	13, 80	-	13, 80	-	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					17.259.102,36		14.919.671,00		15.516.457,84		15.826.787,00		15.985.054,87		16.464.606,51		78.712.577,22	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pendidikan, Kebudayaan
	Prosentase Pendidik Bersertifikat	Jumlah pendidik (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik dibagi jumlah pendidi (Negeri dan Swasta) dibagi 100.	%	56,66	56,7		56,8	-	56,83		57		56,87	-	57	-	56,89	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					3.737,50		10.950,00		11.169,00		11.392,38		11.962,00		12.320,86		57.794,24	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pendidikan, Kebudayaan
	Prosentase Penerbitan Rekomendasi Pendirian PAUD, SD dan SMP	Jumpal Rekomendasi Izin Pendirian PAUD, SD dan SMP dibagi Jumlah lembaga pengelola PAUD, SD dan SMP yang mengajukan rekomendasi dikalikan 100.	%	NA	70		72	-	75		76		79	-	80	-	80	-	
JUMLAH						771.790.136,61		772.074.345,53		776.059.451,88		778.684.208,80		778.971.794,19		779.470.474,69		3.885.260.275,09	-
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KESEHATAN								-											

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					233.159.389,40		89.841.286,64		97.593.566,73		102.065.745,07		104.107.059,97		110.430.271,77		504.037.930,18	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kesehatan
	Rata rata capain SPM	Jumlah rata rata capaian persentase pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	%	82,1	100		100	-	100	-	100		100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					481.300,00		1.470.900,00		1.485.609,00		1.515.321,18		1.560.780,82		1.607.604,24		7.640.215,24	Perangkat Daerah membidangai Urusan Kesehatan
	Proporsi puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar		%		60		65	-	67	-	72	-	75	-	75	-	75	-	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					691.583,00		827.109,40		835.380,49		852.088,10		894.692,51		921.533,28		4.330.803,79	Perangkat Daerah membidangai Urusan Kesehatan
	Proporsi pembinaan Mutu makanan dan minuman		%		10		10	-	10,9	-	11,7	-	12,5	-	13,3	-	13,3	-	
	Proporsi fasyankes yang melakukan pelayanan farmasi sesuai standar		%		80		88,8	-	90	-	91	-	92	-	93	-	93	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.793.914,20		2.093.970,00		2.114.909,70		2.220.655,19		2.265.068,29		2.333.020,34		11.027.623,51	Perangkat Daerah membidangai Urusan Kesehatan
	Prosentase Rumah Tangga PHBS		%		80		85	-	86	-	87	-	88	-	90	-	90	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					227.138.933,57		390.223.149,78		388.268.793,37		396.034.169,24		396.994.510,93		404.934.401,15		1.976.455.024,47	Perangkat Daerah membidangai Urusan Kesehatan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						464.265.120,18		**484.456.415,82**		**490.298.259,30**		**502.687.978,78**		**505.822.112,51**		**520.226.830,78**		**2.503.491.597,18**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					9.944.091,87		19.841.283,49		17.238.109,15		15.100.014,61		16.251.014,76		16.738.545,20		85.168.967,21	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase luasan wilayah banjir dan tergenang	Luasan wilayah banjir dan tergenang / luas wilayah kabupaten x 100	%		19,14388109		18,1935252	0	17,18327294	0	16,21295159	0	15,1927166	0	14,23237799	0	14,23237799	-	
	Persentase luasan daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi Luas daerah irigasi kabupaten X 100	%	63,9397717	64,85086794		66,76896519	0	69,5502062	0	71,08468399	0	73,00278124	0	75,44835523	0	75,44835523	-	
		panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten x 100	%	88,28	89,28		90,78	-	92,78	-	94,78	-	96,78	-	98,78	-	98,78	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					42.629.762,94		32.116.000,00		26.471.800,00		26.779.603,14		32.139.012,28		32.481.792,53		149.988.207,95	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total panjang jalan kabupaten x 100	%	67,03	67,25		87,52448642	-	89,10	-	91,20	-	93,29	-	95,39	-	95,39	-	
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik / Jumlah total jembatan kabupaten (sesuai SK Bupati) x 100	%	94,27	94,71		95,59471366	-	96,92	-	97,80	-	98,68	-	99,56	-	99,56	-	
		Panjang jaringan drainase perkotaan dalam kondisi baik / total Panjang jaringan drainase perkotaan x 100	%	75,13	75,87		76,70374595	-	78,15	-	79,26	-	80,35	-	81,39	-	81,39	-	
		Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten (Km) X 100	%	75,13	75,87		76,70374595	-	78,15	-	79,26	-	80,35	-	81,39	-	81,39	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.374.700,00		2.350.000,00		2.373.500,00		2.492.175,00		2.616.783,75		2.695.287,26		12.527.746,01	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Panjang drainase perkotaan berfungsi dengan baik	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air	KM	202,90	204,88		207,14	-	211,06	-	214,06	-	216,98	-	219,78	-	219,78	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.056.801,00		5.030.000,00		5.080.300,00		5.181.906,00		5.441.001,30		5.604.231,34		26.337.438,64	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Jumlah penyimpangan pemanfaatan ruang / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	20	20		18	-	16	-	14	-	12	-	10	-	10	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.267.318,00		4.425.000,00		4.469.250,00		4.558.635,00		4.786.566,75		4.930.163,75		23.169.615,50	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase rekomendasi teknis IMB (PBG) yang diterbitkan	Jumlah IMB (PBG) yang rekomendasi teknisnya diterbitkan/ jumlah pemohon IMB (PBG) X 100	%	85,29	85,29		85	-	86,00	-	87,00	-	88,00	-	88,00	-	90,00%	-	
	Persentase rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) yang diterbitkan	Jumlah SLF yang diterbitkan/ jumlah pemohon SLF X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					65.600,00		450.000,00		454.500,00		463.590,00		486.769,50		501.372,59		2.356.232,09	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase bangunan/ lingkungan/ kawasan yang ditingkatkan/ tertata	Jumlah bangunan/lingkungan /kawasan yang ditingkatkan / tertata dibagi rencana bangunan/ lingkungan/ kawasan yang akan ditingkatkan dikali	%	-	-		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					527.788,40		882.000,00		890.820,00		908.636,40		954.068,22		982.690,27		4.618.214,89	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis / target jumlah tenaga jasa konstruksi yang akan	%	28,94	34,11		47,02842377	-	59,95	-	72,87	-	85,79	-	98,71	-	98,71	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					7.943.239,00		8.460.383,25		8.544.987,08		8.630.436,95		9.061.958,80		9.333.817,57		44.031.583,65	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di	Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM JP dan BJP di Kawasan Pedesaan dibagi Jumlah rumah tangga di Kawasan Pedesaan x 100%	%	95,58	96,42		97,25475803	-	98,09	-	98,89	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.296.176,00		5.922.117,00		5.981.338,17		6.100.964,93		6.406.013,18		6.598.193,58		31.008.626,86	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase rumah tangga yang terlayani SPALD (Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik)	Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD melalui dibagi jumlah rumah tangga X 100 %	%	92,24	92,46		92,92525001	-	93,12	-	93,36	-	93,56	-	93,72	-	93,72	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					26.233.362,08		22.321.600,00		22.821.248,00		23.734.097,92		24.208.779,88		24.935.043,27		118.020.769,07	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
JUMLAH						**99.338.839,28**		**101.798.383,74**		**94.325.852,41**		**93.950.059,96**		**102.351.968,42**		**104.801.137,35**		**497.227.401,87**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERTANAHAN																			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					413.676,00		970.000,00		970.000,00		1.018.500,00		1.069.425,00		1.101.507,75		5.129.432,75	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Bidang tanah milik Pemda yang bersertifikat	Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikasi	Bidang	565	635		755	-	875	-	995	-	1.115	-	1.345	-	1.345,00	-	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							-		25.000,00		25.500,00		26.775,00		27.578,25		104.853,25	Perangkat Daerah membidangai Urusan PUPR
	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	Jumlah bidang tanah yang difasilitasi penyelesaian ganti rugi dan santunan dibagi Jumlah bidang tanah yang harus dilakukan penyelesaian ganti rugi dan santunan x 100%	%	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	
JUMLAH						**413.676,00**		**970.000,00**		**995.000,00**		**1.044.000,00**		**1.096.200,00**		**1.129.086,00**		**5.234.286,00**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.571.180,00		5.303.521,40		5.462.627,04		5.735.758,39		6.022.546,31		6.203.222,70		28.727.675,85	Perangkat Daerah membidangai Urusan Perumahan dan Permukiman
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pengembang Perumahan					3.033.020,00	-	3.283.420,00	-	3.349.088,40	-	3.416.070,17	-	3.586.873,68	-	3.694.479,89	-	17.329.932,13	Perangkat Daerah membidangai Urusan Perumahan dan Permukiman
	Persentase rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100	%	0	0		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase Rumah layak huni bagi penduduk yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilita Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan +Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kreteria Penerima Pelayanan	%	0	0		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase Pengembangan Perumahan Berjiin		%	12	12		12	-	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh					-	-	7.004.000,00	-	7.214.120,00	-	7.574.826,00	-	7.953.567,30	-	8.192.174,32	-	37.938.687,62	Perangkat Daerah membidangai Urusan Perumahan dan Permukiman
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase RTLH yang tertangani		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					-	**0**	20.000,00	-	20.600,00	-	21.012,00	-	22.062,60	-	22.724,48	-	106.399,08	Perangkat Daerah membidangai Urusan Perumahan dan Permukiman
	% pengembang yang memiliki sertifikasi	jumlah pengembang yang bersertifikasi dibagi jumlah pengembang x 100%	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Kawasan Permukiman					15.827.399,00	-	1.560.800,00	-	1.592.016,00	-	1.223.856,32	-	1.285.049,14	-	1.323.600,61	-	6.985.322,07	Perangkat Daerah membidangai Urusan Perumahan dan Permukiman
	kawasan kumuh yang telah ditangani	Luas kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan kumuh x 100%	%	23,71	3		3		5	-	5	-	6	-	7	-	7	-	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)					198.000,00		800.000,00		824.000,00		840.480,00		882.504,00		908.979,12		4.255.963,12	Perangkat Daerah membidangai Urusan Perumahan dan Permukiman
	Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU dibagi Jumlah Perumahan pada kurun waktu tertentu x 100%		100	100		100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	% perumahan memiliki PSU											-		-		-		-	
JUMLAH						**23.629.599,00**		**17.971.741,40**		**18.462.451,44**		**18.812.002,88**		**19.752.603,03**		**20.345.181,12**		**95.343.979,87**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.996.774,95		2.815.530,45		2.899.996,37		2.957.996,29		3.105.896,11		3.261.190,92		15.040.610,14	Perangkat Daerah membidangai Urusan Rantibum
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan / jumlah keseluruhan gangguan trantibum x 100	persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Cakupan petugas Linmas di kabupaten per RT	Jumlah linmas per RT se Kab. Kendal	rasio		1,4		1,4	-	1,4	-	1,4	-	1,4	-	1,4	-	1,4	-	
	% pelanggaran Perda/perkada yang diselesaikan	Perbandingan perda yang ditegakkan dengan perda yang mengandung sanksi	persen		83		83	-	83	-	83	-	83	-	87	-	87	-	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.326.175,50		4.733.985,50		4.828.665,21		4.925.238,51		5.023.743,28		5.274.930,45		24.786.562,96	Perangkat Daerah membidangai Urusan Rantibum
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Persen	97	97		97	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.302.756,07		8.143.649,00		8.225.085,49		8.636.339,77		8.722.703,17		9.158.838,32	-	42.886.615,75	Perangkat Daerah membidangai Urusan Rantibum
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**17.625.706,52**		**15.693.164,96**		**15.953.747,07**		**16.519.574,58**		**16.852.342,56**		**17.694.959,69**		**82.713.788,85**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3.994.237,29		4.071.904,00		4.194.061,12		4.403.764,18		4.623.952,38		4.855.150,00		22.148.831,68	Perangkat Daerah membidangai Urusan Rantibum
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penanggulangan Bencana					2.607.647,90		2.636.200,00		2.715.286,00		2.986.814,60		3.636.155,33		3.817.963,10		15.792.419,03	Perangkat Daerah membidangai Urusan Rantibum
	Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk dibagi jumlah desa kategori risiko tinggi (73 desa/kelurahan)	%	6,85	2,74		6,85	-	6,85	-	6,85	-	6,85	-	6,85	-	42,47	-	
	Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dibagi jumlah korban bencana	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**6.601.885,19**		**6.708.104,00**		**6.909.347,12**		**7.390.578,78**		**8.260.107,71**		**8.673.113,10**		**37.941.250,71**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN SOSIAL																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					7.002.448		6.141.281,42		6.225.519,86		6.536.795,85		6.732.899,73		6.934.886,72		32.571.383,58	Perangkat Daerah membidangai Urusan Sosial
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pemberdayaan Sosial					102.400,00		160.000,00		164.800,00		181.280,00		190.344,00		196.054,32		892.478,32	Perangkat Daerah membidangai Urusan Sosial
	% peningkatan peran serta PSKS	jumlah PSKS yang mampu bekerja seuai fungsinya dibagi dengan jumlah PSKS X 100%	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	600	-	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							-		50.000,00		50.000,00		52.500,00		54.075,00		206.575,00	
	Prosentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	Jumlah PPKS pekerja migran tindak kekerasanyang mendapatkan penanganan/jumlah PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan x 100	%	0	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Rehabilitasi Sosial					784.400,60		495.600,00		510.468,00		561.514,80		589.590,54		607.278,26		2.764.451,60	
	Prosentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Jumlah PPKS yng mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti / Jumlah PPKS di luar panti keseluruhan x 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					255.964,00		490.000,00		504.700,00		555.170,00		582.928,50		600.416,36		2.733.214,86	Perangkat Daerah membidangai Urusan Sosial
	Prosentase PPKS fakir miskin dan PPKS anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS fakir miskin (rentan resiko sosial dan miskin) + persentase PMKS anak terlantar yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial / 2	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penanganan Bencana					234.000,00		190.000,00		195.700,00		215.270,00		226.033,50		232.814,51		1.059.818,01	
	Prosentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah PPKS korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan fasilitasipada saat tanggap darurat bencana / Jumlah target PPKS korban bencana alam dan sosial yang akan mendapatkan fasilitasi pada saat tanggap darurat bencana x 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	600	-	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					30.000,00		130.000,00		133.900,00		136.578,00		143.406,90		147.709,11		691.594,01	Perangkat Daerah membidangai Urusan Sosial
	Prosentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan / Jumlah standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan x 100	%		60		75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	
JUMLAH						**8.409.212,60**		**7.606.881,42**		**7.785.087,86**		**8.236.608,65**		**8.517.703,17**		**8.773.234,26**		**40.919.515,36**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN TENAGA KERJA																			

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							30.000,00		30.900,00		31.518,00		33.093,90		34.086,72		159.598,62	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	%	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.567.086,50		1.200.000,00		1.508.000,00		1.613.560,00		1.661.966,80		1.711.825,80	-	7.695.352,60	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi/ Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	19	20		25	-	30	-	35	-	40	-	45	-	45	-	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Program Penempatan Tenaga Kerja				962.895,00		415.770,00		428.243,10		436.807,96		458.648,36		472.407,81		2.211.877,23	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan/Jumlah pencaker yang terdaftar	%	51,07	55		58	-	60	-	63	-	65	-	68	-	68	-	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					294.355,00		330.000,00		339.900,00		346.698,00		364.032,90		374.953,89		1.755.584,79	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/ Jumlah Perusahaan	%	0	50		55	-	60	-	63	-	65	-	68	-	68	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.400.258,45		7.480.230,00		7.555.032,30		7.932.783,92		8.091.439,59		8.334.182,78		39.393.668,59	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**10.224.594,95**		**9.456.000,00**		**9.862.075,40**		**10.361.367,88**		**10.609.181,55**		**10.927.457,00**		**51.216.081,83**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					557.810,00		315.460,00		324.923,80		357.416,18		375.286,99		386.545,60		1.759.632,57	
	Presentase perumusan kebijakan pelaksanaan PUG		%	N/A	60		60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					529.010,00		262.870,00		270.756,10		297.831,71		312.723,30		322.104,99		1.466.286,10	
	Prosentase kekerasan terhadap perempan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	25	35		25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					89.017,50		89.017,50		91.688,03		100.856,83		105.899,67		109.076,66		496.538,68	
	Presentase perceraian	Jumlah perceraian yg terjadi dibagi jumlah pernikahan dikali 100%	%	60	50		40	-	35	-	30	-	25	-	20	-	20	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					185.325,00		-		-		50.000,00		52.500,00		54.075,00		156.575,00	
	Prosentase Keterisian Gender dan Anak dalam SIGA oleh Perangkat daerah	Jumlah OPD yang mengisi Aplikasi SIGA dibagi jumlah OPD	%	-	50		55	-	60	-	75	-	75	-	80	-	80	-	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					242.280,00		71.575,00		73.722,25		75.196,70		78.956,53		81.325,23		380.775,70	
	Prosentase pencapaian Desa / keluraha Layak Anak	Prosentase pencapaian Desa / keluraha Layak Anak	%		-	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					70.000,00		382.190,00		393.655,70		433.021,27		454.672,33		468.312,50		2.131.851,81	
	persentase kekerasan pada anak yang ditangani	Pendampingan terhadap anak dan perempuan	%	-		-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	25	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					5.510.338,13		5.667.807,92		5.724.486,00		6.010.710,30		6.070.817,40		6.252.941,92		29.726.763,54	
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**7.183.780,63**		**6.788.920,42**		**6.879.231,87**		**7.325.032,98**		**7.450.856,22**		**7.674.381,91**		**36.118.423,40**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PANGAN																			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					543.910,00		1.125.000,00		1.136.250,00		1.249.875,00		1.312.368,75		1.351.739,81		6.175.233,56	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Prosentase lumbung pangan aktif		%	10	10		13,33	-	13,33	-	16,67	-	16,67	-	20	-	20	-	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					736.499,00		684.850,00		705.395,50		775.935,05		814.731,80		839.173,76		3.820.086,11	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Persentase ketersediaan bahan pokok utama (beras)	Ketersediaan beras kotor : (jumlah penduduk x konsumsi beras)	%	139	139		141	-	143	-	145	-	147	-	147	-	147	-	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan					92.380,00		196.100,00		201.983,00		206.022,66		216.323,79		222.813,51		1.043.242,96	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase penanganan desa rawan pangan	Jumlah desa rawan pangan yang tertangani : Jumlah desa rawan pangan x 100%	%	52,72	53,56		54,39	-	55,23	-	56,07	-	56,90	-	57,74	-	57,74	-	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan					21.067,50		50.000,00		51.500,00		52.530,00		55.156,50		56.811,20		265.997,70	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi melalui uji lab dibagi jumlah sampel pangan segar yang di uji x 100%	%	80	80		80	-	80	-	80	-	80	-	90	-	90	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					20.182.122,44		20.923.203,48		21.132.435,52		22.189.057,29		22.410.947,86		22.859.166,82		109.514.810,97	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**21.575.978,94**		**22.979.153,48**		**23.227.564,02**		**24.473.420,00**		**24.809.528,71**		**25.329.705,09**		**120.819.371,30**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					13.054.619,18	-	12.060.000,00	-	12.221.800,00	-	12.832.890,00	-	13.089.547,80	-	13.482.234,23	-	63.686.472,03	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					43.659,00		355.000,00		365.650,00		372.963,00		391.611,15		403.359,48		1.888.583,63	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang tersedia/ jumlah dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup yang harus disusun X 100	%	-	70		72	-	74	-	76	-	78	-	78	-	78	-	
	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA			3.000		418.748,00		400.000,00		412.000,00		420.240,00		428.644,80		441.504,14		2.102.388,94	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Cakupan pemantauan kualitas air, udara	Jumlah sungai yang terpantau kualitas airnya/ Jumlah sungai yang harus dipantau kualitas airnya X 100	persen		50		60	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
		Jumlah peruntukan lokasi yang terpantau kualitas udaranya/ Jumlah peruntukan lokasi yang harus dipantau kualitas udaranya X 100	persen		50		50	-	70	-	80	-	90	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			50	-	449.178,00	-	100.000,00	-	103.000,00	-	105.060,00	-	110.313,00	-	113.622,39	-	531.995,39	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi jumlah penanggungjawab usaha dan/kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota × 100 %	%	30	35		40	-	45	-	50	-	55	-	60	-	60	-	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			112	-		-	-	-	80.000,00	-	81.600,00	-	85.680,00	-	88.250,40	-	335.530,40	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/ jumlah pengaduan lingkungan hidup yang masuk X 100	persen		100		100	-	100	-	100	-	100	-		-	100	-	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			10	10		10	-	10	50.000,00	10	51.000,00	10	53.550,00	10	55.156,50	30	209.706,50	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Prosentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kabupaten dibagi yang diusulkan X 100	persen	20	20		20	-	20	-	25	-	30	-	30	-	30	-	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			-	-	49.275,00		150.000,00		154.500,00		162.225,00		170.336,25		175.446,34		812.507,59	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Prosentase masyarakat yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat yang didampingi pelaksanaan PBLH/ rencana jumlah Pendampingan PBLH x 100	Persen	-	-		10	-	10	-	10	-	15	-	15	-	45	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH					37.844,50		40.000,00		41.200,00		42.024,00		44.125,20		45.448,96		212.798,16	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Persentase dok persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui	Jumlah rpersetujuan teknis pengelolaan limbah b3 yang disetujui / jumlah dokumen pengelolaan B3 yang diajukan x 100%		80	80		80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.280.670,00		1.395.000,00		1.436.850,00		1.508.692,50		1.584.127,13		1.631.650,94		7.556.320,56	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik	jumlah KEHATI (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik dibagi jumlah KEHATI yang ada X	persen	17,11	17,59		18,07	-	18,56	-	19,04	-	19,52	-	20	-	20	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					6.763.323,02		8.060.000,00		8.721.200,00		9.070.048,00		9.523.550,40		12.809.256,91		48.184.055,31	Perangkat Daerah membidangi Urusan Lingkingan Hidup
	Timbulan sampah yang ditangani	Jumlah timbulan sampah yang ditangani (ton)	ton	17.935	19.547		31108	-	31.947	-	32.795	-	33.654	-	34.522	-	183.573	-	
	Persentase desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolahan sampah melalui 3R	Jumlah desa /kelurahan yang melaksanakan pengelolahan sampah melalui 3R dibagi jumlah desa x 100	persen	0	0		20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	100	-	
								-		-		-		-		-		-	
JUMLAH						**22.097.316,71**		**22.560.000,00**		**23.586.200,00**		**24.646.742,50**		**25.481.485,73**		**29.245.930,30**		**125.520.358,52**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					285.792,00		267.400,00		278.096,00		292.000,80		306.600,84		315.798,87		1.459.896,51	Perangkat Daerah membidangi Urusan pendukcapil
	Prosentase kepemilikan KK	Jumlah Klg yang memiliki KK di bagi jumlah KK keseluruhan	Persen	99,31	99,4		99,5	-	99,6	-	99,7	-	99,8	-	99,9	-	99,9	-	
	Prosentase kepemilikan KTP elektronik	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP elektronik di bagi jumlah wajib KTP	Persen	99,79	99,81		99,83	-	99,85	-	99,87	-	99,89	-	99,91	-	99,91	-	
	Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah penduduk yang mempunyai KIA di bagi jumlah penduduk usia 17 tahun kurang 1 hari	Persen	33,09	34		35	-	36	-	37	-	38	-	39	-	39	-	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			98,33	98,47	59.046,00		159.046,00		166.998,30		175.348,22		184.115,63		189.639,09		875.147,24	Perangkat Daerah membidangi Urusanpendukcapil
	Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	Jumlah penduduk usia 0 -18 tahun yang mempunyai akta kelahiran di bagi jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun	Persen	95,67	96		96,5	-	97	-	97,5	-	98	-	98,5	-	98,5	-	
	Prosentase Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang di terbitkan di bagi jumlah kematian	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	Jumlah pasangan yang mempunyai dokumen pernikahan di bagi jumlah jumlah KK	Persen	99,31	99,4		99,5	-	99,6	-	99,7	-	99.8	-	99,9	-	99,9	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					809.083,00		309.999,80		325.499,79		341.774,78		358.863,52		369.629,42		1.705.767,31	Perangkat Daerah membidangi Urusanpendukcapil
	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base kependudukan di bagi jumlah lembaga pemerintah	2		2		10	-	15	-	20	-	25	-	28	-	28	-	
	Sistem Informasi Kependudukan yang ter up date	Ada		100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					16.725,00		16.725,00		17.394,00		18.263,70		19.176,89		19.752,19		91.311,78	Perangkat Daerah membidangi Urusanpendukcapil
	Profil Kependudukan Kabupaten	% ketersediaan profil Kependudukan dan catatan sipil	Prosentase	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.319.412,28		12.066.031,48		12.367.682,27		12.986.066,38		13.245.787,71		13.643.161,34		64.308.729,20	Perangkat Daerah membidangi Urusanpendukcapil
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**13.490.058,28**		**12.819.202,28**		**13.155.670,36**		**13.813.453,88**		**14.114.544,58**		**14.537.980,92**		**68.440.852,02**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
	PROGRAM PENATAAN DESA					2.630.942,80		1.828.659,99		1.846.946,59		1.939.293,92		2.036.258,62		2.097.346,38		9.748.505,50	Perangkat Daerah membidangi Urusan permasdes
	Prosentase desa yang memiliki sarpras dalam kondisi baik (jalan, kantor)	Jumlah Desa yang memiliki sarpras kondisi baik dibagi jumlah Desa di Kabupaten Kendal	%	65	67		69	-	71	-	73	-	74	-	75	-	75	-	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					99.590,00		399.590,00		411.577,70		419.809,25		440.799,72		454.023,71		2.125.800,38	Perangkat Daerah membidangi Urusan permasdes
	Prosentase Desa yang memiliki Kerjasama	Jumlah desa yang memiliki kerjasama dibagi jumlah desa	%	0	0		3,01	-	3,38	-	4,51	-	4,51	-	4,51	-	4,51	-	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.275.724,20		7.635.000,00		3.711.350,00		3.896.917,50		4.013.825,03		4.134.239,78		23.391.332,30	Perangkat Daerah membidangi Urusan permasdes
	Persentase desa dengan RPJMDES, RKPDES, APBDES		%	100	100		100	-		-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					97.675,00		503.675,00		518.785,25		529.160,96		555.619,00		572.287,57	-	2.679.527,78	Perangkat Daerah membidangi Urusan permasdes
	% kelembagaan desa yang dibina (RT,RW,PKK,Posyandu ,karangtaruna)		%	100	100		100	-		-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.345.792,40		6.827.955,00		6.896.234,55		7.241.046,28		7.313.456,74		7.532.860,44		35.811.553,01	Perangkat Daerah membidangi Urusan permasdes
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**13.449.724,40**		**17.194.879,99**		**13.384.894,09**		**14.026.227,91**		**14.359.959,10**		**14.790.757,88**		**73.756.718,97**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.589.623,00		141.617,00		145.865,51		148.782,82		156.221,96		160.908,62		753.395,91	
	Persentase penurunan usia pernikahan dini	Selisi jumlah pernikahan usia dini tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah tahun n dikali 100%	%	0	20		20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	80	-	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.565.171,00		7.305.746,00		7.378.803,46		7.747.743,63		7.902.698,51		8.139.779,46		38.474.771,06	
	Cakupan PIK R aktif dalam pelayanan informasi dan konseling		%	30	35		46	-	51	-	56	-	61	-	61	-	61	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					700.000,00		1.088.800,00		1.121.464,00		1.177.537,20		1.201.087,94		1.237.120,58		5.826.009,73	
	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)	Persentase kelompok masyarakat dibidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang dibina (UPPKS, PIK KRR, BKL, BKR, BKB)	%	-	5		15	-	25	-	25	-	30	-	40	-	40	-	
JUMLAH						**8.854.794,00**		**8.536.163,00**		**8.646.132,97**		**9.074.063,65**		**9.260.008,41**		**9.537.808,66**		**45.054.176,70**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERHUBUNGAN																			
	Penyelenggaraan LLAJ					12.810.189,61		10.907.000,00		11.125.140,00		11.681.397,00		12.265.466,85		12.510.776,19		58.489.780,04	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perhubungan
	Persentase pemenuhan kebutuhan rambu jalan	Jumlah rambu jalan yang terpasang/ jumlah rambu-rambu yang harus tersedia X 100	%		70		75	-	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	
	Persentase kendaraan (angkutan umum dan angkutan barang) yang lulus uji KIR	Jumlah kendaraan (angkutan umum dan barang) yang lulus KIR pada tahun n dibagi jumlah kendaraan (angkutan umum dan barang) yang harus melaksanaan wajib uji pada tahun n dikali 100	%		75		80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	
	Persentase terminal penumpang tipe c sesuai standar	Jumlah terminal tipe C sesuai standar dibagi jumlah terminal tipe c dikali 100	%	80	80		85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Program Pengelolaan Pelayaran					3.448.210,00		1.140.400,00		1.163.208,00		1.186.472,16		1.245.795,77		1.283.169,64		6.019.045,57	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perhubungan
	% pemenuhan pelabuhan sesuai standar		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					29.799.565,56		32.505.593,58		32.830.649,52		33.815.569,00		34.322.802,54		34.709.258,59		168.183.873,22	
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**46.057.965,17**		**44.552.993,58**		**45.118.997,52**		**46.683.438,16**		**47.834.065,15**		**48.503.204,42**		**232.692.698,83**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					6.196.674,30		7.128.986,00		6.700.275,86		7.035.289,65		7.246.348,34		7.463.738,79		35.574.638,63	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kominfo
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					2.861.548,65		5.294.031,00		2.952.851,93		3.100.494,53		3.224.514,31		3.221.249,74		17.793.141,51	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kominfo
	% Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah Perangkat Daerah) x 100% Permendagri 18 th	%	41,31	45		50	-	55	-	65	-	70	-	75	-	75	-	
	% layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik) x 100% Permendagri 18 th	%	19,77	25		40	-	50	-	60	-	70	-	80	-	80	-	
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					850.078,00		2.979.707,00		3.069.098,21		3.222.553,12		3.319.229,72		3.318.806,61		15.909.394,66	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kominfo

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	Nilai SKM terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah = (Total nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x Nilai penimbang PermenPANRB 14 th 2017 Kondisi awal = NA (2018), NA (2019), NA	Skore	N/A	67		69	-	70	-	72	-	74	-	76	-	76	-	
JUMLAH						**9.908.300,95**		**15.402.724,00**		**12.722.226,00**		**13.358.337,30**		**13.790.092,36**		**14.003.795,14**		**69.277.174,80**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.575.160,97		5.814.183,54		5.888.609,04		6.183.039,50		6.306.700,29		6.495.901,29		30.688.433,66	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan perangkat daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan rutin kantor terpenuhi/ Jumlah kebutuhan rutin dikali 100	Persen	100	100		100	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							30.000,00		31.200,00		32.760,00		34.398,00		35.429,94		163.787,94	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang diterbitkan	Jumlah koperasi menedapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah koperasi mendaftar perijinan dikali 100		6,10	9,10		9,10	-	10,60	-	10,60	-	12,10	-	12,10	-	12,10	-	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					447.603,00		150.000,00		156.000,00		163.800,00		171.990,00		177.149,70		818.939,70	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentasi koperasi/KSP yang diawasi	Jumlah koperasi mendapatkan pengawasan/ jumlah koperasi dikali 100	%	8,54	17.09		18,8	-	20.51	-	22,22	-	23,93	-	25,64	-	25,64	-	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					26.100,00		25.000,00		26.000,00		27.300,00		28.665,00		29.524,95		136.489,95	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase koperasi dan BPR/LKM yang dinilai	Jumlah koperasi dan BPR/LKM yang mendapatkan penilaian dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	17,09	17,6		18,8	-	20,51	-	22,22	-	23,93	-	25,64	-	25,64	-	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					877.087,00		160.000,00		166.400,00		174.720,00		183.456,00		188.959,68		873.535,68	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah koperasi yang anggotanya pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	25,7	25,9		26,1	-	26,4	-	26,6	-	26,7	-	27	-	27	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							95.000,00		98.800,00		103.740,00		108.927,00		112.194,81		518.661,81	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dibagi jumlah koperasi dikali 100	%	25,7	25,9		26,1	-	26,4	-	26,6	-	26,7	-	27	-	27	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.619.392,50		1.328.062,00		1.434.306,96		1.506.022,31		1.536.142,75		1.582.227,04		7.386.761,06	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan dibagi jumlah usaha mikro	%	4,42	5,06		5,64	-	6,26	-	6,41	-	6,94	-	7,2	-	7,20	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					678.015,50		660.000,00		792.000,00		831.600,00		873.180,00		899.375,40		4.056.155,40	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase Usaha mikro yang dikembangkan	Jjumlah usaha mikro yang diembangkan menjadi usaha kecil dibagi jumlah usaha mikro	%	4,80	5,10		5,70	-	5,90	-	6,10	-	6,20	-	6,40	-	6	-	
JUMLAH						**9.223.358,97**		**8.262.245,54**		**8.593.316,00**		**9.022.981,80**		**9.243.459,04**		**9.520.762,81**		**44.642.765,20**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENANAMAN MODAL																			
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					96.420,00		166.420,00		171.412,60		179.983,23		188.982,39		194.651,86		901.450,08	DPMPTSP
	Indikator : % ketersediaan peta potensi dan peluang usaha yang terupdate	Jumlah Peta Potensi dan peluang Usaha yang diupdate dibagi jumlah peta Potensi dan peluang Usaha kali 100 %	Prosen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Promosi Penanaman Modal					622.125,00		411.345,00		423.685,35		444.869,62		467.113,10		481.126,49		2.228.139,56	DPMPTSP
	Prosentase calon investor yang memiliki kepeminatan investasi	Jumlah calon investor yang menyatakan kepeminatan investasi pada event promosi dibagi jumlah calon investor yang hadir di event promosi dikalikan 100%	Prosen	80	80		80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	
	Program Pelayanan Penanaman Modal					575.164,10		559.164,10		575.939,02		604.735,97		634.972,77		654.021,96		3.028.833,83	DPMPTSP
	Prosentase permohonan perizinan dan Non perizinan yang memenuhi ketentuan	Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang sesuai ketentuan dibagi jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk kali 100 persen.	Prosen	90	90		90	-	92	-	92	-	94	-	94	-	94	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					297.944,80		202.012,00		208.072,36		218.475,98		229.399,78		236.281,77		1.094.241,89	DPMPTSP

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase investor/pelaku usaha berijin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal	Jumlah investor/pelaku usaha berijin efektif yang melaksanakan pelaporan penanaman modal dibagi jumlah investor/pelaku usaha berijin efektif kali	Prosen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					116.460,00		132.938,00		136.926,14		143.772,45		150.961,07		155.489,90		720.087,56	DPMPTSP
	Prosentase data perizinan dan non perizinan yang dikelola sisten informasi penanaman modal	Jumlah data yang dikelola sistem tahun ini ditambah data tahun tahun sebelumnya dibagi jumlah data yang ada di sistem dikalikan	Prosen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penunjangan urusan pemerintahan daerah					6.719.831,51		6.448.233,70		6.641.680,71		6.973.764,75		7.182.977,69		7.398.467,02		34.645.123,87	DPMPTSP
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**8.427.945,41**		**7.920.112,80**		**8.157.716,18**		**8.565.601,99**		**8.854.406,80**		**9.120.039,00**		**42.617.876,78**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.543.750,00		1.255.000,00		1.292.650,00		1.383.135,50		1.452.292,28		1.495.861,04		6.878.938,82	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi sosial kemasyarakatan di kota/ jumlah pemuda di kota x 100%	%	15,11	21,95		22,65		23,34		24,03	-	24,73	-	25,42	-	25,42	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					200.000,00		200.000,00		206.000,00		226.600,00		237.930,00		245.067,90		1.115.597,90	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar
	Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang	Pembinaan gerakan pramuka kwartir cabang	%	100	100		100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					15.253.550,00		6.080.000,00		7.762.400,00		6.150.520,00		6.458.046,00		6.651.787,38		33.102.753,38	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar
	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (KONI dan Dispora) dibagi jumlah cabang olahraga prestasi	%	100	100		100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					8.985.837,78		9.309.204,00		9.088.480,12		9.542.904,13		9.829.191,25		9.924.066,99		47.693.846,48	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**25.983.137,78**		**16.844.204,00**		**18.349.530,12**		**17.303.159,63**		**17.977.459,52**		**18.316.783,31**		**88.791.136,58**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN STATISTIK																			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					165.635,00		135.500,00		139.565,00		146.543,25		153.870,41		158.486,52		733.965,19	Perangkat Daerah membidangi Urusan Diskominfo
	% ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dirilis/ diunggah Perangkat Daerah ke portal data kendal	(Jumlah data dan informasi statistik sektoral yang dirilis atau diunggah PD ke Portal Data Kendal / Jumlah data dan informasi statistik sektoral) x 100%	%	N/A	20		40	-	50	-	60	-	70	-	80	-	80	-	
JUMLAH						**165.635,00**		**135.500,00**		**139.565,00**		**146.543,25**		**153.870,41**		**158.486,52**		**733.965,19**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERSANDIAN																			
	Program Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah					303.382,00		369.376,00		380.457,28		399.480,14		419.454,15		432.037,78		2.000.805,35	Perangkat Daerah membidangi Urusan Diskominfo
	% sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	(Jumlah sistem elektronik (SE) yang menerapkan system manajemen keamanan informasi (SMKI) dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian / Jumlah sistem elektronik (SE)) x 100% Permendagri 18 th 2020	%	22,84	25		27	-	30	-	32	-	35	-	40	-	40	-	
JUMLAH						**303.382,00**		**369.376,00**		**380.457,28**		**399.480,14**		**419.454,15**		**432.037,78**		**2.000.805,35**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEBUDAYAAN																			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.476.775,00		408.000,00		428.400,00		449.820,00		472.311,00		486.480,33		2.245.011,33	Perangkat Daerah membidangai Urusan Pendidikan, Kebudayaan
	Prosentase kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) dibagi dengan jumlah obyek budaya dikalikan 100.		100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					263.812,50		115.601,00		121.381,05		127.450,10		133.822,61		137.837,29		636.092,05	
	Prosentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Jumlah grup kesenian yang telah didata dibagi jumlah grup kesenian dibagi 100.	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					186.650,00		36.500,00		38.325,00		40.241,25		42.253,31		43.520,91		200.840,47	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Jumlah tim ahli cagar budaya	Jumlah Sumber Daya Manusia cagar budaya yang menjadi tim ahli cagar budaya ditetapkan dengan SK Bupati.	orang	0	0		0	-	3	-	0	-	5	-	5	-	5	-	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					424.572,50		87.600,00		91.980,00		96.579,00		101.407,95		104.450,19		482.017,14	
	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) dibagi jumlah cagar budaya dikalikan 100..	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					432.000,00		73.000,00		76.650,00		80.482,50		84.506,63		87.041,82		401.680,95	
	Prosentase Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat dibagi Jumlah Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat yang direncanakan	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.783.810,00**		**720.701,00**		**756.736,05**		**794.572,85**		**834.301,50**		**859.330,54**		**3.965.641,94**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERPUSTAKAAN																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.008.256,08		5.329.719,00		4.846.204,95		5.088.515,20		5.342.940,96		5.503.229,19		26.110.609,29	Perangkat Daerah membidangi Urusan Dinarpus
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					10.308.821,70		1.315.000,00		1.478.000,00		1.551.900,00		1.629.495,00		1.678.379,85		7.652.774,85	Perangkat Daerah membidangi Urusan Dinarpus
	Persentase perpustakaan aktif			60	60		65	-	65	-	70	-	70	-	75	-	75	-	
JUMLAH						**15.317.077,78**		**6.644.719,00**		**6.324.204,95**		**6.640.415,20**		**6.972.435,96**		**7.181.609,04**		**33.763.384,14**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEARSIPAN																			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					199.563,00		255.000,00		280.500,00		302.940,00		318.087,00		327.629,61		1.484.156,61	Perangkat Daerah membidangi Urusan Dinarpus
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengolahan arsip secara baku		%	26	26		30	-	33	-	36	-	39	-	42	-	42	-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					105.667,00		70.000,00		73.500,00		79.380,00		83.349,00		85.849,47		392.078,47	Perangkat Daerah membidangi Urusan Dinarpus
	Persentase arsip statis yang dialihmediakan		%	10	10		12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	20	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					-		20.000,00		21.000,00		22.680,00		23.814,00		24.528,42		112.022,42	Perangkat Daerah membidangi Urusan Dinarpus
	Persentase ijin pemanfaatan arsip tertutup yang dikeluarkan		%	50	50		55	-	55	-	55	-	60	-	60	-	60	-	
JUMLAH						**305.230,00**		**345.000,00**		**375.000,00**		**405.000,00**		**425.250,00**		**438.007,50**		**1.988.257,50**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					595.197,00		1.815.416,00		1.869.878,48		1.963.372,40		2.061.541,02		2.123.387,25		9.833.595,16	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
	Produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap se-Kabupaten Kendal pada tahun tertentu	kg	3.801.077	4.190.687		4.400.222	-	4.620.233	-	4.851.244	-	5.093.807	-	5.348.497	-	28.504.690	-	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					2.342.273,50		1.330.800,00		1.370.724,00		1.439.260,20		1.511.223,21		1.556.559,91		7.208.567,32	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
	Produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan tangkap se-Kabupaten Kendal pada tahun tertentu	kg	22.509.480	23.139.000		23.786.000	-	24.453.000	-	25.140.000	-	25.848.000	-	26.577.000	-	148.943.000	-	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		kg/kap/th	30,92	32,5	752.935,00	34,1	289.062,00	35,8	297.733,86	37,6	312.620,55	39,5	328.251,58	41,4	338.099,13	41,4	1.565.767,12	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan penduduk	Angka konsumsi ikan rumah tangga hasil data Susenas BPS ditambah konsumsi ikan di luar rumah tangga ditambah konsumsi ikan yang tidak tercatat						-		-		-		-		-		-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.374.300,63		5.238.977,83		5.343.757,39		5.610.945,26		5.891.492,52		6.068.237,30		28.153.410,30	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kelautan dan Perikanan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**9.064.706,13**		**8.674.255,83**		**8.882.093,73**		**9.326.198,42**		**9.792.508,34**		**10.086.283,59**		**46.761.339,90**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PARIWISATA																			
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.716.728,50		1.315.000,00		1.407.050,00		1.477.402,50		1.551.272,63		1.597.810,80		7.348.535,93	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar
	PAD sektor pariwisata		Rp	546.551,02	1.093.102		1.202.412,20		1.322.653,40		1.454.918,70	-	1.600.414,60	-	1.760.451,70	-	8.433.952,60	-	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					315.325,00		325.000,00		357.500,00		375.375,00		394.143,75		405.968,06		1.857.986,81	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar
	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan (tahun n-(n-1))/ tahun (n-1) x 100%	%	-63,24	5,84		5,60	-	5,98	-	5,98	-	5,95	-	6,06	-	6,06	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					73.750,00		70.000,00		80.500,00		84.525,00		88.751,25		91.413,79		415.190,04	Perangkat Daerah membidangi Urusan Porapar

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan/ jumlah pelaku ekraf x 100%	%	Na	6		12		18		24	-	30	-	36	-	36	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.177.229,00		280.000,00		322.000,00		338.100,00		355.005,00		365.655,15		1.660.760,15	
	Persentase tenaga kerja sektor pariwisata dan ekraf yang tersertifikasi	Jumlah tenaga kerja yang lulus uji sertifikasi/ jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekraf x 100%	%	Na	3		6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	31	-	
JUMLAH						**3.283.032,50**		**1.990.000,00**		**2.167.050,00**		**2.275.402,50**		**2.389.172,63**		**2.460.847,80**		**11.282.472,93**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN																			
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					1.502.531,00		2.110.691,00		2.174.011,73		2.282.712,32		2.396.847,93		2.468.753,37		11.433.016,35	
	Persentase luasan tanaman pangan yang menggunakan varietas benih unggul	Luasan tanaman padi, jagung yang menggunakan varietas benih unggul / Luasan tanaman pangan x 100%	%	94,46	85,00		85,50	-	86,00	-	86,50	-	87,00	-	87,50	-	87,50	-	
	Persentase luasan tanaman hortikultura yang menggunakan varietas benih unggul	Luasan tanaman durian yang menggunakan varietas benih unggul/ Luasan hortikutura x 100%	%	88,89	89,39		89,89	-	90,39	-	90,89	-	91,39	-	91,89	-	91,89	-	
	Persentase luasan tanaman perkebunan yang menggunakan varietas bibit unggul	Luasan tanaman kopi yang menggunakan varietas bibit unggul/ Luasan tanaman perkebunan x 100%	%	69,17	69,37		69,57	-	69,77	-	69,97	-	70,17	-	70,37	-	70,37	-	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					8.924.164,55		5.570.300,00		5.581.706,00		5.860.791,30		6.153.830,87		6.338.445,79		29.505.073,96	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Ha	22.666	22.666		22.666	-	22.666	-	22.666	-	22.666	-	22.666	-	22.666	-	
	Luas lahan yang mendapat pengairan dari sumber-sumber air (irigasi tanah dangkal / dalam, embung, dam parit, long storage) dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan		Ha	4.384	1.350		1.350	-	1.350	-	1.350	-	1.350	-	1.350	-	12.484	-	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					814.321,00		953.465,00		972.534,30		1.021.161,02		1.072.219,07		1.104.385,64		5.123.765,02	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Angka morbiditas ternak ruminansia	jumlah hewan ternak yang berpenyakit	ekor	1916	1.900,00		1.850,00	-	1.800,00	-	1.750,00	-	1.700,00	-	1.650,00	-	1.650,00	-	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					119.735,00		124.103,00		127.826,09		134.217,39		140.928,26		145.156,11		672.230,86	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Persentase luas lahan yang memperoleh pengendalian hama penyakit	Jumlah luas lahan yang memperoleh pengendalian hama penyakit / luas lahan pertanian dan perkebunan x 100%	%	0,62	1,26		1,26	0	1,26		1,26		1,26		1,26		1,26		

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Program Penyuluhan Pertanian					1.522.007,83		1.486.000,00		1.515.720,00		1.591.506,00		1.671.081,30		1.721.213,74		7.985.521,04	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
	Persentase Cakupan Kelompok Tani yang aktif		%	82	84		85	-	86		87		88		89		89		Perangkat Daerah membidangi Urusan Pertanian dan Pangan
JUMLAH						**12.882.759,38**		**10.244.559,00**		**10.371.798,12**		**10.890.388,03**		**11.434.907,43**		**11.777.954,65**		**54.719.607,22**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN																			
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					9.539.537,00		7.741.000,00		5.473.230,00		5.746.891,50		6.034.236,08		6.215.263,16		31.210.620,73	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perdagangan
	Persentase pasar yang layak fungsi	Jumlah Pasar yang mempunyai Sertifikat layak fungsi dibanding dengan jumlah seluruh pasar	persen	0	7,69		15,38	-	23,07	-	30,76	-	38,45	-	38,45	-		-	
	Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting					80.817,22		100.000,00		103.000,00		108.150,00		113.557,50		116.964,23		541.671,73	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perdagangan
	Persentase ketersediaan barang pokok dan penting	Jumlah ketersediaan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	persen	148	150		150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-	
	Program Pengembangan Ekspor					243.487,50		945.000,00		973.350,00		1.022.017,50		1.073.118,38		1.105.311,93		5.118.797,80	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perdagangan
	Pertumbuhan produk unggulan ekspor	perbandingan nilai ekspor dari tahun sebelumnya	%	20	5		5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	25	-	
	Standarisasi dan Perlindungan konsumen					160.907,50		168.695,00		173.755,85		182.443,64		191.565,82		197.312,80		913.773,12	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perdagangan
	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan/dibanding jumlah potensi UTTP	persen	19,18	50		70	-	90	-	95	-	96	-	100	-		-	
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					-		-		-		-		-		-		-	
	Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri	%	0	90		90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.105.761,68		15.650.552,30		15.807.057,82		16.597.410,71		16.763.384,82		17.066.286,36		81.884.692,00	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perdagangan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**26.130.510,90**		**24.605.247,30**		**22.530.393,67**		**23.656.913,35**		**24.175.862,59**		**24.701.138,47**		**119.669.555,37**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERINDUSTRIAN																			
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.015.254,00		1.840.000,00		1.932.000,00		2.028.600,00		2.130.030,00		2.193.930,90		10.124.560,90	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Jumlah indikator Pembangunan industri RPIK dibagi indikator pembangunandalam RIPIN dikali 100 (PMRI No.10/2013)	%				82	-	84	-	86	-	90	-	100	-	100	-	
	Persentase sentra indsutri yang dikembangkan	Jumlah sentra industri dikembangkan dibagi jumlah potensi sentra industri dikali 100	%				85	-	87	-	90	-	95	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							100.000,00		105.000,00		110.250,00		115.762,50		119.235,38		550.247,88	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase IKM yang diusulkan mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI)		%				20	-	30	-	40	-	50	-	60	-	60	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					95.300,00		-		-		50.000,00		52.500,00		54.075,00		156.575,00	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini						20	-	30	-	40	-	50	-	60	-	60	-	
JUMLAH						**1.110.554,00**		**1.940.000,00**		**2.037.000,00**		**2.188.850,00**		**2.298.292,50**		**2.367.241,28**		**10.831.383,78**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					50.000		50.000,00		50.000,00		55.000,00		57.750,00		59.482,50		272.232,50	Perangkat Daerah membidangi Urusan Koperasi dan UMKM
	% Energi terbarukan yang diawasi		%		2		2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
JUMLAH						**50.000,00**		**50.000,00**		**50.000,00**		**55.000,00**		**57.750,00**		**59.482,50**		**272.232,50**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN TRANSMIGRASI																			
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					68.080,00		50.000,00		50.000,00		55.000,00		57.750,00		59.482,50		272.232,50	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Prosentase kawasan calon transmigran		%	0	75		75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					70.000,00		75.230,00		75.230,00		82.753,00		86.890,65		89.497,37		409.601,02	Perangkat Daerah membidangi Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Prosentase jumlah calon transmigran yang diberangkatkan		%	0	50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
JUMLAH						**138.080,00**		**125.230,00**		**125.230,00**		**137.753,00**		**144.640,65**		**148.979,87**		**681.833,52**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDUKUNG (SEKRETARIAT DAERAH)																			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					2.809.391,63		2.875.000,00		2.990.000,00		3.139.500,00		3.296.475,00		3.395.369,25		15.696.344,25	
	Persentase kegiatan pembangunan yang tidak mengalami keterlambatan dlm pelaksanaan		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-		-		-	
	Presentase kenaikan deviden dari sektor BUMD		%	0,65	1		1,5	-	2	-	2,5	-	3	-	3	-	3	-	
	Persentase Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-		-		-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					5.484.805,55		6.668.042,00		6.934.763,68		57.628.240,05		10.509.652,05		10.824.941,61		92.565.639,39	
	Prosentase Kecamatan dan Kelurahan tertib administrasi		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Bag.Pemt
	Persentase kerjasama yg terimplementasi secara efektif		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase raperda yang diusulkan ke propemperda		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.162.917,48		46.304.760,85		46.730.856,07		49.067.398,87		51.520.768,81		53.066.391,88		246.690.176,48	
	% OPD yang memiliki nilai SKM B		%	96	96,50		97,00	-	97,50	-	98,00	-	98,50	-	99	-		-	
	Persentas OPD yang difasilitasi dlam implementasi RB			16,667	16,667		33,33	-	33,33	-	50,00	-	66,67	-	100	-		-	
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**55.457.114,66**		**55.847.802,85**		**56.655.619,75**		**109.835.138,92**		**65.326.895,86**		**67.286.702,74**		**354.952.160,12**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN SEKRETARIAT DPRD																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					36.780.990,00		41.288.574,88		42.114.346,37		44.220.063,69		48.642.070,06		50.101.332,16		226.366.387,16	Setwan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					23.219.010,00		26.911.425,13		27.987.882,13		29.387.276,24		30.856.640,05		31.782.339,25		146.925.562,79	Setwan
	Jumlah produk hukum yang dibahas sesuai kebutuhan	Jumlah Raperda yg difasilitasi Pembahasannya/Jumlah Prolegda x 100	Perda	18	17		17	-	16	-	17	-	17	-	17	-	18	-	
	Prosentase dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD/Jumlah anggota DPRD x 100	%	NA	80		81	-	82	-	83	-	84	-	85	-	85	-	
JUMLAH						**60.000.000,00**		**68.200.000,00**		**70.102.228,50**		**73.607.339,93**		**79.498.710,11**		**81.883.671,41**		**373.291.949,95**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PERENCANAAN																			
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.502.044,00		1.360.342,70		1.469.170,12		1.627.204,87		1.708.565,11		1.793.993,37		7.959.276,16	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase pencapaian realisasi target Program tahunan	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program	persen		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	jumlah indikator Program dan target yang ada di RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah indikator Program di RPJMD	persen		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase kesesuaian Renja dengan RKPD	jumlah indikator dan kegiatan dalam Program yang ada di Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi jumlah indikator dan kegiatan Program di RKPD	persen		86		86	-	86	-	86	-	86	-	86	-	86	-	
	Persentase kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dengan APBD	Jumlah kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di APBD dibagi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di RKPD	persen		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase kesesuaian Renja dengan Renstra PD (Program, Kegiatan, Subkegiatan)	Jumlah kesesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Renja dibagi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Renstra	persen		88		88	-	88	-	88	-	88	-	88	-	88	-	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.185.677,75		1.023.217,75		1.064.146,46		1.170.561,11		1.229.089,16		1.265.961,84		5.752.976,31	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Pemerintahan & Pembangunan Manusia	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program di OPD yang didampingi	persen		90		90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	
	Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Perekonomian & SDA (Sumberdaya Alam)	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program di OPD yang didampingi	persen		92		92	-	92	-	92	-	92	-	92	-	552	-	
	Prosentase realisasi indikator OPD dibawah rumpun Infrastruktur & kewilayahan	jumlah realisasi indikator Program yang tercapai (Sangat Tinggi dan Tinggi) dibagi dengan jumlah indikator Program DI OPD yang didampingi	persen		92		92	-	92	-	92	-	92	-	92	-	92	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5829811		6.809.178,74		6.179.745,01		6.303.339,91		6.933.673,90		7.280.357,60		7.498.768,32		34.195.884,74	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**9.496.900,49**		**8.563.305,46**		**8.836.656,49**		**9.731.439,87**		**10.218.011,87**		**10.558.723,53**		**47.908.137,21**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEUANGAN																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAAN DAERAH					21.542.581,39		23.005.143,22		21.235.194,65		22.296.954,38		22.965.863,01		23.654.838,90		113.157.994,16	Perangkat Daerah membidangi Urusan Keuangan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					382.012.644,35		494.777.065,55		498.594.296,67		515.108.646,20		521.666.039,85		528.220.840,02		2.558.366.888,28	Perangkat Daerah membidangi Urusan Keuangan
	% kesesuaian APBD dengan KUA PPAS	jumlah kegiatan di APBD sesuai dengan KUA PPAS di bagi jumlah kegiatan APBD x 100%			100		100	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	% PELAPORAN KEUANGAN TEPAT WAKTU (kemenkeu, KPPN, KPP, Taspen)	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu (kemenkeu, KPPN, KPP dan Taspen) dibagi jumlah laporan	%		100		100	-	100		100	-	100	-	100	-	100	-	
	% OPD menyusun laporan keuangan sesuai standar keuangan	jumlah OPD yang memiliki laporan keuangan sesuai standar keuangan dibagi dengan jumlah OPD	OPD	1	1		1	-	1		1	-	1	-	1	-	1	-	
	% sistem keuangan yang terintegrasi	Sistem keuangan yang telah terintegrasi dengan Simda Keuangan Dibagi sistem keuangan yang seharus terintegrasi dengan (BLUD, BOS, PENDAPATAN, ASET)	%		25		50	-	75	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	jumlah aset daerah yang teraudited tahun n-1 dibagi jumlah aset daerah n-1 kali 100%				2.448.756,25		3.090.000,00		3.151.800,00		3.372.426,00		3.439.874,52		3.543.070,76		16.597.171,28	
	% aset daerah yang dikelola dengan baik		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					5.169.133,44		4.355.000,00		4.398.550,00		4.662.463,00		4.895.586,15		5.042.453,73		23.354.052,88	Perangkat Daerah membidangi Urusan Keuangan
	% PERTUMBUHAN WP BARU	(jumlah WP n - jumlah WP n-1)/jumlah WP n-1 * 100%			10		10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
	% PERTUMBUHAN PAJAK PERTAHUN	(jumlah pajak n - jumlah pajak n-1)/jumlah pajak n-1 * 100%			5		10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	
	NILAI IKM	hasil penilaian IKM		86,94	86,94		86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	86,94	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% REALISASI PAJAK DAERAH	Jumlah realisasi pajak dibagi Target pajak X 100%			100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**411.173.115,43**		**525.227.208,76**		**527.379.841,32**		**545.440.489,58**		**552.967.363,53**		**560.461.203,42**		**2.711.476.106,60**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEPEGAWAIAN																			
	Program Kepegawaian Daerah					2.809.351,67		2.184.264,14		2.202.690,56		2.378.905,80		2.497.851,09		2.572.786,62		11.836.498,22	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kepegawaian dan Pelatihan
	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter *update*	Jumlah PNS dengan data kepegawaian yang terupdate di bagi jumlah PNS x 100 %	persen	58,02	61		70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	90	-	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas dibagi Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah dikali 100%	persen	207,23	210		210	-	215	-	215	-	220	-	225	-	225	-	
	Tingkat Kedisiplinan ASN	Jumlah ASN yang tidak menerima hukuman dikurangi di bagi jumlah total ASN pada tahun berjalan x 100%	persen	97	97,3		97,6	-	97,9	-	98,2	-	98,5	-	98,8	-	98,8	-	
	Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	Jumlah PNS yang menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu di bagi jumlah PNS x 100 %	persen	55	60		65	-	70	-	80	-	85	-	90	-	90	-	
	Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	Jumlah jabatan struktural yang dievaluasi di bagi jumlah jabatan struktural yang terisi x 100 %	persen	80	82		85	-	87	-	90	-	95	-	100	-	100	-	
	Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan	Jumlah penempatan ASN yang sesuai dengan peta jabatan di bagi seluruh jumlah ASN di peta jabatan x 100 %	persen	55	60		62	-	65	-	70	-	75	-	80	-	80	-	
	Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	Jumah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100 %	persen	87,6	80		82	-	85	-	87	-	87	-	88	-	88	-	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) dibagi seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%	persen	8,08	8,09		8,09	-	8,1	-	8,11	-	8,12	-	8,13	-	8,13	-	
	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang lulus pengembangan kompetensi dibagi jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	persen	23,2	23,21		23,22	-	23,23	-	23,24	-	23,25	-	23,26	-	23,26	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7.375.540,60		6.998.472,90		7.138.442,36		7.852.286,60		8.244.900,93		8.492.247,95		38.726.350,74	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kepegawaian dan Pelatihan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**10.184.892,27**		**9.182.737,05**		**9.341.132,92**		**10.231.192,40**		**10.742.752,02**		**11.065.034,58**		**50.562.848,96**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA					3.636.258,02		4.082.275,47		4.268.034,75		4.310.715,10		4.440.036,55		4.573.237,65		21.674.299,53	Perangkat Daerah membidangi Urusan Kepegawaian dan Pelatihan
	Persentase ASN yang direncanakan mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembnagan kompetensi dibagi Jumlah ASN yang direncanakan mengikuti diklat x 100 %	persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Persentase ASN yang lulus lat prajabatan/latsar dan lat kepemimpinan	Jumlah ASN yang lulus latsar ditambah latpim dibagi jumlah ASN yang mengikuti latsar dan latpim x 100 %	persen		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						3.636.258,02		**4.082.275,47**		**4.268.034,75**		**4.310.715,10**		**4.440.036,55**		**4.573.237,65**		**21.674.299,53**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					869.447,00		1.602.483,00		1.634.532,66		1.797.985,93		1.887.885,22		1.944.521,78		8.867.408,59	Perangkat Daerah membidangi Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Prosentase dokumen penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan RKPD	jumlah dokumen penelitian dan pengembangan yang terintegrasi di RKPD dibagi jumlah dokumen penelitian dan pengembangan	persen	NA	NA		5	-	10	-	15	-	20	-	25	-	25	-	
JUMLAH						**869.447,00**		**1.602.483,00**		**1.634.532,66**		**1.797.985,93**		**1.887.885,22**		**1.944.521,78**		**8.867.408,59**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PENGAWASAN																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					14.971.692,40		15.309.526,15		10.421.907,20		10.526.126,27		10.631.387,53		10.950.329,16		57.839.276,32	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pengawasan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					443.954,00		501.900,00		5.006.919,00		5.507.610,90		5.562.687,01		5.729.567,62		22.308.684,53	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pengawasan
	Prosentase tercapainya penyelenggaraan pengawasan di daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					62.635,00		342.000,00		845.420,00		929.962,00		939.261,62		967.439,47		4.024.083,09	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pengawasan
	Prosentase hasil perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		%		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**15.478.281,40**		**16.153.426,15**		**16.274.246,20**		**16.963.699,17**		**17.133.336,16**		**17.647.336,25**		**84.172.043,94**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN KEWILAYAHAN																			
OPD : KECAMATAN KENDAL																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.755.042,04		20.903.888,00		20.962.926,88		22.639.961,03		23.092.760,25		23.785.543,06		111.385.079,22	Kecamatan Kendal
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					150.000,00		30.000,00		30.900,00		33.372,00		34.039,44		35.060,62		163.372,06	Kecamatan Kendal
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.575.000,00		2.638.000,00		2.717.140,00		2.934.511,20		2.993.201,42		3.082.997,47		14.365.850,09	Kecamatan Kendal
	% aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang	Jumlah usulan yang dilaksanakan dari musrebang dan kegiatan pemberdayaan yang teraksana di kecamatan	%	0	90		90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	0	20	244.552,50	20	220.000,00	20	226.600,00	20	244.728,00	20	249.622,56	20	257.111,24	20	1.198.061,80	Kecamatan Kendal
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan kemanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-				6.806,71		7.351,25		7.498,27		7.723,22		29.379,45	
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					125.387,50		-		-		-		-		-		-	Kecamatan Kendal
	Persentase Penegakan Perda		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**28.849.982,04**		**23.791.888,00**		**23.944.373,59**		**25.859.923,48**		**26.377.121,95**		**27.168.435,61**		**127.141.742,62**	
OPD : KECAMATAN PATEBON																			

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.361.474,53		2.492.765,30		2.617.403,56		2.826.795,85		2.968.135,64		3.057.179,71		13.962.280,05	Kecamatan Patebon
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					55.460,00		32.420,00		34.041,00		36.764,28		38.602,49		39.760,57		181.588,34	Kecamatan Patebon
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					25.248,00		25.800,00		27.090,00		29.257,20		30.720,06		31.641,66		144.508,92	Kecamatan Patebon
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat	%		50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					81.350,00		84.950,00		89.197,50		96.333,30		101.149,97		104.184,46		475.815,23	Kecamatan Patebon
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.300,10		13.400,00		14.070,00		15.195,60		15.955,38		16.434,04		75.055,02	Kecamatan Patebon
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					11.625,00		55.500,00		58.275,00		62.937,00		66.083,85		68.066,37		310.862,22	Kecamatan Patebon
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.545.457,63**		**2.704.835,30**		**2.840.077,06**		**3.067.283,23**		**3.220.647,39**		**3.317.266,81**		**15.150.109,78**	
OPD : KECAMATAN PEGANDON																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.463.095,39		2.459.787,36		2.582.776,73		2.789.398,87		2.928.868,81		3.016.734,87		13.777.566,64	Kecamatan Pegandon
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.300,00		12.768,00		13.406,40		14.478,91		15.202,86		15.658,94		71.515,11	Kecamatan Pegandon
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					29.830,00		43.310,00		45.475,50		49.113,54		51.569,22		53.116,29		242.584,55	Kecamatan Pegandon
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat	%		50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					97.060,00		89.100,00		93.555,00		101.039,40		106.091,37		109.274,11		499.059,88	Kecamatan Pegandon
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					4.500,00		17.307,00		18.172,35		19.626,14		20.607,44		21.225,67		96.938,60	Kecamatan Pegandon
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					6.850,00		70.160,00		73.668,00		79.561,44		83.539,51		86.045,70		392.974,65	Kecamatan Pegandon
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						2.608.635,39		**2.692.432,36**		**2.827.053,98**		**3.053.218,30**		**3.205.879,21**		**3.302.055,59**		**15.080.639,43**	
OPD : KECAMATAN WELERI																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.772.044,56		2.717.296,57		2.853.161,40		3.081.414,31		3.235.485,03		3.332.549,58		15.219.906,88	Kecamatan Weleri
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.000,00		2.664,00		2.797,20		3.020,98		3.172,02		3.267,19		14.921,39	Kecamatan Weleri

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.540,00		39.745,00		41.732,25		45.070,83		47.324,37		48.744,10		222.616,55	Kecamatan Weleri
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah usulan dari musrenbangcam yang diakomodir di RKPD	%		25		30	-	35	-	40	-	45	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					75.600,00		82.800,00		86.940,00		93.895,20		98.589,96		101.547,66		463.772,82	Kecamatan Weleri
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		7.655,00		8.037,75		8.680,77		9.114,81		9.388,25		42.876,58	Kecamatan Weleri
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.540,00		10.656,00		11.188,80		12.083,90		12.688,10		13.068,74		59.685,55	Kecamatan Weleri
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.856.724,56**		**2.860.816,57**		**3.003.857,40**		**3.244.165,99**		**3.406.374,29**		**3.508.565,52**		**16.023.779,77**	
OPD : KECAMATAN GEMUH																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.569.265,91		2.604.717,23		2.734.953,10		2.953.749,34		3.101.436,81		3.194.479,91		14.589.336,40	Kecamatan Gemuh
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					16.361,00		23.000,00		24.150,00		26.082,00		27.386,10		28.207,68		128.825,78	Kecamatan Gemuh
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					32.624,00		26.199,00		27.508,95		29.709,67		31.195,15		32.131,00		146.743,77	Kecamatan Gemuh

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat	Persen	0,23	50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					61.850,00		76.250,00		80.062,50		86.467,50		90.790,88		93.514,60		427.085,48	Kecamatan Gemuh
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					6.650,00		6.650,00		6.982,50		7.541,10		7.918,16		8.155,70		37.247,45	Kecamatan Gemuh
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					8.375,00		20.000,00		21.000,00		22.680,00		23.814,00		24.528,42		112.022,42	Kecamatan Gemuh
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.695.125,91**		**2.756.816,23**		**2.894.657,05**		**3.126.229,61**		**3.282.541,09**		**3.381.017,32**		**15.441.261,30**	
OPD : KECAMATAN CEPIRING																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen	100	100	2.795.176,43	100	2.832.917,43	100	2.974.563,30	100	3.212.528,37	100	3.373.154,79	100	3.474.349,43	100	15.867.513,33	Kecamatan Cepiring
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik					2.350,00		2.000,00		2.100,00		2.268,00		2.381,40		2.452,84		11.202,24	Kecamatan Cepiring
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					58.497,50		51.630,00		54.211,50		58.548,42		61.475,84		63.320,12		289.185,88	Kecamatan Cepiring
	% aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam musrenbang	Jumlah penduduk miskin yang mendapat bantuan sosial (BST, PKH, dll) dibagi jumlah penduduk miskin kali 100	%		50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gannggguan keamanan dan ketertiban yang ditangani				89.201,00		87.400,00		91.770,00		99.111,60		104.067,18		107.189,20		489.537,98	Kecamatan Cepiring

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan kemanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani				-		-		10.000,00		10.800,00		11.340,00		11.680,20		43.820,20	Kecamatan Cepiring
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa maju				16.085,00		12.400,00		13.020,00		14.061,60		14.764,68		15.207,62		69.453,90	Kecamatan Cepiring
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.961.309,93**		**2.986.347,43**		**3.145.664,80**		**3.397.317,99**		**3.567.183,89**		**3.674.199,41**		**16.770.713,52**	
OPD : KECAMATAN KALIWUNGU																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					3.144.064,83		2.744.563,43		2.881.791,60		3.112.334,93		3.267.951,68		3.365.990,23		15.372.631,86	Kecamatan Kaliwungu
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK					-		13.470,00		14.143,50		15.274,98		16.038,73		16.519,89		75.447,10	Kecamatan Kaliwungu
	% Pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					45.055,00		57.528,00		60.404,40		65.236,75		68.498,59		70.553,55		322.221,29	
	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD dibagi total aspirasi masyarakat	%	12	14		15	-	15	-	14	-	14	-	14	-	14	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					63.450,00		88.240,00		92.652,00		100.064,16		105.067,37		108.219,39		494.242,92	Kecamatan Kaliwungu
	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					8.090,00	**7**	67.000,00		70.350,00		75.978,00		79.776,90		82.170,21		375.275,11	Kecamatan Kaliwungu

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					7.715,00		31.385,00		32.954,25		35.590,59		37.370,12		38.491,22		175.791,18	Kecamatan Kaliwungu
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						3.268.374,83		**3.002.186,43**		**3.152.295,75**		**3.404.479,41**		**3.574.703,38**		**3.681.944,48**		**16.815.609,46**	
OPD : KECAMATAN BRANGSONG																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.394.848,06		2.443.711,00		2.565.896,55		2.771.168,27		2.909.726,69		2.997.018,49		13.687.521,00	Kecamatan Brangsong
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					-		9.750,00		10.237,50		11.056,50		11.609,33		11.957,60		54.610,93	Kecamatan Brangsong
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN					4.700,00		18.000,00		18.900,00		20.412,00		21.432,60		22.075,58		100.820,18	Kecamatan Brangsong
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang		%		25		30	-	35	-	40	-	45	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	100	75.600,00	100	91.800,00	100	96.390,00	100	104.101,20	100	109.306,26	100	112.585,45	100	514.182,91	Kecamatan Brangsong
	% gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi dikali 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM							15.000,00		15.750,00		17.010,00		17.860,50		18.396,32		84.016,82	Kecamatan Brangsong
	% kasus konflik sosial yang ditangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi dikali 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.000,00		44.000,00		46.200,00		49.896,00		52.390,80		53.962,52		246.449,32	Kecamatan Brangsong
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
						2.477.148,06		**2.622.261,00**		**2.753.374,05**		**2.973.643,97**		**3.122.326,17**		**3.215.995,96**		**14.687.601,15**	
OPD : KECAMATAN BOJA																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.770.068,18		2.861.773,00		3.004.861,65		3.245.250,58		3.407.513,11		3.509.738,50		16.029.136,85	Kecamatan Boja
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					9.540,00		8.003,00		8.403,15		9.075,40		9.529,17		9.815,05		44.825,77	Kecamatan Boja
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					70.110,00	100	47.485,00	100	49.859,25	100	53.847,99	100	56.540,39	100	58.236,60	100	265.969,23	Kecamatan Boja
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					87.600,00		2.000,00		2.100,00		2.268,00		2.381,40		2.452,84		11.202,24	Kecamatan Boja
	% gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					7.380,00				10.000,00		10.800,00		11.340,00		11.680,20		43.820,20	Trantib
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					33.140,00		15.823,00		16.614,15		17.943,28		18.840,45		19.405,66		88.626,54	Kecamatan Boja
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						2.977.838,18		**2.935.084,00**		**3.091.838,20**		**3.339.185,26**		**3.506.144,52**		**3.611.328,85**		**16.483.580,83**	
OPD : KECAMATAN LIMBANGAN																			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					21.051,50		10.422,00		10.943,10		11.818,55		12.409,48		12.781,76		58.374,88	Kecamatan Limbangan
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					46.435,00		30.623,00		32.154,15		34.726,48		36.462,81		37.556,69		171.523,13	Kecamatan Limbangan
	% aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah aspirasi kecamatan yang diakodir didalam RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan di RKPD	%	15,2	20		20	-	25	-	25	-	30	-	30	-	40	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					76.310,00		94.210,00		98.920,50		106.834,14		112.175,85		115.541,12		527.681,61	Kecamatan Limbangan
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan kemanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-				10.000,00		10.800,00		11.340,00		11.680,20		43.820,20	Kecamatan Limbangan
	Persentae kasus konflik sosial yang di tanganu	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					23.770,00		61.976,00		65.074,80		70.280,78		73.794,82		76.008,67		347.135,08	Kecamatan Limbangan
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.502.472,32		2.538.591,64		2.665.521,22		2.878.762,92		3.022.701,06		3.113.382,10		14.218.958,93	Kecamatan Limbangan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.670.038,82**		**2.735.822,64**		**2.882.613,77**		**3.113.222,87**		**3.268.884,02**		**3.366.950,54**		**15.367.493,83**	
OPD : KECAMATAN SINGOROJO																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.516.166,29		2.521.298,41		2.647.363,33		2.859.152,40		3.002.110,02		3.092.173,32		14.122.097,48	Kecamatan Singorojo
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.534,00		13.000,00		13.650,00		14.742,00		15.479,10		15.943,47		72.814,57	Kecamatan Singorojo

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.747,50		57.500,00		60.375,00		65.205,00		68.465,25		70.519,21		322.064,46	Kecamatan Singorojo
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat	%	0,23	50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					63.376,80		72.036,00		75.637,80		81.688,82		85.773,27		88.346,46		403.482,35	Kecamatan Singorojo
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		11.000,00		11.550,00		12.474,00		13.097,70		13.490,63		61.612,33	Kecamatan Singorojo
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					3.338,00		39.000,00		40.950,00		44.226,00		46.437,30		47.830,42		218.443,72	Kecamatan Singorojo
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.612.162,59**		**2.713.834,41**		**2.849.526,13**		**3.077.488,22**		**3.231.362,63**		**3.328.303,51**		**15.200.514,92**	
OPD : KECAMATAN SUKOREJO																			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.292.021,60		2.355.982,00		2.473.781,10		2.671.683,59		2.805.267,77		2.889.425,80		13.196.140,26	Kecamatan Sukorejo
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.200,00		2.736,00		2.872,80		3.102,62		3.257,76		3.355,49		15.324,67	Kecamatan Sukorejo
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					13.110,00		17.460,00		18.333,00		19.799,64		20.789,62		21.413,31		97.795,57	Kecamatan Sukorejo

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang		%	0	25		30	-	35	-	40	-	45	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					90.490,00		91.620,00		96.201,00		103.897,08		109.091,93		112.364,69		513.174,71	Kecamatan Sukorejo
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan kemanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		2.280,00		2.394,00		2.585,52		2.714,80		2.796,24		12.770,56	Kecamatan Sukorejo
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					31.110,00		93.822,00		98.513,10		106.394,15		111.713,86		115.065,27		525.508,37	Kecamatan Sukorejo
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						2.427.931,60		**2.563.900,00**		**2.692.095,00**		**2.907.462,60**		**3.052.835,73**		**3.144.420,80**		**14.360.714,13**	
OPD : KECAMATAN PATEAN																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.306.749,60		2.388.326,00		2.507.742,30		2.708.361,68		2.843.779,77		2.929.093,16		13.377.302,91	Kecamatan Patean
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.800,00		24.000,00		25.200,00		27.216,00		28.576,80		29.434,10		134.426,90	Kecamatan Patean
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					33.900,00		75.000,00		78.750,00		85.050,00		89.302,50		91.981,58		420.084,08	Kecamatan Patean
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang		Persen	0,23	50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					73.700,00		114.800,00		120.540,00		130.183,20		136.692,36		140.793,13		643.008,69	Kecamatan Patean
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persen	100	100	-	100	-	100	10.000,00	100	10.800,00	100	11.340,00	100	11.680,20	100	43.820,20	Kecamatan Patean
	% kasus konflik sosial yang di tanganu	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persen		100	8.200,00	100	67.000,00	100	70.350,00	100	75.978,00	100	79.776,90	100	82.170,21	600	375.275,11	Kecamatan Patean
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.426.349,60**		**2.669.126,00**		**2.812.582,30**		**3.037.588,88**		**3.189.468,33**		**3.285.152,38**		**14.993.917,89**	
OPD : KECAMATAN PAGERUYUNG																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.241.760,77		2.493.700,00		2.618.385,00		2.827.855,80		2.969.248,59		3.058.326,05		13.967.515,44	Kecamatan Pageruyung
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persen	100	100	7.734,00	100	15.500,00	100	16.275,00	100	17.577,00	100	18.455,85	100	19.009,53	100	86.817,38	Kecamatan Pageruyung
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	0,23	50	35.375,00	50	37.520,00	50	39.396,00	50	42.547,68	50	44.675,06	50	46.015,32	50	210.154,06	Kecamatan Pageruyung
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persen	100	100	75.600,00	100	82.800,00	100	86.940,00	100	93.895,20	100	98.589,96	100	101.547,66	100	463.772,82	Kecamatan Pageruyung
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persen	100	100	10.528,00	100	19.350,00	100	20.317,50	100	21.942,90	100	23.040,05	100	23.731,25	100	108.381,69	Kecamatan Pageruyung
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100						-		-		-		-		-		-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persen			18.360,00		26.000,00		27.300,00		29.484,00		30.958,20		31.886,95		145.629,15	Kecamatan Pageruyung
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.389.357,77**		**2.674.870,00**		**2.808.613,50**		**3.033.302,58**		**3.184.967,71**		**3.280.516,74**		**14.982.270,53**	
OPD : KECAMATAN PLANTUNGAN																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.359.616,00		2.528.319,80		2.654.735,79		2.867.114,65		3.010.470,39		3.100.784,50		14.161.425,13	Kecamatan Plantungan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik		Prosen	100	100	3.630,00	100	11.090,00	100	11.644,50	100	12.576,06	100	13.204,86	100	13.601,01	100	62.116,43	Kecamatan Plantungan
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan x 100						-		-		-		-		-		-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		prosen	100	100	31.934,00	100	48.598,00	100	51.027,90	100	55.110,13	100	57.865,64	100	59.601,61	100	272.203,28	
	% aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Jumlah aspirasi kecamatan yang diakomodir di dalam RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan di RKPD						-		-		-		-		-		-	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosen	100	100	80.346,00	100	114.598,00	100	120.327,90	100	129.954,13	100	136.451,84	100	140.545,39	100	641.877,26	Kecamatan Plantungan
	% gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi x 100						-		-		-		-		-		-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		prosen	100	100	-	100	-	100	10.000,00	100	10.800,00	100	11.340,00	100	11.680,20		43.820,20	Kecamatan Plantungan
	% kasus konflik sosial yang ditangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi x 100						-		-		-		-		-		-	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosen	100	100	8.460,00	100	43.351,60	100	45.519,18	100	49.160,71	100	51.618,75	100	53.167,31	100	242.817,56	Kecamatan Plantungan
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.483.986,00**		**2.745.957,40**		**2.893.255,27**		**3.124.715,69**		**3.280.951,48**		**3.379.380,02**		**15.424.259,86**	
OPD : KECAMATAN ROWOSARI																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.436.711,75		2.608.016,57		2.738.417,40		2.957.490,79		3.105.365,33		3.198.526,29		14.607.816,38	Kecamatan Rowosari

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persen	100	100	1.947,00	100	2.820,00	100	2.961,00	100	3.197,88	100	3.357,77	100	3.458,51	600	15.795,16	Kecamatan Rowosari
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100						-		-		-		-		-	0	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	100	100	12.147,00	100	19.400,00	100	20.370,00	100	21.999,60	100	23.099,58	100	23.792,57	600	108.661,75	Kecamatan Rowosari
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat						-		-		-		-		-	0	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persen	100	100	84.972,00	100	87.440,00	100	91.812,00	100	99.156,96	100	104.114,81	100	107.238,25	600	489.762,02	Kecamatan Rowosari
	% gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100						-		-		-		-		-	0	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persen	100	100	-	100	11.460,00	100	12.033,00	100	12.995,64	100	13.645,42	100	14.054,78	600	64.188,85	Kecamatan Rowosari
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100						-		-		-		-		-	0	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persen	100	100	3.522,00	100	7.230,00	100	7.591,50	100	8.198,82	100	8.608,76	100	8.867,02	600	40.496,10	Kecamatan Rowosari
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.539.299,75**		**2.736.366,57**		**2.873.184,90**		**3.103.039,69**		**3.258.191,67**		**3.355.937,43**		**15.326.720,26**	
OPD : KECAMATAN KANGKUNG																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.509.958,46		2.448.772,00		2.571.210,60		2.776.907,45		2.915.752,82		3.003.225,41		13.715.868,27	Kecamatan Kangkung
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persen	100	100	-	100	3.600,00	100	3.780,00	100	4.082,40	100	4.286,52	100	4.415,12	100	20.164,04	Kecamatan Kangkung
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	0,23	50	16.635,00	50	45.000,00	50	47.250,00	50	51.030,00	50	53.581,50	50	55.188,95	50	252.050,45	Kecamatan Kangkung
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persen	100	100	82.800,00	100	97.800,00	100	102.690,00	100	110.905,20	100	116.450,46	100	119.943,97	100	547.789,63	Kecamatan Kangkung
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persen	100	100	-	100	20.000,00	100	21.000,00	100	22.680,00	100	23.814,00	100	24.528,42	100	112.022,42	Kecamatan Kangkung
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persen			13.500,00		40.000,00		42.000,00		45.360,00		47.628,00		49.056,84		224.044,84	Kecamatan Kangkung
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						2.622.893,46		**2.655.172,00**		**2.787.930,60**		**3.010.965,05**		**3.161.513,30**		**3.256.358,70**		**14.871.939,65**	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
OPD : KECAMATAN RINGINARUM																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.863.881,38		1.906.800,00		2.002.140,00		2.162.311,20		2.270.426,76		2.338.539,56		10.680.217,52	Kecamatan Ringinarum
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					121.620,00		147.000,00		154.350,00		166.698,00		175.032,90		180.283,89		823.364,79	Kecamatan Ringinarum
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persen	0,23	50	50.205,00	50	57.500,00	50	60.375,00	50	65.205,00	50	68.465,25	50	70.519,21	50	322.064,46	Kecamatan Ringinarum
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat						-		-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					50.400,00		64.800,00		68.040,00		73.483,20		77.157,36		79.472,08		362.952,64	Kecamatan Ringinarum
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.500,00		13.400,00		14.070,00		15.195,60		15.955,38		16.434,04		75.055,02	Kecamatan Ringinarum
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persen			53.310,00		55.000,00		57.750,00		62.370,00		65.488,50		67.453,16		308.061,66	Kecamatan Ringinarum
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.159.916,38**		**2.244.500,00**		**2.356.725,00**		**2.545.263,00**		**2.672.526,15**		**2.752.701,93**		**12.571.716,08**	
OPD : KECAMATAN NGAMPEL																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.312.207,07		2.393.317,00		2.512.982,85		2.714.021,48		2.849.722,55		2.935.214,23		13.405.258,11	Kecamatan Ngampel
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.984,00		5.318,00		5.583,90		6.030,61		6.332,14		6.522,11		29.786,76	Kecamatan Ngampel
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					59.218,00		15.253,00		16.015,65		17.296,90		18.161,75		18.706,60		85.433,90	Kecamatan Ngampel
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomodir dibagi total aspirasi masyarakat	Persen	0,23	50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					83.358,00		95.124,00		99.880,20		107.870,62		113.264,15		116.662,07		532.801,03	Kecamatan Ngampel
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-				-		-		-		-		-	Kecamatan Ngampel
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.577,00		6.928,00		7.274,40		7.856,35		8.249,17		8.496,64		38.804,57	Kecamatan Ngampel
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	JUMLAH					**2.466.344,07**	**550**	**2.515.940,00**	**550**	**2.641.737,00**		**2.853.075,96**		**2.995.729,76**		**3.085.601,65**		**14.092.084,37**	
OPD : KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.260.632,60		11.596.956,71		7.176.804,55		2.750.948,91		2.888.496,36		2.975.151,25		27.388.357,78	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					8.810,00		15.000,00		15.750,00		17.010,00		17.860,50		18.396,32		84.016,82	Kecamatan Kaliwungu Selatan

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	% pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dibagi jumlah pelimpahan kewenangan kecamatan X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					48.200,00		70.000,00		73.500,00		79.380,00		83.349,00		85.849,47		392.078,47	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	% aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	Jumlah aspirasi masyarakat yang diakomudir dibagi total aspirasi masyarakat	Persen	0,23	50		50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					73.440,00		85.000,00		89.250,00		96.390,00		101.209,50		104.245,79		476.095,29	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	% ganguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Jumlah gangguan keamanan yang ditangani dibagi jumlah keamanan yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					-		-		-		-		-		-		-	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	% kasus konflik sosial yang di tangani	Jumlah kasus konflik yang ditangani dibagi kasus konflik yang terjadi X 100	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persen			24.600,00		40.000,00		42.000,00		45.360,00		47.628,00		49.056,84		224.044,84	Kecamatan Kaliwungu Selatan
	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
JUMLAH						**2.415.682,60**		**11.806.956,71**		**7.397.304,55**		**2.989.088,91**		**3.138.543,36**		**3.232.699,66**		**28.564.593,19**	
OPD YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			
	Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan					567.990,00		618.000,00		648.900,00		713.790,00		749.479,50		771.963,89		3.502.133,39	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pemerintahan Umum
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan		%	75	77		79	-	81	-	83	-	85	-	87	-	85	-	
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					2.283.474,00		2.065.518,00		2.127.483,54		2.340.231,89		2.457.243,49		2.530.960,79		11.521.437,72	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pemerintahan Umum
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik		%	75	77		79	-	81	-	83	-	85	-	87	-	85	-	
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					412.400,00		268.982,00		282.431,10		310.674,21		326.207,92		335.994,16		1.524.289,39	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pemerintahan Umum
	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas		%	75	77		79	-	81	-	83	-	85	-	87	-	85	-	

Urusan	Program/indikator	Formula Indikator Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9,00*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					42.725,00		332.000,00		348.600,00		383.460,00		402.633,00		414.711,99		1.881.404,99	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pemerintahan Umum
	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa		%	75	77		79	-	81	-	83	-	85	-	87	-	85	-	
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					1.537.770,00		703.900,00		739.095,00		813.004,50		853.654,73		879.264,37		3.988.918,59	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pemerintahan Umum
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaaan dan deteksi dini		%	75	77		79	-	81	-	83	-	85	-	87	-	85	-	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.513.231,27		3.900.800,00		4.017.824,00		4.419.606,40		4.640.586,72		4.779.804,32		21.758.621,44	Perangkat Daerah membidangi Urusan Pemerintahan Umum
	Prosentase terpenuhinya lanyanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah		%	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
						7.357.590,27		**7.889.200,00**		**8.164.333,64**		**8.980.767,00**		**9.429.805,35**		**9.712.699,51**		**44.176.805,51**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Kendal selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1, sedangkan indikator kinerja kunci Kabupaten Kendal disajikan dalam Tabel 8.2.

Untuk indikator urusan perangkat daerah per aspek, sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sedangkan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian urusan Perangkat Daerah.

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Misi I: Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif *(start up*).									
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	-1,53	2,5-3,2	4,28-5,5	5,33-5,64	5,38-5,70	5,43-5,76	5,49-5,82	5,49-5,82
2.	Persentase kontribusi Pariwisata dalam PAD	%	0,036	0,26	0,43	0,43	0,43	0,44	0,45	0,45
3.	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,56	7,14	6,73	5,63	5,43	5,23	5,15	5,15
4.	Angka Kemiskinan	%	9,99	9,89-9,79	9,79-9,59	9,59-9,39	9,39-9,19	9,19-8,89	8,89-8,69	8,89-8,69
	Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0									
5.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	72,29	72,61	73,61	74,61	75,61	76,61	77,61	77,61
6.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indeks	92,85	92,95	93,05	93,1	93,2	93,3	93,4	93,4
	Misi III: Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan									
7.	Angka kriminalitas	Per 100.000 penduduk	151	150	149	148	147	146	145	145
8.	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	Indek Desa Membangun	indeks	0,7095	0,7190	0,7205	0,7220	0,7235	0,7250	0,7265	0,7265
	Misi IV: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan									
10.	Cakupan infrastruktur wilayah yang berkualitas	%	80,212	80,158	80,908	82,050	83,198	84,344	85,490	85,490
11.	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,78	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12.	IRBI (Indek Resiko Bencana)	Indeks	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57	124,57
	Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagipartisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.									
13.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,39	64,41	66,35	67,75	68,32	69,2	69,5	69,5
14.	Nilai SAKIP	nilai	66,31	68,55	70,55	72,55	74,55	76,55	78,55	78,55
15.	Indeks SPBE	indeks	3,76	2,76	3,13	3,43	3,75	3,91	3,91	3,91

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Kendal

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Urusan Pendidikan											Pendidikan
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	%	87,66	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pendidikan pada sekolah dasar	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pendidikan pada sekolah menengah pertama	%	73,88	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	kesetaraan	%	18,17	100	100	100	100	100	100	100	
	Kesehatan											Kesehatan
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,85	0.85	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Cakupan rumah sakit terakreditasi minimal strata utama di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	80	80	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	92.56	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	98.40	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	99.58	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	68.44	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	23.24	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan orang usia 15–29 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	36.81	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	34.93	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	13.35	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	32.73	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	61.67	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	29.79	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	30.87	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											PUPR
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Perbandingan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dibanding Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota	%	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	13,83	13,83	
2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara dibanding luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73,00	75,45	75,45	
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM JP dan BJP terlindungi dibanding jumlah total rumah tangga	%	93,35	94,93	96,11	97,30	98,48	99,67	100	100	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Akses Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	91,62	91,82	91,97	92,17	92,41	92,60	92,77	92,77	
5.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah IMB (PBG) yang rekomendasi teknisnya diterbitkan dibanding jumlah pemohon IMB (PBG)	%	54,82	85,29	85,5	86	86,5	87	88	88	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6.	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang berbanding dengan Total Panjang Jalan Kabupaten	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78	
7.	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Prosentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Kendal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis atau analis dibanding tenaga jasa konstruksi yang dilatih	%	28,94	34,11	47,03	59,95	72,87	85,79	98,71	98,71	
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase kecelakaan kerja pada proyek Pemda	%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman											Perkim
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha x 100	%	74,82 (SK Lama)	0,74 (SK baru)	1,48	2,23	2,97	3,71	4,45	4,45	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah	Jumlah RTLH yang diberi bantuan dan peningkatan	%	13,09	12,72	12,39	12,05	11,72	11,39	11,06	11,06	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Tidak Layak Huni)	rumah swadaya										
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Perumahan memiliki PSU dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ketentraman Ketertiban Perlindungan Umum											Trantibumlinmas
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penyelesaian gangguan trantibum yang ditemukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	SATPOL PP
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana	%	6,85	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Korban kebakaran yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DAMKAR

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Sosial											Sosial
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti ----------X 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	50	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kcbutuhan dasamya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tenaga Kerja											Tenaga Kerja
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ---------- ------- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	%	2	4	6	8	10	14	16	16	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Jumlah tenaga kerja	%	19	20	25	30	35	40	45	45	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		keseluruhan										
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan ---------- Jumlah tenaga kerja	Rp/Orang	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	867.660,70	
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100% Jumlah Perusahaan	%	0	50	55	60	63	65	68	68	
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ---------- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	%	51,07	55	58	60	63	65	68	68	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											PPPA
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi .....x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----------X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	/100.000 penduduk perempuan	4,96	20	20	20	20	20	20	20	
	Pangan											Pangan
1	Skor PPH	Perhitungan pola pangan masyarakat dibanding pola	nilai	87,2	87,2	87,3	87,3	87,4	87,4	87,5	87,5	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		pangan ideal										
	Lingkungan Hidup											LH
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka yang menunjukan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL	nilai	63,78	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42	59,82	59,82	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pendaur ulangan sampah.	%	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	35	40	45	50	55	60	60	
	Administrasi Kepemdudukan & Catatan Sipil											Adminduk Catpil
1.	Perekaman KTP elektronik	Perbandingan jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia17 tahun keatas.	%	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,91	
2.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Perbandingan anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17	%	33,09	34	35	36	37	38	39	39	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Perbandingan jumlah anak 0- 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap keseluruhan jumlah anak usia 0 -18	%	95,67	96	96,5	97	97,5	98	98,5	98,5	
4.	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	Perbandingan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan terhadap jumlah keseluruhan OPD di Kabupaten	%	4	10,7	10,2	20,41	30,61	40,82	44,9	44,9	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											Permasdes
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan mengelolanya dan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. *Jumlah Desa Mandiri tahun ini - Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) / Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) x 100 %*	%	4,51	4,88	5,63	6,76	7,89	9,02	10,15	10,15	
	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana											Dalduk KB
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)		Indeks	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	
2.	Persentase pemakaian	Jumlah peserta KB Aktif	%	65	69	69	70	70	71	71	71	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Modem ----------x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur										
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----------x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	%	15,77	15	14	13	12	11	10	10	
	Perhubungan											Perhubungan
1.	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan a. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP) b. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu	%	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	
	Komunikasi dan Informasi											Kominfo
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD	%	41,31	45	50	55	65	70	75	75	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan	%	19,77	20,90	22,03	23,16	24,29	25,42	26,55	26,55	
3.	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pemerintah dan pemerintah daerah dibagi jumlah penduduk	%	51,48	54	61	63	65	67	70	70	
	Koperasi dan UKM											Koperasi UKM
1.	Persentase Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 %	%	78	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80	80	
2.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	4,8	5,1	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,4	
	Penanaman Modal											Penanaman Modal
1.	Nilai realisasi Investasi	Jumlah realisasi investasi	Rp Trilyun	3,146	1,61	2,5	2,75	3	3,3	3,6	16,76	
	Pemuda dan Olahraga											Pemuda & olahraga
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		%	0,44	0,88	0,92	0,97	1,01	1,06	1,10	1,10	
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		%	15,11	15,49	15,72	15,94	16,16	16,38	16,60	16,60	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Statistik											Statistik
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi jumlah OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dibagi jumlah OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persandian											Persandian
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian	skor	N/A	130	150	175	200	225	250	250	
	Kebudayaan											Kebudayaan
1.	Persentase budaya lokal yang dilestarikan		%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase cagar budaya yang diselestarikan		%	3	100	100	100	100	100	100	100	
	Perpustakaan											Perpustakaan
1.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Dilakukan dengan metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.	%	40,37	40,37	40,50	40,80	41,00	41,30	41,50	41,50	
2.	Indeks Pcmbangunan Literasi Masyarakat	Pengukuran terhadap usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi mayarakat. Formulasi Indikatornya : 1. Pemerataan Layanan;	%	7,7	7,9	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,0	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		2. Ketercukupan Koleksi; 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat; 5. Jumlah Perpustakaan Ber-SNP 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan; 7. Anggota Perpustakaan;										
	Kearsipan											Kearsipan
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahanakuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	75.75	75.85	75.95	76.05	76.15	76.25	76.35	76.35	
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung	%	91.66	91.68	91.70	91.72	91.73	91.74	91.75	91.75	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK										
	Perikanan											**Perikanan**
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	kg	26.310.557	27.329.687	28.186.222	29.073.233	29.991.244	30.941.807	31.925.497	177.447.690	
2	Angka Konsumsi Ikan	Rerata konsumsi ikan per kapita per tahun	Kg/kap/th	30,92	32,5	34,1	35,8	37,6	39,5	41,4	41,4	
	Pariwisata											
1	PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah	Rp	546.551.020	1.093.102.000	2.441.600.000	2.630.200.000	2.819.800.000	3.084.400.000	3.399.000.000	15.468.102.000	
	Pertanian											
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen	Ku/ha	54,25	54,75	55,25	55,75	56,25	56,75	57,25	57,25	Pertanian
		Produksi pertanian (jagung) dibagi luas panen	Ku/ha	68,19	68,69	69,19	69,69	70,19	70,69	71,19	71,19	
		Produksi pertanian (bawang merah) dibagi luas panen	Ku/ha	93,35	93,60	93,85	94,10	94,35	94,60	94,85	94,85	
		Produksi pertanian (cabe) dibagi luas panen	Ku/ha	69,00	69,25	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,50	
		Produksi pertanian (kopi) dibagi luas panen	Ku/ha	7,34	7,44	7,55	7,66	7,77	7,88	7,99	7,99	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah	Upaya pengendalian penyakit hewan yang	%	0,56	0,2	0,01	0,01	0,01	0,008	0,008	0,08	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	kasus penyakit hewan menular	menular										
	Perdagangan											
1	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota kali 100%	%	19,18	50	70	90	95	96	100	100	
	Perindustrian											
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengahtahun (n-1) kali 100%	%	0,00	0,00	20,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	
	Kepegawaian											Kepegawaian
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----------X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	%	207,23	210	210	215	215	220	225	225	
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,08	8,09	8,09	8,1	8,11	8,12	8,13	8,13	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi .....X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,2	23,21	23,22	23,23	23,24	23,25	23,26	23,26	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Pengawasan											Inspektorat
1	Maturitas SPIP		level	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		level	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Keuangan											**Keuangan**
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi .....X 100% total belanja APBD dikurangi satu	%	-9,53%	-12,20%	-20,05%	-21,68%	-25,44%	-25,72%	-27,37%	-27,37%	
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----------X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	%	6,92%	-7,53%	-26,83%	-26,69%	-26,88%	-26,44%	-25,64%	-25,64%	
3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses invcntarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	%	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	YA 100 %	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	Nilai realisasi SiLPA ----------X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya	%	7,15%	7,89%	7,02%	6,24%	5,55%	4,94%	4,39%	4,39%	
	Sekretariat Daerah											
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----------x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	%		100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui	%		75	76	77	78	79	80	80	

No	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	pengadaan	pengadaan ----------X 100% total belanja langsung										

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kendal

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pendidikan										
1.	APS Dikdas	Pendidikan pada sekolah dasar	%	94,56	100	100	100	100	100	100	100
	Kesehatan										
1.	AKI	jumlah kasus/jumlah kelahiran	/ 100.000 Penduduk	115,8	110	82	81	80,9	80,8	80,7	80,7
2.	AKB		AKB / 1000 KH	10,04	10	7,9	7,8	7,7	7,6	7,5	7,5
3.	Prevalensi Stunting		%	17,53	15	14,6	14,2	13,8	13,4	13,4	13,4
4.	Capaian SPM	rata-rata pencapaian 12 SPM Kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan pennukiman rawan banjir di WSKewenangan Kab/Kota (ha) X 100	%	-	19,14	18,19	17,18	16,21	15,19	14,23	14,23
2.	Rasio luas daerah irigasi kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di rehabilitasi (ha) di operasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100	%	63,94	64,85	66,77	69,55	71,08	73	75,45	75,45
3.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang/ total panjang jalan kabupaten x 100	%	88,28	89,28	90,78	92,78	94,78	96,78	98,78	98,78
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase perkotaan tidak tersumbat pembuangan aliran air (Km) dibagi Panjang seluruh drainase perkotaan kewenangan kabupaten (Km) X	%	75,13	75,87	76,70	78,15	79,26	80,35	81,39	81,39

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		100									
5	Persentase ketaatan pemanfaatan tata ruang	Jumlah pola ruang dan struktur ruang yang pemanfaatanya sesuai RTRW / Jumlah pola ruang dan struktur ruang sesuai RTRW x 100	%	80,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00
6	Rasio bangunan gedung ber-IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber-IMB (PBG) dibagi jumlah bangunan dikali 100	%	0,55	0,55	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7	Nilai/ Score SIPJAKI	Nilai layanan informasi jasa konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Score	65	65	70	75	80	85	90	90
8	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Jumlah rumah tangga yang mendapatlan akses air minum melalui SPAM jaaringan perpipaan dibagi jumlah raumah tangga X 100	%	70,41	72,71	75,01	77,31	79,61	81,91	84,21	84,21
9	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	Jumlah rumah tangga yang mendapatlan akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan dibagi jumlah raumah tangga X 100	%	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94	22,94
10	Persentase rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah layanan SPALD-S	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui layanan SPALD-S / Jumlah Rumah di Kabupaten x 100	%	91,62	91,62	91,66	91,7	91,75	91,79	91,84	91,84
11	Persentase rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah layanan SPALD-T	Jumlah rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui layanan SPALD-T / Jumlah Rumah di Kabupaten x 100	%	0,62	0,84	1,26	1,42	1,61	1,77	1,88	1,88
	Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja padka kurun waktu tertentu	%	84,8	85,15	85,2	85,22	85,24	85,26	85,28	85,28

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dibagi Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x100%									
2.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan berdasarkan luasan yang telah ditetapkan	%	74,82 (SK Lama)	0,74 (SK Baru)	1,48	2,23	2,97	3,71	4,45	4,45
	Ketentraman Ketertiban Perlindungan Umum										
1.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk		desa/kel	5	7	11	16	21	26	31	31
3.	Persentase penanganan kebakaran sesuai standar tingkat waktu tanggap (respon time)		Persen	97,44	97,44	97,44	100	100	100	100	100
	Sosial										
1.	Persentase PPKS diluar panti yang ditangani	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti ----------X 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%		65,92	67,62	69,32	71,02	72,72	72,72	72,72
	Tenaga Kerja										
1.	Presentase penyerapan tenaga kerja		%	19	20	25	30	35	40	45	45
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi x	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)									
2.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----------X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	%	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pangan										
1	Persentase Cadangan Pangan Beras (konversi dari gabah)	Permentan No. 11 / Permentan / KN. 130 / 4 / 2018 Tentang penetapan jumlah cadangan beras (konversi dari gabah) = 80% x cadangan beras provinsi x (jumlah penduduk Kendal / jumlah penduduk jawa tengah)	%	4,85	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	5,90	5,90
	Pertanahan										
1.	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	Jumlah bidang tanah milik pemda yang berstifikat dibagi jumlah bidang tanah milik pemda x 100%	%	42,01	47,21	56,13	65,06	73,98	82,9	100	100
	Lingkungan Hidup										
1.	Indeks kualitas air		Indeks	46,7	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64	54,74	54,74
2.	Indeks kualitas udara		Indeks	75,16	72,7	72,79	72,88	72,96	723,06	73,15	73,15
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Indeks	72,05	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43	43,93	43,93
3.	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani		%	75,00	80,00	85,00	95,00	100,00	100	100	100
	Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil										
1.	Persentase penduduk yang memiliki administrasi lengkap		%	99,79	99,81	99,83	99,85	99,87	99,89	99,91	99,91
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan mengelolanya dan	%	4,51	4,88	5,63	6,76	7,89	9,02	10,15	10,15

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. *Jumlah Desa Mandiri tahun ini - Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) / Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) x 100 %*									
	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana										
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)		Indeks		2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modem ----------x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	%	65	69	69	70	70	71	71	71
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----------x 100% Jumlas Pasangan Usia Subur	%	15,77	15	14	13	12	11	10	10
	Perhubungan										
1.	Persentase jaringan jalan yang memiliki trayek		%	73	73	74	74	75	75	76	76
	Komunikasi dan Informasi										
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks domain kebijakan internal SPBE merupakan tingkat kematangan aspek 1 (Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE) PermenPANRB 59 th 2020	Skore	3,41	2,6	3	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2.	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE merupakan rata-rata dari	Skore	3,43	2,6	2,9	3	3,5	3,8	3,8	3,8

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		tingkat kematangan aspek 2 (Perencanaan Strategis SPBE), aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan aspek 4 (Penyelenggara SPBE) PermenPANRB 59 th 2020									
3.	Indeks Domain Manajemen SPBE	Indeks domain manajemen SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE), dan aspek 6 (Pelaksanaan Audit TIK) PermenPANRB 59 th 2020	Skore	NA	1	2	2	3	3	3	3
4.	Indeks Domain Layanan SPBE	Indeks domain layanan SPBE merupakan rata-rata dari tingkat kematangan aspek 7 (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan aspek 8 (Layanan Publik Berbasis Elektronik) PermenPANRB 59 th 2020	Skore	4,03	3,52	3,7	4,2	4,26	4,44	4,44	4,44
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik merupakan rata-rata dari tingkat penilaian tahap 1 (informasi wajib berkala/ website), tahap 2 (SAQ/ Kuesioner Penilaian Mandiri yang terdiri dari : 1. Mengumumkan Informasi Publik, 2. Menyediakan Informasi Publik, 3. Pelayanan Informasi Publik, dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik), tahap 3 (verifikasi atas SAQ), tahap 4 (Uji publik penetapan peringkat) Per Komisi Informasi 5 th 2016	Skore	88,8	88,8	89	89,5	90	90,5	91	91

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Koperasi dan UKM										
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 %	%	78	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80	80
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	4,8	5,1	5,7	5,9	6,1	6,2	6,4	6,4
	Penanaman Modal										
1.	Jumlah Investor baru		investor	903	432	650	715	786	864	950	4.397,00
2.	Nilai IKM		skor	83,33	83	83,6	84	84	85	85	85,00
	Pemuda dan Olahraga										
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota x 100%	%	0,44	0,88	0,92	0,97	1,01	1,06	1,1	1,1
2.	Jumlah atlet olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan inter nasional	Jumlah atlet olah raga yang berprestasi	atlet	35	100	120	130	140	150	160	160
	Statistik										
1.	Prosentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	(jumlah perangkat daerah dengan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia / jumlah perangkat daerah) x 100%	Prosen	NA	10	15	25	40	50	70	70
	Persandian										
2.	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi merupakan rata-rata dari tingkat kelengkapan dan kematangan area 1 (tata kelola KAMI), area 2 (pengelolaan	Skore	N/A	130	150	175	200	225	250	250

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		resiko KAMI), area 3 (kerangka kerja KAMI), area 4 (pengelolaan aset informasi), area 5 (teknologi dan KAMI), dan area 6 (suplemen) Permendagri 18 th 2020									
	Kebudayaan										
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase benda dan tak benda cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perpustakaan										
1.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat digunakan untuk mengukur nilai tingkat kegearan membaca masyarakat pada usia membaca (umur 15 - 69 tahun) dengan menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel/indikator utama seperti : 1. I dikator Frekuensi membaca per minggu, 2. Indikator durasi membaca/ lama membaca per hari, 3. Indikator jumlah bahan bacaan yang ditamatkan per tahun. Rumus Nilai tingkat membaca = ((Total score / Jumlah Responden)/5)x100%	%	40,37	40,37	40,50	40,80	41,00	41,30	41,50	41,50
	Kearsipan										
1.	Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara	Untuk menghitung persentase arsip daerah yang dilestarikan dan terpelihara adalah dengan menghitung jumlah arsip di 4 Depo yaitu : 1. arsip teratur / sudah diolah = 136.257 berkas = 2,725 m1 2. arsip acak/belum diolah =355,8 m1 3. seluruh arsip dipelihara di di fumigasi serta dilakukan pengamanan dan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dari bencana (banjir/ kebakaran/ pencurian/ kerusakan)									
	Urusan Perikanan										
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	kg	26.310.557	27.329.687	28.186.222	29.073.233	29.991.244	30.941.807	31.925.497	31.925.497
	Urusan Pariwisata										
1	persentase peningkatan kunjungan wisatawan	Kunjungan wisata tahun N - Jumlah kunjungan Tahun N-1 / Jml Kunjungan wisata Tahun N-1 x 100%	%	-63,24	5,84	5,6	5,98	5,95	6,06	6,06	6,06
2	Persentase pelaku ekraf yang dikembangkan	Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan/ jumlah pelaku ekraf yang ada x 100%	%	6	6	12	18	24	30	36	36
	Pertanian										
1	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi)	((produktivitas tahun n - produktivitas tahun n-1):(produktivitas tahun n-1)) x 100%	%		-7,77	0,92	0,91	0,90	0,90	0,89	0,89
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (jagung)	((produktivitas tahun n - produktivitas tahun n-1):(produktivitas tahun n-1)) x 100%	%		10,46	0,73	0,73	0,72	0,72	0,71	0,71
3	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (cabai)	((produktivitas tahun n - produktivitas tahun n-1):(produktivitas tahun n-1)) x 100%	%		1,83	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
4	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (bawang merah)	((produktivitas tahun n - produktivitas tahun n-1):(produktivitas tahun n-1)) x 100%	%		0,09	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26
5	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan (kopi)	((produktivitas tahun n - produktivitas tahun n-1):(produktivitas tahun n-1)) x 100%	%		7,00	1,36	1,48	1,46	1,44	1,42	1,40
6	Produksi daging sapi		ton		908	973	994	1.014	1.034	1.054	1.074
7	Produksi daging ayam ras		ton		14.931	15.180	15.300	15.450	15.600	15.850	16.000

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Perdagangan										
1	Persentase pasar yang layak fungsi		%	0	7,69	15,38	23,07	30,76	38,46	46,15	46,15
2	Persentase ketersediaan barang pokok dan barang penting		%	148	150	150	150	150	150	150	150
	Perindustrian										
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengahtahun (n-1) kali 100%	%	0	0	20	40	50	60	70	70
	Kepegawaian										
1	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja	Nilai Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN	Skor	42,66	42,66	42,67	42,7	42,72	42,72	42,72	42,72
2	Dimensi Kompetensi	Nilai Kompetensi IP ASN	Skor	32,62	33	33,62	34	34	35	36	36
	Pengawasan										
1	Pesentase PD dengan tingkat maturitas SPIP level 3		level	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nilai rata-rata SAKIP OPD yang di evaluasi		Nilai	66,31	68,55	70,25	72,25	73,55	75,55	77,55	77,55
	Keuangan										
1	IPKD		rentang IPKD	0	79,325	79,326	79,327	79,328	79,329	79,330	79,330
	Sekretariat daerah										
1.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan clengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ---------- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	%		100	100	100	100	100	100	100
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ---------- ----------X 100% total belanja langsung	%		75	76	77	78	79	80	80

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Sekretariat DPRD										
1.	Indeks IKM (DPRD)	Jumlah anggota DPRD yang puas terhadap pelayanan SekretariatDPRD/Jumlah anggota DPRD x 100%	indeks	60	65	70	75	80	80	80	80
	Perencanaan										
1.	Persentase realisasi sasaran pembangunan	jumlah indikator sasaran RPJMD yang tercapai di bagi jumlah indikator	%	62,5	60,6	75,76	81,80	90,91	93,94	96,97	96,97
	Penelitian										
1.	Persentase penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di bagi jumlah penelitian dan pengembangan yang tersedia dalam SIJELI	%	NA	NA	5	10	15	20	25	25
	KECAMATAN KENDAL										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PATEBON										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PEGANDON										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	64,09	64,09	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	82,9	84,82	84,82	88	88	90	90	90
	KECAMATAN WELERI										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN GEMUH										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	71	73	75	80
70 2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	85,15	87,6	88	89	90	90,5	91	90
	KECAMATAN CEPIRING										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	83	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN KALIWUNGU										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	
	KECAMATAN BRANGSONG										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	63	65	70	73	75	77	80	
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	76	80	83	85	87	89	90	
	KECAMATAN BOJA										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	68	70	72	75	77	79	81	81
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	89	89	89	90	90	90	91	91
	KECAMATAN LIMBANGAN										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	62,17	64	64,5	65	65	65	65	
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	92,83	93	94	95	96	97	97	97
	KECAMATAN SINGOROJO										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	70	75	80	80	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	91,19	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
	KECAMATAN SUKOREJO										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PATEAN										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	63	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	82	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN PAGERUYUNG										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	71,01	72	73	74	75	76	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	89,65	90	91	92	93	94	95	95

No	IKU OPD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	KECAMATAN PLANTUNGAN										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	60,86	61	62,5	63,5	65	66,5	68	68
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	84,53	84,6	84,61	84,62	84,63	84,64	84,65	84,65
	KECAMATAN ROWOSARI										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	68	70	72	75	77	79	81	81
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	89	89	89	90	90	90	91	91
	KECAMATAN KANGKUNG										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	8515	87,55	88	89	90	90,5	91	90
	KECAMATAN RINGINARUM										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	83	84	85	86	87	87	87
	KECAMATAN NGAMPEL										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61,73	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	88,83	84	85	87	88	89	90	90
	KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN										
1.	Nilai SAKIP kecamatan		Skor	61	63	68	70	73	75	80	80
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Skor	80	84	85	87	88	89	90	90
	PEMERINTAHAN UMUM										
1.	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial		%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB IX
PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal yang penyusunannya berpedoman pada arah dan kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dan mengacu pada RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2005 – 2025. RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

RPJMD ini menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Renstra dan Renja PD, Penyusunan Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2021 – 2026.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalanngan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Kendal berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah, maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Kendal (yang baru). RKPD Tahun 2027 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Kendal (yang baru). Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Kendal tahun Anggaran 2027.

9.2 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksnaaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efiseinsi dan efektivitas dalam pendaaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksnaaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal agar melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Semua perangkat daerah Kabupaten Kendal berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan di Kabupaten Kendal;
4. Dalam rangka meningkatkan efetivitas pelaksanaan RPJMD, maka Bappelitbang Kabupaten Kendal berkewajiban menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;
5. RPJMD Kabupaten Kendal menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kendal setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program/ kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Kendal.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO